



HISTORITAS KEBANGSAAN DAN DEMOKRASI

HISTORIOGRAFI, PENDIDIKAN SEJARAH, DAN GENRE
KUMPULAN MAKALAH KONFERENSI NASIONAL SEJARAH IX



ktorat
yaan



Historitas
Kebangsaan dan Demokrasi:
Historiografi, Pendidikan Sejarah dan Genre
Kumpulan Makalah Konferensi Nasional Sejarah IX



Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
2013

Historitas
Kebangsaan dan Demokrasi:
Historiografi, Pendidikan Sejarah dan Genre

Kumpulan Makalah Konferensi Nasional Sejarah IX

Penulis:

Sediono Tjondronegoro
Taufik Abdullah
Azyumardi Azra
Anhar Gonggong
Bambang Purwanto
Sri Margono
Mumuh Muhsin Z.
H. Anwar Hafidz
Abdul Syukur
S. Hamid Hasan
Umasih
Susanto Zuhdi
Harto Juwono
Nawiyanto
Wardiningsih Surjohardjo

Editor :

Kasijanto Sostrodinomo, M.Hum.
Dr. Muhammad Hisyam

Tata Letak & Desain:

Tasman

Penerbit :

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG:

Dilarang mengutip seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin dari penerbit

Tahun 2013

ISBN : 978-602-1289-03-7



PENGANTAR

Buku yang ada di hadapan pembaca sekalian ini diangkat dari makalah-makalah yang dipresentasikan dan didiskusikan pada forum Konferensi Nasional Sejarah IX yang berlangsung tanggal 5 sampai 8 bulan Juli 2011 di Jakarta. Makalah-makalah yang dipilih dalam buku ini adalah yang berhubungan dengan topik sebagaimana termaktub dalam judul buku ini, **Historitas Kebangsaan dan Demokrasi: Historiografi, Pendidikan Sejarah dan Genre**. Dalam judul ini terangkum pengertian bahwa kebangsaan atau nasionalisme sebagai fondasi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkembang dalam sejarah, mulai dari kesadaran tentang konsep diri dan lian, tumbuh menjadi kesadaran kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan. Untuk mencapai cita-cita itu perjuangan dan strateginya harus dirumuskan, dan ketika kemerdekaan itu tercapai, masalah penataan negara dan pemerintahannya berdialektika antara demokrasi sebagai konsep universal dengan ekologi sosial budaya sebagai realitas lokal.

Dialektika itu menghasilkan dinamika sistem kekuasaan yang berubah, tetapi dalam perubahan itu konsep demokrasi dipakai terus menerus, walaupun praktiknya berbeda-beda. Dari demokrasi liberal berubah menjadi demokrasi terpimpin, lalu demokrasi Pancasila hingga sekarang demokrasi tanpa embel-embel dalam semangat reformasi, konsep kebangsaan tetap relevan. Ketika sistem kekuasaan disebut demokrasi liberal, kebangsaan adalah pengikat bermacam-macam identitas primordial, ketika sistem demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila diterapkan kebangsaan adalah ideologi dan alat kekuasaan. Kebangsaan dikooptasi oleh kekuasaan, dipupuk dari kesadaran kesejarahan menjadi ideologi untuk menopang dan memperkuat kekuasaan. Dan di masa kini kebangsaan seakan kehilangan maknanya ketika konsep supremasi hukum menjadi pilar bagi sehatnya demokrasi.

Sebetulnya kebangsaan atau nasionalisme tetap relevan dalam kondisi apapun, tetapi pelemahan yang sekarang terjadi merupakan akibat atau efek dari dijadikannya kebangsaan sebagai ideologi yang pemaknaannya didominasi kekuasaan selama 38 tahun (dari dekrit 1959 sampai reformasi 1998). Karena sistem kekuasaan membentuk

negara hegemonik, dan demokrasi yang diatasnamakan kekuasaan itu membelenggu kemerdekaan, maka kebangsaan yang larut bersamanya turut tercelup dalam citra negatif itu. Apa lagi ketika sistem itu berujung pada krisis multi dimensional, maka kebangsaanpun dirasakan ikut bertanggungjawab atasnya. Ketika inilah dirasakan pentingnya pendidikan sejarah, bukan saja untuk membangkitkan kembali kesadaran kebangsaan yang telah kehilangan maknanya melainkan terutama untuk generasi muda yang masa depannya masih panjang yang berarti juga masa depan NKRI. Kalau dahulu kebangsaan dipakai untuk menghidupkan perjuangan kemerdekaan, kini kebangsaan dipakai untuk mengisi dan memelihara kemerdekaan sehingga negara bangsa yang dengan susah payah diperjuangkan itu tidak hanya tetap eksis, melainkan bertambah maju dan berdaya saing tinggi di era globalisasi. Dengan begini kebangsaan adalah jiwa yang harus tetap terpelihara. Globalisasi tidak menyebabkan rasa kebangsaan hilang, tetapi dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing.

Agar pendidikan sejarah mampu menciptakan kesadaran sejarah yang otentik, sejarah harus ditulis secara benar, objektif, ilmiah dan memperkokoh kebangsaan Indonesia. Walaupun demikian, sejarah tidak hanya ditulis atas nama kebangsaan dalam skup nasional, elitis, dan politis, tetapi juga memperhitungkan factor lokal, arus bawah dan multidimensional. Tetapi sejarah lokal harus menghindarkan diri dari pandangan etno sentris dan regional sentris yang cenderung dipakai untuk menciptakan identitas lokal supaya dapat membenarkan klaim dan legitimasi atas kekuasaan daerah karena kepentingan golongan atau elite tertentu. Sejarah dipakai untuk membenarkan klaim etnik dan kultur tertentu atas nama hak memperoleh kekuasaan, dengan mengabaikan kepentingan bangsa dan negara secara luas. Jadilah sejarah yang demikian itu sebagai sejarah daerah dalam pengertian politik, bukan sejarah lokal sebagaimana dimaksudkan oleh ilmu sejarah.

Pendidikan sejarah di sekolah semestinya memiliki otonomi tersendiri, lepas dari pencampurannya dengan ilmu lain. Dengan otonomi itu sejarah tidak terbandingkan dengan ilmu lain, sehingga konsentrasinya dapat menimbulkan minat dan pengaruhnya terhadap pembangunan karakter, karena bagaimanapun pendidikan sejarah tidak hanya untuk menumbuhkan kesadaran sejarah, tetapi juga membangun karakter. Pendidikan sejarah selama ini tidak memperoleh perhatian dari peserta didik lantaran terbandingkan dengan sosiologi, geografi dan demografi, disamping penulisan bahan ajar sejarah dan metode pembelajaran yang



monoton. Karena itu sangat penting untuk mengembangkan strategi pedagogi dan pemanfaatan teknologi baru yang terus bertumbuh dan merebut minat masyarakat luas. Itulah teknologi media dan informatika. Karena itu, pendidikan sejarah kalau ingin merebut perhatian peserta didik semestinya memanfaatkan juga kemajuan teknologi itu.

Pendidikan sejarah yang dapat menumbuhkan karakter bangsa dan rasa kebangsaan adalah pendidikan sejarah yang bebas dari perpektif kolonialisme. Ketika awal masa kemerdekaan sejarah Indonesia masih ditulis dengan pengaruh yang kuat dari sejarah yang ditulis oleh sejarawan Belanda yang perpektifnya memperlakukan bangsa anak negeri sebagai pelengkap sejarah mereka, maka diperlukan emansipasi sejarah dari pandangan kolonialis itu. Kesadaran muncul agar bangsa Indonesia menulis sejarahnya sendiri, yaitu sejarah yang memerankan bangsa Indonesia sebagai pelaku, ditulis dari dalam perpektif orang Indonesia sendiri, disamping mengikuti kaidah-kaidah penulisan sejarah kritis, akademis dan memiliki visi teoretis yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Maka lahirlah sejarah dengan pendekatan Indonesia sentris. Sejarah dengan pendekatan Indonesia sentris inilah yang diharapkan dapat membentuk bangsa yang berkarakter dan memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat.

Tetapi sejarah memang bukan hanya dipakai untuk pendidikan. Ia adalah ilmu pengetahuan yang pada sifat dasarnya harus terus berkembang. Karena itu masa demi masa, ilmu sejarah terus berkembang. Perkembangan itu menuju diferensiasi dan kedalaman isi, baik isu yang menjadi subjek kajiannya, metodologinya maupun lapis sosial yang menjadi sasaran telaah ilmu ini. Ada sejarah genre baru, disamping yang telah lama berkembang semisal sejarah sosial, sejarah sastra dan sejarah kebudayaan, juga lahir yang baru: sejarah maritim, sejarah hukum, sejarah lingkungan, dan juga sejarah total. Tentu ada lagi sejarah-sejarah lainnya yang sekarang mungkin sedang bersemi dan yang akan berkembang pada masa yang akan datang. Sebagai sejarawan kreativitas dituntut untuk melahirkan sejarah-sejarah genre baru dan menjadi pelaku dalam perkembangan itu. Tetapi buku ini tidak hanya untuk pemerhati sejarah dan sejarawan. Sebagai bahan bacaan, buku ini ditujukan untuk semua pembaca, apapun latar belakang perhatian dan profesinya.

Editor



SAMBUTAN

DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT Buku **Historitas Kebangsaan dan Demokrasi Historiografi, Pendidikan Sejarah dan Genre** dapat diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan makalah Konferensi Nasional Sejarah 2011. Diterbitkannya buku ini sebagai upaya publikasi hasil konferensi agar dapat dibaca oleh khalayak yang berminat pada sejarah. Penerbitan ini juga merupakan bentuk dokumentasi ide-ide yang tertuang dalam Konferensi Nasional Sejarah 2011, dari para penulis yang sebagian besar berasal dari kalangan akademisi.

Kumpulan makalah dalam buku ini membahas berbagai tema yang berkenaan dengan Sejarah Indonesia (historisitas). Tema mengenai kebangsaan dan demokrasi merupakan tema yang selalu menarik untuk dibahas dalam kerangka kesejarahan, yang berkaitan erat dengan pertumbuhan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kita dapat bercermin pada perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, sampai sejauh mana kehidupan berbangsa kita sudah dapat dinilai semakin demokratis.

Perkembangan historiografi Indonesia juga semakin berkembang sejalan dengan makin banyaknya penelitian dan penulisan sejarah lokal. Setiap daerah memiliki pengalaman dan peristiwa sejarahnya sendiri yang menjadi bagian dari sejarah nasional kita. Penulisan sejarah (historiografi) Indonesia menjadi semakin bervariasi dan semakin kaya dibandingkan penulisan sejarah pada masa 20 tahun yang lampau.

Historiografi ini berkaitan erat dengan tema makalah berikutnya berkenaan dengan pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah berkaitan erat dengan pembangunan karakter dan identitas kebangsaan. Berbagai peristiwa bersejarah menjadi bagian dari pendidikan untuk generasi muda untuk memahami sejarah bangsanya, dan dapat digunakan untuk menamamkan rasa cinta tanah air. Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar sejarah menjadi satu hal yang menarik perhatian generasi muda dan

tidak hanya sekedar berkaitan dengan angka tahun dan peristiwa, tapi lebih jauh lagi pada kenapa satu peristiwa terjadi dengan pembahasan yang kritis dalam bentuk paparan yang diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda.

Genre dalam sejarah menjelaskan berbagai macam tema dalam penulisan sejarah melalui berbagai peristiwa sejarah, seperti sejarah lokal, sejarah lisan, sejarah politik dan pemerintahan dan tema sejarah lainnya.

Semoga upaya pendokumentasian kumpulan makalah ini dapat membawa manfaat khususnya bagi generasi muda dan khalayak yang menaruh minat pada sejarah bangsanya sendiri. Buku ini diharapkan dibaca secara luas oleh masyarakat Indonesia layaknya sebuah album perjalanan bangsa Indonesia.

Jakarta, November 2013

Direktur Sejarah dan Nilai Budaya

Endjat Djaenuderajat



DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR	iii
SAMBUTAN DIREKTUR NILAI SEJARAH	vii
DAFTAR ISI	ix

BAGIAN I

NASIONALISME, IDEOLOGI, KEMERDEKAAN DAN DEMOKRASI

1. <i>Sediono Tjondronegoro</i> ; Pasang-Surut Nasionalisme dan Disfungsi Kelembagaan Negara	1
2. <i>Taufik Abdullah</i> ; Nasionalisme dan Kearifan Sejarah	29
3. <i>Azyumardi Azra</i> ; Islam Politik Radikal di Indonesia Ideologi dan Aksi	41
4. <i>Anhar Gonggong</i> ; Di Dalam Indonesia Merdeka Itulah Kita Memerdekakan Rakyat Kita! Sebuah Refleksi Sejarah	71

BAGIAN II

HISTORIOGRAFI

1. <i>Bambang Purwanto</i> ; Membincangkan Kembali Historiografi Indonesiasentris Sebuah Pemikiran Awal	97
2. <i>Sri Margono</i> ; Melukis Tiga Roh Stigmatisasi Dan Kebangkitan Historiografi Lokal Di Banyuwangi	119
3. <i>Mumuh Muhsin Z.</i> ; Menggagas Arah Perkembangan Paradigma Baru Historiografi Indonesia	147

BAGIAN III

PENDIDIKAN SEJARAH

1. <i>H. Anwar Hafidz</i> ; Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Sejarah Berbasis Muatan Lokal melalui Pemanfaatan Media Teknologi Informasi	157
--	-----

2. *Abdul Syukur*; Membangun Karakter Bangsa Lewat Sejarah Refleksi 65 Tahun Pengajaran Sejarah di Indonesia..... 179
3. *S. Hamid Hasan*; Pendidikan Sejarah Orientasi dan Strategi Pedagogis 193
4. *Umasih*; Penyusupan Komunisme dalam Pelaksanaan Pendidikan Pancawardhana 219

BAGIAN IV

SEJARAH GENRE BARU

1. *Susanto Zuhdi* ; Sejarah Maritim Labu Rope Labu Wana Konsep ‘Pulau Sejarah’ dalam Historiografi Indonesia 237
2. *Harto Juwono* ; Sejarah Hukum Pendekatan Hukum dalam Penulisan Sejarah 253
3. *Nawiyanto* ; Sejarah Lingkungan Eksplorasi Sejarah Lingkungan sebagai Teritori dan Perspektif Baru Kajian Sejarah Indonesia 269
4. *Wardiningsih Surjohardjo* ; Sejarah Total Dinamika Kehidupan Masyarakat Gundagai, Australia, 1840–60 Upaya Mewujudkan Pendekatan Sejarah Total 287



BAGIAN PERTAMA
Nasionalisme, Ideologi, Kemerdekaan
dan Demokrasi



Pasang-Surut Nasionalisme dan Disfungsi Kelembagaan Negara

SESIONO M. P. TJONDRONEGORO

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Sebagai seorang penulis yang bukan sejarawan yang kebetulan lahir pada tahun pementasan Sumpah Pemuda, kesadaran saya mengenai pentingnya sejarah merupakan warisan orang tua dan nenek moyang. Masa pendewasaan dengan tumbuhnya usia membawa saya melintasi tiga zaman, yakni masa penjajahan Belanda, pendudukan tentara Jepang, dan masa kemerdekaan ketika Republik Indonesia diakui sebagai negara berdaulat oleh dunia internasional hingga kini.

Oleh karena latar belakang tersebut, pandangan dan kesan pribadi saya yang berdasarkan ingatan dan catatan tidak selalu menaati premis Ilmu Sejarah. Banyak pandangan dan penafsiran yang dikemukakan bersifat pribadi. Setelah dewasa dan dapat mempelajari ilmu-ilmu politik, ekonomi, sejarah dan hukum beberapa negara besar di dunia, semakin tumbuh kesadaran pada diri saya bahwa Ilmu Sejarah dapat diartikan sebagai guru yang memberikan contoh bagaimana suatu bangsa dapat mendirikan negara dan mengarahkan pertumbuhannya.

Boleh dikatakan, inilah yang kini sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sangat besar harapan saya terhadap penyelenggaraan Kongres Nasional Sejarah ini untuk memperoleh kesimpulan dan hasil yang mampu menyumbangkan saran bagi kemajuan bangsa dan negara yang lebih terhormat. Tantangan yang kita hadapi jelas amat besar, dan untuk mengatasinya memerlukan tekad, kesatuan dan perjuangan bangsa yang jauh dari ringan. Tetapi inilah yang dihadapi generasi muda pada dasawarsa awal abad ke-21.

KEDEWASAAN MENAMBAH KESADARAN

Mengalami menjadi anak zaman ketika bangsa ini masih di bawah pemerintahan Belanda, bahkan menerima pendidikan dasar dalam ranah kebudayaan Barat, bukan saja mempengaruhi sudut pandang dan pengalaman hidup saya, tetapi semakin menyadari adanya pelapisan sosial (*onder geschiktheid*) dalam masyarakat. Persepsi saya tentang orang Jawa berkulit cokelat pada umumnya setingkat lebih rendah daripada warga berkulit putih dulu belum ada istilah “orang bule.” Namun, andaikata istilah itu sudah dikenal pada waktu itu, jangan coba-coba mengucapkannya di depan umum.

Pandangan saya dapat lebih maju karena sejak kecil menjadi anak angkat keluarga Manado bernama Dubois yang diperlakukan setingkat (*geljkgesteld*) warga Belanda, dan menjabat Direktur Volkskrediet Bank (sejak 1946 menjadi BRI) di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ayah kandung saya menjabat Asisten Wedana (setingkat camat sekarang) dan berpendidikan Hoogere Burgerschool (HBS, setingkat SMA sekarang) sehingga hubungan dengan pejabat Belanda seperti *controleur*, asisten residen, kesan saya, lebih leluasa dan mudah. Mungkin faktor itulah yang memudahkan saya juga diterima di sekolah dasar Belanda karena bahasa Belanda juga sudah didengar sejak kecil di lingkungan keluarga inti.

Selama masa Sekolah Dasar (Europese Lagere School, 1933–40) sampai awal sekolah lanjutan (HBS, 1940–42), saya boleh dikatakan menerima bekal kebudayaan Barat. Bahasa yang digunakan pun bahasa Belanda dan ditambah bahasa Perancis di sekolah lanjutan, kemudian menyusul Inggris. Latar belakang itu memudahkan saya setelah lulus dari SMA di Jakarta pada 1948 diterima di Politiek Sociale Faculteit Universiteit van Amsterdam pada 1950.





Bekal penguasaan beberapa bahasa asing dan memahami ciri-ciri budaya Barat itu saya rasakan sebagai modal yang sangat bernilai untuk memahami pertumbuhan dan pasang-surut perkembangan sosial-politik di beberapa negara di dunia dari waktu ke waktu. Mungkin ini juga sedikit sumbangan kepada pemahaman saya atas Ilmu Sejarah.

Pekerjaan ayah di jajaran pamong praja zaman penjajahan, ketika masih menjabat Asisten Wedana, membuat berpindah-pindah dari satu kota kecil ke kota kecil lain sehingga saya ikut melihat dan memperhatikan kehidupan penduduk desa. Kota-kota kecil seperti Bawang di kaki Gunung Slamet, Lasem di tepi laut dekat Rembang, dan Ndero di wilayah hutan jati, Kabupaten Ngawi, meninggalkan kesan pada saya tentang kehidupan orang desa yang “primitif” dan miskin. Banyak penduduk desa hidup hanya dengan segobang (2,5 sen) sehari.

Rasanya ingatan itu bertahan sampai saya menjadi pemuda, dan keinginan memperbaiki nasib orang desa tersebut menjadi tujuan hidup. Ungkapan yang sering diucapkan ayah kepada saya adalah *lot's verbetering* atau perbaikan nasib. Beliau juga sering berkata, “Ingat *bu de-mu* Kartini.” Sebenarnya gagasan yang sekarang dikenal sebagai “gender” sudah disadari bahkan dijalankan oleh Bu De Kartini pada abad yang lampau. Intinya, laki-laki dan perempuan harus berkedudukan setara.

KESADARAN NASIONALISME TUMBUH

Sebagai pemuda sekolah menengah yang sering mendengar cerita tentang ramalan Jayabaya, tetapi juga memperoleh bekal bahasa Belanda yang memadai, saya mampu membaca buku Cohen Stuart, *De Volksraad en de Regeerings verklaring* (1938); H. Colijn, *Koloniale vraagstukken van heden en morgen* (1928); Douwes Dekker, *Een natie in de maak*; D. M. G. Koch, *Om de vrijheid* (1950); L. N. Palar, *De Indonesische beweging en Japan*; Soekarno, *Indonesië klaagt aan* (1931); Syahrazad (Sutan Sjahrir),

Indonesische overpeinzingen (1955), dan lain-lain. Berbagai bacaan itu semakin menambah pengertian saya tentang kolonialisme.

Tulisan para pejuang nasionalis serta Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu belum tersebar. Misalnya surat-surat Soekarno ketika ditahan di Penjara Sukamiskin, Bandung, baru diketahui setelah 1945. Demikian pula dalam masa pendudukan Jepang tidak banyak tulisan para pejuang dan intelektual yang dapat dibaca, juga karena sensor sangat keras. Pada 1952, buku George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* terbit dan beredar luas ketika itu saya sudah mulai kuliah di Universiteit van Amsterdam.

Dari jarak jauh setelah meninggalkan Tanah Air, saya berkesempatan merenungkan kembali pengalaman di negara sendiri sehingga timbul aneka pemikiran. Menengok dan mengingat kembali periode 1940–45, sejak Perang II menyebar dari Eropa sampai Asia, tidak salah jika Indonesia “memilih” Jepang meski negara fasis untuk bergabung sementara guna mengusir penjajah asal Eropa dan Amerika dari bumi Asia. Indonesia menjadi negara ketiga di kawasan Asia yang memproklamasikan kemerdekaannya lebih dulu dari India, Pakistan dan negara-negara tetangga lain di Asia Tenggara.

Sebagai pemuda sekolah menengah pada 1940, saya melanjutkan di HBS Malang. Masa pendidikan yang seharusnya lima tahun terhenti ketika tentara Dai Nippon (*Rikugun*) menduduki seluruh Jawa dan melarang serta menutup semua sekolah Belanda. Pada 1943, barulah dibuka Sekolah Menengah Pertama di Jakarta. Antara Mei 1942 sampai awal 1943 sekolah di Prapatan dan Manggarai dibuka. Saya memilih melanjutkan sekolah di SMP Negeri I Prapatan.

Sebagian kurikulum berubah. Bahasa Indonesia dan Jepang menggantikan bahasa Perancis dan Inggris di HBS dulu. Suatu tambahan yang khas dalam pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah



disiplin dan latihan ketentaraan. Setiap pagi, sebelum pelajaran dimulai, murid-murid melaksanakan upacara mengerek bendera Dai Nippon dan membungkuk badan sebentar ke arah Tokyo.

Yang penting saya rasakan adalah hidup berdisiplin dalam barisan lebih terarah di sekolah Jepang bila dibandingkan dengan keteraturan di sekolah Belanda. Bersekolah menengah antara 1943–45 di Jakarta, dan kemudian di Surabaya, seperti menumbuhkan jiwa kemiliteran pada diri saya. Dalam barisan kemiliteran (*gakutotai*), saya berperan sebagai komandan regu (*buntai*) dan disarankan mengikuti latihan judo melawan perwira-perwira *kaigun* (Angkatan Laut Jepang). Barangkali pengalaman ini turut memperkuat niat saya menjadi perwira Angkatan Laut di kemudian hari, juga karena kesadaran bahwa luas laut di Nusantara lebih lapang dibandingkan daratan pada ribuan pulau besar dan kecil.

Saat belajar di SMP dan awal Sekolah Menengah Teknik (1944–45), saya didekati suatu gerakan rahasia yang menurut keterangan dipimpin Sutan Sjahrir dan beberapa aktivis seperti Soedjatmoko, Soedarpo, Soebadio, dan lain-lain. Kelompok pemuda aktivis tersebut sudah mendengar tentang kekalahan tentara Jepang di Pasifik (Rabaul, Morotai, bahkan Papua), melalui pemancar radio gelap.

Pemikiran progresif tentang sosialisme di Indonesia sebenarnya bukan tanpa benih, karena pada zaman penjajahan pun H. J. F. M. Sneevliet mendirikan Organisasi Sosial Demokrasi (Indische Sociaal Democratische Organisatie, 1914) sebagaimana dilaporkan oleh Robert van Niel (1960:123). Oleh karena itu bagi Sutan Sjahrir yang lama menempuh studi di Negeri Belanda, sosialisme bukan sesuatu yang tabu. Ketimpangan sosial dalam masyarakat Hindia Belanda yang menjadi perhatian Sneevliet sama sekali tidak disetujuinya dan ditentanginya lewat gerakan politik.

Berita tentang kekalahan Jepang di Pasifik yang kemudian disusul dengan pengeboman atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan

Nagasaki mendorong kami para pemuda mempersiapkan diri menyambut hari kemerdekaan. Setelah pecah perlawanan, pada September–Oktober 1945, kami menghadapi pasukan Inggris pimpinan Jenderal Mallaby di Surabaya. Bung Karno datang mendamaikan di Surabaya dan diterima oleh Wali Kota Soedirman. Tentara Inggris mundur sampai ke pelabuhan Tanjung Perak dan lapangan udara Morokrembangan, tetapi semua itu untuk mempersiapkan serangan berikut pada 10 November. Tentara marinir Belanda pun masuk kembali dan kami terpaksa meninggalkan Surabaya untuk melanjutkan perlawanan di Mojokerto dan Pandaan.

Hingga Aksi Militer 1947, tentara Belanda menembus Malang sehingga satuan-satuan tentara kita bergerilya dari luar kota. Ini bukan saja timbul di Jawa Timur tetapi juga di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Oleh karena luka cacat, saya hanya membantu di markas Trip (Tentara Pelajar), tidak di lapangan dan garis depan medan pertempuran. Menjelang akhir 1947 saya dinonaktifkan dari tugas kemiliteran dan kembali ke bangku sekolah di Jakarta hingga 1948.

Mengingat kembali masa lebih dari 60 tahun yang lalu tetap meninggalkan kesan kuat pada diri saya tentang persatuan bangsa, dengan pengorbanan yang tak terbayang sekarang. Di Surabaya, Pemuda Hizbullah hanya dengan bambu runcing atau *takeari* sebagai senjata melawan tentara Ghurka yang bersenjata *stengun* dan *mitrailleur* atau senapan mesin. Hidup atau mati demi kemerdekaan seperti bukan masalah atau pilihan di kalangan pemuda tersebut menghadapi keadaan ketika Jepang kalah perang melawan Sekutu pada 6 Agustus 1945.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada 17 Agustus 1945, tentara Inggris masuk ke beberapa kota di Jawa untuk membebaskan bangsa Eropa yang ditawan dan melucuti senjata tentara Jepang yang masih tersisa. Jelas pula kepentingan ekonomi Inggris dan Belanda mengamankan perusahaan besar mereka seperti Internatio, Borsumij, Shell, dan lain-lain.

Kami, para pemuda, melakukan perlawanan terhadap Tentara Inggris termasuk batalyon Gurkha yang masuk ke Surabaya dalam bulan September–Oktober 1945. Kemudian perlawanan kami berlanjut terhadap serangan kedua pada awal November, dan menang, sehingga menjadikan Surabaya sebagai kota pahlawan. Tidak kurang karena Bung Tomo melalui berbagai organisasi pemuda memimpin perlawanan. Jelas, gerakan revolusioner ini didukung oleh Polisi Istimewa eks Tentara Peta dan Divisi VII di bawah Jenderal Soengkono yang pernah memberontak di atas kapal *Zeven Provinciën* milik Belanda.

MEMAHAMI ILMU SEJARAH

Sudah umum diterima bahwa Ilmu Sejarah mengandung pemikiran dan penafsiran dasar atas terjadinya peristiwa serta peranan manusia yang terlibat maupun memimpin di dalamnya dalam berlanjutnya waktu. Kesadaran ini dalam pengalaman penulis juga diprasyarati oleh pengambilan jarak waktu sehingga bila seseorang dapat mengingat kembali peristiwa dan kejadian di masa silam semakin jelas artinya dan pengaruhnya. Mulai dimengerti, misalnya, Sutan Sjahrir (1909–66) menulis *Indonesische overpeinzingen* dan atau mendengar kisah-kisah tentang Tan Malaka (1949) yang melawan tatanan penjajahan Belanda.

Perbedaan perlakuan antara warga Belanda dan bangsa asing lain dengan bangsa pribumi semakin disadari. Di sekolah dasar, *Europeesche Lagere School*, sebagai contoh, murid pribumi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan murid Belanda totok dan Indo. Murid pribumi pun dibedakan menurut lapisan masyarakat karena perbedaan penguasaan bahasa Belanda. Kaum priyayi diberi prioritas. Ujian penguasaan bahasa Belanda, seperti untuk bahasa Inggris sekarang, belum diadakan; *Inlandsche Scholen* (sekolah pribumi) menggunakan bahasa daerah. Di sekolah dasar pribumi, *Hollandsch-inlandsch School*, mulai digunakan

bahasa campuran dengan bahasa Belanda. Tidak mengherankan di Jawa timbul sekolah Taman Siswa karena kaum priyayi pun menyadari bahwa pendidikan putra-putri Indonesia yang kurang menguasai bahasa Belanda harus berlangsung.

Tidak mengherankan mengapa timbul kesadaran bahwa penduduk harus dimajukan bukan hanya di bidang pendidikan. Budi Utomo (atau Boedi Oetomo) didirikan pada 1908, berikut Sarekat Islam pada 1912 yang menuntut peranan lebih besar dalam pendidikan, juga dalam perekonomian menghadapi perusahaan Tionghoa dan pemerintahan (de Jong 2004).

Tan Malaka di Minangkabau melancarkan kritik dan protes terhadap sistem kolonialisme. Memang tidak terlepas dari kesadaran mengapa timbul Marxisme sebagai jalur protes atau kapitalisme yang mengakibatkan kolonialisme. Gerakan kiri tersebut, walau bagaimanapun, mempercepat lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Marxisme yang pada dasarnya menentang kapitalisme yang juga menyebabkan kolonialisme di Asia dan mengakibatkan eksploitasi kaum buruh dan petani, juga timbul setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, jelas bahwa partai-partai politik Islam mengutuk pandangan Marx yang menyebutkan bahwa agama adalah opium atau candu untuk rakyat. Mereka menentang partai-partai komunis. Kedatangan Muso dari Uni Soviet yang mendukung Partai Komunis Indonesia hingga pemberontakan 1948 di Madiun mendapat perlawanan dari kaum muslim pada umumnya. Akhirnya, setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, PKI beserta organisasi di bawah naungannya dinyatakan terlarang di negara Pancasila yang menerima Ketuhanan sebagai dasar persatuan negara yang multietnik.

Boleh dikatakan kebangunan politik di Indonesia dimulai sejak Politik Etis pada awal abad ke-20, yang ditanggapi oleh Boedi Oetomo, kemudian Sarekat Islam yang sejak awal melawan perusahaan Tionghoa (de Jong

2004: 12) yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada 1912 itu pula partai politik pertama yang berani melawan pemerintah, Indische Partij, didirikan oleh Douwes Dekker (de Jong 2004:11); juga mendapat dukungan dari Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat. Keanggotaannya menunjukkan lebih banyak orang Indo (sekitar 5500 orang) dibandingkan Indonesia (1500 orang). Jelas telah timbul perlawanan yang mengakibatkan beberapa tokoh partai IP dibuang ke pulau-pulau lain di Indonesia pada 1913.

Perkembangan tersebut mendorong pemerintah kolonial mendirikan Volksraad pada 1918 sehingga suara berbagai kelompok dapat ditampung. Kebetulan saya mempunyai paman, yakni Pak De Sosrohadikoesoemo, yang menjadi anggota Volksraad sehingga sebagai murid sekolah dasar dapat sedikit mengikuti perdebatan politik dalam Volksraad—melalui cerita Pak De itu. Pembentukan Volksraad (de Jong 2004: 28) disepakati Parlemen Belanda (1916) dan didirikan di Batavia pada 1918, bersifat badan penasihat, beranggotakan 35 wakil yang dipilih oleh Gubernur Jenderal atau mendapat persetujuannya. Memang sistem pemilihan umum belum ada, tetapi pada 1927 jumlah anggota ditambah hingga 60 orang sehingga baik pribumi maupun warga Asia lain (Tionghoa dan Arab) yang tergolong penduduk diwakili, di samping anggota berbangsa Belanda.

Setelah menempuh pendidikan SMP (1942–45) dan SMA (1945–48), walau terputus-putus dan mampu memahami perkembangan politik, saya memilih studi politik dan sosial setelah bebas tugas sepenuhnya dari Trip. Kebetulan ada kesempatan belajar ke Negeri Belanda setelah Konferensi Meja Bundar (1949). Kebetulan pula pada waktu itu saya tidak dapat mencapai cita-cita semula yang ingin menjadi perwira Angkatan Laut karena cacat seumur hidup akibat pertempuran melawan Belanda semasa dalam jajaran Trip Jawa Timur.

Seperti telah disebutkan, saya memilih studi di Politiek Sociale Faculteit, yang merupakan fakultas ketujuh dalam naungan Universiteit

van Amsterdam, yang didirikan pada 1947. Universiteit van Amsterdam sendiri didirikan pada 1632. Di antara tiga jurusan (*sectie*), saya memilih yang mempunyai kurikulum Ilmu Politik, Ekonomi, Hukum, Sejarah Internasional, dan Sosiologi. Hal itu saya rasakan sebagai kombinasi yang bukan hanya menyumbang kepada pengertian tentang Indonesia masa pra-kemerdekaan, tetapi juga kepada visi perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia ke masa depan. Buku-buku wajib yang harus saya pelajari menyumbang banyak pemikiran antardisiplin. Khususnya dalam ilmu politik, saya memperoleh pemahaman tentang perkembangan masyarakat sebelum mengenal demokrasi, dan di bidang ekonomi sosialis diperoleh pengertian mengenai aliran-aliran di bidang tersebut.

Untuk memperdalam pengertian serta pemahaman politik dan sejarah, selama kuliah saya membaca antara lain buku Commins dan Linscott (1947). Dari bacaan itulah saya memahami istilah-istilah *liberty*, *social contract*, *civil government*, *civil disobedience* sampai *communist manifesto*, dan lain-lain. Dalam ilmu sejarah, saya mempelajari filsafat sejarah dari Hegel (1770–1831).

Konsep-konsep dalam kedua ranah ilmu tersebut menunjukkan selain pertumbuhan ideologi juga menjelaskan hubungannya dengan Ilmu Ekonomi sehingga bacaan wajib mencakup buku-buku klasik seperti Adam Smith, *The Wealth of Nations* yang mendasari kapitalisme, dan A. Marshall, *Principles of Economics*. Buku Marshall ini benar-benar mempunyai cakupan ilmu yang luas dan multidisiplin karena menghubungkan pemikiran Ilmu Biologi Herbert Spencer (1890–1903) melalui falsafah sejarah Hegel sampai prinsip matematika dalam Teori Kekayaan Cournot (1801–77), ahli filsafat dan matematika. Edisi pertama buku Marshall yang terbit 1890 jarang ditemukan sebagai bacaan wajib di fakultas ekonomi tahun 1950-an, termasuk di beberapa negara Eropa Barat.

Analisis multidisiplin itu perlu kita kembangkan di sini. Dalam ranah Ilmu Ekonomi, M. Gide dan M. Rist—keduanya guru besar Perancis awal

abad ke-20—mengupas teori ekonomi mulai dari kaum *physiocrat* sampai Adam Smith dan Karl Marx. Doktrin sejarah tokoh-tokoh tersebut memang hebat dan sampai sekarang berguna untuk diajarkan guna merumuskan sintesa. Sebelum Smith dikenal dengan teori ekonominya, di Perancis pun sudah ada penulis seperti Turgot (1726–81) yang menulis tentang falsafah ekonomi.

Pada dasarnya pemikir ilmu ekonomi bertolak dari permasalahan pertanian dan sumber daya alam sejak Zaman Physiocrat sampai David Ricardo menghubungkan masalah nilai tanah dengan penguasaan tanah (1772–1817). Di ranah Ilmu Sejarah, kecuali tentang sejarah umum seperti karya A. J. Toynbee, banyak sejarawan yang menekuni perkembangan Indonesia sejak Revolusi seperti Kahin (1952) yang telah disebutkan, kemudian banyak lagi yang menganalisis dari sudut pandang sosiologi (W. F. Wertheim, 1959), politik (Herbert Feith), dan sejarah (Taufik Abdullah).

PENGALAMAN DAN PENGERTIAN MODEL PEMBANGUNAN

Hingga sekarang ada tiga atau empat negara besar yang sejak abad ke-19/20 memberikan contoh yang menarik mengenai pengalaman sejarahnya. Yang pertama di belahan Barat, yakni Amerika Serikat dan Soviet Rusia, sedangkan di Asia adalah Jepang dan Tiongkok. Sebelum negara-negara tersebut berdiri, di Eropa Barat abad pada ke-18 telah lahir negara dengan tatanan demokrasi pertama setelah tergulingnya Raja Louis XIV sehingga meluluhkan feodalisme. Lapisan menengah yang bukan keluarga ningrat atau *bourgeoisie* maju ke depan yang dibantu kaum buruh dan petani sejak Revolusi Perancis 1789.

Ekonomi perdagangan mulai berkembang di bawah pimpinan kaum *bourgeoisie* tersebut. Perdagangan yang berkembang juga membutuhkan bahan mentah dari wilayah jajahan Perancis di Afrika Timur dan Utara.

Namun, setelah tatanan demokrasi berlangsung sekitar 59 tahun, kaum buruh dan tani yang merasa membantu kaum *bourgeoisie* dalam Revolusi tidak diberi peran sesuai harapan mereka sehingga timbul pemberontakan Februari 1848 atau Brumaire. Ada sejarawan menafsirkan bahwa kaum buruh dipengaruhi oleh ideologi Marxis. Terpadunya pemberontakan memang mempertahankan sistem liberal ekonomi walaupun demokrasi juga membiarkan Partai Sosial Demokrasi (Karl Kautsky 1891) terus hidup. Memang Partai Sosial Demokrat muncul di Jerman lebih dulu dan memperjuangkan nasib para buruh lebih gigih. Ideologi ini menyebar ke Perancis hingga Negeri Belanda sehingga pernah diadakan kongres beberapa negara Eropa Barat yang menyetujui prinsip kedaulatan rakyat.

Perbaikan nasib buruh melalui suatu “revolusi ekonomi” mulai populer dan pertentangan antarlapisan masyarakat terjadi. Di Negeri Belanda, pada 1895 dirumuskan program perjuangan yang menuntut hak memilih yang sama bagi laki-laki dan wanita, sampai melarang dan menarik kembali monopoli atas perusahaan industri. Ada pula usul melarang penjualan tanah negara kepada kaum partikelir. Tanah dinasionalisasi dan pembangunan di provinsi maupun kotamadya harus dilakukan oleh negara. Di antara 12 program perjuangan yang dirumuskan Partai Nasional Demokrat Belanda termasuk bahasa dan jam kerja yang pelaksanaannya sama bagi buruh laki-laki dan wanita. Setelah partai buruh, Sociaal-democratische Arbeiderspartij, cukup kuat dan didukung banyak anggota, diadakan rapat di berbagai kota secara berkala. Perbaikan nasib dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan jelas cepat menimbulkan keadaan yang berlawanan antarlapisan masyarakat.

Itulah pelajaran bagi Indonesia untuk menghindari peluang tersebut terlebih setelah Reformasi 1998 ketika kebebasan politik dan ekonomi bertambah longgar. Pemerintah otoriter yang berlangsung selama Orde Baru semakin dirasakan lebih tertib karena korupsi, kolusi dan nepotisme masih lebih terkendali.



Contoh lain adalah Amerika yang sebelum diresmikan menjadi Amerika Serikat pada 1776 juga masih menjadi jajahan Inggris. Benua Amerika yang ditemukan Colombus pada 1492 boleh dikatakan sudah dipengaruhi Inggris sejak awal abad ke-17 karena banyak migran datang ke Virginia dan wilayah lainnya. Bahkan di Kepulauan Karibia, Inggris sudah berkembang dan berpengaruh di sana. Proklamasi kemerdekaan oleh Thomas Jefferson pada 1776 melahirkan Amerika Serikat setelah tentara Inggris dikalahkan pada 19 April 1775. Namun, rupanya kemenangan dari Inggris ini—yang menguntungkan kaum *bourgeoisie*—belum memecahkan penderitaan dan pengangguran pada lapisan masyarakat bawah (Presser 1947: 56).

Beberapa presiden Amerika Serikat yang memerintah sejak proklamasi negara itu, termasuk Lincoln dan Monroe, belum mampu menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara negara bagian di utara dan di selatan. Negara bagian utara lebih maju di bidang industri dan menyerap tenaga kerja kaum Negro dari selatan yang masih lebih agraris. Ketimpangan ekonomi di Utara dan Selatan ini akhirnya mengakibatkan perang saudara antara 1860–65.

Di Carolina Selatan terdapat perkebunan padi yang menderita kekurangan pekerja Negro yang memilih lari ke Utara. Juga pendatang dari Afrika semakin berkurang. Pertikaian Utara-Selatan boleh dikatakan disebabkan oleh perkembangan industri dan perdagangan di utara yang merugikan perkebunan dan ketersediaan tenaga kerja atau perbudakan. Akhirnya pertentangan tentang perbudakan mencuat sehingga timbul perbedaan antara utara yang progresif dan selatan yang mempertahankan perbudakan.

Kependudukan di Amerika Serikat mencerminkan perbedaan ras. Orang Indian merupakan penduduk asli, sedangkan Inggris, Tionghoa, Jepang, Mexico dan Negro adalah pendatang. Yang tampak terkemuka adalah penduduk berkulit putih yang merupakan mayoritas, sedangkan

orang kulit hitam berada pada lapisan bawah. Dengan pengangkatan Barack Obama menjadi presiden berkulit hitam yang pertama kesetaraan bangsa seperti berkembang lebih baik.

Negara Barat ketiga yang mengalami perubahan struktur secara radikal adalah Rusia. Di bawah Tsar, Rusia termasuk negara berpola feodal yang menempatkan kaum ningrat berkuasa. Namun, gerakan Marxis berhasil mengubah struktur sosial melalui pergulatan politik yang keras. Tiga tokoh, yakni Trotsky, Lenin dan Stalin, memperjuangkan perubahan struktur politik yang lebih meningkatkan peranan rakyat dalam ekonomi. Dengan menerapkan teori Karl Marx, mereka berjuang meningkatkan kesejahteraan dan peranan politik lapisan bawah.

Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat antara Trotsky di satu pihak dan Lenin dan Stalin di pihak lain. Komunisme, menurut Trotsky, hanya dapat diterapkan melalui Revolusi Sedunia, sedangkan Lenin dan Stalin beralih dapat dimulai di satu negara besar seperti Rusia yang berpenduduk multietnik. Perbedaan tersebut akhirnya menjadi perjuangan politik yang mengakibatkan kematian Trotsky di Meksiko.

Proklamasi berdirinya Negara Uni Soviet terjadi pada 1917 oleh Lenin di kota St. Petersburg, yang kemudian diubah menjadi Leningrad. Presiden pertama yang memimpin negara itu adalah Joseph B. Stalin. Sebagian wilayah Uni Soviet berada di daratan Eropa dan sebagian lainnya di Asia Barat. Ideologi komunisme negara itu menentang ekonomi kapitalis dan liberal, dan ingin menggantinya dengan ekonomi yang dikendalikan oleh negara yang lebih adil dan memperbaiki nasib lapisan bawah. Dalam sistem ekonomi kapitalis itulah lapisan bawah menderita karena, menurut Adam Smith, ekonomi kapitalis membenarkan persaingan bebas antar-pengusaha sehingga yang berhasil atau kuat akan mendapat keuntungan lebih banyak.

Bila dibandingkan dari sudut kehidupan beragama, Amerika Serikat

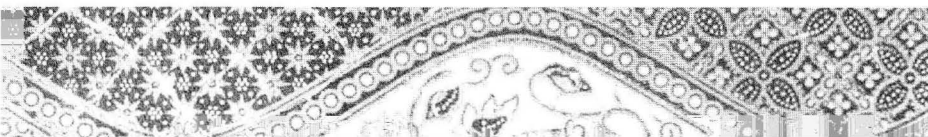


lebih memberikan kebebasan daripada Uni Soviet. Ideologi komunisme di Uni Soviet melarang agama dalam politik sesuai dengan pendapat Karl Marx yang melihat agama sebagai opium bagi rakyat. Meski ada kebebasan beragama dan pengelompokan mazhab yang dianut berbagai ras di Amerika Serikat, hal itu tidak menonjol dalam pembentukan partai politik. Berbeda dengan di Indonesia yang pernah berdiri Partai Masyumi, kemudian Nahdatul Ulama, disusul Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan lain-lain, pada masa kini. Di Negeri Belanda, gejala itu disebut *splinter partijen* atau pecahan partai.

Saya mengetahui hal itu karena pernah menjadi penyebar pamflet partai politik semasa kuliah di Negeri Belanda sambil mencari tambahan uang saku. Saat terjadi pertikaian Belanda versus Republik Indonesia mengenai nasib Nieuw Guinea atau Irian Barat pada 1960, saya (ketika itu sudah bergelar doktorandus) sempat bertemu dengan beberapa fraksi parlemen di Den Haag. Tidak tampak partai agama kecil “pecahan” di sana. Penganut Katolik bersatu dalam Katholieke Volkspartij, sedangkan kaum Protestan tersebar di berbagai partai politik. Hanya ada satu partai yang didukung mayoritas Protestan, yakni Antirevolutionaire Partij, yang justru menyetujui penyerahan kedaulatan New Guinea kepada Republik Indonesia, bersama Partij van de Arbeid dan Communistische Partij van Nederland. Artinya, “pecahan partai” yang berbasis suatu agama dalam praktik politik praktis malah tidak efektif.

ASIA BANGKIT

Kebangkitan negara di benua Asia tidak saya pelajari secara khusus, tetapi sebagai pembanding saya tertarik membaca tentang reformasi dan revolusi seperti yang terjadi di Jepang pada zaman Restorasi Meiji Tenno (1868–1912) dan di Tiongkok (1942–35). Kedua negara mengusahakan modernisasi dan industrialisasi dari tahap agraris, bahkan ekonomi



Tiongkok sejak awal abad ke-20 dikuasai perusahaan asing besar, melawan Inggris, Amerika dan Jepang di Shanghai dan Manchuria.

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat dan perkembangan menuju industrialisasi serta modernisasi di bawah Meiji Tenno mendorong Jepang melakukan ekspansi ke negara Asia lain. Negara itu menduduki Korea dan Manchuria di daratan Tiongkok dan turut meluaskan Perang Dunia II di Eropa ke Asia. Dalam pemerintahannya menerapkan ideologi fasisme, dan penguasaan militer. Jepang juga menjatuhkan bom di Pearl Harbour milik Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii. Selanjutnya mereka menyerbu ke Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda yang kala itu masih dikuasai Belanda. Meski demikian, sebagian penduduk Jawa yang percaya pada ramalan Jayabaya tetap optimistis karena pendudukan Jepang menurut ramalan itu hanya akan berlangsung “seumur jagung.” Dan benar, masa pendudukan Jepang berakhir setelah bom atom Amerika Serikat menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki sehingga memaksa Jepang menyerah. Sekalipun kalah perang, Jepang sudah memiliki modal industri yang berharga, sehingga kemajuannya hampir setingkat negara industri Barat bahkan mampu bersaing dalam beberapa bidang seperti industri mobil, elektronika, dan energi nuklir.

Berbeda dari pola pembangunan Jepang, Tiongkok setelah bangun menuju nasionalisme mutakhir di bawah Sun Yan Sen (1912) disaingi oleh Partai Komunis Tiongkok di bawah Mao Tse Tung. Sebagai anak petani yang cukup kaya, Mao juga memperhatikan pembangunan sektor pertanian dan menghentikan pengaruh dominan ekonomi Barat melalui penghapusan daerah konsesi negara Barat di Kota Shanghai.

Revolusi Tiongkok pimpinan Mao Tse Tung (1893–1976) sebenarnya sudah berawal pada 1924 dan Partai Komunis juga sudah memegang peranan penting dalam tiga tahap, yakni 1924–27, 1927–36, dan 1936–45 masa melawan Jepang. Revolusi pecah karena Partai Komunis Tiongkok sejak awal melawan imperialisme negara asing dan kekuatan feodal di



dalam negeri. Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang didukung kaum proletariat juga memimpin kaum tani, borjuis kecil dan massa penganggur ke masa depan yang lebih baik. Mao menulis, *“Only the proletariat and the Communist Party can lead the peasantry, the urban petty bourgeoisie and the bourgeoisie . . . to the path of the victory”* (Mao Tse Tung 1963).

Singkatnya PKT bertujuan memperbaiki nasib lapisan masyarakat yang masih menderita dan menduduki kota-kota serta menjangkau daerah yang semakin luas. Dengan bantuan Tentara Merah dilakukan Reformasi Agraria (1931–34). Setelah berbagai kesulitan dapat diatasi, mulai 1935 PKT dengan bantuan Tentara Merah semakin mencapai hasil perjuangan yang sesuai dengan strategi mereka. Kemenangan Tentara Merah dari Tentara Kuomintang di bawah Chiang Kai Shek mengalami tahapan perjuangan selama sepuluh tahun.

PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL

Sejak awal strategi PKT dengan Tentara Merah bertujuan memperbaiki nasib proletariat dan petani kecil karena itu Reformasi Agraria dilaksanakan di daerah yang sudah mereka kuasai. Di beberapa provinsi seperti Kiangsi, Sinchuan, Yungshin, Wanan, Ningkong, dan lain-lain, tuan tanah besar menguasai 60–80 persen tanah pertanian sehingga mayoritas petani kecil dan buruh tani terjerumus dalam pengangguran (Mao Tse Tung 1963).

Partai Komunis menguasai wilayah yang semakin luas sehingga mengalahkan Tentara Kuomintang. Sebutan Tentara Merah berubah nama menjadi Tentara Pembebasan Rakyat pada 1946. Setelah rakyat Tiongkok dibebaskan dari imperialisme Amerika Serikat dan Perang Dunia II berakhir, PKT melanjutkan strategi pembangunannya dengan membenahi struktur agraria di pedesaan. Bukan hanya pembagian tanah yang lebih merata, tetapi juga pembentukan satuan usaha tani yang lebih besar. Koperasi pertanian didirikan dan kolektivitas dilaksanakan sehingga diperoleh unit usaha yang lebih besar.

Sejak awal Revolusi Tiongkok beranggapan bahwa kekuasaan lapisan tuan tanah besar tidak dapat dihindari selama imperialisme negara asing menguasai Tiongkok karena mereka adalah dasar dari imperialisme (Mao Tse Tung III: 88–89). Lapisan *bourgeois* dibagi atas “borjuis besar” dan “borjuis kecil.” Borjuis besar memanfaatkan imperialisme sehingga yang kecil menderita di daerah pertanian. Petani kaya dan tuan tanah merupakan lapisan setengah-feodal yang hanya 5 persen dari penduduk pedesaan yang menguasai 60–80 persen luas tanah pertanian. Ketimpangan inilah yang harus diubah melalui Koperasi Tani sehingga produksi bertambah dan hasilnya dapat dibagi lebih merata (Mao Tse Tung III: 98).

Petani miskin dan buruh tani yang merupakan 70 persen penduduk pedesaan akan berperan lebih aktif dan akan diperbaiki kehidupannya melalui Reformasi Agraria. Nasib kaum proletariat di perkotaan yang masih mempunyai hubungan erat dengan para petani di daerah pedesaan juga perlu dibantu melalui kerja sama dengan borjuis kecil yang aktif di sektor perdagangan dan industri kecil.

Setelah Perang Dunia II berakhir, Revolusi Tiongkok baru mencapai tahap “*bourgeois democratie*” dan belum “*proletarian socialist*”—walaupun tahap ini merupakan prasyarat untuk mencapai bentuk negara sosialis yang memerangi ketimpangan antarlapisan sosial. Perkembangan ini sesuai dengan apa yang diidamkan Sun Yan Sen pada 1912, sesuai Manifesto Kongres Nasional Kuomintang 1924. Apa yang diimpikan Mao Tse Tung bahwa setelah revolusi politik dan ekonomi selesai, juga berlangsung revolusi budaya. Semua itu untuk mewujudkan bentuk *new democracy* yang berbeda dari pengertian demokrasi di negara Barat (Mao Tse Tung III: 109).

RETROSPEKSI

Sejak kedatangan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) hingga kemerdekaan, Indonesia boleh dikatakan mengalami pemerintahan liberal ekonomi. Pada masa pemerintahan kolonial (1830–1942),

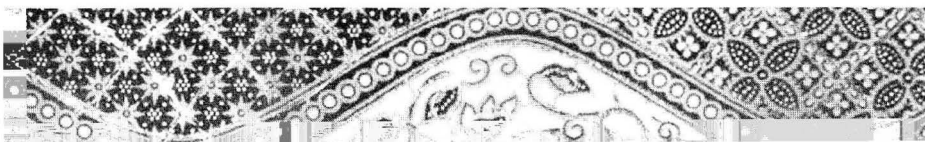


perekonomian bercorak kapitalistik, kemudian tiga tahun pemerintahan fasis Jepang, dan periode politik ekonomi yang masih mantap atau sedang mencari tatanan yang sesuai dengan falsafah dasar Pancasila.

Beberapa cendekiawan Indonesia yang lahir pada awal abad ke-20 seperti Soekarno (1901–70), Mohammad Hatta (1902–80) dan Sutan Sjahrir (1906–66), yang kemudian berperan penting pada masa menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tentu mengamati peristiwa kelahiran beberapa negara besar seperti Uni Soviet, Tiongkok Nasional di bawah Sun Yat Sen, dan meningkatnya peranan Jepang sejak 1930. Perkenalan terhadap berbagai ideologi politik atau *Weltanschauung* dunia, tentu membawa pemahaman mereka bahwa kapitalisme Barat menimbulkan kolonialisme, faktor timbulnya perlawanan komunisme dan sosialisme, yang juga menyulut nasionalisme.

Kata pengantar H. Roeslan Abdulgani dalam kumpulan pidato Bung Karno berjudul *Amanat Penderitaan Rakyat* menjelaskan bahwa dua karangan dalam buku itu, “Indonesia Menggugat” dan “Mentjapai Indonesia Merdeka,” Bung Karno menganalisis secara tajam mengenai penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia dengan menggunakan pendekatan Marxisme. Dari analisis itu timbul teori yang mendasari gerakan perjuangannya yang disebut Marhaenisme. Tampaknya, lahirnya pandangan itu bukan sekadar karena pertemuan Bung Karno dengan seorang petani di Jawa Barat bernama Marhaen. Tiga tahun kemudian, dalam *Mentjapai Indonesia Merdeka* (1933), Bung Karno menegaskan arti Marhaenisme, dan melalui karya ini pula ia menjelaskan arti sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam perjuangan mewujudkan Indonesia Merdeka.

Perhatian Bung Karno di luar bidang keahliannya memang perlu kita tiru dan kembangkan. Bahkan seorang guru besar sejarah berkebangsaan Belanda yang sangat terkenal, Jan Romein, menulis bahwa sebagai seorang insinyur dan arsitek, Bung Karno sangat mendalami bacaan tentang



Marxisme, tetapi pemikirannya jauh dari komunisme. “Zeer belezen in de Marxistische literatuur zij het verre van communistisch,” tulis Romein. Intinya adalah bahwa Indonesia Merdeka harus mampu memperbaiki nasib kaum papa sesuai dengan lima sila dalam Pancasila yang lahir dari pemikiran Bung Karno pada awal Juni 1945. “Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.”

Kembali dari studi di Eropa selama lebih dari satu dasawarsa, Mei 1963, saya teringat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara menunjuk Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup (Kapitsa dan Maletin 2009: 252). Namun, mengejutkan tidak lama setelah itu terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sikap perwira tinggi ABRI terhadap Presiden Soekarno terpecah menjadi kelompok pendukung dan penentang. Singkat kata, masa pemerintahan Soekarno berakhir akibat tragedi peristiwa itu. Jenderal Soeharto tampil sebagai presiden baru yang menyebut pemerintahannya sebagai Orde Baru sejak 1966.

Pada awal Orde Baru, tampak gejala kepemimpinan militer yang menonjol sehingga banyak pihak khawatir akan timbul dominasi militer. Di Eropa pada awal abad ke-20 gejala serupa itu diikuti munculnya gerakan politik yang dikenal sebagai fasisme dan membentuk negara totaliter, seperti Italia di bawah Mussolini, dan Jerman di bawah Hitler. Ciri fasisme yang totaliter adalah mendukung pimpinan negara yang diktatorial dan menolak keberadaan partai politik dalam dewan perwakilan rakyat. Kepemimpinan fasis jelas menolak tatanan demokrasi, sosialisme dan liberalisme, dan karena itu dilawan oleh banyak negara di dunia.

Bila dibandingkan, sifat dan gaya pemerintahan Orde Baru pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan Orde Lama yang digantikannya. Jika pada masa Orde Lama dikenal “Demokrasi Terpimpin” di bawah kendali penuh Soekarno, maka pada masa Orde Baru terjadi dominasi militer di bawah komando Soeharto. Boleh dikata keduanya sama-



sama “tegas” dalam politik pemerintahannya. Perbedaan yang menonjol mungkin terletak dalam politik ekonomi yang selama Orde Baru lebih terpengaruh oleh kapitalisme dan liberalisme. Pertumbuhan *bourgeoisie* Indonesia lebih pesat pada masa Orde Baru yang terlihat pada munculnya puluhan pengusaha besar seperti keluarga Bakrie, Ibnu Sutowo, Soedono Salim, hingga keluarga Soeharto sendiri seperti Mbak Tutut, Bambang Trihatmodjo, Tommy, dan masih banyak lagi (Globe Asia 2008). Sebagian pengusaha besar tersebut sebenarnya telah berkembang sebelum Orde Baru. Artinya struktur politik dan ekonomi liberal sudah lama bertumbuh dan efeknya menyuburkan praktik korupsi. Di negara besar semisal Amerika Serikat, gejala seperti itu sudah diketahui umum paling tidak sejak abad ke-19 (Presser 1951).

Di negara “semuda” Indonesia pun gejala korupsi sudah lama terdengar tetapi pemberitaan melalui media massa lebih meluas setelah Reformasi (1998). Judul-judul berita atau laporan di surat kabar dan majalah yang menyeramkan seperti “Lumbung (Bulog) Penuh Tikus,” “Wis Bobrok,” “Ketika Maling Kuras Kekayaan Negara,” “Dana Non-Budgeter dan Pertamina,” dan lain-lain, menyadarkan publik betapa semrawutnya negeri kita. Bisa ditambahkan bahwa dalam Pemilihan Umum 1999 pun korupsi dana Komisi Pemilihan Umum nyaris melibatkan semua partai peserta Pemilu (*Kompas*, September 2002; lihat juga artikel Sediono M. P. Tjondronegoro, “Dari Kolonialisme sampai Materialisme,” *Suara Pembaruan*, Agustus 2010).

Pluralisme partai politik dewasa ini juga melemahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan ketegasan pemerintah pusat juga terkikis karena kabinet presidensial dilemahkan oleh perwakilan terlalu banyak partai politik dalam DPR ataupun DPRD. Ditambah dengan praktik korupsi di lingkungan parlemen yang tidak kalah dahsyatnya dengan kalangan birokrasi, maka benarlah apa yang pernah disimpulkan oleh Teuku Jacob (2004), guru besar Universitas

Gadjah Mada, bahwa usaha kita membangun demokrasi jauh dari berhasil, malah timbul kleptokrasi. Demokrasi yang kita impikan ternyata hanya *democrazy* seperti yang diplesetkan oleh para aktivis.

Dari sudut pandang dan analisis sosiologi, gejala dan praktik korupsi tersebut bisa dilihat sebagai melemahnya nilai-nilai sosial (*values*) yang mempengaruhi moralitas manusia pada umumnya sehingga perbuatannya pun tidak terkendali lagi oleh adat atau undang-undang serta peraturan. Dari segi agama, perilaku koruptif itu bisa dilihat sebagai ketidaktaatan manusia pelaku korupsi terhadap nilai-nilai suci yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Dalam situasi moral seperti itu, mudah sekali timbul anarki dan lemah hukum dalam masyarakat (Nabiel F. Almusawah 2007).

Untuk menganalisis situasi masyarakat Perancis abad ke-19, sosiolog Emile Durkheim memperkenalkan istilah *anomie*. Istilah itu sendiri sudah dikenal sejak 1591 dan sering dihubungkan dengan bidang teologi abad ke-17 dalam arti ingkar terhadap hukum, lebih khusus *divine law* atau hukum ketuhanan. Durkheim menggunakan istilah itu dalam penelitian klasiknya mengenai bunuh diri (*suicide*) pada 1897. Ahli-ahli sosiologi abad ke-20 seperti C. R. M. Mac Iver mengartikan istilah *anomie* lebih luas.

Situasi *anomie* bukan saja menunjukkan lemahnya penerapan hukum, tetapi warga masyarakat sudah terlepas dari akar-akar moralitasnya sehingga perilaku dan kepentingan pribadi dan kelompok sangat menonjol. Di Indonesia, gejala dan kecenderungan itu terlihat dan dirasakan setelah Reformasi 1998. Untuk melengkapi pemahaman, di sini dikutip definisi *social capital* yang erat terkait pada moralitas bangsa dan yang sudah melemah sampai di tingkat nasional—dan sebagai warga negara yang mengalami perjuangan fisik, hal itu saya rasakan sangat menyedihkan, “*Define social capital broadly as the institution, relationships, attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development.*”





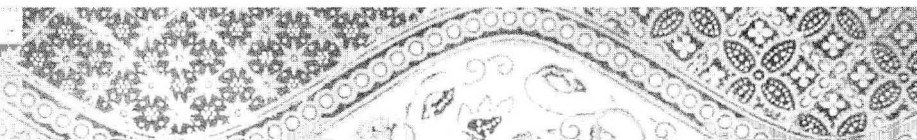
Akibat kebingungan dan kelemahan berperilaku sesuai norma hidup dalam masyarakat mutakhir—dan bukan adat lagi—terjadilah perilaku yang tidak sesuai, dengan fatwa agama sekalipun. Modal sosial yang mencakup sistem “panutan” dalam kebudayaan Indonesia juga membutuhkan waktu untuk berubah menjadi kepemimpinan demokratis yang ditaati oleh jauh lebih banyak warga negara.

Melemahnya pegangan pada norma adat untuk menaati perundang-undangan dan peraturan publik sangat mempermudah timbulnya korupsi, khususnya di kalangan birokrasi negara. Begitu pula prinsip yang mendasari pemikiran dan teori pendekar ekonomi Adam Smith, *survival of the fittest*, atau yang kuat akan bertahan, jelas mempunyai relevansi yang erat dengan perbuatan korupsi. Di Indonesia, gejala tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, terutama pada masa Orde Baru, hanya saja belum banyak dibahas secara terbuka. Media massa kala itu tidak menyebarkan berita-berita tentang korupsi.

Keterbukaan dalam membongkar gejala korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang ditunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan langkah yang sangat patut dihargai. Namun, efektivitas pemberantasannya masih perlu banyak waktu. Hanya tindakan tegas dan hukuman mati akan dapat mengurangi perbuatan korupsi yang paling merugikan masyarakat.

PERUBAHAN PELAPISAN SOSIAL

Sebelum kemerdekaan, orang kaya pribumi hampir tak diketahui. Salah seorang yang terkenal adalah Nitisemito, produsen rokok kretek di Kudus, Jawa Tengah. Lapisan sosial paling yang mencakup pengusaha besar diduduki orang Belanda, disusul oleh usahawan keturunan Tionghoa, sedangkan pengusaha pribumi menempati lapisan terbawah. Keadaan mulai berubah setelah pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan perusahaan swasta



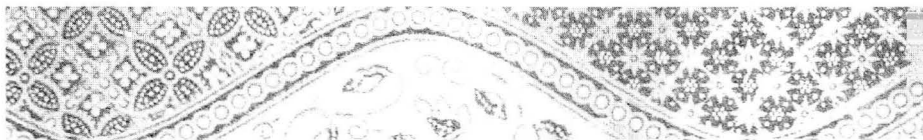
sehingga memunculkan kelas *entrepreneur* atau *bourgeoisie*, besar ataupun kecil.

Namun, perusahaan negara yang sudah dibentuk sebelumnya seperti Pertamina kemudian menjadi Pertamina dinilai kurang efisien (Abeng 2008). Dengan swastanisasi yang lebih deras, modal asing yang ditanam di Indonesia juga semakin besar. Dari sisi angkatan kerja, walaupun terjadi pertumbuhan dari 98,91 juta sampai 108,13 juta pada 2001–07, pengangguran juga meningkat dari 8,10 persen sampai 10,54 persen dalam periode yang sama.

Data lain menunjukkan terjadi pengangguran 8,32 persen dan setengah pengangguran 34,32 persen, walaupun pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen. Angkatan kerja baru terserap 30 persen yang dapat pekerjaan tetap, sedangkan 70 persen yang lain masih bebas (*Bisnis Indonesia*, 23 Mei 2011).

Menurut majalah *Globe Asia* (Edisi Khusus, Juni 2008) dari 150 orang terkaya Indonesia, 14 orang di antaranya memiliki kekayaan antara US\$ 1,05 milyar hingga US\$ 9,2 milyar termasuk Aburizal Bakrie, Budi Hartono (Djarum), Eka Tjipta Widjaya (Sinar Mas), Sudono Salim (Salim Group), Arifin Panigoro (Medco), dan Hashim Djojohadikusumo (Tirtamas) untuk menyebut beberapa nama. Bahkan perusahaan Bakrie bukan hanya terkaya di Indonesia tetapi di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya ketimpangan antara lapisan pemilik modal trilyunan rupiah di satu pihak dan jutaan buruh dan tani yang hidup dari kurang dari US\$ 2,00 per hari per kapita tidak mengherankan bila timbul korupsi dan berbagai bentuk sengketa.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi sangat menarik bagaimana falsafah dasar pemikir politik ekonomi klasik mempengaruhi tumbuhnya kelembagaan dalam masyarakat. Dari sejarah negara-negara besar dapat kita pahami bahwa feodalisme, yakni kekuasaan raja di atas rakyatnya, dikenal di semua benua.



Falsafah yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi Adam Smith *survival of the fittest* mengubah pelapisan sosial, karena mereka yang bermodal dan dapat menguasai perekonomian menggantikan kepemimpinan kaum feodal. Namun, lapisan bermodal yang menguasai perputaran roda ekonomi masih tetap melanjutkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sedangkan menurut falsafah demokrasi hal itu tidak sesuai. Sosialisme yang muncul kemudian berusaha meralat keadaan dengan mengusahakan pemerataan. Jelas ini juga ditentang oleh lapisan yang berkuasa, dan banyak negara berkembang sekarang sedang mengusahakan suatu tatanan dalam masyarakat masing-masing dengan mengetengahkan kesamarataan hak (demokrasi) sehingga terhindarnya ketimpangan ekonomi dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu sering terdengar bahwa masyarakat yang diidamkan itu berbentuk negara sosial demokrat.

REFORMASI DAN MODAL SOSIAL

Mengalami dan memperhatikan kekacauan di masa Reformasi ini timbul pertanyaan apa sebab utamanya. Dari sudut pandang sosiologi dapat diajukan hipotesa bahwa besar kemungkinan karena modal sosial sangat melemah.

Dulu, definisi tersebut berdasarkan penelitian masyarakat kecil di daerah pedesaan. Namun, kini sudah saatnya dihubungkan dengan masyarakat nasional yang jauh lebih besar dan luas. Inilah yang menjadikan negara terhormat, adil dan makmur sebagaimana pernah diimpikan Bung Karno: Negara Sosial Demokrasi.

DAFTAR ACUAN

- Abdullah, Taufik (1995), "Past Performance and Future Directions," dalam N. Schulte Nordholt dan Visser (ed.), *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism* (43–58). Amsterdam: VU University Press.
- Abdullah, Taufik (ed.) (1977), *The Heartbeat of Indonesian Revolution*. Jakarta: Gramedia.
- Almusawa, Nabil F. (2008), *The Islam Way: 25 Solusi untuk Permasalahan Masyarakat Modern*. Bandung: Arkan Publishing.
- Commins, S. dan N. Linscott (1947), *Man and the State: The Political Philosophers*. New York: Random House.
- Dharmawan, Eko P. (2005), *Agama itu Bukan Candu: Tesis-tesis Fierbachi, Karl Marx dan Tan Malaka*. Yogyakarta: Resist Book.
- Durkheim, Emile (1951), *Suicide: A Study in Sociology*. USA dan Canada [tanpa nama kota]: The Free Press.
- Feith, Herbert (1957), *The Indonesia Elections of 1955*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Gide, Charles dan Ch. Rist (1947), *Histoire des doctrines économiques: Des physiocrates à J. Stuart Mill*. Paris, René Sirey.
- Globe Asia (2008), "150 Richest: US\$ 69 Billion Total Wealth." Singapura, RZB Groups (130–31).
- Gould, J. dan W. L. Kolb (ed.) (1964), *A Dictionary of the Social Sciences*. New York: The Free Press.
- Gootaert, Ch. dan Th. van Bas'telaer (ed.) (2002), *Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners*. Washington, D.C.: The World Bank.



- Harrison, Lawrence E. dan Samuel P. Huntington (2000), *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Hindley, Donald (1962), "President Soekarno and the Communists: The Politics of Domestication," *American Political Science Review* [nomor dan bulan penerbitan tidak tercatat].
- de Jong, L. (2002), *The Collapse of Colonial Society: The Dutch in Indonesia During the Second World War*. Leiden: KITLV Press.
- de Kadt, J. (1949), *De Indonesische tragedie: Het treurspel der gemiste kansen*. Amsterdam: Van Oorschot.
- Kahin, George McTurnan (1952), *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Kapista, M. S. dan N. P. Maletin (2009), *Soekarno: Biografi Politik*. Bandung: CV Ultimius.
- Li Fu-Chun (1955), *Report on the First Five-Year Plan for Development of the National Economy of the People's Republic of China in 1953–1957* [nama kota dan penerbit tidak tercatat].
- Mao Tse Tung (1963), *Selected Military Writings of Mao Tse Tung*. Peking: Foreign Language Press.
- Marshall, Alfred (1949), *Principles of Economics*. London: Mac Millan.
- Moeso (1951), *Jalan Baru untuk Republik Indonesia*. Jakarta: Bintang Merah.
- van Mook, H. J. (1949), *Indonesië, Nederland en de wereld*. Amsterdam: De Bezige Bij.
- Poeze, Harry A. (2007), *Verguisd en vergeten: Tan Malaka de linkse beweging en de Indonesische revolutie 1945–1948* (3 volume). Leiden: KITLV Press.
- Presser, J. (1951), *Amerika: Van kolonie tot wereldmacht*. Amsterdam: Elsevier.

- Ricardo, David (1817), *Principles of Political Economy and Taxation* [nama kota dan penerbit tidak tercatat].
- Sjahrir, Soetan (1949), *Out of Exile: Letters by Soetan Sjahrir* (ditulis ulang dan disunting oleh Maria Duchateau-Sjahrir). New York.
- Tjondronegoro, S. M. P. (1993), "Poverty Alleviation: Institutional and Administrative Problems," dalam J. P. Dirkse, F. Husken dan M. Rutten (ed.), *Indonesia's Experiences under the New Order* (159–83). Leiden: KITLV Press.
- (1995), "Indonesia's Social Science Agenda: A Personal View," dalam N. Schulte Northold dan L. Visser (ed.), *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism* (59–77). Amsterdam: VU University Press.
- (2000), "Melintasi Budaya dari Kolonialisme, Nasionalisme sampai Materialisme," *Suara Pembaruan* [tanggal penerbitan tidak tercatat].
- Wertheim, W. F (1946), *Nederland op de tweesprong: Tragedie van den aan traditie gebonden mens*. Amsterdam: De Nieuwe Stern.
- (1959), *Indonesia Society in Transition: A Study of Social Change*. The Hague dan Bandung: W. van Hoeve.
- Yamin, Muh. (1959), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid II [tanpa nama kota dan penerbit].



Nasionalisme dan Kearifan Sejarah

TAUFIK ABDULLAH

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Tidak seperti Demokrasi Terpimpin, yang dengan begitu saja digantikan oleh sebuah rezim baru setelah legitimasi Presiden Sukarno ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 1967, kejatuhan Orde Baru pada 1998 ternyata tidak memberi kesempatan bagi lahirnya rezim baru. Kejatuhan Orde Baru malah menimbulkan suasana krisis yang bersifat multidimensional. Ketika sistem kekuasaan yang serba-dominan telah tersingkir maka kesempatan pun terbuka lebar bagi terjadinya perbenturan wacana. Pada waktu itulah segala kesatuan pendapat dan persamaan idealisme yang sejak lama dipelihara Orde Baru—bahkan juga sesuatu yang senantiasa diusahakan Demokrasi Terpimpin pada masa kekuasaannya—mencair begitu saja. Seperti dulu juga, ketika “demokrasi parlementer” (1950–59) masih merupakan tatanan kenegaraan, perbenturan berbagai corak idealisme pun terjadi. Hanya saja kini perbenturan itu terwujud ketika tradisi otoritarianisme telah tertanam dalam struktur kesadaran. Idealisme ke arah terwujudnya demokrasi yang sehat dikumandangkan tetapi suara dan hasrat ini telah ditempa oleh sikap otoriter. Maka yang tampil ke permukaan hanyalah suasana euforia yang tampak seperti telah merelatifkan kesopanan politik dan bahkan juga keharusan konstitusional.

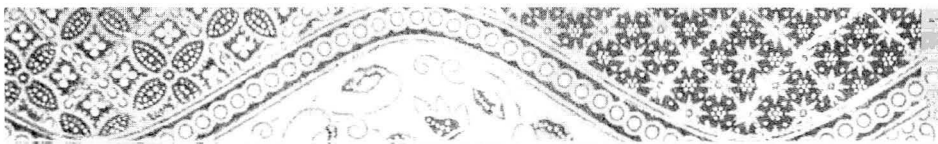
SISTEM WACANA DAN NASIONALISME

Demonstrasi massa, dimotori terutama oleh mahasiswa, yang diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan gaya, adalah pantulan situasi ketika afinitas yang aneh dari hasrat demokrasi yang sekian lama terpendam, dengan tradisi otoriter yang telah menjadi bagian dari struktur kesadaran.

Gejala monopoli kebenaran dan keharusan politik tampil seperti gejala yang umum dan lumrah saja. Dalam suasana euforia politik seperti ini sekian banyak partai, yang ingin memperjuangkan tempat yang diharapkan memadai dalam pembagian kekuasaan, bertumbuhan. Pada waktu ini pula berbagai corak lembaga swadaya masyarakat menampilkan diri sebagai kekuatan *civil society* yang menempatkan diri sebagai perantara yang autentik tanpa cela antara negara dengan masyarakat.

Bahkan ketika ini pula bermacam corak konflik horisontal meletus di beberapa daerah. Dalam situasi yang menjadi pentas dari berbagai corak keanekaragaman konflik ini tampak pula betapa perbedaan agama, etnisitas, bahkan juga tingkat sosial-ekonomis dan lingkungan tempat tinggal bisa saja menjadi patokan untuk menentukan mana lawan dan mana pula kawan. Konflik horisontal ini bukan saja memperlihatkan betapa masing-masing pihak ingin mendapatkan kemenangan dalam berhadapan dengan lawan yang berwajah banyak, tetapi sesungguhnya juga merupakan suatu bentuk wacana tentang betapa arti kehadiran negara telah direlatifkan. Negara tetap dirasakan sebagai kekuatan dan sistem kekuasaan yang riil dan sah tetapi makna kehadirannya dijadikan sebagai suatu eksistensi yang relatif saja—ada tetapi tak begitu relevan.

Maka mestikah diherankan jika di tengah-tengah kegalauan sosial-politik seperti ini sebuah pertanyaan sederhana akhirnya terlontar. Ke manakah perginya perasaan kebangsaan yang mempersatukan yang biasa disebut nasionalisme itu? Apakah cita-cita dan kesadaran politik yang telah mengikat berbagai kesatuan sosial dan budaya serta keragaman status sosial dan ekonomi dalam hasrat untuk mendirikan dan mempertahankan suatu komunitas politik baru yang disebut negara-bangsa kini telah mulai memasuki masa yang pudar? Mengapakah nasionalisme, yang telah berhasil membentuk tekad bagi terwujudnya suatu komunitas baru yang integratif, yang telah melebihi ikatan primordial dan yang merangkai segala macam perbedaan dalam sebuah ikatan sosial-politik yang disebut bangsa, tampak seperti sedang melonggar?



Atau, apakah yang disebut sebagai "krisis nasionalisme" ini hanyalah sekedar contoh dari peralihan sistem wacana ketika pergantian landasan kekuasaan politik telah terjadi? Bukankah hal ini dengan keras dirasakan pada saat rezim lama yang serba-dominan secara formal telah berakhir? Siapa tahu, mungkin juga inilah masalahnya. Bukankah sistem *discourse* yang dominan kerap kali memantulkan sifat dan corak sistem kekuasaan yang dominan? Jangan-jangan suasana yang dirasakan sebagai pantulan dari krisis nasionalisme itu sesungguhnya hanyalah hal yang biasa saja. Sebab bisa jadi kehadiran "nasionalisme" hanya terasakan sebagai realitas yang fungsional dalam kehidupan sosial-politik ketika ancaman dari luar sedang dihadapi dan mungkin juga pada saat kekuasaan yang dominan dirasakan sebagai teramat memaksakan kehadirannya. Jika demikian, nasionalisme yang selama ini praktis dikuasai negara—bahkan sejak zaman Demokrasi Terpimpin—berarti juga harus mengalami ujian keabsahannya.

Dalam suasana ketika negara menampilkan diri sebagai "sang maha- penentu," nasionalisme biasa sekali diperlakukan sebagai landasan ideologis atas legitimasi kekuasaan. Ketika visi tentang diri dan komunitas serta program kekinian dan cita-cita masa depan yang tumbuh dan dipupuk dari kesadaran sejarah dan visi masa depan dikuasai oleh negara maka nasionalisme pun menjadi alat kekuasaan. Ketika nasionalisme resmi ini semakin kokoh, masyarakat-bangsa pun semakin kehilangan hak atas wacana yang semula menjadi landasan kelahiran bangsa. Di bawah hegemoni makna yang dipelihara negara yang serakah, yang ingin menguasai semua, maka nasionalisme, yang semula bertolak dari idealisme tentang kehadiran suatu corak ikatan kehidupan komunitas yang baru dan menyegarkan, kini bisa menjadi ideologi-penyangga bagi sistem kekuasaan. Jika memang demikian halnya maka bisa saja pengingkaran atas keabsahan perilaku kekuasaan sekaligus diartikan sebagai penafian atas *relevancy* nasionalisme.

Dapatlah dibayangkan ketika Orde Baru jatuh, keabsahan dari berbagai hal yang pernah berada di bawah dominasinya mengalami krisis

pula. Dalam suasana ini nasionalisme keindonesiaan pun seakan-akan tenggelam begitu saja dalam lautan lupa. Kini yang teringat hanyalah keharusan adanya supremasi hukum dan berlanjutnya proses ke arah berlangsungnya demokratisasi yang sehat dan kreatif. Sedangkan yang dirasakan sebagian masyarakat-bangsa ialah keresahan akan kemiskinan yang seperti enggan untuk membaik dan pendidikan bagi anak-anak dan kesehatan bagi keluarga yang terasa semakin jauh dari jangkauan.

KRISIS NASIONALISME ATAU GAIRAH KEBEBASAN

Jika demikian, apakah yang dianggap sebagai kemerosotan nasionalisme itu hanyalah pembebasan dari dominasi wacana dari dua rezim otoriter—Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru—yang datang bergantian. Barangkali kemerosotan itu terasa karena semakin kuatnya hasrat reformasi untuk mendapatkan kembali cita-cita bangsa yang murni, sebelum diwarnai oleh panggilan sistem kekuasaan yang serakah. Masalahnya ialah di balik keluhuran hasrat dan cita-cita yang terkandung dalam dirinya, bahkan juga yang menjadi pendorong kelahirannya, nasionalisme ternyata bisa juga menjadi landasan yang strategis bagi penguasa untuk mengekang kebebasan masyarakat. Jika unsur integratif yang terlekat pada nasionalisme bisa dikuasai, meskipun dengan mengorbankan keharusan demokratis yang merupakan bagian esensial dari kelahiran nasionalisme itu sendiri, negara sesungguhnya telah mempunyai landasan yang kuat untuk mempertahankan dominasinya. Maka, timbul pertanyaan, apakah yang disebut sebagai krisis nasionalisme itu sejatinya merupakan pantulan menaikinya hasrat kebebasan setelah kekuasaan yang serba-dominan dikalahkan. Namun, bagaimanakah realitas empirik yang sesungguhnya?

Tanpa harus melibatkan diri dalam konser kritik yang kini sangat gencar terhadap pemerintah, sebagai lembaga eksekutif, dan bahkan juga tanpa harus mendaftarkan berbagai corak kegalauan fungsi dan keutuhan



moral yang menyebar ke hampir semua lembaga kenegaraan (termasuk lembaga legislatif dan yudikatif), berbagai kenyataan empirik bisa berbicara sendiri. Gerakan reformasi ternyata juga tampil sebagai pembuka pintu bagi hampir semua jenis konflik. Sumber-sumber konflik yang selama ini ditutupi dengan keras oleh sistem kekuasaan yang sentralistik, kini seakan-akan mendapat saluran untuk tampil ke permukaan. Tiba-tiba bangsa juga dikagetkan oleh fakta sederhana bahwa perbedaan status ekonomi, agama, dan etnis, bahkan desa dan kampung yang berlainan sekalipun, bisa menjadi sumber atau alasan dari meletusnya konflik terbuka. Bahkan proses demokratisasi yang sekian lama terhenti—sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959—dilanjutkan kembali dalam desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah tampak memberi peluang bagi tersalurnya hasrat nasionalisme-etnis dan munculnya kecenderungan primordialisme. Terbebas dari sistem kekuasaan, yang bukan saja sentralistik tetapi juga berhasil menjadikan dirinya sebagai pemegang hegemoni wacana, maka berbagai kemungkinan pun tampil begitu saja.

Betapa ironis ketika proses demokratisasi telah dihidupkan kembali, otonomi daerah dan—apalagi—pemekaran wilayah ternyata bukan sekadar membuka kebebasan relatif bagi daerah untuk mengatur diri sendiri tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah pusat. Otonomi daerah tidak pula berarti semakin memungkinkan kedekatan negara dengan rakyat. Ternyata otonomi daerah dan pemekaran wilayah tidak jarang menjadi saluran bagi konflik kepentingan para elite lokal. Betapa paradoks juga terasa ketika otonomi daerah, yang bertolak dari hasrat untuk mencapai keutuhan bangsa, ada kalanya tampil sebagai pemancing munculnya segala corak faktor pembeda yang disintegratif.

Berbagai peristiwa yang melanda Tanah Air kita memperlihatkan bahwa keberhasilan nasionalisme, yang ingin melebur batas-batas sosial-kultural ke dalam suatu komunitas baru, yang disebut bangsa, dan menjadikan semangat patriotisme sebagai landasan melawan kolonialisme, kini harus

menghadapi ujian yang berat dan beragam pula. Ujian dan tantangan itu bukan saja berasal dari keharusan terlaksananya agenda yang terlekat erat pada cita-cita, tetapi juga dari corak komunitas lain yang melampaui batas-batas negara dan bangsa. Berbagai corak saluran globalisme—sebagai akibat dari proses globalisasi yang semakin mempererat interdependensi ekonomi dan moneter, hubungan informasi dan komunikasi antarnegara, bahkan juga aliansi politik dan ekonomi dari berbagai corak kesatuan regional dan politik—terasa juga seperti telah merelatifkan batas-batas negara dan bangsa.

Selain itu, bagaimana pula akan bisa dilupakan begitu saja dorongan universalisme agama, yang sejak semula telah mempunyai hubungan yang dilematis dengan nasionalisme. Ada universalisme yang tampil sebagai pendukung, ketika kekuatan durjana kolonialisme dan imperialisme terasa mengancam, tetapi ada pula saatnya ketika kecenderungan ini menampilkan diri sebagai penantang dari keabsahan nasionalisme, yang membuat batas-batas antara “kita” dan “mereka.” Maka, mestikah diherankan pula kalau ada golongan yang mencita-citakan terbentuknya negara yang berdasarkan keharusan agama yang bersifat eksklusif dan bahkan ada pula yang berusaha mendirikan sebuah negara-yang-melampaui-ikatan-bangsa dan menjadikan agama, bukannya kesadaran nasionalisme, sebagai landasan bagi perwujudan negara. Maka, hasrat ideologis yang diperjuangkan ini dengan begitu saja mengingkari empat pilar konsensus konstitusional yang ingin mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat bhineka tunggal ika. Jadi, apakah nasionalisme, yang dalam Pancasila disederhanakan dalam ungkapan “persatuan Indonesia,” masih memiliki harapan untuk mempertahankan eksistensinya dan relevansi kehadirannya?

Segala kesulitan dan kegelisahan yang kini dirasakan anak bangsa adalah batu ujian dalam hidup bernegara dan berbangsa. Kesemuanya adalah bagian dari dinamika kehidupan kebangsaan yang sekali-sekali



pasti dialami dalam dinamika pergolakan sejarah. Berbagai kekecewaan yang kini terasa seperti sedang melanda kehidupan bangsa adalah harga yang harus dibayar ketika dorongan untuk mendapatkan harkat kehidupan yang lebih layak tidak lagi tertahankan. Pada saat negara telah memutuskan untuk melepaskan hegemoninya terhadap dunia makna, sebagaimana secara simbolik dilakukan dengan penghapusan indoktrinasi, ketika itu pula dimulai pencarian landasan baru yang sesuai dengan cita-cita yang tercetus dan diperjuangkan saat eksistensi negara baru dilahirkan. Ketika kebebasan itu telah didapatkan maka pada waktu itu pulalah renungan untuk mendapatkan pemahaman baru terhadap konsensus yang pernah dipatrikan tidak terhindarkan. Oleh karena itu mestikah diherankan kalau kini—sayup-sayup mungkin masih terasa—pencarian landasan baru nasionalisme Indonesia mulai juga dilakukan.

NASIONALISME DAN TANTANGAN SEJARAH

Nasionalisme bukanlah sekadar sebuah ideologi, tetapi suatu *"state of mind,"* kata Hans Kohn; atau *"une ame, un princip spirituel,"* kata Ernest Renan, yang lahir dari hasrat pembebasan dari segala corak tekanan dan keterpencilan. Nasionalisme juga merupakan ideologisasi keinginan untuk menggapai harkat kemanusiaan bagi kehidupan kebangsaan. Ada kalanya nasionalisme tampil sebagai landasan idiil dalam usaha mendobrak segala hambatan yang menghalangi terwujudnya cita-cita yang terlekat dalam dirinya, yaitu terbentuknya suatu komunitas yang mengatasi ikatan etnis dan agama, bahkan juga geografis. Dengan demikian, nasionalisme dipakai sebagai salah satu patokan etika, sebagai faktor penentu ketika pilihan dari situasi yang dilematis harus dibuat. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh seorang prajurit ketika panggilan ke medan perang untuk membela Tanah Air datang pada saat sang istri tercinta akan melahirkan? Maka biarlah kesadaran etika menyelesaikan situasi yang dilematis ini. Tetapi lebih sering nasionalisme berperan sebagai sumber motivasi dalam

perumusan sistem perilaku atau sebagai etos yang memberikan landasan emosional dalam pola perilaku. Dalam suasana ini nasionalisme, yang telah berperan sebagai etos, menjadi landasan kesadaran yang mengajarkan bahwa sesuatu yang dilakukan dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan bukan saja secara rasional masuk akal, tetapi juga secara emosional menyenangkan.

Maka, dapat dipahami pula bila landasan emosional dari sesuatu yang menyenangkan dan rasional itu ada saatnya mengalami krisis. Ketika berbagai alternatif bermunculan dan pada saat sekian banyak kekecewaan atas kegagalan untuk mendapatkan sesuatu yang penting dan menyenangkan itu dirasakan maka krisis nasionalisme, sebagai landasan etos, bisa juga datang melanda. Seperti halnya dengan landasan etos lainnya, bahkan juga yang bertolak dari keyakinan religius sekalipun, sistem perilaku yang terpancar dari nasionalisme selalu ditempa oleh berbagai corak ujian dan biasa pula menghadapi tantangan dalam perjalanan waktu.

Jika landasan nasionalisme itu dirasakan sebagai pengingkaran terhadap harkat kemanusiaan dari komunitas yang diciptakannya maka daya tahannya pun akan terkuras begitu saja. Kalau hal ini terjadi maka komunitas yang dibayangkan (*imagined community*, kata Ben Anderson) yang disebut bangsa itu pun akhirnya hanya tinggal dalam catatan sejarah. Kemungkinan ini bertambah besar apabila komunitas itu gagal untuk "berdamai dengan sejarah"—ingatan kolektif akan masa lalu yang dipenuhi berbagai pengalaman yang pahit dan penuh dendam. Tetapi sebaliknya, jika ingatan akan keberhasilan lama yang dilakukan bersama dan kenangan kepada pengorbanan yang pernah diberikan bagi kepentingan bersama dan untuk keutuhan komunitas yang tercipta secara imajinatif itu bisa dibangkitkan dan dipupuk kembali, maka ketika itu pula "krisis" dari krisis nasionalisme sangat mungkin bisa terjadi. Maka apa yang dirasakan krisis nasionalisme itupun mulai menjalani masa akhirnya. Ketika masa akhir itu telah dicapai, ujian pun selesai— mungkin untuk sementara—



dan keutuhan bangsa pun semakin terjaga dan masa depan pun dihadapi dengan penuh optimisme.

Argumen ini tentu saja bisa terasa mempermudah masalah. Bukankah tiada satu bangsa pun—apalagi yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan penuh pengorbanan—yang bisa terlepas dari penetrasi globalisasi, yang merelatif-kan arti dan bahkan fungsi dari segala corak batas dan perbatasan. Dengan kata lain, kini tampaklah dengan jelas bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan secara internal, seakan-akan hanya kita saja yang merupakan realitas yang utuh. Secara teoretis bisa pula diperkirakan bahwa penetrasi kekuatan dan pengaruh dunia luar pun mempunyai kemungkinan pula untuk menggoyahkan kemantapan internal yang ingin dicapai. Dapatlah dibayangkan bahwa kehadiran komunitas baru yang diidam-idamkan juga dipengaruhi oleh realitas dunia yang tanpa batas. Dengan kata lain globalisasi, yang senantiasa ditopang oleh kosmopolitanisme, mempunyai kemungkinan pula untuk menggerogoti sendi-sendi nasionalisme.

Meski penetrasi pengaruh globalisasi dalam kesadaran kebangsaan merupakan kemungkinan yang riil, tetapi perlu juga disadari bahwa globalisasi sesungguhnya adalah proses yang bertolak dari kesadaran dan realitas kekinian serta harapan akan masa depan yang hanya bisa dibayangkan. Tidak seperti bangsa, yang bertolak dari pengalaman dan ingatan kesejarahan yang riil dan bahkan biasa pula ditempa oleh imajinasi yang romantik, globalisasi hanyalah gambaran kekinian tanpa dukungan ingatan kesejarahan. Globalisasi, dengan kata lain, *memoryless*, tanpa ingatan. Jika dibandingkan dengan bangsa maka boleh pula dikatakan bahwa globalisasi juga hampa dari romantisisme, suasana perasaan yang tidak pernah absen dalam proses pembentukan dan pertumbuhan bangsa. Jadi, akhirnya kita pun harus menyadari bahwa kekuatan dan daya tahan internal lebih menentukan.

Eksistensi bangsa, yang didukung oleh cita-cita nasionalisme, bukan

saja bertolak dari visi kesejarahan, tetapi juga dari hasil pergumulan intelektual untuk memahami pesan historis dari ingatan kolektif dan cacatan kesejarahan berbagai kesatuan etnis anak-bangsa. Primordialisme atau bahkan etno-nasionalisme mungkin bisa memecah-mecah komunitas bangsa, yang terkait dalam berbagai corak ingatan kolektif dan cacatan kesejarahan itu. Tetapi jika lembaran sejarah—sebagai cacatan yang mencoba merangkul semua aspek yang relevan dalam kehidupan sosial—dibuka lagi, maka tampaklah bahwa komunitas bangsa ini justru lahir sebagai reaksi terhadap kelemahan struktural dan kultural yang terlekat dalam diri bangsa-lama.

Jika sejarah pergerakan kebangsaan dengan jelas bisa memperlihatkan berbagai corak perlawanan terhadap kolonialisme dan berkisah tentang tumbuhnya hasrat untuk membentuk komunitas baru yang disebut bangsa, maka sejarah hubungan antar-kesatuan politik tradisional dan ikatan-ikatan etnis dengan jelas pula memperlihatkan tentang saling keterkaitan antara berbagai kesatuan dan ikatan itu. Ambil saja contoh pada beberapa kenyataan sosial-kultural yang sampai kini masih menjadi bagian dari dinamika kehidupan bangsa. Bagaimanakah harus diterangkan, misalnya, fakta historis yang sederhana tentang penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, pemakaian ”bahasa Melayu” dalam naskah-naskah yang ditulis oleh berbagai kesatuan etnis yang tidak berbahasa Melayu, penerjemahan naskah Melayu ke bahasa Jawa dan sebaliknya, dan sebagainya, jika bukan karena keterkaitan sejarah yang telah berjalan sekian abad. Tetapi bagaimanakah kisah-sejarah tentang saling keterkaitan itu sehingga pada waktunya melahirkan sebuah bangsa-baru, yang saling berbeda tetapi merasa satu? Seketika hal ini disadari, siapakah yang tidak akan menekurkan sambil menggeleng-gelengkan kepala saat mengetahui bahwa pelajaran sejarah hanya menempati sebuah sudut terpencil dalam kurikulum sekolah.

Sayup-sayup terdengar protes bahwa sejarah masih masuk dalam pelajaran, tetapi pertanyaannya apakah sejarah ataukah kronikel, yang



memberikan daftar peristiwa, yang diberikan kepada anak-didik. Memang benar "kronikel" yang berisikan "apa, bila, di mana, dan siapa" adalah bagian esensial dari sejarah, tetapi jawab dari keempat pertanyaan itu belumlah bernama "sejarah." Sebab, sebagai uraian tentang dinamika masa lalu, sejarah menuntut pertanggungjawaban moral dan akademis dalam menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa." Bahkan lebih daripada itu, sejarah yang didukung oleh ketelitian akademis dan kejujuran moral serta sensitivitas kultural, memberikan perenungan intelektual—betapapun mungkin sederhana—tentang "penting" dan "relevan"-nya dinamika dan karakter dari peristiwa sejarah yang dibicarakan.

Lagi-lagi suara protes terdengar. Bukankah uraian panjang lebar diberikan ketika kisah tentang hari-hari besar yang dirayakan sedang dibicarakan? Benar juga, tetapi "hari besar" adalah hasil pilihan yang disengaja untuk suatu keperluan tertentu—entah politik atau apa saja yang dianggap penting bagi keutuhan sosial. "Hari besar" adalah peristiwa sejarah yang telah dijadikan "monumen"—dibiarkan di sana untuk senantiasa dikenang sambil merenungkan pesan kekinian yang bisa ditarik dari kejadian masa lalu itu. Hanya saja kehadiran "monumen" tidak jarang ditentukan oleh terdapatnya afinitas antara peristiwa sejarah dengan kepentingan kekuasaan. Jadi bisa dipahami bila peristiwa sejarah yang dijadikan "monumen" itu merupakan bagian dari dinamika *ideological contestation*. Dengan kata lain faktor kekuasaan ikut bermain. Hanya saja peristiwa sejarah yang dipakai sebagai alat peneguh legitimasi kekuasaan mengalami krisis kepercayaan ketika kekuasaan itu mengalami krisis pula. Apalagi bila "monumen" yang menyimpan dendam dalam perbendaharaannya akan semakin melarutkan bangsa dalam krisis.

Uraian kesejarahan semestinya dapat dijadikan sebagai penyimpan ingatan kolektif tentang pengorbanan bersama yang autentik. Dengan pemahaman tentang keterikatan kehidupan dalam lintasan sejarah bukan saja akan memungkinkan kita mengetahui dinamika kehidupan bangsa

dalam peralihan waktu tetapi juga kearifan sejarah yang inspiratif. Bukankah tanpa pemahaman sejarah yang kreatif nasionalisme tidak akan mungkin bisa dilahirkan ?

Begitulah, di samping hal-hal yang bersifat keharusan struktural—seperti kemakmuran relatif masyarakat bangsa, kesempatan mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya—nasionalisme akan bisa bertahan jika ditopang oleh perluasan pengetahuan dan pemahaman sejarah di kalangan anak-bangsa. Dalam pertarungan kultural dan persaingan ekonomi yang semakin gencar, nasionalisme Indonesia Raya akan lebih mungkin bisa bertahan dan bahkan semakin kuat jika segala dendam yang sempat bersemi dalam ingatan mengalami transformasi—dari dendam menjadi pelajaran ketika mengayuh ke masa depan yang lebih cerah.



Islam Politik Radikal di Indonesia

Ideologi dan Aksi

AZYUMARDI AZRA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

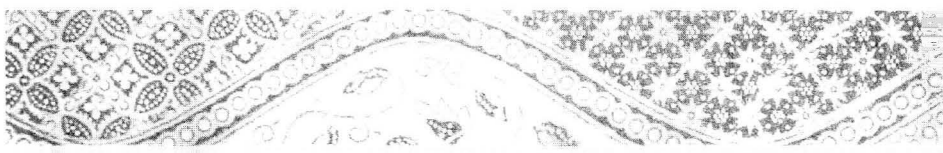
P*olitical Islam* dan *Cultural Islam* merupakan dua istilah populer yang berkembang di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, *political Islam* menjadi *Islam politik* yang umumnya diperhadapkan dengan *cultural Islam* atau *Islam kultural*. Penggunaan kedua istilah itu menunjukkan adanya dua jenis Islam, yaitu Islam politik dan Islam kultural. Yang dimaksud dengan Islam politik adalah Islam yang memiliki orientasi yang kuat kepada politik dan kekuasaan; sebaliknya Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dalam kehidupan Islami melalui jalur nonpolitik seperti dakwah Islam secara damai atau melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Istilah *Islam Politik* berkembang ketika Snouck Hurgronje menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda khususnya pada perempatan terakhir abad ke-19. Ia membagi Islam politik dan Islam ibadah atau Islam ritual. Bagi pemerintah Belanda, keberadaan Islam politik harus dibatasi karena Islam semacam ini memiliki tujuan mengakhiri penjajahan Belanda dan menggantinya dengan politik pan-Islam, semacam kekhilafahan. Oleh karena itu, menurut Snouck Hurgronje, perkembangan Islam politik harus ditekan sebab dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Sedangkan Islam ibadah atau Islam ritual—yang kini Islam kultural—sangat berbeda dengan Islam politik. Menurut Snouck Hurgronje, pemerintah justru harus mampu mengakomodasi dan memfasilitasi Islam ritual—dalam hal ini Islam kultural—atau membiarkannya berkembang sendiri.

Berkaitan dengan isu Islam politik di Indonesia, politik Islam dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, Islam politik yang direpresentasikan partai-partai Islam yang terlibat dalam sistem dan proses politik yang sah. Mereka berusaha mencapai agenda politik tertentu seperti penerapan syariah Islam dan pembentukan negara Islam. Dalam sejarah Indonesia, Islam politik ini dipresentasikan Masyumi pada 1950-an, Nahdlatul Ulama (NU), dan sejumlah partai Islam *gurem*. Pada masa pemerintahan Soeharto, Islam politik diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan pada masa sesudahnya direpresentasikan sejumlah partai politik Islam baru seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan lain-lain.

Kedua, Islam politik yang ditampilkan beberapa kelompok atau organisasi Muslim yang memiliki agenda politik yang hampir sama dengan kelompok pertama. Hanya saja, kelompok atau organisasi ini bukan merupakan partai politik karena mereka tidak mengakui keabsahan sistem dan proses politik yang ada. Mereka juga tidak mempercayai partai politik Islam maupun organisasi sosial keagamaan Islam kultural yang merupakan *mainstream* Islam di Indonesia. Bagi mereka, partai politik dan organisasi Islam arus utama yang moderat terlalu banyak mengakomodasi dan berkompromi dengan apa yang mereka anggap sebagai sistem dan proses politik yang tidak Islami.

Islam politik kelompok kedua ini—yang biasa disebut sebagai ‘Islam politik radikal’—berkembang di Timur Tengah, Asia Tenggara dan negara-negara Muslim lain di dunia. Di Indonesia, pada masa pasca-kemerdekaan hingga 1960-an, sebagian besar Islam politik radikal direpresentasikan oleh beberapa kelompok, misalnya Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NI). Kelompok ini independen dari organisasi Muslim *mainstream* di Indonesia. Mereka melakukan pemberontakan dalam usaha mendirikan Negara Islam Indonesia dengan cara menumbangkan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.



Islam politik semacam ini juga muncul pada masa pemerintahan Soeharto. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari sisa-sisa kelompok pemberontak DI/NII yang telah dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Beberapa yang lain merupakan kelompok relatif lebih baru yang terinspirasi perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, atau di beberapa negara Muslim khususnya yang melawan kebijakan politik Barat. Pembentukan kelompok Islam politik kedua ini diilhami oleh kesuksesan revolusi di Iran pada 1979 di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Peristiwa sejarah sangat penting ini menjadi inspirasi terbentuknya kelompok Islam politik kedua tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Rezim Soeharto memberikan kepada mereka label ‘kelompok subversif’ yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 dari kekuasaan pemerintahan selama 32 tahun membebaskan kelompok kedua kategori Islam politik. Euforia demokrasi dan pencabutan Undang-undang Anti-Subversi oleh Presiden B. J. Habibie—yang menggantikan Soeharto—memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kelompok ini untuk mengekspresikan wacana dan gerakan ekstrem dan radikal. Kini, mereka bebas melakukan berbagai aktivitas di ruang publik. Kelompok ini terkadang main hakim sendiri, melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok Islam lain yang mereka anggap menyimpang. Dalam banyak kasus mereka sangat leluasa karena kurangnya penegakan hukum oleh polisi—yang juga tengah menghadapi masalah baik kredibilitas dan bahkan semacam demoralisasi setelah berpisah dari Tentara Nasional Indonesia di dalam ABRI.

Beberapa kelompok Islam politik jenis kedua yang pernah sangat berpengaruh, antara lain, Lasykar Jihad (LJ) yang didirikan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wa al-jama’ah (FKASWJ) di bawah pimpinan Ja’far Umar Thalib; Front Pembela Islam (FPI) dipimpin Habib Riziq

Shihab; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Abu Bakar Baasyir; Jamaa'at Ikhwanul Muslimin Indonesia (JAMI) di bawah pimpinan Habib Huseinal-Habsyi; dan Hizbut Tharir Indonesia (HTI) (Bamualim, dkk. 2001; Azra 2003a; Fananie, dkk. 2002; Jamhari dan Jahroni, 2004). Sangat penting dikemukakan, beberapa kelompok tersebut kemudian dibubarkan pemimpinnya sendiri—seperti Lasykar Jihad—atau menghilang, atau meredam aktivitasnya setelah terjadi penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku peledakan bom Bali dan beberapa bom lainnya di Indonesia sejak akhir 2002.

Sangatlah jelas, kelompok Islam politik radikal bersifat merupakan independen dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan organisasi Islam *mainstream* seperti Muhammadiyah dan NU. Mereka juga tidak berafiliasi dengan partai politik Islam, seperti PPP, PBB, dan PKS. Hal itu mengindikasikan, kelompok Islam politik tidak mempercayai organisasi Muslim baik organisasi sosial keagamaan maupun organisasi politik. Hal ini karena dalam pandangan kelompok ini, seperti disinggung sebelumnya, organisasi Islam arus utama terlalu akomodatif dan kompromistis dalam sikap politik dan agama mereka terhadap realitas politik dan agama di Indonesia. Sebaliknya, kelompok kedua Islam politik cenderung tidak menunjukkan sikap akomodasi dan kompromi, dan karena itulah mereka terlihat radikal.

Eksistensi kelompok Islam politik radikal ini juga mendapat dukungan dari sebagian kelompok militer Indonesia (TNI), khususnya pada setelah kejatuhan Soeharto. Situasi politik tidak menentu di masa Presiden B. J. Habibie yang legitimasinya dipersoalkan sementara kalangan membuat munculnya kalangan Muslim yang ingin membelanya mati-matian. Mereka ini kemudian dikenal sebagai 'Pam Swakarsa' yang memusatkan diri mereka di Masjid Istiqlal Jakarta. Ada rumor yang menyebutkan, kelompok Pam Swakarsa yang menunjukkan indikasi radikalisme mendapat dukungan secara diam-diam dari kalangan militer Indonesia.



Kelompok politik Islam radikal dilihat dari asal muasal pertumbuhannya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kelompok radikal yang pada dasarnya tumbuh dan berkembang di Indonesia; di antaranya Lasykar jihad—yang sudah membubarkan diri; FPI, dan beberapa kelompok lain yang lebih kecil. Kedua, kelompok yang bersumber dari Timur Tengah atau berorientasi kepada bermacam organisasi Timur Tengah, seperti JAMI yang berasal dari al-Ikhwan a-Muslimin di Mesir, dan Hizbut Tahrir, yang pada awalnya didirikan Syaikh Taqi al-Din Nabhani di Jordan pada 1950-an.

Semua kelompok Islam politik radikal ini memiliki orientasi ideologis dan praksis yang berkembang di antara gerakan-gerakan ‘Islamis’ (*Islamiyyun*) di Timur Tengah yang sangat mereka percayai sebagai dunia Islam yang sejati. Dalam pandangan keagamaan, mereka menganut ideologi salafi radikal, yaitu mewujudkan Islam yang ‘murni’ seperti dipraktikkan kaum Salam—para sahabat Nabi dan *thabi’in*. Dari segi pandangan politik, mereka menganut ideologi khilafatisme yang di antara tujuan terpentingnya adalah pembentukan entitas politik khilafah universal bagi seluruh Muslim di dunia. Selanjutnya, dengan adanya khilafah universal ini adalah penegakan syari’ah secara menyeluruh (bdk. Jamhari dan Jahroni 2004).

Meskipun kelompok Islam politik radikal ini memiliki tujuan mendirikan *khilafah* atau *dawlah Islamiyah* yang bersifat lokal dan regional, mereka sangat jauh berbeda dengan gerakan DI/NII di Indonesia. Kelompok radikal saat ini cenderung independen dari dan tidak terkait banyak dengan kelompok radikal terdahulu; atau mereka telah menjadi independen dari gerakan DI/NII (Ausop 2003).

Melihat gejala radikalisme di tengah masyarakat Muslim Indonesia khususnya, jelas fenomena ini memiliki sejarah panjang yang kompleks. Sejarah radikalisme di dalam masyarakat Muslim menunjukkan banyak faktor yang bertanggung jawab atas kemunculannya. Ada kecenderungan sangat kuat bahwa motivasi dan daya dorong radikalisme lebih terkait

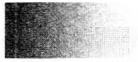
dengan politik daripada agama. Terlihat jelas bahwa peningkatan radikalisme juga terkait erat dengan kekacauan sistem politik dan sosial di Indonesia pada masa awal reformasi. Secara keseluruhan, ketiadaan atau kurangnya penegakan hukum merupakan faktor penting bagi kelompok radikal untuk menegaskan diri mereka, antara lain dengan main hakim sendiri dan berbagai bentuk kekerasan lain dengan mengatasnamakan Islam.

AKSI ISLAM POLITIK RADIKAL

Organisasi teroris yang paling terkenal di Asia Tenggara, tidak diragukan lagi, adalah al-Jamaah al-Islamiyah (JI). JI terdaftar di antara sejumlah organisasi teroris dunia, dan disebut memiliki keterkaitan dengan al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Kita mengetahui bahwa sejumlah anggota JI telah ditahan aparat keamanan di beberapa Negara di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lain; dan sebagian di antaranya telah diajukan ke pengadilan karena keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan berbagai aksi pemboman yang terjadi di Indonesia. Bahkan Abu Bakar Baasyir, yang disebut-sebut sebagai pimpinan tertinggi JI, pernah dijatuhi hukuman 20 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada Februari 2005, bukan karena dugaan keterlibatannya dengan terorisme, tapi karena pemalsuan dokumen imigrasi ketika dia kembali ke Indonesia setelah mengasingkan diri di Malaysia pasca hukuman yang dijatuhkan pengadilan Indonesia di masa Soeharto.

Meskipun polisi dan perangkat hukum lainnya mengajukan berbagai macam bukti tentang kepemimpinannya dalam JI dan dugaan keterlibatannya di dalam berbagai aksi pemboman, Baasyir dan pengikutnya menolak dan meningkari bahwa ia adalah pimpinan JI. Sebaliknya, dia mengakui bahwa hanyalah pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI); dia menegaskan bahwa MMI tidak sama dengan JI, dan buka pula merupakan bagian dari



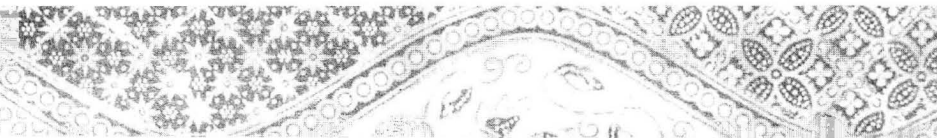


JI.

Baasyir memang membingungkan banyak pihak. Banyak kalangan publik mengetahui, bahwa bersama Abdullah Sungkar, kawan lamanya, Baasyir mendirikan organisasi al-Jamaah al-Islamiyah. JI yang mereka dirikan tentunya berbeda dengan istilah *Jama'ah Islamiyah* yang secara generik berarti masyarakat Muslim secara umum. Tetapi, JI yang dibentuk Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir merupakan organisasi khusus dengan kepemimpinan, struktur, dan keanggotaan tertentu bagi mereka yang tertarik untuk masuk ke dalamnya.

Juga jelas bahwa JI pimpinan Abdullah Sungkar semula hampir tidak dikenal masyarakat Muslim Asia Tenggara umumnya atau di Indonesia dan Malaysia khususnya. Bahkan adalah kenyataan pula, baik Sungkar maupun Baasyir tidak begitu dikenal dalam dinamika pergerakan Islam di Indonesia sebelumnya. Hanya setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, khususnya setelah Presiden George W Bush mendeklarasikan perang melawan terorisme, nama JI sebagai organisasi teroris mulai menarik perhatian publik. Itulah sebabnya mengapa banyak di antara masyarakat Muslim di Asia Tenggara kemudian merasa skeptis dengan keberadaan JI. Bagi mereka, JI hanyalah sebuah organisasi bayangan yang dibuat intelijen Amerika Serikat untuk mendiskreditkan Islam dan Muslim.

Harus diakui, sangat sulit menilai secara persis dinamika dan struktur organisasi seperti JI, karena asal dan sifatnya yang merupakan organisasi tersembunyi, yang bergerak di bawah tanah. Namun, berdasarkan catatan kepolisian, ada beberapa hal yang dapat dilihat dari organisasi JI ini. Organisasi ini dipimpin oleh seorang *amir* yang dibantu sejumlah wakil pimpinan pada tingkat daerah (*mantiqi*) yang kemudian memiliki masing-masing wakil yang langsung mengatur mengatur para anggota. Pada umumnya anggota tidak pernah berhubungan langsung dengan *amir*; bahkan sangat boleh jadi para anggota pada tingkat akar rumput tidak



mengetahui siapa yang menjadi *amir* tertinggi. Hal ini mudah dipahami, karena cara kerja organisasi semacam ini terbentuk dalam sistem jaringan yang boleh jadi tidak mengetahui keberadaan jaringan lain, dan setiap jaringan dapat beroperasi secara independen.

Menurut sebuah laporan, Abdullah Sungkar yang memimpin JI pernah direkrut beberapa jenderal ABRI yang dekat dengan Presiden Soeharto. Bersama dengan Abu Bakar Baasyir, Sungkar direkrut Haji Ismail Pranoto (Hispran) untuk masuk gerakan NII pada pertengahan 1970-an. Sementara Hispran dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 1978 atas keterlibatannya di dalam Komando Jihad, Sungkar dan Baasyir pada awal 1980-an mampu mendirikan kelompok NII pimpinan mereka sendiri yang menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (Nursalim, 2001; Jamhari & Jahroni 2004: 56-7).

Menurut sejumlah studi lebih belakangan (Ausop 2005; Janhari dan Jahroni 2004; ICG 2004), kelompok Islam politik radikal tertentu di Indonesia memiliki keterkaitan DI/TII di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo yang ada pada 1950-an melakukan pemberontakan melawan Republik Indonesia. Meskipun militer Indonesia saat ini berhasil membasmi pemberontakan yang bertujuan mendirikan NII, banyak di antara anggota DI/TII dulu itu berhasil bertahan hidup selama beberapa kurun waktu, bahkan beberapa di antara mereka masih hidup hingga kini.

Meskipun mereka mampu bertahan, ketiadaan seorang pemimpin yang kuat menyebabkan perpecahan di kalangan mantan anggota DI/TII. Selain itu, perubahan strategi diantara mereka, apakah akan terus menggunakan pendekatan radikal seperti kekerasan dan pemberontakan, atau menerapkan pendekatan damai dalam usaha mereka mendirikan sebuah Negara Islam di Indonesia memperburuk perpecahan dan konflik yang terus berlanjut bahkan hingga saat ini.

Salah satu kelompok eks-DI/TII atau anggota NII yang disebut-sebut



melanjutkan pendekatan terorisme adalah Komando Jihad, yang melakukan sejumlah aktivitas terror pada 1970-an, di antaranya penyerangan kantor polisi di Bangkok. Tidak banyak hal yang dapat diketahui tentang kelompok yang disebut sebagai Kelompok Warman. Tetapi kecurigaan berkembang di kalangan masyarakat Muslim Indonesia bahwa kelompok radikal ini terdiri dari mantan anggota DI/TII atau anggota NII yang direkrut beberapa jenderal di lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto. Dengan menghasut mereka melakukan kegiatan kekerasan dan terorisme, Islam dapat didiskreditkan dan akhirnya memberikan justifikasi kepada militer Indonesia untuk menguasai dan mengendalikan Islam dan Muslim.

Sekali lagi, melihat aktivitas Sungkar dan Baasyir pada masa Soeharto jelas keduanya tidak mungkin melakukan kekerasan dan kegiatan terorisme. Namun demikian, mereka memilih untuk mengkritik pedas pemerintahan Soeharto. Secara umum, mereka menentang kebijakan Soeharto,; hal inilah kemudian yang menyebabkan mereka ditahan di balik jeruji penjara selama empat tahun pada 1978. Bebas dari tahanan pada 1982, Sungkar dan Baasyir melanjutkan perjuangan mereka melawan Soeharto dengan membentuk apa yang disebut dengan kelompok *usrah* (secara literal berarti keluarga) sebagai usaha mereka untuk mendirikan NII. Pada 1986, rezim Soeharto menahan sejumlah pimpinan *usrah* dengan tuduhan melakukan tindakan subversive; namun Sungkar dan Baasyir berhasil melarikan diri ke Malaysia. Di negara jiran inilah, mereka hidup selama 15 tahun dan kembali ke Indonesia pada 1999 setelah kejatuhan rezim Soeharto.

Salah satu kelompok NII terdahulu lainnya adalah kelompok NII KW 9 yang dipimpin Abu Toto yang bernama asli AS Panji Gumilang. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah kelompok ini meninggalkan gagasan NII atau tidak; namun jelas kelompok ini memilih jalan damai dengan aktivitas dakwah, terutama pendidikan. Panji Gumilang menimbulkan keheranan di kalangan masyarakat Muslim, karena mendirikan Pondok Pesantren al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, yang terkenal karena

kemegahan bangunannya yang spektakuler. Dengan segera ia dituduh kalangan Muslim tertentu menyebarkan ajaran menyimpang di pesantren tersebut. Investigasi pihak berwenang dan Badan Penelitian Departemen Agama Republik Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada penyimpangan dari ajaran Islam di dalam Pesantren al-Zaytun, baik dalam segi akidah maupun praktik keagamaan.

IDEOLOGI ISLAM POLITIK RADIKAL

Sekali lagi, kita harus mengakui, perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional, regional, dan internasional, khususnya pasca peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, pada kenyataannya telah mendorong radikalisasi Islam politik jenis kedua, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penahanan dan pengadilan terhadap sejumlah individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia atas tuduhan keterlibatan dalam aksi terorisme mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki keterkaitan secara regional satu sama lain, dan juga dengan kelompok-kelompok radikal internasional.

Investigasi polisi Indonesia terhadap kasus bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002, misalnya, menyingkapkan adanya hubungan yang kompleks antara para individu dan kelompok militan yang kemudian melakukan aksi kekerasan dan teror, termasuk di antaranya pengeboman di Hotel Marriot dan Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta. Sebuah gambaran lebih jelas mengenai jaringan radikal kemudian menjadi terbuka. Sedikitnya ada dua pola yang mencolok terungkap dari investigasi yang dilakukan polisi pada kasus-kasus pengeboman. Yang pertama, beberapa pelaku pengeboman adalah alumni Pesantren Ngruki, Solo, Jawa Tengah, pimpinan Abu Bakar Baasyir, seperti disebutkan sebelumnya, dianggap pemimpin spiritual Jama'ah Islamiyah, inti dari



kelompok-kelompok radikal di Asia Tenggara. Kedua, beberapa pelaku pengeboman adalah veteran perang melawan Uni Soviet di Afghanistan (Azra, 2003b; ICG Agustus 2002; ICG Desember 2002; Nuralim 2001).

Persepsi tentang radikalisasi Islam politik jenis kedua di antara kelompok Muslim tertentu di Indonesia atau di Asia Tenggara muncul sesaat setelah peristiwa 11 September 2001 di New York dan Washington DC. Persepsi tersebut tumbuh dengan pesat setelah terjadi berbagai pemboman meledak di Tanah Air, terutama tragedy bom Bali yang menewaskan hamper 200 orang tak bersalah. Pengeboman gerai McDonald dan *showroom* mobil Haji Kalla di Makassar, Sulawesi Utara, pada perayaan Idul Fitri (5 Desember 2002), diikuti dengan pengeboman Hotel Marriot di Jakarta pada 2003, dan pengeboman di Kuningan atau tepatnya di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 9 September 2004 dan pemboman Bali II pada 2005, memperkuat adanya kecenderungan peningkatan tindakan terorisme di kalangan individu dan kelompok radikal di Indonesia. Kesimpulan ini dihasilkan dari hasil investigasi kepolisian di Indonesia yang menunjukkan bahwa para pelaku tindakan teroris ini adalah individu-individu yang diketahui merupakan anggota kelompok radikal tertentu.

Sekali lagi, perkembangan internasional berikutan dengan serangan terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001 telah menyebabkan individu dan kelompok tertentu di kalangan masyarakat Muslim Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi radikal untuk kemudian menganut 'ideologi kebencian' (*ideology of hatred*). Operasi militer Amerika di Afghanistan menyusul penyerangan atas World Trade Center di New York dan Markas Besar Pentagon di Washington DC merupakan momentum yang menguntungkan bagi individu dan kelompok radikal untuk menyatakan diri mereka secara lebih tegas.

Presiden George W. Bush yang memutuskan menyerang Irak sejak Maret 2003 menambah kebencian dan kemarahan di kalangan Muslim radikal. Lebih lanjut, penahanan sejumlah orang yang dianggap radikal

di Malaysia, Singapura, dan Filipina kian menambah kemarahan dan kebencian mereka terhadap Amerika Serikat dan simbol-simbol yang mereka anggap sebagai representasi dari imperialisme Amerika Serikat, seperti McDonald dan Kentucky Fried Chicken. Semua ini kian memperkuat ‘ideologi kemarahan’ mereka.

Tetapi, kita tidak boleh salah dalam memahami perkembangan baru semacam ini; karena pada kenyataannya radikalisme di kalangan Muslim Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Meskipun Islam di Asia Tenggara secara umum dianggap sebagai Islam yang moderat dan damai, namun sejarah Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa radikalisme di kalangan Muslim, sebagaimana akan dibahas nanti, telah ada selama kurang lebih dua abad silam, ketika gerakan Padri yang merupakan adaptasi dari gerakan Wahhabi di Sumatera Barat pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19 memegang kendali untuk memaksa masyarakat Muslim Sumatera Barat untuk mengikuti pemahaman Islam mereka yang literal. Gerakan Padri dengan kekerasan itu bertujuan menyebarkan kemurnian dan keaslian ajaran Islam sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya (*salaf*). Namun demikian, gerakan Padri gagal mendapatkan dukungan mayoritas Muslim local. Gerakan Padri merupakan satu-satunya contoh ideologi salafi radikal di seluruh Asia Tenggara. Gerakan Padri di Sumatera Barat memberikan contoh gerakan radikal dengan menggulirkan gagasan jihad melawan sesama muslim; dan setelah itu tidak ada lagi gerakan semacam itu dalam skala yang sebanding.

Jadi sekali lagi, dalam konteks terakhir ini, salafi radikal bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Gerakan Padri merupakan satu-satunya kelompok salafi radikal di Indonesia yang menggunakan kekerasan terhadap kaum Muslimin lain yang menolak mengikuti ajaran-ajaran mereka. Preseden ini tidak diikuti gerakan salafiyah lain di Indonesia, yang muncul sejak awal abad ke-20, ketika para pembaharu salafiyah asal Mesir seperti Muhammad Abduh dan dan Rasyid Ridha mengilhami



sama “tegas” dalam politik pemerintahannya. Perbedaan yang menonjol mungkin terletak dalam politik ekonomi yang selama Orde Baru lebih terpengaruh oleh kapitalisme dan liberalisme. Pertumbuhan *bourgeoisie* Indonesia lebih pesat pada masa Orde Baru yang terlihat pada munculnya puluhan pengusaha besar seperti keluarga Bakrie, Ibnu Sutowo, Soedono Salim, hingga keluarga Soeharto sendiri seperti Mbak Tutut, Bambang Trihatmodjo, Tommy, dan masih banyak lagi (Globe Asia 2008). Sebagian pengusaha besar tersebut sebenarnya telah berkembang sebelum Orde Baru. Artinya struktur politik dan ekonomi liberal sudah lama bertumbuh dan efeknya menyuburkan praktik korupsi. Di negara besar semisal Amerika Serikat, gejala seperti itu sudah diketahui umum paling tidak sejak abad ke-19 (Presser 1951).

Di negara “semuda” Indonesia pun gejala korupsi sudah lama terdengar tetapi pemberitaan melalui media massa lebih meluas setelah Reformasi (1998). Judul-judul berita atau laporan di surat kabar dan majalah yang menyeramkan seperti “Lumbung (Bulog) Penuh Tikus,” “Wis Bobrok,” “Ketika Maling Kuras Kekayaan Negara,” “Dana Non-Budgeter dan Pertamina,” dan lain-lain, menyadarkan publik betapa semrawutnya negeri kita. Bisa ditambahkan bahwa dalam Pemilihan Umum 1999 pun korupsi dana Komisi Pemilihan Umum nyaris melibatkan semua partai peserta Pemilu (*Kompas*, September 2002; lihat juga artikel Sediono M. P. Tjondronegoro, “Dari Kolonialisme sampai Materialisme,” *Suara Pembaruan*, Agustus 2010).

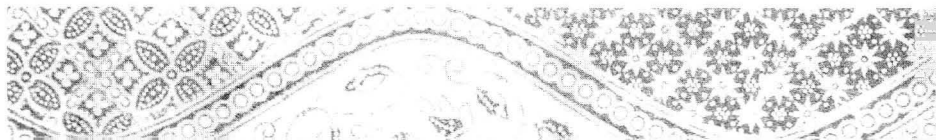
Pluralisme partai politik dewasa ini juga melemahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahkan ketegasan pemerintah pusat juga terkikis karena kabinet presidensial dilemahkan oleh perwakilan terlalu banyak partai politik dalam DPR ataupun DPRD. Ditambah dengan praktik korupsi di lingkungan parlemen yang tidak kalah dahsyatnya dengan kalangan birokrasi, maka benarlah apa yang pernah disimpulkan oleh Teuku Jacob (2004), guru besar Universitas

Gadjah Mada, bahwa usaha kita membangun demokrasi jauh dari berhasil, malah timbul kleptokrasi. Demokrasi yang kita impikan ternyata hanya *democracy* seperti yang diplesetkan oleh para aktivis.

Dari sudut pandang dan analisis sosiologi, gejala dan praktik korupsi tersebut bisa dilihat sebagai melemahnya nilai-nilai sosial (*values*) yang mempengaruhi moralitas manusia pada umumnya sehingga perbuatannya pun tidak terkendali lagi oleh adat atau undang-undang serta peraturan. Dari segi agama, perilaku koruptif itu bisa dilihat sebagai ketidaktaatan manusia pelaku korupsi terhadap nilai-nilai suci yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Dalam situasi moral seperti itu, mudah sekali timbul anarki dan lemah hukum dalam masyarakat (Nabiel F. Almusawah 2007).

Untuk menganalisis situasi masyarakat Perancis abad ke-19, sosiolog Emile Durkheim memperkenalkan istilah *anomie*. Istilah itu sendiri sudah dikenal sejak 1591 dan sering dihubungkan dengan bidang teologi abad ke-17 dalam arti ingkar terhadap hukum, lebih khusus *divine law* atau hukum ketuhanan. Durkheim menggunakan istilah itu dalam penelitian klasiknya mengenai bunuh diri (*suicide*) pada 1897. Ahli-ahli sosiologi abad ke-20 seperti C. R. M. Mac Iver mengartikan istilah *anomie* lebih luas.

Situasi *anomie* bukan saja menunjukkan lemahnya penerapan hukum, tetapi warga masyarakat sudah terlepas dari akar-akar moralitasnya sehingga perilaku dan kepentingan pribadi dan kelompok sangat menonjol. Di Indonesia, gejala dan kecenderungan itu terlihat dan dirasakan setelah Reformasi 1998. Untuk melengkapi pemahaman, di sini dikutip definisi *social capital* yang erat terkait pada moralitas bangsa dan yang sudah melemah sampai di tingkat nasional—dan sebagai warga negara yang mengalami perjuangan fisik, hal itu saya rasakan sangat menyedihkan, “*Define social capital broadly as the institution, relationships, attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development.*”



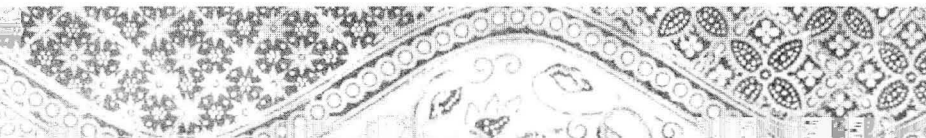
Akibat kebingungan dan kelemahan berperilaku sesuai norma hidup dalam masyarakat mutakhir—dan bukan adat lagi—terjadilah perilaku yang tidak sesuai, dengan fatwa agama sekalipun. Modal sosial yang mencakup sistem “panutan” dalam kebudayaan Indonesia juga membutuhkan waktu untuk berubah menjadi kepemimpinan demokratis yang ditaati oleh jauh lebih banyak warga negara.

Melemahnya pegangan pada norma adat untuk menaati perundang-undangan dan peraturan publik sangat mempermudah timbulnya korupsi, khususnya di kalangan birokrasi negara. Begitu pula prinsip yang mendasari pemikiran dan teori pendekar ekonomi Adam Smith, *survival of the fittest*, atau yang kuat akan bertahan, jelas mempunyai relevansi yang erat dengan perbuatan korupsi. Di Indonesia, gejala tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, terutama pada masa Orde Baru, hanya saja belum banyak dibahas secara terbuka. Media massa kala itu tidak menyebarkan berita-berita tentang korupsi.

Keterbukaan dalam membongkar gejala korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti yang ditunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan langkah yang sangat patut dihargai. Namun, efektivitas pemberantasannya masih perlu banyak waktu. Hanya tindakan tegas dan hukuman mati akan dapat mengurangi perbuatan korupsi yang paling merugikan masyarakat.

PERUBAHAN PELAPISAN SOSIAL

Sebelum kemerdekaan, orang kaya pribumi hampir tak diketahui. Salah seorang yang terkenal adalah Nitisemito, produsen rokok kretek di Kudus, Jawa Tengah. Lapisan sosial paling yang mencakup pengusaha besar diduduki orang Belanda, disusul oleh usahawan keturunan Tionghoa, sedangkan pengusaha pribumi menempati lapisan terbawah. Keadaan mulai berubah setelah pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan perusahaan swasta



sehingga memunculkan kelas *entrepreneur* atau *bourgeoisie*, besar ataupun kecil.

Namun, perusahaan negara yang sudah dibentuk sebelumnya seperti Pertamina kemudian menjadi Pertamina dinilai kurang efisien (Abeng 2008). Dengan swastanisasi yang lebih deras, modal asing yang ditanam di Indonesia juga semakin besar. Dari sisi angkatan kerja, walaupun terjadi pertumbuhan dari 98,91 juta sampai 108,13 juta pada 2001–07, pengangguran juga meningkat dari 8,10 persen sampai 10,54 persen dalam periode yang sama.

Data lain menunjukkan terjadi pengangguran 8,32 persen dan setengah pengangguran 34,32 persen, walaupun pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 persen. Angkatan kerja baru terserap 30 persen yang dapat pekerjaan tetap, sedangkan 70 persen yang lain masih bebas (*Bisnis Indonesia*, 23 Mei 2011).

Menurut majalah *Globe Asia* (Edisi Khusus, Juni 2008) dari 150 orang terkaya Indonesia, 14 orang di antaranya memiliki kekayaan antara US\$ 1,05 milyar hingga US\$ 9,2 milyar termasuk Aburizal Bakrie, Budi Hartono (Djarum), Eka Tjipta Widjaya (Sinar Mas), Sudono Salim (Salim Group), Arifin Panigoro (Medco), dan Hashim Djojohadikusumo (Tirtamas) untuk menyebut beberapa nama. Bahkan perusahaan Bakrie bukan hanya terkaya di Indonesia tetapi di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya ketimpangan antara lapisan pemilik modal trilyunan rupiah di satu pihak dan jutaan buruh dan tani yang hidup dari kurang dari US\$ 2,00 per hari per kapita tidak mengherankan bila timbul korupsi dan berbagai bentuk sengketa.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi sangat menarik bagaimana falsafah dasar pemikir politik ekonomi klasik mempengaruhi tumbuhnya kelembagaan dalam masyarakat. Dari sejarah negara-negara besar dapat kita pahami bahwa feodalisme, yakni kekuasaan raja di atas rakyatnya, dikenal di semua benua.



Falsafah yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi Adam Smith *survival of the fittest* mengubah pelapisan sosial, karena mereka yang bermodal dan dapat menguasai perekonomian menggantikan kepemimpinan kaum feodal. Namun, lapisan bermodal yang menguasai perputaran roda ekonomi masih tetap melanjutkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sedangkan menurut falsafah demokrasi hal itu tidak sesuai. Sosialisme yang muncul kemudian berusaha meralat keadaan dengan mengusahakan pemerataan. Jelas ini juga ditentang oleh lapisan yang berkuasa, dan banyak negara berkembang sekarang sedang mengusahakan suatu tatanan dalam masyarakat masing-masing dengan mengetengahkan kesamarataan hak (demokrasi) sehingga terhindarnya ketimpangan ekonomi dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu sering terdengar bahwa masyarakat yang diidamkan itu berbentuk negara sosial demokrat.

REFORMASI DAN MODAL SOSIAL

Mengalami dan memperhatikan kekacauan di masa Reformasi ini timbul pertanyaan apa sebab utamanya. Dari sudut pandang sosiologi dapat diajukan hipotesa bahwa besar kemungkinan karena modal sosial sangat melemah.

Dulu, definisi tersebut berdasarkan penelitian masyarakat kecil di daerah pedesaan. Namun, kini sudah saatnya dihubungkan dengan masyarakat nasional yang jauh lebih besar dan luas. Inilah yang menjadikan negara terhormat, adil dan makmur sebagaimana pernah diimpikan Bung Karno: Negara Sosial Demokrasi.

DAFTAR ACUAN

- Abdullah, Taufik (1995), "Past Performance and Future Directions," dalam N. Schulte Nordholt dan Visser (ed.), *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism* (43–58). Amsterdam: VU University Press.
- Abdullah, Taufik (ed.) (1977), *The Heartbeat of Indonesian Revolution*. Jakarta: Gramedia.
- Almusawa, Nabil F. (2008), *The Islam Way: 25 Solusi untuk Permasalahan Masyarakat Modern*. Bandung: Arkan Publishing.
- Commings, S. dan N. Linscott (1947), *Man and the State: The Political Philosophers*. New York: Random House.
- Dharmawan, Eko P. (2005), *Agama itu Bukan Candu: Tesis-tesis Fierbakh, Karl Marx dan Tan Malaka*. Yogyakarta: Resist Book.
- Durkheim, Emile (1951), *Suicide: A Study in Sociology*. USA dan Canada [tanpa nama kota]: The Free Press.
- Feith, Herbert (1957), *The Indonesia Elections of 1955*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Gide, Charle dan Ch. Rist (1947), *Histoire des doctrines economique: Des physiocrates a J. Stuart Mill*. Paris, Reneil Sirey.
- Globe Asia (2008), "150 Richest: US\$ 69 Billion Total Wealth." Singapura, RZB Groups (130–31).
- Gould, J. dan W. L. Kolb (ed.) (1964), *A Dictionary of the Social Sciences*. New York: The Free Press.
- Gootaert, Ch. dan Th. van Bas'telaer (ed.) (2002), *Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplin-ary Tool for Practioners*. Washington, D.C.: The World Bank.



- Harrison, Lawrence E. dan Samuel P. Huntington (2000), *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Hindley, Donald (1962), "President Soekarno and the Communists: The Politics of Domestication," *American Political Science Review* [nomor dan bulan penerbitan tidak tercatat].
- de Jong, L. (2002), *The Collapse of Colonial Society: The Dutch in Indonesia During the Second World War*. Leiden: KITLV Press.
- de Kadt, J. (1949), *De Indonesische tragedie: Het treurspel der gemiste kansen*. Amsterdam: Van Oorschot.
- Kahin, George McTurnan (1952), *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Kapista, M. S. dan N. P. Maletin (2009), *Soekarno: Biografi Politik*. Bandung: CV Ultimus.
- Li Fu-Chun (1955), *Report on the First Five-Year Plan for Development of the National Economy of the People's Republic of China in 1953–1957* [nama kota dan penerbit tidak tercatat].
- Mao Tse Tung (1963), *Selected Military Writings of Mao Tse Tung*. Peking: Foreign Language Press.
- Marshall, Alfred (1949), *Principles of Economics*. London: Mac Millan.
- Moeso (1951), *Jalan Baru untuk Republik Indonesia*. Jakarta: Bintang Merah.
- van Mook, H. J. (1949), *Indonesië, Nederland en de wereld*. Amsterdam: De Bezige Bij.
- Poeze, Harry A. (2007), *Verguisd en vergeten: Tan Malaka de linkse beweging en de Indonesische revolutie 1945–1948* (3 volume). Leiden: KITLV Press.
- Presser, J. (1951), *Amerika: Van kolonie tot wereldmacht*. Amsterdam: Elsevier.

- Ricardo, David (1817), *Principles of Political Economy and Taxation* [nama kota dan penerbit tidak tercatat].
- Sjahrir, Soetan (1949), *Out of Exile: Letters by Soetan Sjahrir* (ditulis ulang dan disunting oleh Maria Duchateau-Sjahrir). New York.
- Tjondronegoro, S. M. P. (1993), "Poverty Alleviation: Institutional and Administrative Problems," dalam J. P. Dirkse, F. Husken dan M. Rutten (ed.), *Indonesia's Experiences under the New Order* (159–83). Leiden: KITLV Press.
- (1995), "Indonesia's Social Science Agenda: A Personal View," dalam N. Schulte Northold dan L. Visser (ed.), *Social Science in Southeast Asia: From Particularism to Universalism* (59–77). Amsterdam: VU University Press.
- (2000), "Melintasi Budaya dari Kolonialisme, Nasionalisme sampai Materialisme," *Suara Pembaruan* [tanggal penerbitan tidak tercatat].
- Wertheim, W. F (1946), *Nederland op de tweesprong: Tragedie van den aan traditie gebonden mens*. Amsterdam: De Nieuwe Stern.
- (1959), *Indonesia Society in Transition: A Study of Social Change*. The Hague dan Bandung: W. van Hoeve.
- Yamin, Muh. (1959), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid II [tanpa nama kota dan penerbit].

Nasionalisme dan Kearifan Sejarah

TAUFIK ABDULLAH

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Tidak seperti Demokrasi Terpimpin, yang dengan begitu saja digantikan oleh sebuah rezim baru setelah legitimasi Presiden Sukarno ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 1967, kejatuhan Orde Baru pada 1998 ternyata tidak memberi kesempatan bagi lahirnya rezim baru. Kejatuhan Orde Baru malah menimbulkan suasana krisis yang bersifat multidimensional. Ketika sistem kekuasaan yang serba-dominan telah tersingkir maka kesempatan pun terbuka lebar bagi terjadinya perbenturan wacana. Pada waktu itulah segala kesatuan pendapat dan persamaan idealisme yang sejak lama dipelihara Orde Baru—bahkan juga sesuatu yang senantiasa diusahakan Demokrasi Terpimpin pada masa kekuasaannya—mencair begitu saja. Seperti dulu juga, ketika "demokrasi parlementer" (1950–59) masih merupakan tatanan kenegaraan, perbenturan berbagai corak idealisme pun terjadi. Hanya saja kini perbenturan itu terwujud ketika tradisi otoritarianisme telah tertanam dalam struktur kesadaran. Idealisme ke arah terwujudnya demokrasi yang sehat dikumandangkan tetapi suara dan hasrat ini telah ditempa oleh sikap otoriter. Maka yang tampil ke permukaan hanyalah suasana euforia yang tampak seperti telah merelatifkan kesopanan politik dan bahkan juga keharusan konstitusional.

SISTEM WACANA DAN NASIONALISME

Demonstrasi massa, dimotori terutama oleh mahasiswa, yang diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan gaya, adalah pantulan situasi ketika afinitas yang aneh dari hasrat demokrasi yang sekian lama terpendam, dengan tradisi otoriter yang telah menjadi bagian dari struktur kesadaran.

Gejala monopoli kebenaran dan keharusan politik tampil seperti gejala yang umum dan lumrah saja. Dalam suasana euforia politik seperti ini sekian banyak partai, yang ingin memperjuangkan tempat yang diharapkan memadai dalam pembagian kekuasaan, bertumbuhan. Pada waktu ini pula berbagai corak lembaga swadaya masyarakat menampilkan diri sebagai kekuatan *civil society* yang menempatkan diri sebagai perantara yang autentik tanpa cela antara negara dengan masyarakat.

Bahkan ketika ini pula bermacam corak konflik horisontal meletus di beberapa daerah. Dalam situasi yang menjadi pentas dari berbagai corak keanekaragaman konflik ini tampak pula betapa perbedaan agama, etnisitas, bahkan juga tingkat sosial-ekonomis dan lingkungan tempat tinggal bisa saja menjadi patokan untuk menentukan mana lawan dan mana pula kawan. Konflik horisontal ini bukan saja memperlihatkan betapa masing-masing pihak ingin mendapatkan kemenangan dalam berhadapan dengan lawan yang berwajah banyak, tetapi sesungguhnya juga merupakan suatu bentuk wacana tentang betapa arti kehadiran negara telah direlatifkan. Negara tetap dirasakan sebagai kekuatan dan sistem kekuasaan yang riil dan sah tetapi makna kehadirannya dijadikan sebagai suatu eksistensi yang relatif saja—ada tetapi tak begitu relevan.

Maka mestikah diherankan jika di tengah-tengah kegalauan sosial-politik seperti ini sebuah pertanyaan sederhana akhirnya terlontar. Ke manakah perginya perasaan kebangsaan yang mempersatukan yang biasa disebut nasionalisme itu? Apakah cita-cita dan kesadaran politik yang telah mengikat berbagai kesatuan sosial dan budaya serta keragaman status sosial dan ekonomi dalam hasrat untuk mendirikan dan mempertahankan suatu komunitas politik baru yang disebut negara-bangsa kini telah mulai memasuki masa yang pudar? Mengapakah nasionalisme, yang telah berhasil membentuk tekad bagi terwujudnya suatu komunitas baru yang integratif, yang telah melebihi ikatan primordial dan yang merangkai segala macam perbedaan dalam sebuah ikatan sosial-politik yang disebut bangsa, tampak seperti sedang melonggar?



Atau, apakah yang disebut sebagai "krisis nasionalisme" ini hanyalah sekadar contoh dari peralihan sistem wacana ketika pergantian landasan kekuasaan politik telah terjadi? Bukankah hal ini dengan keras dirasakan pada saat rezim lama yang serba-dominan secara formal telah berakhir? Siapa tahu, mungkin juga inilah masalahnya. Bukankah sistem *discourse* yang dominan kerap kali memantulkan sifat dan corak sistem kekuasaan yang dominan? Jangan-jangan suasana yang dirasakan sebagai pantulan dari krisis nasionalisme itu sesungguhnya hanyalah hal yang biasa saja. Sebab bisa jadi kehadiran "nasionalisme" hanya terasakan sebagai realitas yang fungsional dalam kehidupan sosial-politik ketika ancaman dari luar sedang dihadapi dan mungkin juga pada saat kekuasaan yang dominan dirasakan sebagai teramat memaksakan kehadirannya. Jika demikian, nasionalisme yang selama ini praktis dikuasai negara—bahkan sejak zaman Demokrasi Terpimpin—berarti juga harus mengalami ujian keabsahannya.

Dalam suasana ketika negara menampilkan diri sebagai "sang maha- penentu," nasionalisme biasa sekali diperlakukan sebagai landasan ideologis atas legitimasi kekuasaan. Ketika visi tentang diri dan komunitas serta program kekinian dan cita-cita masa depan yang tumbuh dan dipupuk dari kesadaran sejarah dan visi masa depan dikuasai oleh negara maka nasionalisme pun menjadi alat kekuasaan. Ketika nasionalisme resmi ini semakin kokoh, masyarakat-bangsa pun semakin kehilangan hak atas wacana yang semula menjadi landasan kelahiran bangsa. Di bawah hegemoni makna yang dipelihara negara yang serakah, yang ingin menguasai semua, maka nasionalisme, yang semula bertolak dari idealisme tentang kehadiran suatu corak ikatan kehidupan komunitas yang baru dan menyegarkan, kini bisa menjadi ideologi-penyangga bagi sistem kekuasaan. Jika memang demikian halnya maka bisa saja pengingkaran atas keabsahan perilaku kekuasaan sekaligus diartikan sebagai penafian atas *relevancy* nasionalisme.

Dapatlah dibayangkan ketika Orde Baru jatuh, keabsahan dari berbagai hal yang pernah berada di bawah dominasinya mengalami krisis

pula. Dalam suasana ini nasionalisme keindonesiaan pun seakan-akan tenggelam begitu saja dalam lautan lupa. Kini yang teringat hanyalah keharusan adanya supremasi hukum dan berlanjutnya proses ke arah berlangsungnya demokratisasi yang sehat dan kreatif. Sedangkan yang dirasakan sebagian masyarakat-bangsa ialah keresahan akan kemiskinan yang seperti enggan untuk membaik dan pendidikan bagi anak-anak dan kesehatan bagi keluarga yang terasa semakin jauh dari jangkauan.

KRISIS NASIONALISME ATAU GAIRAH KEBEBASAN

Jika demikian, apakah yang dianggap sebagai kemerosotan nasionalisme itu hanyalah pembebasan dari dominasi wacana dari dua rezim otoriter—Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru—yang datang bergantian. Barangkali kemerosotan itu terasa karena semakin kuatnya hasrat reformasi untuk mendapatkan kembali cita-cita bangsa yang murni, sebelum diwarnai oleh panggilan sistem kekuasaan yang serakah. Masalahnya ialah di balik keluhuran hasrat dan cita-cita yang terkandung dalam dirinya, bahkan juga yang menjadi pendorong kelahirannya, nasionalisme ternyata bisa juga menjadi landasan yang strategis bagi penguasa untuk mengekang kebebasan masyarakat. Jika unsur integratif yang terlekat pada nasionalisme bisa dikuasai, meskipun dengan mengorbankan keharusan demokratis yang merupakan bagian esensial dari kelahiran nasionalisme itu sendiri, negara sesungguhnya telah mempunyai landasan yang kuat untuk mempertahankan dominasinya. Maka, timbul pertanyaan, apakah yang disebut sebagai krisis nasionalisme itu sejatinya merupakan pantulan menaikny hasrat kebebasan setelah kekuasaan yang serba-dominan dikalahkan. Namun, bagaimanakah realitas empirik yang sesungguhnya?

Tanpa harus melibatkan diri dalam konser kritik yang kini sangat gencar terhadap pemerintah, sebagai lembaga eksekutif, dan bahkan juga tanpa harus mendaftarkan berbagai corak kegalauan fungsi dan keutuhan



moral yang menyebar ke hampir semua lembaga kenegaraan (termasuk lembaga legislatif dan yudikatif), berbagai kenyataan empirik bisa berbicara sendiri. Gerakan reformasi ternyata juga tampil sebagai pembuka pintu bagi hampir semua jenis konflik. Sumber-sumber konflik yang selama ini ditutupi dengan keras oleh sistem kekuasaan yang sentralistik, kini seakan-akan mendapat saluran untuk tampil ke permukaan. Tiba-tiba bangsa juga dikagetkan oleh fakta sederhana bahwa perbedaan status ekonomi, agama, dan etnis, bahkan desa dan kampung yang berlainan sekalipun, bisa menjadi sumber atau alasan dari meletusnya konflik terbuka. Bahkan proses demokratisasi yang sekian lama terhenti—sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959—dilanjutkan kembali dalam desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah tampak memberi peluang bagi tersalurnya hasrat nasionalisme-etnis dan munculnya kecenderungan primordialisme. Terbebas dari sistem kekuasaan, yang bukan saja sentralistik tetapi juga berhasil menjadikan dirinya sebagai pemegang hegemoni wacana, maka berbagai kemungkinan pun tampil begitu saja.

Betapa ironis ketika proses demokratisasi telah dihidupkan kembali, otonomi daerah dan—apalagi—pemekaran wilayah ternyata bukan sekadar membuka kebebasan relatif bagi daerah untuk mengatur diri sendiri tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah pusat. Otonomi daerah tidak pula berarti semakin memungkinkan kedekatan negara dengan rakyat. Ternyata otonomi daerah dan pemekaran wilayah tidak jarang menjadi saluran bagi konflik kepentingan para elite lokal. Betapa paradoks juga terasa ketika otonomi daerah, yang bertolak dari hasrat untuk mencapai keutuhan bangsa, ada kalanya tampil sebagai pemancing munculnya segala corak faktor pembeda yang disintegratif.

Berbagai peristiwa yang melanda Tanah Air kita memperlihatkan bahwa keberhasilan nasionalisme, yang ingin melebur batas-batas sosial-kultural ke dalam suatu komunitas baru, yang disebut bangsa, dan menjadikan semangat patriotisme sebagai landasan melawan kolonialisme, kini harus

menghadapi ujian yang berat dan beragam pula. Ujian dan tantangan itu bukan saja berasal dari keharusan terlaksananya agenda yang terlekat erat pada cita-cita, tetapi juga dari corak komunitas lain yang melampaui batas-batas negara dan bangsa. Berbagai corak saluran globalisme—sebagai akibat dari proses globalisasi yang semakin mempererat interdependensi ekonomi dan moneter, hubungan informasi dan komunikasi antarnegara, bahkan juga aliansi politik dan ekonomi dari berbagai corak kesatuan regional dan politik—terasa juga seperti telah merelatifkan batas-batas negara dan bangsa.

Selain itu, bagaimana pula akan bisa dilupakan begitu saja dorongan universalisme agama, yang sejak semula telah mempunyai hubungan yang dilematis dengan nasionalisme. Ada universalisme yang tampil sebagai pendukung, ketika kekuatan durjana kolonialisme dan imperialisme terasa mengancam, tetapi ada pula saatnya ketika kecenderungan ini menampilkan diri sebagai penantang dari keabsahan nasionalisme, yang membuat batas-batas antara “kita” dan “mereka.” Maka, mestikah diherankan pula kalau ada golongan yang mencita-citakan terbentuknya negara yang berdasarkan keharusan agama yang bersifat eksklusif dan bahkan ada pula yang berusaha mendirikan sebuah negara-yang-melampaui-ikatan-bangsa dan menjadikan agama, bukannya kesadaran nasionalisme, sebagai landasan bagi perwujudan negara. Maka, hasrat ideologis yang diperjuangkan ini dengan begitu saja mengingkari empat pilar konsensus konstitusional yang ingin mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semangat bhineka tunggal ika. Jadi, apakah nasionalisme, yang dalam Pancasila disederhanakan dalam ungkapan “persatuan Indonesia,” masih memiliki harapan untuk mempertahankan eksistensinya dan relevansi kehadirannya?

Segala kesulitan dan kegelisahan yang kini dirasakan anak bangsa adalah batu ujian dalam hidup bernegara dan berbangsa. Kesemuanya adalah bagian dari dinamika kehidupan kebangsaan yang sekali-sekali



pasti dialami dalam dinamika pergolakan sejarah. Berbagai kekecewaan yang kini terasa seperti sedang melanda kehidupan bangsa adalah harga yang harus dibayar ketika dorongan untuk mendapatkan harkat kehidupan yang lebih layak tidak lagi tertahankan. Pada saat negara telah memutuskan untuk melepaskan hegemoninya terhadap dunia makna, sebagaimana secara simbolik dilakukan dengan penghapusan indoktrinasi, ketika itu pula dimulai pencarian landasan baru yang sesuai dengan cita-cita yang tercetus dan diperjuangkan saat eksistensi negara baru dilahirkan. Ketika kebebasan itu telah didapatkan maka pada waktu itu pulalah renungan untuk mendapatkan pemahaman baru terhadap konsensus yang pernah dipatrikan tidak terhindarkan. Oleh karena itu mestikah diherankan kalau kini—sayup-sayup mungkin masih terasa—pencarian landasan baru nasionalisme Indonesia mulai juga dilakukan.

NASIONALISME DAN TANTANGAN SEJARAH

Nasionalisme bukanlah sekadar sebuah ideologi, tetapi suatu "*state of mind*," kata Hans Kohn; atau "*une ame, un princip spirituel*," kata Ernest Renan, yang lahir dari hasrat pembebasan dari segala corak tekanan dan keterpencilan. Nasionalisme juga merupakan ideologisasi keinginan untuk menggapai harkat kemanusiaan bagi kehidupan kebangsaan. Ada kalanya nasionalisme tampil sebagai landasan idiil dalam usaha mendobrak segala hambatan yang menghalangi terwujudnya cita-cita yang terlekat dalam dirinya, yaitu terbentuknya suatu komunitas yang mengatasi ikatan etnis dan agama, bahkan juga geografis. Dengan demikian, nasionalisme dipakai sebagai salah satu patokan etika, sebagai faktor penentu ketika pilihan dari situasi yang dilematis harus dibuat. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh seorang prajurit ketika panggilan ke medan perang untuk membela Tanah Air datang pada saat sang istri tercinta akan melahirkan? Maka biarlah kesadaran etika menyelesaikan situasi yang dilematis ini. Tetapi lebih sering nasionalisme berperan sebagai sumber motivasi dalam

perumusan sistem perilaku atau sebagai etos yang memberikan landasan emosional dalam pola perilaku. Dalam suasana ini nasionalisme, yang telah berperan sebagai etos, menjadi landasan kesadaran yang mengajarkan bahwa sesuatu yang dilakukan dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan bukan saja secara rasional masuk akal, tetapi juga secara emosional menyenangkan.

Maka, dapat dipahami pula bila landasan emosional dari sesuatu yang menyenangkan dan rasional itu ada saatnya mengalami krisis. Ketika berbagai alternatif bermunculan dan pada saat sekian banyak kekecewaan atas kegagalan untuk mendapatkan sesuatu yang penting dan menyenangkan itu dirasakan maka krisis nasionalisme, sebagai landasan etos, bisa juga datang melanda. Seperti halnya dengan landasan etos lainnya, bahkan juga yang bertolak dari keyakinan religius sekalipun, sistem perilaku yang terpancar dari nasionalisme selalu ditempa oleh berbagai corak ujian dan biasa pula menghadapi tantangan dalam perjalanan waktu.

Jika landasan nasionalisme itu dirasakan sebagai pengingkaran terhadap harkat kemanusiaan dari komunitas yang diciptakannya maka daya tahannya pun akan terkuras begitu saja. Kalau hal ini terjadi maka komunitas yang dibayangkan (*imagined community*, kata Ben Anderson) yang disebut bangsa itu pun akhirnya hanya tinggal dalam catatan sejarah. Kemungkinan ini bertambah besar apabila komunitas itu gagal untuk "berdamai dengan sejarah"—ingatan kolektif akan masa lalu yang dipenuhi berbagai pengalaman yang pahit dan penuh dendam. Tetapi sebaliknya, jika ingatan akan keberhasilan lama yang dilakukan bersama dan kenangan kepada pengorbanan yang pernah diberikan bagi kepentingan bersama dan untuk keutuhan komunitas yang tercipta secara imajinatif itu bisa dibangkitkan dan dipupuk kembali, maka ketika itu pula "krisis" dari krisis nasionalisme sangat mungkin bisa terjadi. Maka apa yang dirasakan krisis nasionalisme itupun mulai menjalani masa akhirnya. Ketika masa akhir itu telah dicapai, ujian pun selesai— mungkin untuk sementara—



dan keutuhan bangsa pun semakin terjaga dan masa depan pun dihadapi dengan penuh optimisme.

Argumen ini tentu saja bisa terasa mempermudah masalah. Bukankah tiada satu bangsa pun—apalagi yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan penuh pengorbanan—yang bisa terlepas dari penetrasi globalisasi, yang merelatif-kan arti dan bahkan fungsi dari segala corak batas dan perbatasan. Dengan kata lain, kini tampaknya dengan jelas bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan secara internal, seakan-akan hanya kita saja yang merupakan realitas yang utuh. Secara teoretis bisa pula diperkirakan bahwa penetrasi kekuatan dan pengaruh dunia luar pun mempunyai kemungkinan pula untuk menggoyahkan kemantapan internal yang ingin dicapai. Dapatlah dibayangkan bahwa kehadiran komunitas baru yang diidam-idamkan juga dipengaruhi oleh realitas dunia yang tanpa batas. Dengan kata lain globalisasi, yang senantiasa ditopang oleh kosmopolitanisme, mempunyai kemungkinan pula untuk menggerogoti sendi-sendi nasionalisme.

Meski penetrasi pengaruh globalisasi dalam kesadaran kebangsaan merupakan kemungkinan yang riil, tetapi perlu juga disadari bahwa globalisasi sesungguhnya adalah proses yang bertolak dari kesadaran dan realitas kekinian serta harapan akan masa depan yang hanya bisa dibayangkan. Tidak seperti bangsa, yang bertolak dari pengalaman dan ingatan kesejarahan yang riil dan bahkan biasa pula ditempa oleh imajinasi yang romantis, globalisasi hanyalah gambaran kekinian tanpa dukungan ingatan kesejarahan. Globalisasi, dengan kata lain, *memoryless*, tanpa ingatan. Jika dibandingkan dengan bangsa maka boleh pula dikatakan bahwa globalisasi juga hampa dari romantisme, suasana perasaan yang tidak pernah absen dalam proses pembentukan dan pertumbuhan bangsa. Jadi, akhirnya kita pun harus menyadari bahwa kekuatan dan daya tahan internal lebih menentukan.

Eksistensi bangsa, yang didukung oleh cita-cita nasionalisme, bukan

saja bertolak dari visi kesejarahan, tetapi juga dari hasil pengumpulan intelektual untuk memahami pesan historis dari ingatan kolektif dan cacatan kesejarahan berbagai kesatuan etnis anak-bangsa. Primordialisme atau bahkan etno-nasionalisme mungkin bisa memecah-mecah komunitas bangsa, yang terkait dalam berbagai corak ingatan kolektif dan cacatan kesejarahan itu. Tetapi jika lembaran sejarah—sebagai cacatan yang mencoba merangkul semua aspek yang relevan dalam kehidupan sosial—dibuka lagi, maka tampaklah bahwa komunitas bangsa ini justru lahir sebagai reaksi terhadap kelemahan struktural dan kultural yang terlekat dalam diri bangsa-lama.

Jika sejarah pergerakan kebangsaan dengan jelas bisa memperlihatkan berbagai corak perlawanan terhadap kolonialisme dan berkisah tentang tumbuhnya hasrat untuk membentuk komunitas baru yang disebut bangsa, maka sejarah hubungan antar-kesatuan politik tradisional dan ikatan-ikatan etnis dengan jelas pula memperlihatkan tentang saling keterkaitan antara berbagai kesatuan dan ikatan itu. Ambil saja contoh pada beberapa kenyataan sosial-kultural yang sampai kini masih menjadi bagian dari dinamika kehidupan bangsa. Bagaimanakah harus diterangkan, misalnya, fakta historis yang sederhana tentang penyebaran Islam ke seluruh Nusantara, pemakaian "bahasa Melayu" dalam naskah-naskah yang ditulis oleh berbagai kesatuan etnis yang tidak berbahasa Melayu, penerjemahan naskah Melayu ke bahasa Jawa dan sebaliknya, dan sebagainya, jika bukan karena keterkaitan sejarah yang telah berjalan sekian abad. Tetapi bagaimanakah kisah-sejarah tentang saling keterkaitan itu sehingga pada waktunya melahirkan sebuah bangsa-baru, yang saling berbeda tetapi merasa satu? Seketika hal ini disadari, siapakah yang tidak akan menekurkan sambil menggeleng-gelengkan kepala saat mengetahui bahwa pelajaran sejarah hanya menempati sebuah sudut terpencil dalam kurikulum sekolah.

Sayup-sayup terdengar protes bahwa sejarah masih masuk dalam pelajaran, tetapi pertanyaannya apakah sejarah ataukah kronikel, yang



memberikan daftar peristiwa, yang diberikan kepada anak-didik. Memang benar "kronikel" yang berisikan "apa, bila, di mana, dan siapa" adalah bagian esensial dari sejarah, tetapi jawab dari keempat pertanyaan itu belumlah bernama "sejarah." Sebab, sebagai uraian tentang dinamika masa lalu, sejarah menuntut pertanggungjawaban moral dan akademis dalam menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa." Bahkan lebih daripada itu, sejarah yang didukung oleh ketelitian akademis dan kejujuran moral serta sensitivitas kultural, memberikan perenungan intelektual—betapapun mungkin sederhana—tentang "penting" dan "relevan"-nya dinamika dan karakter dari peristiwa sejarah yang dibicarakan.

Lagi-lagi suara protes terdengar. Bukankah uraian panjang lebar diberikan ketika kisah tentang hari-hari besar yang dirayakan sedang dibicarakan? Benar juga, tetapi "hari besar" adalah hasil pilihan yang disengaja untuk suatu keperluan tertentu—entah politik atau apa saja yang dianggap penting bagi keutuhan sosial. "Hari besar" adalah peristiwa sejarah yang telah dijadikan "monumen"—dibiarkan di sana untuk senantiasa dikenang sambil merenungkan pesan kekinian yang bisa ditarik dari kejadian masa lalu itu. Hanya saja kehadiran "monumen" tidak jarang ditentukan oleh terdapatnya afinitas antara peristiwa sejarah dengan kepentingan kekuasaan. Jadi bisa dipahami bila peristiwa sejarah yang dijadikan "monumen" itu merupakan bagian dari dinamika *ideological contestation*. Dengan kata lain faktor kekuasaan ikut bermain. Hanya saja peristiwa sejarah yang dipakai sebagai alat peneguh legitimasi kekuasaan mengalami krisis kepercayaan ketika kekuasaan itu mengalami krisis pula. Apalagi bila "monumen" yang menyimpan dendam dalam perbendaharaannya akan semakin melarutkan bangsa dalam krisis.

Uraian kesejarahan semestinya dapat dijadikan sebagai penyimpan ingatan kolektif tentang pengorbanan bersama yang autentik. Dengan pemahaman tentang keterikatan kehidupan dalam lintasan sejarah bukan saja akan memungkinkan kita mengetahui dinamika kehidupan bangsa

dalam peralihan waktu tetapi juga kearifan sejarah yang inspiratif. Bukankah tanpa pemahaman sejarah yang kreatif nasionalisme tidak akan mungkin bisa dilahirkan ?

Begitulah, di samping hal-hal yang bersifat keharusan struktural—seperti kemakmuran relatif masyarakat bangsa, kesempatan mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya—nasionalisme akan bisa bertahan jika ditopang oleh perluasan pengetahuan dan pemahaman sejarah di kalangan anak-bangsa. Dalam pertarungan kultural dan persaingan ekonomi yang semakin gencar, nasionalisme Indonesia Raya akan lebih mungkin bisa bertahan dan bahkan semakin kuat jika segala dendam yang sempat bersemi dalam ingatan mengalami transformasi—dari dendam menjadi pelajaran ketika mengayuh ke masa depan yang lebih cerah.



Islam Politik Radikal di Indonesia

Ideologi dan Aksi

AZYUMARDI AZRA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

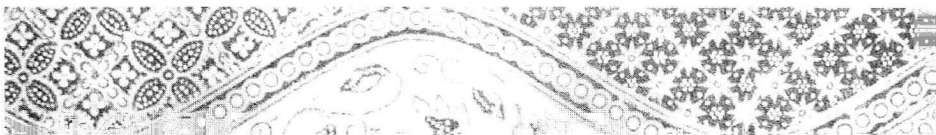
P*olitical Islam* dan *Cultural Islam* merupakan dua istilah populer yang berkembang di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, *political Islam* menjadi *Islam politik* yang umumnya diperhadapkan dengan *cultural Islam* atau *Islam kultural*. Penggunaan kedua istilah itu menunjukkan adanya dua jenis Islam, yaitu Islam politik dan Islam kultural. Yang dimaksud dengan Islam politik adalah Islam yang memiliki orientasi yang kuat kepada politik dan kekuasaan; sebaliknya Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dalam kehidupan Islami melalui jalur nonpolitik seperti dakwah Islam secara damai atau melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Istilah *Islam Politik* berkembang ketika Snouck Hurgronje menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda khususnya pada perempatan terakhir abad ke-19. Ia membagi Islam politik dan Islam ibadah atau Islam ritual. Bagi pemerintah Belanda, keberadaan Islam politik harus dibatasi karena Islam semacam ini memiliki tujuan mengakhiri penjajahan Belanda dan menggantinya dengan politik pan-Islam, semacam kekhilafahan. Oleh karena itu, menurut Snouck Hurgronje, perkembangan Islam politik harus ditekan sebab dapat membahayakan kelangsungan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Sedangkan Islam ibadah atau Islam ritual—yang kini Islam kultural—sangat berbeda dengan Islam politik. Menurut Snouck Hurgronje, pemerintah justru harus mampu mengakomodasi dan memfasilitasi Islam ritual—dalam hal ini Islam kultural—atau membiarkannya berkembang sendiri.

Berkaitan dengan isu Islam politik di Indonesia, politik Islam dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, Islam politik yang direpresentasikan partai-partai Islam yang terlibat dalam sistem dan proses politik yang sah. Mereka berusaha mencapai agenda politik tertentu seperti penerapan syariah Islam dan pembentukan negara Islam. Dalam sejarah Indonesia, Islam politik ini dipresentasikan Masyumi pada 1950-an, Nahdlatul Ulama (NU), dan sejumlah partai Islam *gurem*. Pada masa pemerintahan Soeharto, Islam politik diwakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan pada masa sesudahnya direpresentasikan sejumlah partai politik Islam baru seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan lain-lain.

Kedua, Islam politik yang ditampilkan beberapa kelompok atau organisasi Muslim yang memiliki agenda politik yang hampir sama dengan kelompok pertama. Hanya saja, kelompok atau organisasi ini bukan merupakan partai politik karena mereka tidak mengakui keabsahan sistem dan proses politik yang ada. Mereka juga tidak mempercayai partai politik Islam maupun organisasi sosial keagamaan Islam kultural yang merupakan *mainstream* Islam di Indonesia. Bagi mereka, partai politik dan organisasi Islam arus utama yang moderat terlalu banyak mengakomodasi dan berkompromi dengan apa yang mereka anggap sebagai sistem dan proses politik yang tidak Islami.

Islam politik kelompok kedua ini—yang biasa disebut sebagai ‘Islam politik radikal’—berkembang di Timur Tengah, Asia Tenggara dan negara-negara Muslim lain di dunia. Di Indonesia, pada masa pasca-kemerdekaan hingga 1960-an, sebagian besar Islam politik radikal direpresentasikan oleh beberapa kelompok, misalnya Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII). Kelompok ini independen dari organisasi Muslim *mainstream* di Indonesia. Mereka melakukan pemberontakan dalam usaha mendirikan Negara Islam Indonesia dengan cara menumbangkan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.



Islam politik semacam ini juga muncul pada masa pemerintahan Soeharto. Beberapa di antaranya merupakan bagian dari sisa-sisa kelompok pemberontak DI/NII yang telah dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Beberapa yang lain merupakan kelompok relatif lebih baru yang terinspirasi perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun internasional, atau di beberapa negara Muslim khususnya yang melawan kebijakan politik Barat. Pembentukan kelompok Islam politik kedua ini diilhami oleh kesuksesan revolusi di Iran pada 1979 di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Peristiwa sejarah sangat penting ini menjadi inspirasi terbentuknya kelompok Islam politik kedua tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Rezim Soeharto memberikan kepada mereka label ‘kelompok subversif’ yang mengancam persatuan dan kesatuan nasional.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 dari kekuasaan pemerintahan selama 32 tahun membebaskan kelompok kedua kategori Islam politik. Euforia demokrasi dan pencabutan Undang-undang Anti-Subversi oleh Presiden B. J. Habibie—yang menggantikan Soeharto—memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kelompok ini untuk mengekspresikan wacana dan gerakan ekstrem dan radikal. Kini, mereka bebas melakukan berbagai aktivitas di ruang publik. Kelompok ini terkadang main hakim sendiri, melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok Islam lain yang mereka anggap menyimpang. Dalam banyak kasus mereka sangat leluasa karena kurangnya penegakan hukum oleh polisi—yang juga tengah menghadapi masalah baik kredibilitas dan bahkan semacam demoralisasi setelah berpisah dari Tentara Nasional Indonesia di dalam ABRI.

Beberapa kelompok Islam politik jenis kedua yang pernah sangat berpengaruh, antara lain, Lasykar Jihad (LJ) yang didirikan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wa al-jama’ah (FKASWJ) di bawah pimpinan Ja’far Umar Thalib; Front Pembela Islam (FPI) dipimpin Habib Riziq

Shihab; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pimpinan Abu Bakar Baasyir; Jamaa'at Ikhwanul Muslimin Indonesia (JAMI) di bawah pimpinan Habib Huseinal-Habsyi; dan Hizbut Tharir Indonesia (HTI) (Bamualim, dkk. 2001; Azra 2003a; Fananie, dkk. 2002; Jamhari dan Jahroni, 2004). Sangat penting dikemukakan, beberapa kelompok tersebut kemudian dibubarkan pemimpinnya sendiri—seperti Lasykar Jihad—atau menghilang, atau meredam aktivitasnya setelah terjadi penangkapan dan pengadilan terhadap pelaku peledakan bom Bali dan beberapa bom lainnya di Indonesia sejak akhir 2002.

Sangatlah jelas, kelompok Islam politik radikal bersifat merupakan independen dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan organisasi Islam *mainstream* seperti Muhammadiyah dan NU. Mereka juga tidak berafiliasi dengan partai politik Islam, seperti PPP, PBB, dan PKS. Hal itu mengindikasikan, kelompok Islam politik tidak mempercayai organisasi Muslim baik organisasi sosial keagamaan maupun organisasi politik. Hal ini karena dalam pandangan kelompok ini, seperti disinggung sebelumnya, organisasi Islam arus utama terlalu akomodatif dan kompromistis dalam sikap politik dan agama mereka terhadap realitas politik dan agama di Indonesia. Sebaliknya, kelompok kedua Islam politik cenderung tidak menunjukkan sikap akomodasi dan kompromi, dan karena itulah mereka terlihat radikal.

Eksistensi kelompok Islam politik radikal ini juga mendapat dukungan dari sebagian kelompok militer Indonesia (TNI), khususnya pada setelah kejatuhan Soeharto. Situasi politik tidak menentu di masa Presiden B. J. Habibie yang legitimasinya dipersoalkan sementara kalangan membuat munculnya kalangan Muslim yang ingin membelanya mati-matian. Mereka ini kemudian dikenal sebagai 'Pam Swakarsa' yang memusatkan diri mereka di Masjid Istiqlal Jakarta. Ada rumor yang menyebutkan, kelompok Pam Swakarsa yang menunjukkan indikasi radikalisme mendapat dukungan secara diam-diam dari kalangan militer Indonesia.



Kelompok politik Islam radikal dilihat dari asal muasal pertumbuhannya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, kelompok radikal yang pada dasarnya tumbuh dan berkembang di Indonesia; di antaranya Lasykar jihad—yang sudah membubarkan diri; FPI, dan beberapa kelompok lain yang lebih kecil. Kedua, kelompok yang bersumber dari Timur Tengah atau berorientasi kepada bermacam organisasi Timur Tengah, seperti JAMI yang berasal dari al-Ikhwan a-Muslimin di Mesir, dan Hizbut Tahrir, yang pada awalnya didirikan Syaikh Taqi al-Din Nabhani di Jordan pada 1950-an.

Semua kelompok Islam politik radikal ini memiliki orientasi ideologis dan praksis yang berkembang di antara gerakan-gerakan ‘Islamis’ (*Islamiyyun*) di Timur Tengah yang sangat mereka percayai sebagai dunia Islam yang sejati. Dalam pandangan keagamaan, mereka menganut ideologi salafi radikal, yaitu mewujudkan Islam yang ‘murni’ seperti dipraktikkan kaum Salam—para sahabat Nabi dan *thabi’in*. Dari segi pandangan politik, mereka menganut ideologi khilafatisme yang di antara tujuan terpentingnya adalah pembentukan entitas politik khilafah universal bagi seluruh Muslim di dunia. Selanjutnya, dengan adanya khilafah universal ini adalah penegakan syari’ah secara menyeluruh (bdk. Jamhari dan Jahroni 2004).

Meskipun kelompok Islam politik radikal ini memiliki tujuan mendirikan *khilafah* atau *dawlah Islamiyah* yang bersifat lokal dan regional, mereka sangat jauh berbeda dengan gerakan DI/NII di Indonesia. Kelompok radikal saat ini cenderung independen dari dan tidak terkait banyak dengan kelompok radikal terdahulu; atau mereka telah menjadi independen dari gerakan DI/NII (Ausop 2003).

Melihat gejala radikalisme di tengah masyarakat Muslim Indonesia khususnya, jelas fenomena ini memiliki sejarah panjang yang kompleks. Sejarah radikalisme di dalam masyarakat Muslim menunjukkan banyak faktor yang bertanggung jawab atas kemunculan-annya. Ada kecenderungan sangat kuat bahwa motivasi dan daya dorong radikalisme lebih terkait

dengan politik daripada agama. Terlihat jelas bahwa peningkatan radikalisme juga terkait erat dengan kekacauan sistem politik dan sosial di Indonesia pada masa awal reformasi. Secara keseluruhan, ketiadaan atau kurangnya penegakan hukum merupakan faktor penting bagi kelompok radikal untuk menegaskan diri mereka, antara lain dengan main hakim sendiri dan berbagai bentuk kekerasan lain dengan mengatasnamakan Islam.

AKSI ISLAM POLITIK RADIKAL

Organisasi teroris yang paling terkenal di Asia Tenggara, tidak diragukan lagi, adalah al-Jamaah al-Islamiyah (JI). JI terdaftar di antara sejumlah organisasi teroris dunia, dan disebut memiliki keterkaitan dengan al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden. Kita mengetahui bahwa sejumlah anggota JI telah ditahan aparat keamanan di beberapa Negara di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lain; dan sebagian di antaranya telah diajukan ke pengadilan karena keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan berbagai aksi pemboman yang terjadi di Indonesia. Bahkan Abu Bakar Baasyir, yang disebut-sebut sebagai pimpinan tertinggi JI, pernah dijatuhi hukuman 20 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada Februari 2005, bukan karena dugaan keterlibatannya dengan terorisme, tapi karena pemalsuan dokumen imigrasi ketika dia kembali ke Indonesia setelah mengasingkan diri di Malaysia pasca hukuman yang dijatuhkan pengadilan Indonesia di masa Soeharto.

Meskipun polisi dan perangkat hukum lainnya mengajukan berbagai macambukti tentang kepemimpinannya dalam JI dan dugaan keterlibatannya di dalam berbagai aksi pemboman, Baasyir dan pengikutnya menolak dan mengingkari bahwa ia adalah pimpinan JI. Sebaliknya, dia mengakui bahwa hanyalah pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI); dia menegaskan bahwa MMI tidak sama dengan JI, dan buka pula merupakan bagian dari



II.

Baasyir memang membingungkan banyak pihak. Banyak kalangan publik mengetahui, bahwa bersama Abdullah Sungkar, kawan lamanya, Baasyir mendirikan organisasi al-Jamaah al-Islamiyah. JI yang mereka dirikan tentunya berbeda dengan istilah *Jama'ah Islamiyah* yang secara generik berarti masyarakat Muslim secara umum. Tetapi, JI yang dibentuk Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir merupakan organisasi khusus dengan kepemimpinan, struktur, dan keanggotaan tertentu bagi mereka yang tertarik untuk masuk ke dalamnya.

Juga jelas bahwa JI pimpinan Abdullah Sungkar semula hampir tidak dikenal masyarakat Muslim Asia Tenggara umumnya atau di Indonesia dan Malaysia khususnya. Bahkan adalah kenyataan pula, baik Sungkar maupun Baasyir tidak begitu dikenal dalam dinamika pergerakan Islam di Indonesia sebelumnya. Hanya setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, khususnya setelah Presiden George W Bush mendeklarasikan perang melawan terorisme, nama JI sebagai organisasi teroris mulai menarik perhatian publik. Itulah sebabnya mengapa banyak di antara masyarakat Muslim di Asia Tenggara kemudian merasa skeptis dengan keberadaan JI. Bagi mereka, JI hanyalah sebuah organisasi bayangan yang dibuat intelijen Amerika Serikat untuk mendiskreditkan Islam dan Muslim.

Harus diakui, sangat sulit menilai secara persis dinamika dan struktur organisasi seperti JI, karena asal dan sifatnya yang merupakan organisasi tersembunyi, yang bergerak di bawah tanah. Namun, berdasarkan catatan kepolisian, ada beberapa hal yang dapat dilihat dari organisasi JI ini. Organisasi ini dipimpin oleh seorang *amir* yang dibantu sejumlah wakil pimpinan pada tingkat daerah (*mantiqi*) yang kemudian memiliki masing-masing wakil yang langsung mengatur mengatur para anggota. Pada umumnya anggota tidak pernah berhubungan langsung dengan *amir*; bahkan sangat boleh jadi para anggota pada tingkat akar rumput tidak

mengetahui siapa yang menjadi *amir* tertinggi. Hal ini mudah dipahami, karena cara kerja organisasi semacam ini terbentuk dalam sistem jaringan yang boleh jadi tidak mengetahui keberadaan jaringan lain, dan setiap jaringan dapat beroperasi secara independen.

Menurut sebuah laporan, Abdullah Sungkar yang memimpin JI pernah direkrut beberapa jenderal ABRI yang dekat dengan Presiden Soeharto. Bersama dengan Abu Bakar Baasyir, Sungkar direkrut Haji Ismail Pranoto (Hispran) untuk masuk gerakan NII pada pertengahan 1970-an. Sementara Hispran dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 1978 atas keterlibatannya di dalam Komando Jihad, Sungkar dan Baasyir pada awal 1980-an mampu mendirikan kelompok NII pimpinan mereka sendiri yang menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (Nursalim, 2001; Jamhari & Jahroni 2004: 56-7).

Menurut sejumlah studi lebih belakangan (Ausop 2005; Janhari dan Jahroni 2004; ICG 2004), kelompok Islam politik radikal tertentu di Indonesia memiliki keterkaitan DI/TII di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo yang ada pada 1950-an melakukan pemberontakan melawan Republik Indonesia. Meskipun militer Indonesia saat ini berhasil membasmi pemberontakan yang bertujuan mendirikan NII, banyak di antara anggota DI/TII dulu itu berhasil bertahan hidup selama beberapa kurun waktu, bahkan beberapa di antara mereka masih hidup hingga kini.

Meskipun mereka mampu bertahan, ketiadaan seorang pemimpin yang kuat menyebabkan perpecahan di kalangan mantan anggota DI/TII. Selain itu, perubahan strategi diantara mereka, apakah akan terus menggunakan pendekatan radikal seperti kekerasan dan pemberontakan, atau menerapkan pendekatan damai dalam usaha mereka mendirikan sebuah Negara Islam di Indonesia memperburuk perpecahan dan konflik yang terus berlanjut bahkan hingga saat ini.

Salah satu kelompok eks-DI/TII atau anggota NII yang disebut-sebut



melanjutkan pendekatan terorisme adalah Komando Jihad, yang melakukan sejumlah aktivitas terror pada 1970-an, di antaranya penyerangan kantor polisi di Bangkok. Tidak banyak hal yang dapat diketahui tentang kelompok yang disebut sebagai Kelompok Warman. Tetapi kecurigaan berkembang di kalangan masyarakat Muslim Indonesia bahwa kelompok radikal ini terdiri dari mantan anggota DI/TII atau anggota NII yang direkrut beberapa jenderal di lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto. Dengan menghasut mereka melakukan kegiatan kekerasan dan terorisme, Islam dapat didiskreditkan dan akhirnya memberikan justifikasi kepada militer Indonesia untuk menguasai dan mengendalikan Islam dan Muslim.

Sekali lagi, melihat aktivitas Sungkar dan Baasyir pada masa Soeharto jelas keduanya tidak mungkin melakukan kekerasan dan kegiatan terorisme. Namun demikian, mereka memilih untuk mengkritik pedas pemerintahan Soeharto. Secara umum, mereka menentang kebijakan Soeharto,; hal inilah kemudian yang menyebabkan mereka ditahan di balik jeruji penjara selama empat tahun pada 1978. Bebas dari tahanan pada 1982, Sungkar dan Baasyir melanjutkan perjuangan mereka melawan Soeharto dengan membentuk apa yang disebut dengan kelompok *usrah* (secara literal berarti keluarga) sebagai usaha mereka untuk mendirikan NII. Pada 1986, rezim Soeharto menahan sejumlah pimpinan *usrah* dengan tuduhan melakukan tindakan subversive; namun Sungkar dan Baasyir berhasil melarikan diri ke Malaysia. Di negara jiran inilah, mereka hidup selama 15 tahun dan kembali ke Indonesia pada 1999 setelah kejatuhan rezim Soeharto.

Salah satu kelompok NII terdahulu lainnya adalah kelompok NII KW 9 yang dipimpin Abu Toto yang bernama asli AS Panji Gumilang. Tidak ada yang mengetahui secara pasti apakah kelompok ini meninggalkan gagasan NII atau tidak; namun jelas kelompok ini memilih jalan damai dengan aktivitas dakwah, terutama pendidikan. Panji Gumilang menimbulkan keheranan di kalangan masyarakat Muslim, karena mendirikan Pondok Pesantren al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, yang terkenal karena

kemegahan bangunannya yang spektakuler. Dengan segera ia dituduh kalangan Muslim tertentu menyebarkan ajaran menyimpang di pesantren tersebut. Investigasi pihak berwenang dan Badan Penelitian Departemen Agama Republik Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada penyimpangan dari ajaran Islam di dalam Pesantren al-Zaytun, baik dalam segi akidah maupun praktik keagamaan.

IDEOLOGI ISLAM POLITIK RADIKAL

Sekali lagi, kita harus mengakui, perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional, regional, dan internasional, khususnya pasca peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, pada kenyataannya telah mendorong radikalisasi Islam politik jenis kedua, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penahanan dan pengadilan terhadap sejumlah individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia atas tuduhan keterlibatan dalam aksi terorisme mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki keterkaitan secara regional satu sama lain, dan juga dengan kelompok-kelompok radikal internasional.

Investigasi polisi Indonesia terhadap kasus bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002, misalnya, menyingkapkan adanya hubungan yang kompleks antara para individu dan kelompok militant yang kemudian melakukan aksi kekerasan dan teror, termasuk di antaranya pengeboman di Hotel Marriot dan Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta. Sebuah gambaran lebih jelas mengenai jaringan radikal kemudian menjadi terbuka. Sedikitnya ada dua pola yang mencolok terungkap dari investigasi yang dilakukan polisi pada kasus-kasus pengeboman. Yang pertama, beberapa pelaku pengeboman adalah alumni Pesantren Ngruki, Solo, Jawa Tengah, pimpinan Abu Bakar Baasyir, seperti disebutkan sebelumnya, dianggap pemimpin spiritual Jama'ah Islamiyah, inti dari



kelompok-kelompok radikal di Asia Tenggara. Kedua, beberapa pelaku pengeboman adalah veteran perang melawan Uni Soviet di Afghanistan (Azra, 2003b; ICG Agustus 2002; ICG Desember 2002; Nuralim 2001).

Persepsi tentang radikalisasi Islam politik jenis kedua di antara kelompok Muslim tertentu di Indonesia atau di Asia Tenggara muncul sesaat setelah peristiwa 11 September 2001 di New York dan Washington DC. Persepsi tersebut tumbuh dengan pesat setelah terjadi berbagai pemboman meledak di Tanah Air, terutama tragedy bom Bali yang menewaskan hamper 200 orang tak bersalah. Pengeboman gerai McDonald dan *showroom* mobil Haji Kalla di Makassar, Sulawesi Utara, pada perayaan Idul Fitri (5 Desember 2002), diikuti dengan pengeboman Hotel Marriot di Jakarta pada 2003, dan pengeboman di Kuningan atau tepatnya di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 9 September 2004 dan pemboman Bali II pada 2005, memperkuat adanya kecenderungan peningkatan tindakan terorisme di kalangan individu dan kelompok radikal di Indonesia. Kesimpulan ini dihasilkan dari hasil investigasi kepolisian di Indonesia yang menunjukkan bahwa para pelaku tindakan teroris ini adalah individu-individu yang diketahui merupakan anggota kelompok radikal tertentu.

Sekali lagi, perkembangan internasional berikutan dengan serangan terhadap Amerika Serikat pada 11 September 2001 telah menyebabkan individu dan kelompok tertentu di kalangan masyarakat Muslim Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi radikal untuk kemudian menganut ‘ideologi kebencian’ (*ideology of hatred*). Operasi militer Amerika di Afghanistan menyusul penyerangan atas World Trade Center di New York dan Markas Besar Pentagon di Washington DC merupakan momentum yang menguntungkan bagi individu dan kelompok radikal untuk menyatakan diri mereka secara lebih tegas.

Presiden George W. Bush yang memutuskan menyerang Irak sejak Maret 2003 menambah kebencian dan kemarahan di kalangan Muslim radikal. Lebih lanjut, penahanan sejumlah orang yang dianggap radikal

di Malaysia, Singapura, dan Filipina kian menambah kemarahan dan kebencian mereka terhadap Amerika Serikat dan simbol-simbol yang mereka anggap sebagai representasi dari imperialisme Amerika Serikat, seperti McDonald dan Kentucky Fried Chicken. Semua ini kian memperkuat 'ideologi kemarahan' mereka.

Tetapi, kita tidak boleh salah dalam memahami perkembangan baru semacam ini; karena pada kenyataannya radikalisme di kalangan Muslim Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Meskipun Islam di Asia Tenggara secara umum dianggap sebagai Islam yang moderat dan damai, namun sejarah Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa radikalisme di kalangan Muslim, sebagaimana akan dibahas nanti, telah ada selama kurang lebih dua abad silam, ketika gerakan Padri yang merupakan adaptasi dari gerakan Wahhabi di Sumatera Barat pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19 memegang kendali untuk memaksa masyarakat Muslim Sumatera Barat untuk mengikuti pemahaman Islam mereka yang literal. Gerakan Padri dengan kekerasan itu bertujuan menyebarkan kemurnian dan keaslian ajaran Islam sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya (*salaf*). Namun demikian, gerakan Padri gagal mendapatkan dukungan mayoritas Muslim local. Gerakan Padri merupakan satu-satunya contoh ideologi salafi radikal di seluruh Asia Tenggara. Gerakan Padri di Sumatera Barat memberikan contoh gerakan radikal dengan menggulirkan gagasan jihad melawan sesama muslim; dan setelah itu tidak ada lagi gerakan semacam itu dalam skala yang sebanding.

Jadi sekali lagi, dalam konteks terakhir ini, salafi radikal bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Gerakan Padri merupakan satu-satunya kelompok salafi radikal di Indonesia yang menggunakan kekerasan terhadap kaum Muslimin lain yang menolak mengikuti ajaran-ajaran mereka. Preseden ini tidak diikuti gerakan salafiyah lain di Indonesia, yang muncul sejak awal abad ke-20, ketika para pembaharu salafiyah asal Mesir seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha mengilhami



sehingga betul-betul mencerminkan demokrasi. Perubahan yang dimaksud Habib adalah ke arah kesadaran bahwa Dwifungsi itu bukan hak sejarah melainkan pengejawantahan komitmen dan tanggungjawab ABRI untuk melaksanakan dan melanjutkan pengisian kemerdekaan. Tapi sekali-kali jangan mengklaim bahwa rasa komitmen dan tanggungjawab itu hanya ada pada ABRI.

Habib melanjutkan pernyataannya tentang mendesaknya penghapusan hak-hak khusus ABRI sebagai bagian dari usaha mengubah praktik Dwifungsi ke arah yang lebih mencerminkan demokrasi. Salah satu hak khusus yang dikemukakan Habib adalah pengangkatan anggota ABRI di DPR. Pengangkatan seperti itu di mata Habib adalah suatu diskriminasi politik”. (Said 2002: 165). Namun, apapun kritik orang, pemerintahan Soeharto sejauh itu terus berjalan berdasar nilai-nilai dalam masyarakat warisan yang dengan penopang utamanya TNI/ABRI, Dwifungsi ABRI, dan Golkar.

Di tengah situasi itu, rakyat tampaknya belum merdeka. Tentu banyak faktor yang menyebabkan mengapa rakyat belum merdeka di alam kemerdekaan. Sepanjang kurun 1950 hingga 1960-an, persoalan utama yang dihadapi rakyat ialah terjadinya pelbagai gerakan “penentangan” (pemerintah tentu menggunakan istilah *pemberontakan*) terhadap pemerintah yang dilakukan dengan kekuatan bersenjata. Dengan senjata yang dimilikinya itu, seperti halnya TNI, penentang mempunyai kekuatan memaksa. Maka, ada wilayah di Indonesia yang berada dalam “kekuasaan penuh” kekuatan penentang. Di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan-Tenggara, dan di Kalimantan Selatan, misalnya terdapat daerah tertentu yang dapat dikatakan dikuasai oleh pasukan “pemberontak”. Dalam situasi seperti itu, rakyat yang berada dalam wilayah “penguasaan” para penentang itu praktis belum merdeka. Mereka dalam suasana ketakutan karena mendapat tekanan dari pasukan penentang pemerintah, bahkan bisa ditembak dengan tuduhan “memihak pemerintah.” Di sisi lain, pasukan pemerintah juga menekan rakyat di daerah yang sama dengan tuduhan “memihak kepada pemberontak.”

Sementara itu, walau Presiden Soeharto telah menjalankan program pembangunan lima tahunan (Repelita) dan oleh sementara pihak dianggap berhasil, bahkan mendapat "pujian" dari lembaga internasional, namun di balik itu, masih amat banyak rakyat yang belum merdeka. Merdeka dari kemiskinan ketakutan, misalnya, tampak masih merupakan mimpi. Contoh, pada masa reformasi sekalipun, pasukan ketenteraman dan ketertiban di kota-kota besar memukuli dan merusak barang dagangan pedagang kaki lima. Dalam masa rezim Orde Baru, orang yang dianggap anti-Pancasila dan menolak Dwifungsi terkucilkan. Selama pemerintahan Soeharto, jelas ada daerah yang mengalami penderitaan karena tekanan, dan tidak merasakan kemerdekaan. Tidak terlalu salah untuk menyebut Aceh sebagai contoh konkret.

Rakyat miskin yang tidak merdeka di republik yang merdeka ini, tidak bisa disebut sedikit jumlahnya. Beberapa waktu yang lalu, dalam acara *talkshow* di berbagai media televisi diperdebatkan jumlah orang miskin: 67 juta ataukah 37 juta orang. BPS menyebut angka 37 juta, sementara pihak lain, dengan patokan penghasilan \$2,00 sehari (Bank Dunia), menyebut angka 67 juta orang. Berita yang lain, masih ada 117 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan (*Koran Jakarta*, 24 Juni 2011). Perhitungan mana pun yang benar, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa meski secara faktual sekian puluh tahun Indonesia telah merdeka sebagai negara-bangsa, namun puluhan juta unsur bangsa itu belum merdeka sepenuhnya!

BANTUAN ASING IMF YANG TIDAK MEMERDEKAKAN

Ada dua adegan menarik dalam tayangan berita di televisi. Yang pertama, seorang ibu sederhana yang suaminya menjadi buron karena dituduh terlibat mencuri aliran listrik milik Perusahaan Listrik Negara di Tangerang. Saat ditanya wartawan televisi, apakah Si Ibu mengetahui



mengapa suaminya buron dan di mana keberadaan suaminya, ia marah atas perlakuan aparat pemerintah terhadap suaminya sambil menunjukkan kenyataan miskin yang dialaminya. Tiba-tiba ia mengeluarkan pernyataan yang mengagetkan, "Apa gunanya ada Pancasila?"¹⁴ Tayangan yang kedua mengenai keadaan sosial-ekonomi masyarakat di sebuah kecamatan di Jawa Tengah yang memperlihatkan seluruh penduduknya idiot dan sangat miskin sehingga makanan sehari-hari mereka hanyalah nasi aking dan tiwul.¹⁵

Kedua adegan berita tersebut memberi bukti bahwa pernyataan Soekarno—yang ingin memerdekakan rakyat di alam kemerdekaan—tidak sepenuhnya dapat dengan segera terwujud. Artinya, di alam Indonesia merdeka yang telah berlangsung lebih dari setengah abad, masih amat banyak warga bangsa yang belum merdeka seutuhnya. Tentu banyak sebabnya. Sebuah bangsa yang baru merdeka, tantangan yang utama ialah merumuskan model masyarakat apa yang diinginkan, dan menentukan langkah strategis untuk mewujudkannya. Tampaknya ketika hendak menjawab atau mewujudkan tantangan itulah para pemimpin dan pengemban tanggung jawab dalam pemerintahan serta para tokoh politik dan cerdik-pandai "mengalami kesulitan."

Model masyarakat yang hendak kita wujudkan sebenarnya telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa-negara ini sejak mereka masih berjuang untuk memerdekakan bangsa dan negaranya. Hal itu dirumuskan dengan jelas dalam pembukaan undang-undang negara— UUD 1945)—yaitu *masyarakat adil dan makmur*; dan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang ideal-visioner itu ialah Pancasila dengan salah satu silanya berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Namun, sepanjang masa merdeka hingga kini, pemerintah yang berkuasa silih-berganti untuk pembangunan, tidak pernah merumuskan lanjut usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang berkeadilan sosial bagi

14 Tayangan TVOne, saya tonton pada Februari 2011.

15 Tayangan TVOne, saya tonton pada Oktober 2010.

seluruh rakyat itu. Yang terjadi, rumusan model masyarakat masa depan Indonesia merdeka itu hanyalah “permainan verbal” dari mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.

Model masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu telah dirumuskan kembali selama kekuasaan Presiden Soekarno yang singkat dalam periode Demokrasi Terpimpin (1959–66), yang berbunyi *Sosialisme Indonesia*. Tetapi, lagi-lagi rumusan yang tampaknya memang cita-cita Soekarno sejak awal keterlibatannya sebagai pemimpin utama pergerakan kemerdekaan pada 1927 sampai masa setelah kemerdekaan, juga tidak lebih dari ungkapan verbalistik yang dipidatokan dalam setiap kesempatan. Bahkan, menjadi bahan utama dalam kegiatan resmi pemerintah—dalam rangka penyelesaian revolusi—yang disebut indoktrinasi Manipol USDEK untuk menciptakan “kader-kader revolusi.”

Demikian pula dengan pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto yang menjalankan pembangunan dengan fokus pembangunan ekonomi—prioritas bidang pertanian —perancangannya tidaklah sebagai penjabaran untuk mewujudkan model masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Walaupun pemerintah menjalankan pembangunan dengan program lima tahunan yang jelas, namun dalam kurun itu bangsa-negara merdeka ini terjebak oleh strategi situasional yang dilakukan oleh kekuatan asing kapitalis yang dalam kenyataannya merupakan strategi penjajahan “model baru”.

Strategi situasional tersebut terbagi menjadi dua jebakan. Yang pertama sebagaimana yang diungkapkan oleh John Perkins:

Hingga tahun 1971, tekad Amerika Serikat untuk menjauhkan Indonesia dari komunisme menguat karena hasil Perang Vietnam terlihat sangat tidak pasti. Presiden Nixon telah memulai serangkaian penarikan pasukan pada musim panas 1969, dan strategi Amerika Serikat cenderung berperspektif lebih global. Strategi difokuskan untuk mencegah efek domino bahwa satu negara jatuh ke tangan komunis setelah yang lainnya, dan strategi itu difokuskan pada beberapa negara; *dimana Indonesia adalah yang utama*.

Dasar pikiran kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah bahwa Soeharto akan *melayani Washington* dengan cara yang serupa dengan Shah Iran. Amerika Serikat juga berharap bangsa itu akan berfungsi sebagai model untuk negara lainnya di wilayah itu. Washington mendasari bagian dari strateginya pada asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh di Indonesia mungkin mempunyai reaksi yang positif bagi seluruh dunia Islam, terutama di Timur Tengah yang mudah meledak. Dan jika itu bukan perangsang yang cukup, *Indonesia memiliki minyak*. Tak seorang pun yakin tentang jumlah atau kualitas cadangan minyaknya, tetapi para seismolog perusahaan minyak merasa gembira sekali dengan berbagai kemungkinan itu.¹⁶

Strategi jebakan kedua, diungkapkan oleh seorang sastrawan-cendekiawan, Budi Darma, dari Surabaya. Dikatakannya,

Dalam perundingan mengenai penanaman modal asing, sementara itu, kita sering berada pada pihak yang dikalahkan. Contoh yang bukan rahasia antara lain dapat dilihat dari kasus pertambangan; penduduk dikorbankan, lingkungan dirusak, pembagian keuntungan tak seimbang; sementara kalau ada gejolak, pihak asing langsung atau tidak langsung jadi pemenang.

Dalam sebuah percakapan tak resmi, ekonom Faisal Basri menyatakan bahwa kekalahan dalam penanaman modal asing dimulai pada zaman Orde Baru, waktu kita dalam keadaan terpaksa. Memang benar, andai kata tak ditopang oleh kekuatan asing, kemungkinan Orde Baru tak mampu mempertahankan kekuasaan dalam waktu lama. Situasi dan kondisi pada waktu itu memaksa Indonesia dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan asing dalam penanaman modal (Darma 2011).

Artikel guru besar itu membicarakan hal yang dikutip tersebut untuk menjadi contoh betapa terpuruknya “republik merdeka” ini karena ketiadaan daya menghadapi kekuatan asing sehingga “terpaksa mengemis” bantuan mereka. Kita kehilangan martabat diri sebagai bangsa-negara merdeka! Ironinya, atas nama bantuan untuk pembangunan bangsa ini justru dilakukan oleh lembaga internasional, seperti International Monetary Fund. Selanjutnya, Budi Darma mengungkapkan,

Tengoklah, misalnya, ulah IMF mendatangkan konsultan asing ke instansi pemerintah pada tahun 1980-an. Mereka dianggap pandai dan terhormat karena mereka bukan orang Indonesia. Seorang pembesar Depdikbud terpaksa mengaku bahwa kemampuan banyak konsultan itu “setara” dengan sopir bus kota di Jakarta (Darma 2011; cetak miring dari penulis, AG).

Kedua strategi itulah yang dijalankan oleh bangsa asing dan lembaga keuangan internasional ketika pemerintah Indonesia sangat memerlukannya.

¹⁶ Lihat Perkins 2005: 23–4; cetak miring dari penulis (AG).

Tetapi, patut diperhatikan bahwa di balik itu, menurut Perkins, ada dua hal yang menjadi kepentingan Amerika Serikat, yaitu menempatkan Indonesia dalam rangka “perang dingin” untuk menghadapi kekuatan blok Komunis ketika itu—bahkan ada kata-kata “Soeharto akan melayani Washington” yang sangat melecehkan tidak hanya bagi Soeharto pribadi, tetapi juga terutama bangsa Indonesia. Kedua, Amerika juga mengincar sumber minyak yang dimiliki oleh perut bumi Indonesia. Dengan menggunakan IMF, sejak periode Orde Baru pimpinan Soeharto itu, pemerintah negara republik yang memang “kaya” ini dililit utang dari sejumlah negara asing, dan lembaga keuangan internasional, antara lain IMF. Namun, dengan bantuan dari IMF itu, kenyatannya Indonesia belum berhasil keluar dari kesulitan ekonomi, justru sebaliknya semakin terpuruk.

Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia *diwajibkan* melaksanakan paket kebijakan konsensus Washington melalui penandatanganan *Letter of Intent* (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. . . . Oleh karena itu, ketika terjadi krisis keuangan tahun 1998, IMF dengan *leluasa mengatur dan mendikte* pemerintah Indonesia seenaknya sendiri (Sudjiono dan Soenardijo 2009: 73; cetak miring dari penulis, AG).

Ternyata “keasyikan” meminta bantuan asing sampai sekarang masih berlanjut. Beberapa waktu yang lalu diberitakan bahwa utang Indonesia saat itu mencapai 1.078 triliun rupiah. Jumlah yang tentu saja harus dibayarkan kembali oleh generasi yang akan datang.

KARENA SAKIT GANTI BULU?

Apakah waktu sekitar 60 tahun masih terasa singkat untuk bekerja yang menghasilkan secara pasti bahwa kita memang merdeka? Yang tampak, sekali lagi, sebagian besar rakyat di negeri ini belum merdeka. Kalau begitu, apa yang menyebabkannya? Mungkinkah karena bangsa ini masih *in transformatie*, sakit ganti bulu, seperti yang dikatakan Soekarno,



yaitu penyakit yang menjadi sebab bangsa Indonesia dijajah orang asing. Seajar dengan itu kita dapat mengatakan, mungkinkah dewasa ini, di dalam alam kemerdekaan ini, kita juga mengalami sakit ganti bulu dari bangsa-negeri jajahan menjadi bangsa-negara merdeka. Apakah hal itu yang menjadi sebab sehingga kita belum mampu merumuskan kembali dan berlanjut tentang tatanan model masyarakat adil dan makmur yang akan kita wujudkan di hari depan. Atau, apakah kegagalan kita memerdekakan rakyat di alam kemerdekaan sekarang ini karena sebagian besar pemimpin dan warga masyarakat kita masih bermental dan berpegang pada (sistem) nilai masyarakat warisan?

DAFTAR ACUAN

- Darma, Budi (2011), "Martabat Bangsa," *Kompas*, 30 Juni.
- Davidson, Jamie S., David Henley, Sandra Moniaga (ed.) (2010), *Adat dalam Politik Indonesia*, terj. Emilius Ola Kleden dan Nina Dwisasanti. Jakarta: KITLV Perwakilan Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Gonggong, Anhar (1985), *Biografi H. O. S. Cokroaminoto*. Jakarta: Ditektorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2002), *Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan: Pergumulan antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Ciptaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Hatta, Muhammad (1966), *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka, Indonesia Adil dan Makmur*. Bandung: Angkasa.
- (2002), *Memoir: Terbitan Khusus Satu Abad Bung Hatta*. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Jenkins, David (2010), *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975–1983*, terj. Depok: Komunitas Bambu.
- Muluk, Hamdi (2010), *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Panitia Pembinaan Djiwa Revolusi (1961?), *Tudjuh Bahan² Pokok Indoktrinasi*. Jakarta.
- Perkins, John (2005), *Confession of an Economic Hit*, diterjemahkan sebagai *Pengakuan Seorang Ekonom Perusak*. Jakarta: Abdi Tandır.
- Said, Salim (2002), *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Militer Indonesia 1958–2000*. Jakarta: Aksara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta.

Sudjiono, Budi dan Soenardijo (2009), *Neolib (Neoliberalisme) Ekonomi dan Etatisme*. Jakarta: Golden Terayon Press.

Sukarno (1964), *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Dibawah Bendera Revolusi.

— (1982), *Mencapai Indonesia Merdeka*. Jakarta: Inti Idayu Press dan Yayasan Pendidikan Soekarno.

Yamamoto Haruki (2010), *Gelora Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Dian Rakyat.





BAGIAN KEDUA
HISTORIOGRAFI



Membincangkan Kembali Historiografi Indonesiasentris Sebuah Pemikiran Awal

BAMBANG PURWANTO
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Perubahan politik yang terjadi di Indonesia kurang lebih satu dekade terakhir ini telah menciptakan beberapa fenomena yang menarik jika dilihat secara historiografis. Salah satunya, kebijakan desentralisasi kekuasaan dan menguatnya otonomi daerah seiring dengan perubahan politik nasional sejak akhir abad yang lalu, ditandai oleh semakin besarnya keinginan setiap kesatuan wilayah administratif dan kultural untuk menulis sejarah lokal masing-masing. Ada kesan yang kuat bahwa konstruksi sejarah yang dihasilkan tidak lagi sekedar memuat asal usul dari unit administratif atau budaya tertentu itu, melainkan telah berkembang pada elemen-elemen lain yang secara sadar dihadirkan untuk menunjukkan identitas diri yang berbeda dari yang lainnya.

Dalam perkembangan historiografi Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan, penulisan sejarah lokal pada periode-periode awal dilakukan untuk menghasilkan konstruksi sejarah yang berimbang secara kewilayahan dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan dominasi Jawasentris, baik dalam pengertian substansi faktual maupun cara pandang dalam Sejarah Indonesia. Pada periode itu, penulisan sejarah lokal pada intinya merupakan satu kesatuan dengan penulisan sejarah nasional Indonesia, yang menempatkan cara pandang keindonesian sebagai rujukan utama secara historiografis untuk menghadirkan keunikan yang terjadi di tingkat lokal sebagai bagian dari sejarah nasional. Biarpun orientasi politis sudah muncul pada setiap penulisan “sejarah hari jadi” dari satu unit wilayah administratif tertentu sebagai contoh, dalam kenyataanya

jikapun ada kepentingan politik di dalamnya, hal itu hanya terbatas pada persoalan politik lokal semata. Sementara itu dalam konteks yang lebih makro, perkembangan diskursus penulisan sejarah dari dalam yang mulai diperkenalkan secara umum dalam kajian sejarah negara-negara bekas koloni pada tahun 1960-an, menjadi salah satu inspirasi berkembangnya keinginan memasukkan unsur-unsur sejarah lokal dalam proses dekolonisasi historiografi Indonesia. Penulisan sejarah lokal itu merupakan upaya untuk menunjukkan peran pokok bangsa Indonesia dalam proses terbentuknya kesatuan geopolitik Indonesia, berdasarkan kenyataan-kenyataan masa lalu yang terjadi di tingkat lokal.

Akan tetapi dalam perkembangan akhir-akhir ini, penulisan sejarah lokal cenderung kembali pada perspektif regiosentris dan etnosentris, salah satu ciri dominan yang juga ada di dalam tradisi historiografi kolonial dan “historiografi tradisional”. Keberadaan sejarah lokal mutakhir itu berfungsi untuk membangun basis legitimasi historis, kultural dan sekaligus intelektual atas kekuasaan politik kedaerahan, terutama kepentingan praktis masing-masing etnik dominan yang ada di dalamnya. Persoalan Jawa dan luar Jawa atau pusat dan daerah yang sebelumnya menjadi alasan utama, sekarang seolah-olah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting. Pemikiran yang berkembang telah melampaui batas alasan-alasan sebelumnya, beralih lebih jauh pada hak mutlak anak negeri atas kekuasaan di lokalitas masing-masing tanpa mempedulikan ikatan kebangsaan yang telah disepakati sebelumnya. Sejarah dimanfaatkan secara sistematis untuk membedakan sebuah wilayah administratif dan kultural tertentu dengan yang lain, sehingga menempatkan elemen lain di luarnya sebagai sesuatu yang dianggap asing walaupun berada dalam satu ikatan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia selama ini. Persoalan asli dan asing telah dipersempit sampai batas-batas administratif kedaerahan dan kesukuan, bukan lagi kenegaraan dan kebangsaan dalam arti yang luas.

Konstruksi sejarah yang dibangun bahkan secara konseptual telah mengarah pada “sejarah daerah” dalam pengertian politik, bukan sejarah

lokal seperti yang dikenal dalam ilmu sejarah, dan bahkan sampai batas tertentu menantang keberadaan konsep kebangsaan yang telah ada. Secara teoretik hal itu tentu saja dapat memicu munculnya ruang krisis dalam konteks identitas nasional, ketika Indonesia tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam membangun identitas diri secara historis di masing-masing wilayah atau komunitas. Oleh karena itu secara historiografis, keadaan itu menimbulkan pertanyaan praktis yang pernah diperdebatkan sebelumnya tentang relevansi Indonesiasentris dalam Sejarah Indonesia, terutama menyangkut struktur dan fungsinya. Hal itu juga langsung mengingatkan kembali pada pendapat Mohammad Ali dan Bambang Oetomo kurang lebih 50 tahun lalu, yang menyatakan “cerita sejarah yang bersifat Indonesia-sentris itu tidak bersifat regiosentris, etnosentris atau xeno-sentris” (R. Moh. Ali 2005), dan “historiografi Indonesia belum memberi sumbangan bagi ilmu sejarah” (Bambang Oetomo 1961). Akan tetapi sejauh manakah dan dalam hal apakah pernyataan itu masih relevan dalam konteks penulisan sejarah yang didasarkan pada Indonesiasentris di masa depan?

Sementara itu dalam konteks yang lain, setelah kurang lebih 40 tahun sejak Sartono Kartodirdjo memperkenalkan formula metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial sebagai jalan keluar atas tidak aplikatif dan relevannya Indonesiasentris untuk membangun konstruksi Sejarah Indonesia, komunitas sejarawan Indonesia seolah-olah tidak lagi menjadikan Indonesiasentris dan konsekuensi metodologisnya sebagai sesuatu yang perlu diperbincangkan secara ilmiah. Sebelum itu sampai awal tahun 1960-an sejak “falsafah sejarah spekulatif” yang menjadi landasan sejarah nasional diperbincangkan secara luas dalam Seminar Sejarah tahun 1957, pada waktu itu dua cendekiawan Indonesia Mohammad Ali dan Soedjatmoko secara terus menerus mencoba membangun pemaknaan yang tepat secara keilmuan atas formulasi filosofis dari Sejarah Indonesia yang dibingkai oleh Indonesiasentrisme (Soedjatmoko, dkk., ed. 1995). Mohammad Ali secara pribadi bahkan menerbitkan sebuah buku pada tahun 1961, yang mengisyaratkan adanya ilmu sejarah Indonesia sebagai

sebuah disiplin yang mandiri. Ironisnya dalam jangka waktu yang cukup lama, buku karangannya salah satu sejarawan akademik awal yang dimiliki oleh Indonesia itu seakan-akan hilang di telan bumi dan dilupakan dalam perbincangan studi sejarah setelah tragedi politik tahun 1965. Terlepas dari keberadaannya, buku Mohammad Ali itu jarang, kalau tidak mau menyebutnya tidak lagi dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan-jurusan sejarah yang ada, paling tidak di Universitas Gadjah Mada yang menjadi salah satu pusat pembelajaran sejarah di Indonesia sepanjang kurang lebih tiga dekade terakhir abad ke-20. Buku itu hanya diketahui oleh para mahasiswa dan mungkin juga dosen sejarah tertentu, yang mengenalnya di awal tahun 1960-an atau generasi lebih muda yang kebetulan menemukannya di dalam koleksi usang perpustakaan. Bahkan tersirat pada para mahasiswa sejarah telah terjadi rekayasa sosial atau mungkin juga politik, yang secara sengaja ingin memberi pesan sejak awal bahwa buku itu tidak cukup berharga dan bermutu untuk menjadi referensi dalam proses pembelajaran. Baru setelah diterbitkan kembali pada tahun 2005, buku ini mulai kembali secara resmi menjadi referensi dalam proses pembelajaran sejarah di Indonesia.¹

Sejak akhir 1960-an dan awal 1970-an, Sartono Kartodirdjo muncul sebagai figur dominan, kalau tidak mau disebut satu-satunya sejarawan Indonesia yang membangun muatan keilmiahan pada cara pandang keindonesiaan dalam merekonstruksi Sejarah Indonesia. Berdasarkan konsep integrasi yang bersumber dari metodologi sejarah struktural dan pendekatan ilmu-ilmu sosial, Sartono Kartodirdjo berhasil meyakinkan para sejarawan Indonesia bahwa konsep Indonesiasentris tidak perlu lagi diperdebatkan karena telah memiliki kekuatan metodologis yang memadai untuk kerja kesejarahan yang didasarkan keadah-kaedah ilmu pengetahuan. Akibatnya setelah seminar sejarah Indonesia kedua di Yogyakarta pada tahun 1970

¹ Terlepas dari tidak luasnya pengetahuan redaktur dari penerbit yang baru secara personal, terutama berkaitan dengan jaringan para sejarawan Indonesia, pernyataan tentang hak cipta di dalam pengantar redaksi pada cetakan tahun 2005 mengisyaratkan tentang ketidaktahuan sebagian besar generasi yang dibesarkan setelah tahun 1965 terhadap buku karangan salah satu sejarawan utama Indonesia yang pernah menjadi Kepala Arsip Nasional Indonesia ini (R. Moh. Ali 2005).



dan diterbitkannya buku Sejarah Nasional Indonesia pertama kali pada tahun 1975, ada kesan bahwa persoalan filosofis dan metodologis seakan-akan sudah selesai dan tidak lagi menjadi hal yang perlu diperdebatkan di antara para sejarawan Indonesia (Bambang Purwanto 2006). Jikapun ada perdebatan dalam forum-forum ilmiah para sejarawan, maka hal itu hanya berkisar pada persoalan seputar substansi faktual dan ideologis daripada keilmuan. Padahal buku Sejarah Nasional Indonesia sendiri masih menyisakan persoalan besar dalam penjabaran konsepsi Indonesiasentris dalam Sejarah Indonesia yang perlu diperdebatkan, karena secara sengaja mengeluarkan masa lampau kebudayaan dengan alasan “jenis sejarah ini sudah sejak lama mandiri dan ruang lingkup penulisan ini terpaksa dibatasi” (Sartono Kartodirdjo, dkk. 1975). Sebuah alasan yang sangat simplistik, dan tidak menggambarkan sebuah konsepsi historiografis yang katanya didasarkan pada sejarah *neoscientific*. Walaupun buku Sejarah Nasional Indonesia, yang awalnya terdiri dari 6 jilid dan sejak tahun 1993 menjadi 7 jilid telah memberi ruang yang lebih luas bagi elemen-elemen sosial disamping masih tetap kuatnya elemen politik, ketidakhadiran elemen budaya seakan-akan telah menghasilkan Sejarah Indonesia tanpa jiwa. Latar belakang itu tentu saja sekali lagi menimbulkan pertanyaan, apakah masih tetap relevan membicarakan kompleksitas pemikiran kesejarahan di Indonesia untuk dapat memahami konsepsi Indonesiasentris dan konsekuensi metodologisnya sebagai dasar bagi penulisan Sejarah Indonesia di masa depan?

Anggapan yang telah disebutkan di atas ternyata tidak seluruhnya benar jika merujuk pada tulisan-tulisan Taufik Abdullah dan almarhum Kuntowijoyo, dua orang kolega muda Sartono Kartodirdjo yang kemudian menjadi bagian utama dari sedikit sejarawan Indonesia generasi berikutnya yang mau bersusah payah berpikir secara filosofis, teoretis dan metodologis. Meminjam istilah yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh beberapa pengamat historiografi Indonesia, Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo dapat dikategorikan sebagai aktor yang membangun oposisi loyal terhadap

pandangan-pandangan kesejarahan Sartono Kartodirdjo. Keduanya memiliki banyak kesamaan secara keilmuan dengan Sartono Kartodirdjo, kalau tidak mau disebut terinspirasi oleh cara pandang sejarah yang dibangun oleh Sartono Kartodirdjo. Salah satu diantaranya dapat dilihat dari adanya pengaruh “ilmu sejarah gaya *neoscientific*” yang diperkenalkan Sartono Kartodirdjo pada pemikiran kesejarahan generasi kedua sejarawan Indonesia itu. Seperti juga Sartono Kartodirdjo yang ingin menyetarakan aktor-aktor sejarah dan memberi ruang sejarah bagi “orang kecil” dan kebanyakan (Sartono Kartodirdjo 1982), Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo juga cenderung melakukan “demokratisasi” sejarah dan memberi tempat pada mereka dan peristiwa yang terabaikan dalam penulisan sejarah gaya lama. Akan tetapi dalam beberapa hal, keduanya ternyata menunjukkan perbedaan yang sangat prinsipil dibandingkan dengan pemikiran Sartono Kartodirdjo. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, sampai batas tertentu Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo telah keluar dari kerangka besar pemikiran Indonesiasentris yang didasarkan pada sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan Sartono Kartodirdjo. Walaupun selalu menyatakan adanya keterkaitan secara keilmuan dengan Sartono Kartodirdjo, mereka berdua sebenarnya telah membangun konsepsi kesejarahan yang berbeda, sesuai dengan dasar berpikir filosofis dan epistemologis masing-masing.² Pada tataran praktis, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa perbedaan itu tidak berkembang menjadi perdebatan ilmiah dalam konteks perkembangan historiografi Indonesia dan ilmu sejarah?

Kuntowijoyo yang pernah menjadi murid langsung Sartono Kartodirdjo misalnya, melihat sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan gurunya sebagai sebuah alternatif metodologi untuk mengoperasionalkan konsepsi Indonesiasentris telah membawa Sejarah Indonesia hidup di menara gading dan terasing dari masyarakatnya. Ketika

²Sampai batas tertentu, Onghokham berada pada posisi yang sama dengan Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo yang membangun pemikiran kesejarahan yang agak berbeda dengan arus besar yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirdjo (Onghokham 2003).



metodologi ini berkembang bersamaan dengan kekuasaan otoritarian Orde Baru, Sejarah Indonesia “tidak mengancam rezim”, “tidak menyumbangkan apapun, tidak berkontradiksi pada siapapun, dan aman bagi semua orang”, karena sejarah tidak berfungsi sebagai kritik sosial menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo: 2000). Lebih lanjut Kuntowijoyo menyatakan, hampir-hampir tidak ada sejarawan Indonesia yang muncul sebagai martir untuk melawan kezaliman sebuah rezim otoritarian melalui konstruksi sejarah yang dibuatnya. Jika Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa penulisan Sejarah Indonesia harus melepaskan diri dari aspek etik untuk menunjukkan netralitas ilmu pengetahuan, sebaliknya Kuntowijoyo melihat elemen etik yang bukan bermakna sebagai moralisasi sejarah menjadi sesuatu yang penting dalam historiografi Indonesia masa depan sehingga sejarah tidak menjadi antikuarian melainkan relevan bagi setiap kekinian. Oleh karena itu Kuntowijoyo memperkenalkan sejarah sebagai kritik sosial, disamping sejarah sebagai sistem dan transformasi dalam historiografi Indonesia baru yang dia bayangkan. Tidak seperti Sartono Kartodirdjo yang secara tegas melepaskan pemikiran kesejarahannya dari elemen religio-magis dan beralih kepada empiris-ilmiah, Kuntowijoyo tidak pernah takut pada pengaruh elemen keagamaan dalam proses membangun konsepsi pemikiran kesejarahannya.

CarapandangkesejarahanKuntowijoyodi atasmerupakan satukesatuan dengan konsepsi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial profetik yang dikembangkan dalam karya-karyanya yang lain. Berdasarkan konsepsi itu, sejarah menurut Kuntowijoyo dapat dikategorikan sebagai bagian dari ilmu *nafsiyah* atau humaniora yang “berkenaan dengan makna”. Merujuk pada klasifikasi keilmuan yang didasarkan pada paradigma Al-Quran, sejarah menurut Kuntowijoyo memang tidak mengutamakan elemen spiritual dan moral pada tataran normatif semata melainkan sebagai sebuah kekuatan perubahan sosial yang didasarkan pada misi humanisasi, liberalisasi, dan transendensi bagi terciptanya masyarakat yang lebih baik dan membangun peradaban (Kuntowijoyo 2006). Berdasarkan hal itu, maka pemikiran

kesejarahan profetik sebagai sistem pengetahuan berkoherensi dengan iman yang bersumber pada *tauhid* untuk menghasilkan metodologi. Tiga kesatuan *tauhid* yaitu pengetahuan, kehidupan, dan sejarah, akhirnya membentuk satu kebenaran sejarah, tidak adanya perbedaan antara sejarah yang sarat nilai dan bebas nilai, dan pada dasarnya sejarah bermanfaat baik bagi umat maupun manusia secara umum.

Dalam konteks ini berbeda dengan Sartono Kartodirdjo yang cenderung kebarat-bataran dan sekuler terlepas dari adanya pengaruh Agustinus dan Ibnu Khaldun dalam pemikiran kesejarahannya, Kuntowijoyo memasukkan elemen spiritual keagamaan ke dalam konsepsi kesejarahannya untuk merekonstruksi Sejarah Indonesia. Kuntowijoyo tidak berhenti dengan mereproduksi dasar berpikir yang sama melainkan selalu berusaha mengisi kekosongan roh spiritual yang masih terbuka dari pemikiran *social scientific* kesejarahan Sartono Kartodirdjo.³ Kuntowijoyo dapat dikatakan membangun jati diri intelektualnya sebagai sejarawan dengan cara mengubah premis-premis normatif Alquran menjadi pemikiran kesejarahan yang empirik dan rasional sebagai sebuah metodologi. Berbeda dengan Marxisme yang memposisikan agama sebagai candu yang menimbulkan kejumudan, maka Kuntowijoyo menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan fondasi bagi sebuah formulasi ilmu pengetahuan untuk kemajuan dan membebaskan umat manusia. Pemikiran kesejarahan Kuntowijoyo melampaui batas ilmu sebagai ideologi dogmatis yang menjadi ciri khas Marxisme dan rezim pengetahuan otoriter lainnya, sesuatu yang sangat relevan dan memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip demokratisasi historiografi Indonesia yang diperkenalkan oleh Sartono Kartodirdjo.

Kuntowijoyo lebih jauh berharap agar historiografi Indonesia yang dikembangkan itu dapat terus “melayani masyarakat tanpa kehilangan sejarah sebagai disiplin akademik” (Kuntowijoyo 2000). Hal itu

³Pada tataran yang lebih praktis, adanya perbedaan dasar berpikir ini menyebabkan Kuntowijoyo bersama-sama dengan karibnya Djoko Suryo memisahkan mata kuliah Teori Sejarah dengan Metodologi Sejarah dalam proses pembelajaran di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, sesuatu yang selalu dipertanyakan oleh Sartono Kartodirdjo semasa hidupnya.



menunjukkan bahwa Kuntowijoyo tidak mempertentangkan antara fungsi sejarah sebagai sebuah ilmu dengan sejarah sebagai gerakan sosial, ketika sejarah sebagai historiografi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosio-kultural masyarakatnya. Pendapat ini mengingatkan kita pada pernyataan Sartono Kartodirdjo yang menyatakan, “historiografi tidak dapat sepenuhnya diterangkan, tanpa menempatkannya dalam hubungannya dengankontekskulturalnya...(yang)merupakanrefleksidariikatankulturnya atau jiwa zamannya” (Sartono Kartodirdjo 1983). Jika sejarah sebagai sistem dan transformasi hanya berfungsi untuk membangun rekonstruksi tentang masa lalu untuk memahami masa lalu, maka sejarah sebagai kritik sosial memiliki kemampuan merekonstruksi masa lalu untuk memahami masa kini dan merancang masa depan (Kuntowijoyo 2000). Berdasarkan pemikiran kesejarahannya itu, historiografi Indonesia diasumsikan Kuntowijoyo tidak hanya terbebaskan dari jeratan Neerlandosentrisme dan kolonialsentrisme yang berkesinambungan, melainkan juga memberi ruang yang jauh lebih besar pada mereka yang tertindas dan termarginalkan untuk juga memiliki hak atas sejarah. Terinspirasi oleh Sartono Kartodirdjo yang menghadirkan petani untuk merepresentasikan hak sejarah orang Indonesia yang terabaikan dalam historiografi kolonialsentris, Kuntowijoyo melalui tanggung jawab keagamaan dan sosialnya selalu berusaha menghadirkan kenyataan sejarah dari masa lalu masyarakat yang tidak mendapat tempat dalam historiografi Indonesia sebelumnya, termasuk tulisannya tentang sejarah Madura.

Sementara itu dalam konteks yang lain, Sartono Kartodirdjo sangat terpukau pada empirisme-ilmiah dan sangat menekankan pada profesionalisme para sejarawan yang “terikat kepada prinsip-prinsip, standar-standar serta teknik-kerja seperti yang lazim berlaku dalam ilmu pengetahuan” (Sartono Kartordirdjo 1982). Akibatnya, Sartono Kartodirdjo membedakan secara ketat antara sejarah yang dihasilkan “sejarawan mazhab romantis” dan “sejarawan yang menghasilkan sejarah populer” dengan “sejarawan profesional” atau “sejarawan teknis”, terlepas dari

pendapatnya yang menyatakan bahwa penelitian sejarah memang tidak “menjadi monopoli dari golongan profesional” (Sartono Kartodirdjo 1982). Berbeda dengan Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo memberi apresiasi yang lebih besar terhadap kerja ilmiah para “bukan sejarawan” yang menulis sejarah lokal (Kuntowijoyo 1994). Menurut Kuntowijoyo, bukan hanya mereka yang belajar dan mengajar sejarah di perguruan tinggi saja yang berhak menulis sejarah melainkan semua orang dapat menjadi sejarawan dan menghasilkan karya sejarah bermanfaat bagi masyarakatnya dan ilmu pengetahuan. Walaupun Kuntowijoyo juga melihat metodologi sebagai sesuatu yang penting dalam proses kerja penelitian sejarah seperti yang juga diyakini oleh Sartono Kartodirdjo, metodologi yang diartikannya sebagai “jalan” dapat dirumuskan oleh setiap penulis sejarah tanpa harus belajar ilmu sejarah di perguruan tinggi dan tidak perlu dinyatakan secara eksplisit di dalam karya-karya sejarah (Kuntowijoyo 1994).

Cara pandang yang tidak selalu sama dengan Sartono Kartodirdjo juga dikemukakan oleh Taufik Abdullah, dalam konteks “historiografi tradisional” dan sejarah lokal, sebagai contoh. Berbeda dengan Sartono Kartodirdjo yang membedakan kenyataan sejarah dan mitos dalam konteks historiografi yang berkembang dalam tradisi kesejarahan masyarakat Indonesia secara kaku, Taufik Abdullah tidak begitu saja memvonis refleksi kultural masyarakat atas masa lalunya itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat dalam merekonstruksi sejarah sebagai sebuah kesadaran intelektual. Hal itu berkaitan erat dengan muatan historiografi itu sendiri, yang merupakan rekonstruksi atas kenyataan dari masa lampau pada satu sisi dan pemaknaan atas kenyataan masa lalu di sisi yang lain. Sartono Kartodirdjo memang percaya bahwa proses naturalisasi pada “historiografi tradisional” dapat menjadikannya sebagai sebuah karya yang mengandung banyak kenyataan-kenyataan historis daripada mitos, seperti yang berlaku pada Negarakertagama. Akan tetapi ia tetap berpegang pada pendapat bahwa “proses naturalisasi jenis historiografi ini tidak dapat berkembang seperti di dunia Barat. Babad, Hikayat atau Kronik sebagai sejarah total

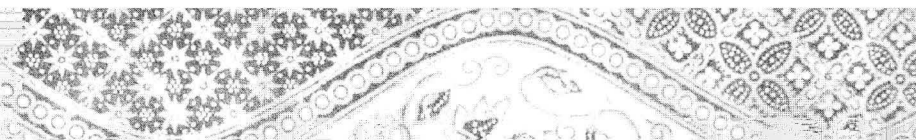




tetap memuat campuran unsur-unsur mitologis, eskhatologis, kronologis”, yang jauh dari sejarah kritis hasil kerja sejarawan teknis dengan metodologi dan “falsafah sejarah kritis atau teori sejarah yang telah dikurangi pikiran-pikiran metafisis” (Sartono Kartodirdjo: 1982). Sartono Kartodirdjo lebih jauh menyatakan bahwa “tekanan pada ilmu sejarah sebagai sejarah kritis lebih tepat daripada tekanan pada historiografi yang spekulatif-etis orientasinya” (Sartono Kartodirdjo 1982).

Sementara itu menurut Taufik Abdullah, “ketika sejarah kritis ingin ditulis maka masalah pertama yang harus dihadapi ialah mencari ‘fakta’ di belakang historiografi tradisional, yang memantulkan hayat ‘kewajaran sejarah’, dan tradisi lisan, yang merupakan *mirage of reality*” (Dami N. Toda 1999). Dalam konteks penulisan sejarah kritis sekalipun, seharusnya para sejarawan tidak begitu saja meninggalkan pemaknaan sejarah yang dilakukan oleh masyarakat dan sumber-sumber asli, karena hal itu akan menghasilkan “konfrontasi dari dua corak penulisan”. Padahal yang diperlukan adalah transformasi historiografis, yang akan bermanfaat untuk menghadirkan sejarah sebagai rekonstruksi dan penjelasan atas peristiwa masa lampau (Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo 1985). Oleh karena itu tidak mengherankan jika Taufik Abdullah memberi apresiasi yang sangat tinggi pada karya Dami N. Toda yang merekonstruksi Sejarah Manggarai Flores dengan memanfaatkan historiografi-historiografi yang hidup di dalam berbagai masyarakat lokal, baik di dalam maupun di luar Manggarai. Konstruksi sejarah lokal yang dibuat oleh Dami N. Toda dipercaya oleh Taufik Abdullah tidak hanya “mengisi kekosongan relatif dari pengetahuan tentang” sejarah lokal, “tetapi juga menunjukkan berbagai permasalahan historiografis” yang perlu didiskusikan lebih lanjut untuk dapat menghadirkan bagian-bagian yang hilang dari Sejarah Indonesia sebagai sebuah keumuman (Dami N. Toda 1999).

Pada tataran ini, pemikiran kesejarahan Taufik Abdullah bersinggungan dengan konsepsi Nancy Florida tentang historiografi Jawa yang dinyatakan dalam ungkapannya “*writing the past, inscribing the*



future, menyurat yang silam menggurat yang menjelang” (Nancy Florida 1995; 2003). Lebih jauh Nancy Florida menyatakan bahwa bagi orang Jawa menulis tentang masa lalu yang telah terjadi pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya untuk meramal tentang sesuatu yang akan terjadi. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa “sejarah ini juga merupakan suatu ramalan”, yang sekaligus menekankan bahwa secara intelektual dan kultural orang Jawa biasa menghadirkan masa lalu, masa kini dan masa depan sebagai satu kesatuan ketika melakukan rekonstruksi historis (Nancy Florida 1995). Mengikuti kerangka berpikir yang dikembangkan oleh Roland Barthes dan memahami hubungan timbal balik dalam sebuah proses yang disebut Nancy Florida sebagai “dialog produktif” secara terus menerus, maka para pujangga Jawa yang bertindak sebagai subjek dalam produksi karya-karya tekstual itu dapat dikatakan sebagai pengarang dan sekaligus pembaca (Nancy Florida 1995). Para pujangga itu tidak hanya memproduksi atas nama masa lalu melainkan juga membaca tanda-tanda zamannya dan mencari jalan bagi masa depan. Sementara itu di dalam tradisi pemikiran Barat, keberadaan cara berpikir kesejarahan seperti itu di dalam suatu masyarakat merupakan refleksi bahwa masyarakat pendukungnya merupakan sebuah masyarakat yang memiliki kecenderungan optimistis, masyarakat yang penuh dengan ide-ide tentang kemajuan, dan masyarakat yang selalu dipenuhi oleh perasaan gembira (Robert L. Heilbroner 1961). Hal itu berarti, naskah-naskah tradisi dan ingatan kolektif masyarakat sebagai sebuah realitas kultural sebenarnya memiliki agenda yang lebih luas. Berbagai ungkapan optimisme dan strategi rekonsiliasi sebagai pemaknaan atas masa lalu terkandung di dalamnya, bukan hanya “bertujuan membuat pembenaran dari kedudukan yang sedang berkuasa atau melegitimasi eksistensinya” seperti yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo (Sartono Kartodirdjo 1983). Sampai batas-batas tertentu, tradisi historiografi ini tidak hanya dilihat sebagai pemaknaan masyarakat atas masa lalu, melainkan juga fakta sejarah untuk merekonstruksi secara historis perubahan atau perkembangan mentalitas,



intelektual, dan kebudayaan masyarakat pada periode tertentu.

Perbedaan lain yang cukup penting ketika membandingkan antara konsepsi kesejarahan Taufik Abdullah dengan Sartono Kartodirdjo terlihat pada pembicaraan tentang posisi sejarah lokal yang dihadapkan dengan Sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional. Keberadaan baik sejarah nasional maupun sejarah Indonesia sebagai sebuah konsepsi historiografis bagi Taufik Abdullah lebih merupakan hasil konsensus yang tidak “terlepas dari patokan normatif”, karena sifatnya dasarnya yang anakronis. Konsensus itu “ditentukan bukan oleh keharusan logis ... tetapi oleh tuntutan ideologis” (Taufik Abdullah 1979). Hal itu mengisyaratkan, hampir-hampir tidak ada gunanya membangun konsepsi keilmuan dalam perbincangan tentang penjabaran Indonesiasentris menjadi Sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional, karena “pengujian berdasarkan disiplin ilmu sejarah akan menimbulkan kekacauan saja,” kata Taufik Abdullah (Taufik Abdullah 1979). Berdasarkan cara berpikir di atas, Taufik Abdullah sampai pada kesimpulan “mengambil titik-tolak bahwa studi dan penulisan sejarah lokal sebagai bahan pelengkap dari apa ... disebut sejarah nasional ... hanyalah suatu sikap rendah diri yang tidak perlu”. Lebih jauh menurut sejarawan yang pernah menjabat Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini, “memakai titik tolak bahwa studi sejarah lokal adalah usaha menyumbang bagi sejarah nasional akan memancing kesulitan metodologis .. dan hanya menghasilkan sejarah nasional versi lokal” karena “keduanya menuntut perumusan permasalahan yang berbeda-beda dan skala pentingnya peristiwa yang belum tentu sama”.⁴ Oleh karena itu menurut Taufik Abdullah, “kita melihat suatu tulisan tentang sejarah suatu daerah menggapai-gapai seperti kehilangan akal untuk bercerita” ketika ditempatkan dalam konteks perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia pada awal abad ke-20 (Taufik Abdullah 1979). Padahal di dalam kata pengantar edisi pertama buku Sejarah Nasional Indonesia yang

⁴Perbandingan yang sangat menarik untuk dilakukan dalam konteks ini adalah konsepsi paradigmatis yang digunakan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia VII. Sebagian penulis dalam buku yang hadir malu-malu itu, secara serampangan menggunakan fakta-fakta sejarah lokal Jakarta untuk membangun konstruksi sejarah dalam arti nasional (Anhar Gonggong, dkk., 1993)

diterbitkan pada tahun 1975, Sartono Kartodirdjo sebagai salah satu editor umum menyatakan “ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai nasional” dalam sebuah proses integrasi sehingga muncul kesadaran “penduduk kepulauan Indonesia merupakan suatu bangsa”. Oleh karena itu, “sejarah lokal atau sejarah daerah perlu ditulis dalam hubungannya dengan atau peranannya dalam kesatuan besar” (Sartono Kartodirdjo, dkk., ed. 1975).

Berdasarkan kenyataan intelektual yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih terdapat banyak hal yang belum dirumuskan secara jelas dalam penafsiran keilmuan atas konsepsi Indonesiasentris yang ada selama ini, termasuk konsepsi yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirdjo. Kenyataan keilmuan itu mengakibatkan ketidakmampuan untuk membangun tafsir Indonesiasentris yang lebih lugas sesuai dengan muatan metodologis yang digunakan. Sebaliknya meminjam cara berpikir Kuntowijoyo, konstruksi Sejarah Indonesia tetap terperangkap dalam tahap ideologis walaupun secara historiografis seharusnya telah berada pada tahap keilmuan sejak sejarah struktural, pendekatan multidimensional atau metodologi sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial menjadi tren utama dalam penulisan sejarah, terutama para sejarawan akademik. Konstruksi lama yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada dua dekade pertama pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia terus berlanjut, padahal kondisi kekinian Indonesia telah berubah dan para sejarawan telah merekonstruksi Sejarah Indonesia dengan pendekatan keilmuan. Akibatnya, secara konseptual konstruksi Sejarah Indonesia yang didasarkan pada Indonesiasentris tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan sejarah yang didasarkan pada cara pandang Neerlandosentris atau kolonialsentris (Bambang Purwanto 2006). Oleh karena itu tidak mengherankan ketika Sejarah Indonesia ditempatkan pada konteks sejarah lokal, maka konstruksi sejarahnya yang muncul penuh dengan warna regiosentris dan etnosentris.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemahaman historiografis

Indonesia tidak dibingkai oleh dasar kultural tempatan dimana masa lalu itu terjadi, melainkan tetap pada kultur Barat yang melihat Indonesia sebagai sebuah koloni yang marginal. Oleh karena itu bukan tidak mungkin sebenarnya kita semua masih menjadi penerus setia dari tradisi berpikir historiografis yang diwariskan oleh para orientalis, yang menjadi dasar berpikir historiografi kolonialsentris (Linda Tuhiway Smith 1990). Menurut cara berpikir orientalis, masa lalu Indonesia yang berstatus koloni diibaratkan seperti koleksi museum yang statis. Konstruksi atas masa lalu yang dihasilkan hanya berfungsi untuk menyenangkan pembacanya yaitu para pendukung imperialisme dan kolonialisme, yang melihat koloni sebagai sesuatu yang eksotis namun tidak beradab (Edward Said 1993). Sampai batas tertentu, keberadaan paradigma sejarah yang berbeda dan dapat mendekolonialisasi metodologi menjadi sebuah kebutuhan atau keniscayaan sehingga memberi tempat pada pemikiran tempatan untuk menjelaskan, memahami, dan memaknai kenyataan-kenyataan historis yang terjadi di ruangnya sendiri.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa pendapat Mohammad Ali yang secara tegas membedakan antara konsepsi “Sejarah Daerah” dan “Sejarah Indonesia” telah diabaikan selama ini, baik oleh para sejarawan maupun dalam pemaknaan kesejarahan oleh masyarakat secara umum. Menurut Mohammad Ali yang menggunakan kenyataan sejarah Sulawesi Selatan pada abad ke-17 sebagai contoh, menjadikan Sultan Hassanuddin sebagai pahlawan dan menempatkan Aru Palaka sebagai pemberontak atau sebaliknya dalam konstruksi sejarah merupakan wujud dari regiosentris dan etnosentris Makassar atau Bone bukan Indonesiasentris (R. Moh. Ali 2005). Hal serupa seharusnya juga dilakukan untuk merekonstruksi kenyataan sejarah dari ekspansi Mataram ke berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa pada masa Sultan Agung. Menurut Mohammad Ali, dalam perspektif Indonesiasentris ekspansi Sultan Agung itu “merugikan Indonesia. Pembinaan kota-kota dagang Jawa memperkuat kedudukan Belanda dan melumpuhkan perekonomian Indonesia barat” (R. Moh. Ali 2005). Hal itu

berarti membuat kesimpulan yang menyatakan kebesaran Sultan Agung karena keberhasilannya menaklukkan kota-kota pantai di sepanjang Pantai Utara Jawa bukan merupakan wujud dari Sejarah Indonesia dalam konteks Indonesiasentris melainkan cara pandang kedaerahan Sejarah Mataram.

Konsepsi Indonesiasentris yang mengikuti pemikiran kesejarahan Mohammad Ali itu membawa kita pada sikap kritis terhadap konstruksi sejarah yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia yang ada selama ini. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa bukan nasionalisme Indonesia yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda, melainkan perang yang dipimpin oleh Jepang yang telah menghentikan secara mendadak pada tahun 1942 seluruh kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun secara bertahap selama ratusan tahun. Oleh karena itu, kenyataan sejarah yang berlangsung antara tahun 1942 sampai dengan 1945 tidak bisa disebut sebagai masa pendudukan Jepang melainkan masa penjajahan Jepang. Kata penjajahan yang menggantikan kata pendudukan memiliki fungsi yang sangat besar untuk mendelegitimasi secara historiografis hak Belanda atas Indonesia setelah Jepang menyatakan kekalahan mereka dalam Perang Dunia II. Cara pandang ini sekaligus menempatkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai salah satu wujud dari pilihan rasional dalam perjalanan sejarah nasionalisme Indonesia, ketika kesempatan itu muncul. Hal itu berarti, pergolakan politik dan militer antara Indonesia dan Belanda pada masa yang selama ini dikenal sebagai periode revolusi itu sebenarnya bukan antara penjajah dan yang dijajah, melainkan antara Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat dengan Belanda yang berusaha membangun kembali kekuasaan kolonialnya yang dominan di atas puing-puing bekas koloninya dan koloni Jepang. Pada tataran ini, secara historiografis Indonesia ditempatkan sebagai sesuatu yang sejajar dengan Belanda.

Jika cara berpikir historiografis lama yang menempatkan Indonesia merdeka dari kekuasaan kolonial Belanda terus dilakukan, maka seharusnya ada beberapa alternatif waktu untuk mengidentifikasi



kemerdekaan Indonesia dan kita tidak perlu marah dengan pendapat Belanda yang menyatakan “penyerahan kedaulatan” dan bukan “pengakuan kedaulatan” sebagai manifestasi dari kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 27 Desember 1949. Selain tanggal itu, maka tanggal 17 Agustus 1950 ketika Republik Indonesia Serikat sebagai hasil bentukan Belanda dihapuskan secara sepihak memiliki dasar rasionalitas yang kuat untuk dijadikan alternatif lain dari waktu kemerdekaan Indonesia menurut logika historiografi Indonesiasentris yang dijabarkan selama ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan tanggal “pembebasan Irian Barat” dapat juga dijadikan dasar untuk menyatakan waktu kemerdekaan Indonesia, karena secara nyata keuntuhan wilayah Republik Indonesia sebagai warisan seluruh wilayah Hindia Belanda tercapai.

Kekacauan paradigmatik itu pulalah yang menyebabkan ketidakjelasan konstruksi sejarah yang berkaitan dengan posisi Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Di dalam konstruksi sejarah yang ada selama ini, eksistensi Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia berlangsung mulai 4 Januari 1946 ketika Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta sampai 27 Desember 1949 sehari sebelum Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta (Suhartono, dkk. 2002). Berdasarkan kajian komprehensif atas data-data yang ada, secara *de facto* Yogyakarta mulai menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 5 Januari 1946 bukan 4 Januari 1946. Sementara itu keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta dilakukan secara resmi pada tanggal 3 Januari 1946, sedangkan tanggal 4 Januari 1946 lebih merupakan waktu simbolik dari proses perpindahan itu, yang ditandai oleh keberangkatan Presiden Republik Indonesia menuju ibu kota yang baru di Yogyakarta. Di lain pihak, Presiden Soekarno meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta sebagai ibu kota RIS pada tanggal 28 Desember 1949, bukan 27 Desember 1946 (Kementerian Penerangan Republik Indonesia 1950). Sementara itu tanggal 27 Desember 1949 yang

disebutkan di atas sebagai hari terakhir eksistensi Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, sebaliknya ditandai oleh pelantikan Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Sementara Presiden Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta.

Berdasarkan dokumen resmi di dalam Berita Negara Republik Indonesia dapat dikatakan bahwa paling tidak sampai tanggal 15 Agustus 1950, Yogyakarta tetap berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia. Hal itu dapat dilihat pada tempat ditandatanganinya Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Ijazah Guru Sekolah Lanjutan Umum/Vak yang ditandatangani Mr. Assaat. Menurut dokumen itu, Peraturan Pemerintah itu ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 (Berita Negera Republik Indonesia No.1-68 1950). Satu hal yang perlu diperhatikan, pada hari yang sama Presiden Soekarno juga menandatangani rancangan UUD Negara Kesatuan atau kemudian lebih dikenal sebagai UUD Sementara dan sekaligus memproklamasikan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai wujud dari kesepakatan antara pemerintah RIS dan pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia (P. J. Suwarno 1994; Nugroho Notosutanto 1976). Keberadaan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia tentu saja berakhir secara resmi setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950, dan Republik Indonesia menjadi satu-satunya kekuasaan resmi di wilayah yang pernah menjadi tanah jajahan Belanda dan Jepang ini. Sejak saat itu Jakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia, sedangkan Yogyakarta kembali kepada status awalnya menjadi sebuah propinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berstatus sebagai daerah istimewa. Status itu didasarkan pada UU No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 3 Maret 1950, yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang pada waktu itu bestatus sebagai negara bagian RIS.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan tidak terjadi kejumudan mutlak dalam perkembangan pemikiran kesejarahan di kalangan sejarawan di Indonesia, karena secara personal beberapa sejarawan generasi

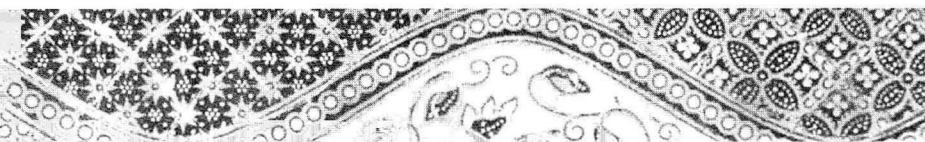
berikutnya, paling tidak diwakili Taufik Abdullah dan Kuntowijoyo telah berusaha menjabarkan lebih lanjut prinsip-prinsip dasar historiografi Indonesiasentris untuk membangun konstruksi Sejarah Indonesia sesuai ilmu sejarah. Hal yang terjadi adalah adanya keengganan meluas dan akut untuk menjadikan pemikiran kesejarahan baru itu sebagai wacana ilmiah yang diperdebatkan. Akibatnya, rumusan historiografis yang lebih konkret tentang operasionalisasi Indonesiasentris baik sebagai sebuah perspektif keilmuan untuk merekonstruksi sejarah sebagai peristiwa maupun pemaknaan terhadap kenyataan-kenyataan masa lalu tidak terbentuk. Pada tataran ini, terdapat jurang luas yang memisahkan antara pemikiran kesejarahan yang berkembang di kalangan akademisi dengan pengetahuan sejarah yang ada di dalam masyarakat, termasuk substansi yang diajarkan di satuan pendidikan dasar menengah. Hasilnya, historiografi Indonesiasentris yang bersifat ideologis dan cocok bagi situasi masyarakat Indonesia pada dekade-dekade awal kemerdekaan terus menjadi diskursus kesejarahan dominan, ketika sebagian konstruksi Sejarah Indonesia telah memasuki alam keilmuani dan demokratisasi. Sementara itu tindakan menafikan keberadaan pemikiran kesejarahan Mohammad Ali telah mengakibatkan adanya ruang kosong dan hilangnya kesempatan dalam perkembangan historiografi Indonesia, padahal seharusnya pemikiran Mohammadi Ali dapat menjembatani perubahan dari fase sejarah ideologis ke fase sejarah keilmuan yang dimotori oleh Sartono Kartodirdjo. Jika sejarawan saja tidak mampu keluar dari beban politik yang melestarikan dendam sejarah, jangan berharap banyak pada masyarakat secara umum dapat keluar dari kepicikan historiografis.

Ketika kompleksitas kenyataan sejarah bertemu dengan proses globalisasi yang memunculkan ide tentang sejarah tanpa negeri, demokratisasi yang menuntut pengakuan atas hak-hak eksklusif individual, dan berkembangnya paradigma ilmu pengetahuan yang ingin meruntuhkan hegemoni orientalisme dan positivisme melalui kesadaran dekonstruktifnya, tidak ada salahnya untuk mendiskusikan kembali pemikiran kesejarahan

yang melingkupi historiografi Indonesiasentris, agar ditemukan rumusan yang lebih tepat dan sesuai dengan jiwa zamannya. Periodisasi Sejarah Indonesia nampaknya perlu untuk dirumuskan kembali, hal serupa juga perlu dilakukan pada ruang lingkupnya ketika berbagai hasil penelitian mutakhir telah menghadirkan bukti-bukti baru yang dapat digunakan untuk membangun konstruksi yang baru. Perspektif historiografi Indonesia di masa depan tidak dapat begitu saja menafikan bahwa Indonesia dan Belanda berbagi masa lalu bersama pada periode tertentu, dan hal serupa dapat diberlakukan pada Timor Leste. Dalam perspektif yang baru ini harus ada keberanian untuk membayangkan bahwa sebagian dari masa lalu Belanda merupakan masa lalu Indonesia itu sendiri, tanpa harus menghilangkan peran pokok orang Indonesia dan meneruskan dendam sejarah pada kolonialisme. Kita juga harus menerima dengan lapang dada bahwa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Aceh atau Makassar bukanlah Indonesia, dan Indonesia merupakan hasil kesadaran dan kesepakatan bersama yang baru benar-benar hadir di sebuah koloni Belanda pada awal abad ke-20.

Pada tataran kultural, historiografi baru itu seharusnya tidak perlu alergi dengan proses mitologisasi yang bermuara pada subjektivitas historis, yang sering dituduhkan hanya menjadi ciri historiografi tradisi dan tidak mungkin dihadirkan oleh konstruksi sejarah berdasarkan ilmu pengetahuan. Sejarah pada dasarnya adalah historiografi itu sendiri, sedangkan historiografi adalah refleksi kultural dan sekaligus kesadaran intelektual yang melibatkan sejarawan baik sebagai secara individual maupun sosial sebagai agen. Sebagai produk kultural dan sekaligus intelektual kekinian, maka sampai kapanpun sejarah pasti memiliki muatan subjektivitas. Oleh karena itu konstruksi sejarah yang bertujuan untuk memahami identitas bangsa tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari mitos. Bahkan sebagai sejarawan yang sangat menjunjung tinggi sejarah sebagai ilmu dan proses kerja ilmu pengetahuan, Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa “sejarah nasional kita juga merupakan rekonstruksi

masa lampau untuk membenarkan eksistensi negara nasional serta ideologi nasionalisme kita”. Pendapat yang hampir senada diungkapkan oleh Taufik Abdullah yang berpendapat bahwa, secara konseptual sejarah nasional berfungsi bagi usaha “ke arah tercapainya integrasi nasional” sebagai sebuah konsensus. Semua ini akhirnya bermuara pada pilihan yang tidak mudah bagi para sejarawan Indonesia masa depan untuk menentukan kemana akan berpihak, antara objektivitas absolut ilmu pengetahuan yang elitis dan eksklusif atau subjektivitas relatif historiografi yang mencerdaskan, menyelamatkan, dan mengandung empati tanpa harus kehilangan sifat kritisnya. Ini semua hanya sebuah tawaran gagasan awal untuk membicarakan kembali historiografi Indonesiasentris. Mungkin ada sejarawan Indonesia tertarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut, agar ditemukan rumusan pemikiran kesejarahan yang bermanfaat serta relevan bagi Indonesia secara keseluruhan dan kemanusiaan di masa kini dan masa depan.





Melukis Tiga Roh

Stigmatisasi Dan Kebangkitan Historiografi Lokal Di Banyuwangi

SRI MARGONO
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Suatu hari di sebuah pendopo Museum Blambangan, seorang pelukis wajah Pak Kojin sedang duduk memegang pensil, di depannya selembar kertas putih telah diletakkan di papan. Persis di belakang Pak Kojin berdiri seorang pemuda bernama Agus, sambil memejamkan mata sedang khusuk membaca doa-doa, menyalurkan energy positif ke tubuh sang pelukis. Di depan Pak Kojin seorang gadis bernama Dewi duduk dengan khusuk pula. Matanya menatap tajam ke arah kertas putih yang masih bersih itu. Sementara itu di belakang Dewi ada Sembilan orang anak-anak muda yang juga duduk membaca doa-doa. Di pinggir pendopo sejumlah tokoh masyarakat di Banyuwangi duduk menyaksikan dengan takjub. Setelah beberapa saat Agus bertanya kepada pelukis, “Apa yang bapak lihat?” Si pelukis sebentar menjawab, “ada seseorang di samping Dewi”, Agus kembali bertanya, “Bapak bisa melihat dengan jelas?” Si Pelukis mengiyakan, “benar seorang perempuan”. “Kalau begitu segeralah lukis wajahnya di kertas?” perintah Agus. Si pelukispun segera beraksi menggerakkan tangannya melukis sosok wanita di sebelah Dewi. Si pelukis tampak begitu hati-hati menggoreskan pensilnya ke kanvas. Tiba-tiba Dewi tubuhnya bergetar sebentar kemudian berteriak, “Matanya tidak seperti itu”. Sang pelukispun segera mengoreksi bentuk matanya. Kurang lebih dua jam kemudian lukisan tampak hampir selesai. Sosok perempuan yg tergambar dari kepala hingga bagian tengah tubuhnya telah selesai digambar. Namun tiba-tiba, Dewi tubuhnya kembali berguncang keras, sebentar kemudian jatuh pingsan. Ritual terpaksa berhenti, menunggu hingga Dewi siuman.

Setelah Dewi siuman, ia dintanya oleh Agus. “Mengapa sampai jatuh pingsan”. Dewi menjawab dengan lirih, “saya ditendang oleh sosok yang hadir disampingnya itu, karena lukisan itu belum ada tahi lalatnya. Setelah beberapa saat, ritual dimulai kembali. Semua kembali pada posisi duduk semula, dan pelukis pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah kurang lebih tiga jam akhirnya lukisan itu dapat diselesaikan. Sosok perempuan berpakaian prajurit itu dipercaya sebagai wajah Sayu Wiwit, seorang tokoh legendaris dari kerajaan Blambangan yang ditangkap Kompeni pada saat meletusnya pemerontakan pada tahun 1771-1772.

Cerita di atas bukanlah cuplikan dari sebuah novel, tetapi sebuah kejadian sebenarnya yang diceritakan kembali oleh Agus Mursidi seorang pemuda dari Banyuwangi, yang membantu tim pengajuan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh legendaris dari Banyuwangi yang hidup pada abad ke-18, yaitu Sayu Wiwit, Wong Agung Wilis, dan Jagapati. Agus berfungsi sebagai pengundang roh dari ketiga tokoh herois itu, sekaligus menyalurkan energy positif kepada pelukis agar si pelukis mampu melihat roh yang dihadirkan itu. Dewi berfungsi sebagai juru bicara si roh, bila si pelukis melakukan kesalahan dalam melukiskan paras wajah si roh itu.

Ritual menggambar tiga tokoh itu berlangsung lima hari, yang dilakukan dalam beberapa minggu. Tidaklah mudah menyelesaikan sebuah lukisan, karena jika si pelukis banyak melakukan kesalahan maka konkuensinya si juru bicara yang terkena resikonya. Ritual itu berlangsung hingga lima hari karena Dewi sebagai mediator komunikasi antara si pelukis dan si obyeknya beberapa kali pingsan. Hal ini sering terjadi karena si pelukis tidak dapat mengindahkan perintah si roh dan Dewi yang menjadi sasaran jika instruksi yang ia berikan tak dipatuhi si pelukis. Apalagi para penonton ikut punya pendapat tentang lukisan itu sehingga si pelukis sering kebingungan menuruti pandangan siapa. Tidak hanya Dewi, si pelukis pun juga mengalami masalah. Selama seminggu tidak bisa tidur karena roh



salah seorang sosok yang digambarkannya terus membututinya, sehingga harus dilakukan ritual khusus agar si roh berhenti membayangnya.

Apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Banyuwangi itu adalah bagian dari upaya untuk memenuhi salah satu syarat yang diajukan oleh pemerintah pusat / Departemen Sosial dalam pengajuan gelar pahlawan. Pengajuan gelar pahlawan harus di sertai paling tidak tiga elemen penting, yaitu photo / lukisan dari si tokoh, makam si tokoh dan juga buku biografi atau kajian ilmiah akademis tentang si tokoh.

Tuntutan itu tentu tidaklah mudah karena dalam historiografi Indonesia, ketiga tokoh itu memang tidak pernah disebut sama sekali, kecuali dalam beberapa naskah *Babad Blambangan* yang ditulis pada abad ke 18 dan 19, dan juga di beberapa roman sejarah yang telah ditulis oleh beberapa novelis. Kajian akademis terhadap ketiga tokoh itu belum pernah dilakukan oleh sejarawan setidaknya hingga thesis I Made Sujana tahun 1995. Hal-hal yang meyakinkan bagi masyarakat Blambangan untuk mengajukan gelar pahlawan kepada ketiga tokoh itu tentu saja berdasarkan pada karya-karya itu. Namun tekad itu telah bulat, upaya melahirkan pahlawan baru yang membanggakan rakyat Banyuwangi harus diwujudkan, sehingga upaya keras untuk memenuhi persyaratan pengajuan gelar pahlawan kepada ketiga tokoh itu terus dilakukan. Disamping menghadirkan ketiganya dalam lukisan, perburuan makam serta penulisan buku-buku tentang ketiga sosok itu dilakukan. Budayawan, intelektual, tokoh masyarakat, pejabat daerah hingga masyarakat umum dengan semangat mendukung upaya itu.

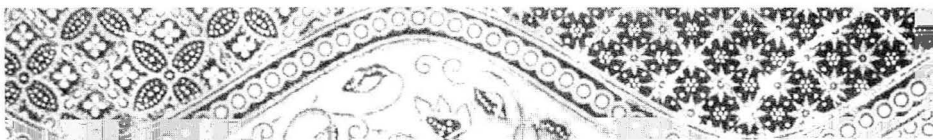
Tulisan singkat ini mencoba untuk membahas tentang kebangkitan historiografi lokal di Banyuwangi kaitanya dengan penggalan identitas local. Pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam paper ini adalah mengapa masyarakat Banyuwangi kontemporer tergerak untuk menggalakan kebangkitan historiografi lokal. Bagaimana karakteristik budaya lokal mewarnai kebangkitan historiografi lokal di Banyuwangi.

BLAMBANGAN DALAM BUNGKUSAN LEGENDA

Blambangan merupakan negara fragmentaris yang strukturnya bahkan dibuat lebih rentan oleh kekacauan politik internal, perang, dan konsekuensi-konsekuensinya yang tidak dapat ditawar-tawar: intervensi dan pendudukan asing. Sejak pendiriannya pada paruh akhir abad ke-13, ibukota Blambangan telah berpindah ke enam lokasi berbeda.¹ Meski artifak-artifak historis yang signifikan yang berhasil ditemukan bertanggal dari masa sangat awal kerajaan tersebut, informasi tentang kerajaan ini tertutup bagi tradisi historiografi lokal yang, dalam banyak kasus tercampur dengan mitos dan legenda. Banyak sejarawan meyakini bahwa tidak lama setelah kejatuhan Tumapel atau Singasari dan pendirian Majapahit pada paruh akhir abad ke-13 (1293), sebuah kerajaan baru didirikan di sebelah timur Jawa menggunakan nama Blambangan. Pendiri kerajaan ini dan lokasi ibukotanya yang tepat sangat sulit ditentukan. Versi prosa dari Babad Blambangan menyatakan bahwa raja pertama Blambangan adalah Menak Sopal, namun penulis babad menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat diceritakan mengenai raja ini dan pemerintahannya.² Kronik lain, Babad Sembar, meletakkan Lembu Miruda di puncak pohon keluarga Blambangan dan menunjuk Watu Putih (dekat Panarukan) sebagai ibu kotanya. Pada abad ke-14 (1365) Blambangan juga disebut dalam sebuah *kakawin* (puisi lama Jawa), *Negarakertagama*, dan sebuah kronik Melayu, *Hikayat Rajaraja Pasei*. Sumber lokal lain, *Serat Pararaton*, menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Kalagemet atau Jayanagara (1309-1328), Majapahit meluaskan kekuasaannya ke belahan timur Jawa, menekan ke arah timur Lumajang termasuk Blambangan. Kemudian, pada masa pemerintahan Rajasanagara atau Hayamwuruk (1359-1389), kawasan ini dihadiahkan pada anaknya Bhre Wirabumi. Ketika Hayamwuruk meninggal pada tahun

¹ Gagasan mengenai Blambangan sebagai Negara fragmentaris diperkenalkan oleh I Made Sujana. Pengarang mengasosiasikan Blambangan dengan *Nagari Tawon Madu*. lihat, I Made Sujana, *Nagari Tawon Madu*, 3.

² *Babad Notodinngatan*, dalam Winarsih Arifin, *Babad Blambangan* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995).



1389, sepupunya dan menantu laki-lakinya, Wikramawardana, berkuasa, namun sepuluh tahun kemudian penguasa ini turun tahta dan menarik diri ke pedalaman untuk menjadi seorang petapa. Dia mengambil keputusan ini setelah kematian putra tunggalnya, yang bakal menjadi penggantinya. Sebelum mengundurkan diri, dia memilih satu-satunya putrinya yang masih hidup, Dewi Suhita, sebagai pewarisnya. Bhre Wirabumi menolak keputusan tersebut, dan mencoba untuk melepaskan Blambangan dari Majapahit. Hal ini berujung pada pecahnya perang antara Majapahit dan Blambangan (1404-1406), yang berakhir dengan kehancuran Bhre Wirabumi, yang kemudian dipenggal lehernya. Kepalanya dipersembahkan kepada Ratu Majapahit.

MENAKJINGGA, WONG PINGGIR DAN STIGMA JAWA

Sejarah Kematian Bhre Wirabumi sama dengan salah satu cerita yang dituturkan dalam epik Jawa terkenal Serat Damarwulan. J. L. A. Brandes mengasosiasikan Bhre Wirabumi dengan Raja Menak Jingga, seorang figur antagonis dalam epik tersebut. Garis yang diambil dalam cerita ini adalah bahwa Menak Jingga, raja Blambangan, tidak mengakui kedaulatan Majapahit dan dia ingin menikahi Ratu Majapahit, Kencanawungu (Dewi Suhita). Sang Ratu menolak lamaran Menak Jingga dan mengirim Damarwulan ke Blambangan untuk membunuhnya. Pada saat perang terjadi, Menak Jingga terbunuh dan kepalanya pun dipersembahkan pada sang Ratu. Sebagai imbalannya, sang Ratu menikahi Damarwulan dan mengangkatnya ke singgasana.³

Penulis Babad Blambangan juga menempatkan cerita Menak Jingga pada plot utama sejarah Blambangan. Menurut babad ini, setelah penaklukan Raja Brawijaya menganugerahkan Blambangan pada Ajar Gunturgeni, seorang petapa dari Tengger, yang dengan gagah berani mengusir musuh dari Majapahit. Petapa ini juga dianugerahi nama baru, Pamengger. Akan tetapi, Pamengger tidak memiliki anak yang dapat menggantikannya. Yang

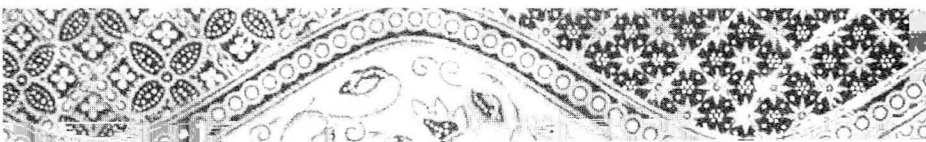
³ Brandes, 'Verslag over een Babad Balambangan'.

dia miliki hanyalah seekor anjing. Dia mengubah anjingnya tersebut menjadi sesosok manusia, namun tidak sempurna, kepala sosok manusia itu masih berbentuk anjing. Dia menamai makhluk ciptaannya ini sebagai Menak Jingga dan menaikkannya ke singgasana. Dari titik ini, kisah berlanjut seperti yang telah disebutkan dalam epik di atas. Sekali lagi, Menak Jingga dilengserkan oleh Damarwulan.

Bhre Wirabumi, Pamengger, dan Menak Jingga, semua tokoh ini barangkali merujuk pada satu figur yang sama. Jika yang pertama diterima sebagai figur yang lebih historis, maka dua yang terakhir mestinya merupakan personifikasi dari yang pertama. Patung yang disebutkan oleh Veth barangkali adalah patung Bhre Wirabumi. Siapa pun yang menulis epik Damarwulan, maka pastilah dia dipenuhi dengan gairah tentang kejayaan Majapahit. Menak Jingga dianggap bukan manusia dan diasosiasikan tidak berbeda dengan anjing. Barangkali penulis babad Blambangan menolak untuk mengakui sosok penuh tanda tanya semacam itu sebagai Bhre Wirabumi atau Pamengger, ke dalam pohon keluarga Blambangan. Oleh karena itu, dia menciptakan seorang penjahat, Menak Jingga, yang sifat-sifat menjijikkan dari Pamengger. Dengan kata lain, penulis mengakui Menak Jingga sebagai salah satu raja Blambangan, namun secara genealogis dia tidak disangkutnkan pada garis utama keluarga. Barangkali ini merupakan sebuah upaya untuk menghapus noda politik pada dinasti penguasa Blambangan.

Blambangan sangat jarang disebut dalam historiografi Indonesia. Dalam karya pionirnya *Pengantar Sejarah Indonesia* dan berjilid-jilid buku *Sejarah Nasional Indonesia*⁴ karyanya, Sartono Kartodirdjo tidak sekalipun membuat kalimat tentang kawasan tersebut. Sebelum penerbitan karya I Made Sujana pada tahun 2003, episode sejarah Blambangan hanya dapat ditemukan pada karya-karya C. Lekkerker dan H. J. De Graaf.

4 Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia: Dari Emporium ke Imperium, 1600-1800* (Jakarta: Gramedia, 1987); Idem. (et.al.), *Sejarah Nasional Indonesia*. 6 jil, (Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan, 1976)



Karya penting Lekkerker tentang *Java's Oosthoek* sangat jarang dibaca oleh para pembaca Indonesia karena ditulis dalam bahasa Belanda. Saya mendapatkan banyak manfaat dari penelitian penting ini. Meski demikian, cerita dramatis Blambangan sangat populer di antara penduduk Indonesia, terutama mereka yang hidup di Jawa, karena roman kerajaan Blambangan sering kali ditulis dalam banyak novel atau disebut-sebut dalam tradisi oral dan tulis lokal (*babad*). Oleh karena itu, dalam benak penduduk Indonesia Blambangan lebih sering atau setidaknya dianggap sebagai *tanah impian*.⁵

Pada tahun 1935, sebuah novel tentang Blambangan berjudul *Digdaja* diterbitkan dalam majalah sastra *Penghidoepan*. Pengarang dari novel ini, Tan Boen Swie (T.B.S), mencoba menjawab teka-teki mengenai asal usul *Tiyang Pinggir* atau *Wong Pinggir*, sebuah komunitas terpisah yang hidup di Surakarta dan Yogyakarta.⁶ *Tiyang Pinggir* berasal dari ujung timur pulau Jawa atau *pinggiran*, Blambangan tepatnya. *Tiyang Pinggir* atau rakyat Blambangan terkenal digdaya (sakti).

Tan Boen Swie menceritakan bahwa pada masa Mataram, laki-laki dari Blambangan digunakan sebagai *coban* (*Guinea-pig*) senjata yang lazim mereka gunakan dalam pertempuran. Jika seseorang mati, senjatanya akan dianggap sakti dan ampuh dalam pertempuran.⁷ Perempuan mereka diminta menjadi perawat anak-anak kerajaan. Rakyat percaya bahwa ketika mereka hamil, perempuan Blambangan rajin meminum sebuah cairan herbal yang dibuat dari dedaunan *rajegwesi*. Ini menjadikan warna air susu mereka *setengah wulung* (semi-indigo), dan seorang bayi yang mengonsumsi air susu tersebut akan tumbuh menjadi seorang yang digdaya.

51 Made Sudjana, *Nagari Tawon Madu: Sejarah Politik Blambangan Abad XVIII* (Bali: Larasan-Sejarah, 2001); C. Lekkerkerker, 'Blambangan' *IG*, 45/2, (1923); H. J. de Graaff, *Geschiedenis van Indonesië* (s-Gravenhage: Nijhoff, 1949).

6 Mengenai *Tiyang Pinggir*, lihat Soehari, 'Pinggir', *Djawa*, 5-6, (1929), 160-168.

7 Tan Boen Swie, *Digdaja* (Soerabaja: Tan's Drukkerij, 1935). Diterbitkan juga dalam *Penghidoepan*, no. 128, (1935). Novel kedua, *Tjaban: Samboengan dari Digdaja* (Soerabaja: Tan's Drukkerij, 1936), juga diterbitkan dalam *Penghidoepan*, no. 133, (1936).



Ketika Blambangan dikalahkan oleh Mataram, *Tiyang Pinggir* dipindah ke Mataram dan direkrut sebagai anggota pasukan kerajaan, di mana mereka disebut sebagai Prajurit Blambangan. Setelah pembagian Mataram pada tahun 1755, korps Prajurit Blambangan terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok tetap berada di bawah administrasi Surakarta, sementara satunya lagi dipindah pada Sultan baru, Hamengkubuwana I Yogyakarta. Di Surakarta, pada masa kekuasaan Pakubuwana III, korps Prajurit Blambangan dibubarkan karena mereka tidak lagi digdaya, namun mereka kemudian direkrut lagi pada masa pemerintahan Pakubuwana IV (1788-1820). Korps baru ini diberi 400 *pangkon lungguh* (tanah garapan) atau sekitar 100 *bahu*, terletak di sekitar Kartasura dan Ngadireja. Pada masa pemerintahan Pakubuwana IV korps Prajurit Blambangan berada di bawah komando Pangeran Aria Mangkubumi II. Setelah kematian Mangkubumi II, korps Prajurit Blambangan dibagi menjadi dua kelompok; Suratetana dan Jayatetana, yang kemudian lebih terkenal sebagai Prajurit Kartasura. Setelah masa itu, nama Prajurit Blambangan surut di Surakarta.

Citra Blambangan sebagai tanah air *wong digdaya* masih terus terpelihara hingga kini. Banyuwangi, nama saat ini untuk Blambangan, telah lama menikmati reputasi sebagai salah satu pusat ilmu hitam yang kuat dan kekuatan supernatural lainnya di Indonesia; sebuah kehormatan yang juga dimiliki oleh Banten di Jawa Barat dan pulau Lombok. Ilmu hitam yang dipraktekkan di Banyuwangi saat ini dipercaya sebagai campuran kepercayaan animistik dan mistisisme Islam, yang ditumbuhkan dalam atmosfer konflik antar agama yang menguasai istana Blambangan sejak abad ke-16. Rakyat Banyuwangi meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh kekacauan—baik komunal ataupun personal—disebabkan oleh ilmu hitam. Kematian yang tidak wajar atau tiba-tiba, kegagalan panen, kematian ternak, dan persoalan pernikahan ini segalanya dianggap sebagai hasil kerja keji para dukun santet lokal. Pada tahun 1998, pembunuhan



massal atas ratusan praktisi ilmu hitam menjadi salah satu isu politik besar pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid.⁸

USING, STIGMA BALI DAN IDENTITAS YANG DIPAKSAKAN

Stigmatisasi yang menimbulkan perdebatan panjang dan juga kebingungan adalah penggunaan istilah “osing” atau “using” untuk menyebut masyarakat asli Banyuwangi dan bahasa yang mereka gunakan. Sebagian besar masyarakat Banyuwangi kontemporer tidak memahami konteks historis dan anthropologis istilah ini, sehingga walaupun stigma yang sebenarnya memiliki makna negatif ini justru yakni sebagai identitas lokal.

Dua puluh tahun terakhir istilah “using” semakin populer di Banyuwangi, terutama setelah pemerintah menerapkan otonomi daerah. Using yang pada awalnya hanya dipakai untuk menyebut sekelompok kecil penduduk asli Banyuwangi dan dialek yang mereka gunakan itu kini telah diadopsi secara formal oleh pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai identitas atau ikon daerah. Using kini memiliki asosiasi yang lebih luas untuk menyebut kebudayaan Banyuwangi secara keseluruhan. Hampir segala bentuk hasil budidaya penduduk di wilayah ini kini disertai dengan embel-embel “Using”. Ben Arps menyebutnya gejala yang massive ini dengan *ambience*.

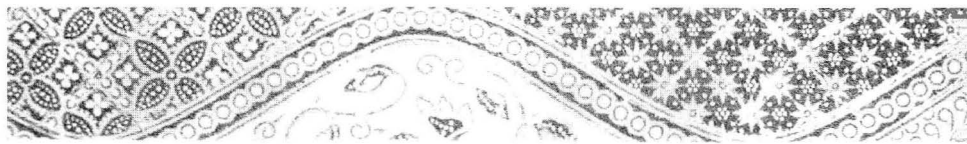
Pada umumnya para ahli sepakat bahwa, secara etimologis istilah “using” berasal dari bahasa Bali “sing” yang artinya “tidak” atau “bukan”, namun demikian hingga kini belum ada penjelasan yang memuaskan mengapa istilah using dipakai untuk menyebut penduduk asli Banyuwangi. Beberapa interpretasi yang ada umumnya masih sangat

⁸ Mengenai pembantaian ini, lihat Veven S. P. Wardhana (ed.), *Geger Santet Banyuwangi* (Institut Studi Arus Informasi ISAI). Lihat juga S. Saiful Rohim, *Merah Darah Santet di Banyuwangi*, Jakarta: Metro Pos, 1998); Jason Brown, ‘The Banyuwangi Murders’ (The Australian Consortium of In Country Indonesian Studies, 1999); Sunarlan, ‘Kekerasan Negara dan Konflik Elite: Studi Kasus di Banyuwangi 1998-1999’, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, vol. 2 (2002), 110-136.

spekulatif. Seorang ahli filologi dan linguistic dari Universitas Leiden, Ben Arps, misalnya mengasosiasikan istilah *sing* ini dengan cara orang Surakarta dan Yogyakarta menyebut dialek yang digunakan di wilayah Banyumas “gak-gakan” dari kata *gak* atau yang dalam dialek Surakarta dan Yogyakarta artinya *ora* atau tidak. Jadi mereka disebut using karena dialek yang digunakannya. Ada yang menjelaskan bahwa penggunaan kata *sing* sebenarnya hasil dari proses *verbasteren* dari kata Belanda *Oosterling*, yang artinya timur, karena Banyuwangi letaknya di ujung timur Pulau Jawa. Pendapat ini disampaikan oleh tokoh budayawan senior Banyuwangi, Pranoto (walaupun istilah ini sebenarnya untuk menyebut penduduk Timur Asing yang tinggal di Hindia Belanda, yaitu China, Arab, India dan Jepang).

Para ahli juga telah mencoba menjelaskan siapa sebenarnya yang menyebut nama using itu. Dari kajian linguistik yang dilakukan, Ben Arps menyimpulkan bahwa istilah using baru muncul setelah abad ke-20 mengingat beberapa ahli linguistik Jawa dan Banyuwangi khususnya, seperti Van der Tuuk, Scholte maupun Stoppelaar tidak pernah menggunakan istilah ini dalam karya-karyanya. Menurut Ben Arps istilah ini digunakan oleh penduduk Jawa yang bermigrasi ke Banyuwangi, yang oleh penduduk Banyuwangi disebut *wong kulonan* atau *mataraman*.

Ada upaya menjelaskan bahwa kata using yang artinya “tidak” atau “bukan” pertama kali dipakai penduduk Jawa dari wilayah Barat yang bermigrasi dan tinggal di Banyuwangi. Istilah itu dipakai untuk membedakan diri mereka dengan penduduk asli. Dengan kata lain, “tidak” atau “bukan” di sini yang dimaksudkan adalah “tidak Jawa” atau “bukan Jawa”. Penjelasan ini memunculkan pertanyaan mengapa orang Jawa untuk mengatakan “bukan Jawa” atau “tidak Jawa” tidak menggunakan istilah sendiri yang lazim digunakan yaitu “ora Jawa” atau “dudu Jawa”. Masyarakat Jawa di Jawa Tengah biasanya menyebut orang luar dengan “wong sabrang”, atau jika ingin mengatakkan orang yang tidak



berkepribadian Jawa dengan istilah “durung Jawa” artinya belum Jawa. Dalam konteks kebudayaan Jawa, “durung Jawa” jika ia belum bisa mengaplikasikan unsur-unsur penting kejawaan, yaitu bahasa (yg terdiri dari *ngoko*, *alus* dan *krama*) dan segala norma dan nilai yang melekat dalam kebudayaan Jawa.

Di samping itu penjelasan di atas tidak dapat menunjukkan asosiasi logis tentang penggunaan kata “sing” yang jelas dari bahasa Bali itu dengan unsur ke-Bali-annya, baik secara historis, sosiologis maupun anthropologis. Benar bahwa penduduk Jawa di Banyuwangi menyebut penduduk itu dengan istilah “using”, tetapi apa asosiasi logis kata itu dengan Bali dimana istilah itu berasal. Jawaban yang muncul biasanya hanya mengatakan bahwa karena Banyuwangi secara geografis dekat dengan Bali, sehingga wajar jika ada unsur bahasa Bali yang didopsi dalam bahasa orang Banyuwangi asli. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa yang diadopsi adalah kata “sing” yang artinya “bukan atau tidak”, dan bukan kata Bali lain dengan makna tertentu yang lain pula. Apa penjelasan logisnya ketika digunakan untuk menyebut penduduk asli Banyuwangi.

Kegagalan para anthropolog dan linguistik dalam memberikan penjelasan makna sebenarnya dari istilah ini disebabkan kerana pendapat mereka tidak didukung fakta-fakta historis. Data-data linguistik, anthropologis dan historis harus dipadukan untuk memahami konteks sosio-historisnya. Data-data historis yang dimaksud adalah rekaman-rekaman atau catatan-catatan factual tentang kehidupan sosial politik masyarakat Banyuwangi khususnya dari abad ke 17 hingga awal abad ke-20. Data-data antropologis adalah laporan-laporan penelitian antropologis di Banyuwangi terutama yang dilakukan pada periode yang sama.

Para ahli linguistik dan budaya telah berhasil melacak makna using dari sisi etimologis, sementara para anthropolog telah berhasil mengungkapkan karakteristik enografis dari masyarakat Banyuwangi yang disebut *wong using* itu sendiri. Lalu pertanyaan tersisa yang belum

mendapatkan jawaban yang memuaskan adalah mengapa masyarakat asli Banyuwangi itu disebut using yang artinya “tidak atau bukan”. Kutipan di bawah ini adalah jawaban dari pertanyaan ini:

Nog verder werpt de Blambanganers het van zich af, dat hij van Balineesche origine zou wezen. Wanneer wordt opgemerkt, dat zijn schildvorming gezicht met dat van vele Baliërs overeenkomt, lach hij spotend, of hij zeggen wil: “gelijk is nog geen elgen!” ‘twaren slechten menschen, die baliërs,” voert hij eenigzins beleedigd aan. En wanneer vergoelijkend opgemerkt wordt, dat ze veelal voor een vergrijp tegen de kaste (in verbintenis met een vrouw van hoogere kaste bijv.) naar hier warden verbannen, dan wij hij zich niet laten overtuigen, maar bromt: moordenaars en dieven waren het. Orang nakal betoel.

De nam “Oesingers” waaronder de Blambanganners in den Oosthoek bekend zijn en die afkomstig is van het Balische “sing” neen, geldt min of meer als beleedigend. “Wong Oesing” betekent” zooveel als geen mensch, en voor een zelfbewust mensch is dit inderdaad beneden alles.

[Orang Blambangan menolak pernyataan bahwa ia keturunan dari orang Bali. Ketika dikatakan bahwa raut mukanya mirip dengan wajah kebanyakan orang Bali ia tertawa dengan sinis, kemudian menjawab “mirip tidak berarti sama”. Mereka adalah orang-orang jahat, orang-orang Bali itu.” Demikian ia mengatakan dengan nada mengejek. Dan ketika ia dikatakan sering diusir karena sifat ofensifnya terhadap kasta tertentu (biasanya terhadap wanita dari kelas yang lebih tinggi), ia masih tidak yakin, tetapi dengan sinis akan mengatakan: “bukankah mereka itu pembunuh dan pencuri? “Orang nakal betul”.

Nama “oesing” yang biasa digunakan untuk menyebut orang Blambangan di ujung timur (Jawa) dan yang diambil dari istilah Bali “sing” atau “bukan”, dipandang kurang atau lebih ejekan. “Wong Oesing” berarti “bukan manusia”, dan bagi kesadaran diri seseorang ini tentu saja “di bawah segala sesuatu.”]

Kutipan itu diambil dari sebuah laporan yang ditulis oleh seorang antropolog Belanda yang menyebutkan dirinya dengan “insider” yang pada tahun 1930-an melakukan penelitian di Banyuwangi dan Bali. Laporan itu tentu melahirkan suatu pertanyaan historis mengapa antara orang-orang Banyuwangi dan orang-orang Bali saling mengejek atau merendahkan satu sama lain. Hal ini tentu hanya bisa dijawab dengan fakta-fakta sejarah.

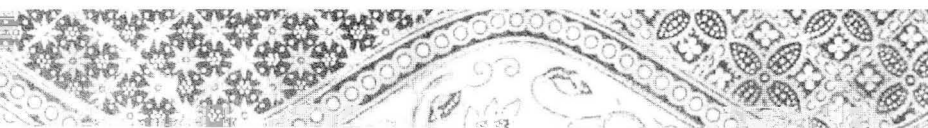
Sentimen anti-Bali di kalangan rakyat Banyuwangi atau Blambangan sebenarnya telah muncul sejak awal abad ke 18, ketika Blambangan dikuasai oleh Bali. Sejak berada di bawah kekuasaan



Bali Raja-raja Blambangan diikat pernikahan dengan putrid-putri dari Bali. Sehingga di kalangan elit kraton di Blambangan mulai terjadi percampuran darah, Blambangan-Bali atau peranakan Blambangan Bali. Ketika pengaruh Islam mulai menguat di kalangan elite kraton Blambangan, sentiment anti Bali mulai muncul, sehingga muncul upaya sistematis untuk melenyapkan keturunan Bali dari bikokrasi kerajaan. Hal ini pula yang sering melahhirkan konflik politik dalam setiap suksesi di kerajaan Blambangan. Di level bawah banyak rakyat Bali yang didorong hijrah menyeberangi selat Bali ke Blambangan untuk mengembangkan penanaman padi yang luas. Kerajaan-kerajaan di Bali yang endemic dengan perang memerlukan persediaan pangan yang besar, dan Blambangan adalah tempat yang pas untuk dijadikan sebagai lumbung pangan. Migrasi orang-orang Bali ini juga mendorong semakin luasnya perkawinan campur antara orang-orang Bali dan Blambangan. Sehingga muncul kelompok masyarakat yang pada abad ke-18 disebut sebagai *punakawan*, untuk menyebut mereka yang memiliki darah Bali atau peranakan Bali.

Kolonialisme Bali atas Blambangan membuat masyarakat menderita sehingga masyarakat Blambangan ingin sekali lepas dari kekuasaan Balli. Hal mendapat momentumnya ketika VOC ingin datang menguasai Blambangan. Saat awal kedatangan VOC rakyat Blambangan menyambut dengan gembira dan membantu membantai para penguasa Bali di Blambangan. Tentu ini menimbulkan kebencian pula bagi masyarakat bali terhadap Blambangan, klimak kebencian itu terjadi ketika Blambangan diislamkan oleh Kompeni. Upaya Bali menjadikan Blambangan sebagai tembok terakhir untuk membentengi masuknya Islam di Bali gagal.

Hal lain ialah sistem sosial yang diterapkan di Blambangan oleh penguasa Hindu di Bali. Orang Blambangan yang menikah dengan orang Bali, sekalipun dengan perempuan dengan kasta yang paling rendah, ia



tidak pernah diakui masuk dalam struktur kasta di Bali. Mereka tetap dianggap sebagai *out of caste*, lebih rendah dari kasta paling rendah di Bali, atau dengan kata lain “osing” manusia tak berkasta atau *geen meens* (bukan manusia).

Kembali kepada laporan anthropolog Belanda di atas, orang Blambangan justru mengklaim dirinya sebagai “*echte Javaan*” atau orang Jawa tulen. Tentu klaim ini sangat personal, subyektif dan mengandung bias dan *ethnical prejudice* warisan historis peristiwa-peristiwa politik yang dialami masyarakat Blambangan yang telah mengendap selama lebih dari satu setengah abad berada pada kekuasaan Bali. Kemudian apakah kemudian yang disebut wong using, yang selama ini dianggap “orang asli” Banyuwangi itu sebenarnya adalah keturunan Bali?

Kembali sebuah fakta historis dari paruh kedua abad ke delapan belas sangat menarik untuk dipertimbangkan. Setelah Kompeni mengetahui bahwa beberapa rangkaian pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Blambangan selalu didukung oleh orang-orang Bali, maka Kompeni mulai membersihkan unsur-unsur Bali dalam birokrasi di Blambangan, dari level paling rendah hingga tertinggi. Orang-orang Bali dan peranakan Bali di Blambangan diburu dan dibunuh. Kompeni hanya akan mengangkat para kepala lokal itu dari orang asli Blambangan. Namun demikian rupanya Kompeni sendiri tidak bisa berkulit ketika menghadapi kenyataan bahwa Karangandul, orang yang paling dipercaya ditunjuk sebagai kepala di Blambangan ternyata memiliki darah Bali. Sehingga rencana untuk pengangkatannya dipermasalahkan. Namun menarik kemudian pernyataan Karangandul ketika kesetiaannya kepada kompeni diragukan. Ia mengatakan, “Karena semua kenyataan itu, Belanda pun tak punya pilihan selain tetap mengangkat Karangandul sebagai kepala distrik di Banyuwangi.”

Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Blambangan sekalipun dalam tubuh mereka mengalir darah orang Bali



tetapi mereka tidak pernah mau disamakan dengan orang Bali karena alasan historis itu. Bahkan mereka merasa darah Bali dalam tubuh mereka itu penyebab malapetaka, karena selama pendudukan VOC mereka dimusuhi, diburu, dibunuh dan hendak dimusnahkan karena darah Bali dalam tubuhnya. Tentu saja bagi orang-orang Bali, using bukan hanya mereka yang asli Blambangan, tetapi juga peranakan Bali, yang walaupun di dalam tubuh mereka memancar darah Bali tetapi tidak pernah bisa masuk dalam sistem kasta mereka. Baik orang asli Banyuwangi maupun peranakan Bali di Blambangan tak bisa dibedakan secara kultural, sekalipun secara fisik mereka mungkin memiliki kemiripan dengan orang Bali. Peranakan Bali di Blambangan tak akan mudah mengakrabi kultur Bali karena pada umumnya peranakan Bali di Blambangan tidak pernah melihat apalagi tinggal di Bali.

HISTORIOGRAFI LOKAL

Kebangkitan historiografi lokal di Banyuwangi dapat dilacak dari tahun 1977, ketika Bupati Banyuwangi Joko Slamet Supaat membentuk sebuah tim penulisan buku *Selayang Pandang Blambangan*. Tim ini diketuai oleh Sekwilda Banyuwangi Is Soetrisna. Setelah setahun bekerja tim ini mengeluarkan rekomendasi berupa peringatan hari jadi Banyuwangi yang berdasarkan penelitian awal diusulkan dua alternative yaitu tanggal 19 April 1691 dengan peristiwa pendaratan penguasa Bali Ki Panji Sakti di pesisir timur Banyuwangi dan 18 Desember 1771 saat terjadi perang Bayu antara rakyat Blambangan melawan Kompeni yang dipimpin Jagapati.

Pada tahun 1987, Bupati kembali membentuk tim untuk membahas rekomendasi dari tim ke pertama. Tim kedua yang dipimpin oleh M Soepranoto ini tidak mendukung salah satu dari dua alternatif yang direkomendasikan tim pertama tetapi justru memberikan alternatif tanggal atas kelahiran Banyuwangi, yaitu 7 Desember 1773. Tanggal itu mengacu

pada pengangkatan Mas Alit sebagai Bupati pertama di Banyuwangi dengan gelar Raden Tumenggung Wiraguna.

Tentu saja usulan baru itu mendapat tentangan dari Tim pertama, yang menganggap bahwa tanggal itu berbau kolonial, dan kurang memiliki nilai heroisme lokal yang dapat dijadikan sebagai panutan bagi generasi muda. Protes tim pertama ini didukung oleh Dewan Harian Cabang 1945, sekelompok tokoh tua Banyuwangi yang terdiri dari para pejuang kemerdekaan tahun 1945.

Perbedaan pendapat itu terus meruncing hingga akhirnya pada tahun 1991 Bupati Banyuwangi kembali membentuk tim baru dan membubarkan tim-tim sebelumnya. Tim baru yang dipimpin oleh Sekwilda Widodo Pribadi ini tidak bisa bekerja maksimal dan tidak melahirkan rekomendasi apapun. Hingga akhirnya muncul sebuah buku yang ditulis oleh Budayawan local, Sri Adi Oetomo, Menelusuri dan mencari Hari Jadi Kota Banyuwangi. Penulis buku ini mengusulkan dua alternative tanggal yang telah diusulkan sebelumnya oleh tim sebelumnya, yaitu tanggal 7 desember 1773, saat penunjukkan Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi dan tanggal 2 Februari 1774 saat pelantikan Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi.

Banyaknya pandangan baru tentang Hari Jadi Kota Banyuwangi ini mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan simposium membahas alternatif-alternatif itu dengan mengundang para sejarawan akademis dan pakar sejarah lainnya untuk memberikan pandangan akademis mereka. Seminar itu diselenggarakan pada tanggal 9-10 November 1993 dengan agenda pokok membahas tentang Hari Jadi Kota Banyuwangi dan memunculkan tokoh-tokoh local yang layak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Dalam seminar ini kembali muncul alternatif baru tentang hari jadi Banyuwangi yang diusulkan oleh arkeolog dari Yogyakarta, Abdul Cholig Nawawi yaitu tanggal 27 April 1477. Dengan demikian hingga

diadakan seminar tahun 1993 itu telah ada 5 alternatif tanggal hari jadi Banyuwangi. Seminar yang dihadiri kurang lebih 200 peserta itu akhirnya merekomendasikan 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi dan mengusulkan 3 nama tokoh yang akan diusulkan sebagai pahlawan nasional, yaitu Sayu Wiwit, Wong Agung Wilis dan Jagapati. Ketiganya adalah tokoh yang hidup pada abad ke 18 yang dipercaya melakukan perlawanan gigih terhadap Kompeni di Blambangan.

Keputusan ini mendapat reaksi keras dari H. Armaya, seorang budayawan lokal yang mendukung ide tim kedua yang mengusulkan tanggal 7 Desember sebagai hari jadi Banyuwangi. Reaksi yang muncul di media local ini kontan melahirkan polemik di media. Para pendukung tanggal 18 Desember bereaksi balik, hingga polemik ini berlangsung lama di media masa. Polemik ini mengundang perhatian kelompok yang menamakan yang tergabung dalam Pusat Studi Budaya Banyuwangi, yang juga mengusung alternatif tanggal baru hari jadi Banyuwangi, yaitu 24 Oktober 1774. Alternatif ini merujuk pada buku yang ditulis oleh sejarawan Bali I Made Sujana, Nagari Tawon Madu.

Munculnya alternatif hari jadi Banyuwangi ini sekaligus membentuk munculnya kelompok pendukung maupun penentangannya. Penetapan 18 Desember 1771 sebagai hari Jadi banyuwangi itu telah membelah elite di Banyuwangi ke dalam berbagai kelompok itu. Hal ini melahirkan keprihatinan dari tiga tokoh utama di Banyuwangi yang dipimpin oleh Haji Slamet. Haji Slamet yang masih keturunan Tawangalun, raja terbesar di Blambangan dari abad ke-17, membentuk kelompok yang ia sebut sebagai Tim Independen. Kelompok ini tidak memberikan alternatif baru hari jadi Banyuwangi tetapi lebih aktif menghadiri kegiatan *gesah* budaya, penulisan buku, pembangunan monumen-monumen sejarah dan juga mempopulerkan sejarah local melalui siaran radio. Tiga buku penting telah mereka terbitkan antara lain biografi Sayu Wiwit, Wong Agung Wilis, dan yang terakhir adalah Mencari Sang Menakjingga.

EPILOG

Sejarah masyarakat Blambangan atau yang dikenal Banyuwangi sekarang adalah sejarah perjuangan yang panjang melawan penindasan berutun dari Majapahit, Mataram, Bali, VOC – Belanda, Inggris dan Jepang. Masyarakat Banyuwangi memang tidak memiliki tradisi sejarah lokal yang mandiri sebelumnya. Historiografi tradisional yang berupa *babad* dan tulisan sejarah lain banyak ditulis tetapi dari perspektif para *outsiders* (orang luar) dan penindasnya. Dominasi *outsiders* dalam historiografi lokal di Banyuwangi melahirkan stigmatisasi sebelah mata. Cerita tentang Menakjingga, Wong Pinggir, Wong Using adalah *stereotypes* ciptaan dari para *outsiders*. Stigmatisasi ini tidak berhenti di masa kolonial karena setelah kemerdekaan masyarakat Banyuwangi terus menjadi subyek stigmatisasi, dari lumbung komunisme hingga dukun santet. Regim Orde Baru turut membangun stigma terutama setelah lagu “Genjer-genjer” yang diciptakan oleh tokoh-tokoh budayawan Banyuwangi (Muhammad Arif) menjadi ilustrasi utama film G-30 S/PKI yang tontonkan secara *massive* dan simultan kepada rakyat Indonesia. Pasca Orde Baru Banyuwangi masih menjadi sasaran bagi stigmatisasi, terutama saat kekuatan-kekuatan tertentu hendak memojokkan sekelompok masyarakat di Banyuwangi yang memiliki profesi tertentu sebagai dukun santet, ahli mencederai atau membunuh dengan kekuatan supranatural. Stigmatisasi-stigmatisasi itu sangat sistematis melibatkan berbagai kelompok, dari penguasa atau politikus, jurnalis, pujaanngga/budayawan, bahkan para intelektual.

Kebangkitan historiografi lokal di Banyuwangi didorong oleh semangat dekonstruksi atas historiografi lokal yang mapan yang melahirkan stigma-stigma sepihak itu. Gerakan kebangkitan historiografi lokal di Banyuwangi ini bukan eksklusif milik para sejarawan tetapi melibatkan kalangan yang luas, dari pejabat lokal, guru, budayawan, pengusaha sampai masyarakat umum. Di sinilah keunikannya, karena kontribusi dari kalangan yang luas itu maka karakteristik budaya lokal mewarnai



proses dan wacana pembentukannya. Upaya menghadirkan ketiga sosok pahlawan Banyuwangi dalam lukisan dengan ritual khusus itu salah satu dari karakteristik itu. Bagi Rakyat Banyuwangi pengakuan kepada ketiga tokoh abad ke-18 itu adalah wujud dari penemuan harga diri sekaligus ingin menunjukkan bahwa Banyuwangi adalah seperti halnya bagian dari masyarakat Indonesia lainnya yang juga turut andil dalam membangun berdirinya Indonesia. Tampaknya rakyat Banyuwangi kontemporer masih harus berjuang lebih keras untuk terus keluar dari stigmatisasi, apalagi upaya pengajuan gelar pahlawan nasional itu tak dikabulkan. Stigma terakhir kepada Banyuwangi adalah “industri demo wisata konflik”, seperti yang diberikan oleh seorang pejabat Pangdam Jawa Timur belum lama ini ketika berkunjung ke Banyuwangi dan menyaksikan berbagai demonstrasi dan konflik-konflik yang terjadi di Banyuwangi belakangan ini.

PUSTAKA BANYUWANGI

Daftar ini merupakan acuan sekaligus inventarisasi berbagai jenis tulisan tentang Banyuwangi.

Sejarah: Buku dan Artikel

Armaya, “Berdirinya Kabupaten Banyuwangi” dalam PSBB, *Berdirinya Kabupaten Banyuwangi: Sejumlah Kajian, Catatan, dan Berita (24 Oktober 1774)*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya, 2010), hlm., 9-14

Armaya, “Tirtogondo”, dalam PSBB, *Berdirinya Kabupaten Banyuwangi: Sejumlah Kajian, Catatan, dan Berita (24 Oktober 1774)*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya, 2010), hlm., 37-46

Decky Irmawan, “Heroisme, Masih Layak Dikedepankan? Hari Jadi Banyuwangi dalam Sebuah Tinjauan”, dalam PSBB, *Berdirinya Kabupaten Banyuwangi: Sejumlah Kajian, Catatan, dan Berita (24 Oktober 1774)*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya, 2010), hlm., 30-36

Dwi Pranoto, “Sejarah Sekitar Hari Jadi”, dalam PSBB, *Berdirinya Kabupaten Banyuwangi: Sejumlah Kajian, Catatan, dan Berita (24 Oktober 1774)*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya, 2010), hlm., 27-30

Fatrah Abal, “Tidak Ada Puputan Bayu”, dalam PSBB, *Berdirinya Kabupaten Banyuwangi: Sejumlah Kajian, Catatan, dan Berita (24 Oktober 1774)*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya, 2010), hlm., 47-54

Iwan Aziez Siswanto S., “Hari Jadi Banyuwangi: Mubazir Diperingati”, dalam PSBB, *Berdirinya Kabupaten Banyuwangi: Sejumlah Kajian, Catatan, dan Berita (24 Oktober 1774)*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya, 2010), hlm., 55-60

PSBB, *Berdirinya Kabupaten Banyuwangi: Sejumlah Kajian, Catatan, dan Berita (24 Oktober 1774)*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya, 2010)

Suhalik, “Sejarah Hari Jadi Kota Kabupaten Banyuwangi dalam Kajian Ilmiah: Sebuah Kilas Balik”, dalam PSBB, *Berdirinya Kabupaten*



Banyuwangi: Sejumlah Kajian, Catatan, dan Berita (24 Oktober 1774), (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya, 2010), hlm., 15-26

Artikel dalam Surat Kabar/Majalah

“Babad, Legenda, Novel atau Sejarah”, *Bali Post*, *Rabu Kliwon*, 17 November 1993

“Hari Jadi Banyuwangi Perlu Dirubah”, *Posinfo*, Minggu V, 30 Desember 2004 – 5 Januari 2005

“Harjaba Kembali Disoal”, *Posinfo*, Minggu II, 9-15 Juni 2005

“Kontroversi Harjaba Dipansuskan”, *Koran Banyuwangi*, Edisi 18/Tahun II, 1-15 Maret 2005

“Kontroversi Penetapan Hari Jadi Banyuwangi: Pencaarian HJB Butuh Waktu Lama”, *Radar Banyuwangi*, Kamis Wage, 30 Desember 1999

“Merenda Polemik, Mencari Kebenaran Penetapan HJB, Kontemplasikan HJB, Tanggalkan Rasa Sentimen”, *Radar Banyuwangi*, Selasa Legi 11 Januari 2000

“Ungkit Penetapan Harjaba Abaikan Perda No. 10/1995”, *Koran Banyuwangi*, Edisi 20/Tahun II, 1-15 Maret 2005

Azi, “Harjaba Kembali Diungkit”, *Radar Banyuwangi*, Rabu Kliwon, 2 Pebruari 2005

Ikaningtyas, “Harjaba 18 Desember 1771 Haruskah Dikaji Ulang?”, *Kupas*, Edisi 10/II/Minggu ke-4, Desember 2004

Irwan Suryanto, “Benarkah 18 Desember 1771 Hari Jadi Banyuwangi? Kriteria Sejarah HJB Patut Dipertanyakan”, *Radar Banyuwangi*, Rabu Legi, 22 Desember 1999

Irwan Suryanto, “Benarkah 18 Desember 1771 Hari Jadi Banyuwangi? Sesuai Sejarah seharusnya HJB 7 Desember 1773”, *Radar Banyuwangi*, Kamis Pahing, 23 Desember 1999

Irwan Suryanto, “Kontroversi Penetapan 18 Desember 1771 sebagai HJB 7 Desember 1773 Berbau Antek Kolonial”, *Radar Banyuwangi*, Jumat Kliwon, 31 Desember 1999

Irwan Suryanto, “Kontroversi Penetapan 18 Desember 1771 sebagai HJB Sangat Rasional 18 Desember 1771 sebagai HJB”, *Radar*

Banyuwangi, Senin Pon, 3 Januari 2002

W. U & S, “Dari Seminar Sejarah Blambangan: Ibu Kota atau Nama Banyuwangi”, *Bali Post*, Jumat Pahin, 19 November 1993

Historiografi Lokal Banyuwangi

Abdul Manan dkk., *Geger Santet Banyuwangi*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001)

Budi Wiriyanto, “Kemiskinan di Banyuwangi: Derita di Atas Melimpahnya Hasil Bumi”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 47-52

Dasuki Noer, “Sastra Banyuwangi dalam Perjalanan Sejarah”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 82-87

Dasuki Noer, “Lintasan Sejarah” *Lembaran Kebudayaan*, No. 11, Juni 2010, hlm., 5-16

Dwi Pranoto, “Lampias Dendam, Sejarah, Idiologi”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 43-47

Dwi Pranoto, “Hari Jadi Banyuwangi”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 8 & 9, Januari-Pebruari 2010, hlm., 37-41

Dwi Pranoto, “Kebudayaan dan Politik”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 5-20

Dwi Pranoto, “Nagari Tawon Madu yang Tanpa Madu”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 11, Juni 2010, hlm., 47-50

Eko Budi Setianto, “Sisi Mistis Ritual Seblang” *Lembaran Kebudayaan*, No. 14 Pebruari 2011, hlm., 11-13

Fatrah Abal, “Tidak Ada Puputan di Bayu”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 09, Desember 2009, hlm., 7-14

Fhg. Hrd, “Menyusuri Jejak Penyebaran Islam di Banyuwangi” *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 79-82

Hari Priyanto, “Politisasi Santet di Masyarakat Using” *Lembaran Kebudayaan*, No. 09, Desember 2009, hlm., 15-35

Hasan Basri, “Temuguruh”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 14 Pebruari 2011, hlm., 23-55

Ika, “Orang Berjasa itu Terlupakan”, *Kupas*, Edisi 11, I, Januari 2005



- Hasan Basri, "Dari Bromocorah ke Barong: Sebuah Catatan", *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 71-74
- Ikaningtyas, "18 Oktober 1965", *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 9-41
- Ikaningtyas, "Benda Peninggalan Kerajaan Blambangan Banyak Dijual Warga", *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 67-69
- Ikaningtyas, Mahbub Djunaidi, Nurdin Kalim, "Blambangan yang Disingkirkan", *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 51-57.
- Kurniawati Hastuti, "Keunggulan Modal Sosial yang Belum Tergali: Banyuwangi Paska Orde Baru", *Lembaran Kebudayaan*, No.03, Agustus 2009, hlm., 2-7
- Lekkerkerker, C., "Sejarah Blambangan" (terj. Pitoyo Boedhy Setiawan), *Lembaran Kebudayaan*, No. 09, Desember 2009, hlm., 42-47
- Miskaawi, "Pembangunan Kabupaten Banyuwangi: Suatu Tinjauan Kesejarahan, Seni dan Budaya", *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 71-75
- Muhammad Hadi Sundoro dkk, *Pangeran Rempeg Jagapati: Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan di Tanah Blambangan Tahun 1771*, (Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2008)
- Muhammad Hadi Sundoro, *Wong Agung Wilis Pahlawan Blambangan (Tahun 1767-1780)*, Muhammad Hadi Sundoro dkk, *Pangeran Rempeg Jagapati: Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan di Tanah Blambangan Tahun 1771*, (Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2008)
- Nur Hariri, "Derita atas Kesuburan Bumi Banyuwangi", *Lembaran Kebudayaan*, No. 16, Mei 2011, hlm., 19-27
- Rosdi Bahtiar Martadi, "Emas vs Potensi Agraris Banyuwangi: Sebentuk Kanibalisasi antara Potensi", *Lembaran Kebudayaan*, No. 13, Januari 2011, hlm., 15-26
- S.A. Hamid, "Banyuwangi, Darah Seni yang Menngalir Deras", *Lembaran Kebudayaan*, No. 16, Mei 2011, hlm., 29-35

Slamet Kurniawan, "Banyuwangi dalam Demokrasi Hari Ini", *Lembaran Kebudayaan*, No. 13 Januari 2011, hlm., 57-69

Slamet Utomo dkk., *Wong Agung Wilis: Perang Rasisme*, (Banyuwangi: Tim Independen Banyuwangi, 2008)

Slamet Utomo dkk., *Sayu Wiwit Sang Kaisar*, (Banyuwangi: Tim Independen Banyuwangi, 2009)

Slamet Utomo dkk., *Mencari Sang Menak Jingga*, (Banyuwangi: Tim Independen Banyuwangi, 2009)

Suhaili Cordiaz, "Pejuang Tanpa Bintang (Obsesi yang Tertinggal)", *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 2-4

Suhalik, "Sewindu Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi: Sebuah Catatan", *Lembaran Kebudayaan*, No. 03, Agustus 2009, hlm., 8-20

Suhalik, *Mengenai Sejarah dan Kebudayaan Banyuwangi*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi, 2009)

Sumono Abdul Hamid, "Sati Terbesar: Upacara Istri Membakar Diri dalam Upacara Ngaben" *Lembaran Kebudayaan*, No. 16, Mei 2011, hlm., 3-6

Sunu Catur Budiyo, "Silang Budaya dalam Seni Pertunjukan Janger Banyuwangi", *Lembaran Kebudayaan*, No. 16, Mei 2011, hlm., 37-58

Taufik Wr. Hidayat, "Sebuah Karanganyar", *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 65-71

Taufiq Wr. Hidayat, "Aset Budaya Banyuwangi", *Lembaran Kebudayaan*, No. 09, Desember 2009, hlm., 3-5

Novel dan Roman Sejarah Banyuwangi

Achmad Aksoro, "Raja Macuwet: Lahirnya Prabu Menakjingga", *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 88-93

Armaya, *Bayangan: Sebuah Novel*, (Banyuwangi: Pusat studi Budaya Banyuwangi, 2010)

Armaya, *Keris Emas: Sebuah Novel*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi, 2010)



Armaya, *Menimba dari Kejadian: Esai-esai Terpilih Armaya*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi, 2010)

Armaya, *Berdirinya Kerajaan Macan Putih*, (Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi, 2010)

Budi Sidharta, "Soemokiat", *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 94

Endro Wilis, "Beberapa Catatan terhadap Bedah Buku (Review) Cerita Rakyat Banyuwangi di SMUN I Giri, 2 Nopember 2002", *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 59-66

Fatrah Abal, "Ngaji Pasemon I: Mengungkap Makna Prabu Kenya Kencanawungu, Nama Tokoh-tokoh dan Tempat dalam Cerita Damarwulan dan Menakjingga", *Lembaran Kebudayaan*, No. 03 Agustus 2009, hlm., 33-43

Fatrah Abal, "Ngaji Pasemon III: Blambangan dalam Serat Damarwulan", *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 95-106

Fatrah Abal, "Ngaji Pasemon IV: Ranggalawe dalam Serat Damarwulan", *Lembaran Kebudayaan*, No. 06, Nopember 2009, hlm., 29-37

Fatrah Abal, "Kebomarcuet dan Jaka Umbaran", *Lembaran Kebudayaan*, No. 09, Desember 2009, hlm., 48-52

Fatrah Abal, "Damarwulan dan Menakjingga", *Lembaran Kebudayaan*, No. 11, Juni 2010, hlm., 27-56

Fatrah Abal, "Damarwulan Menakjingga", *Lembaran Kebudayaan*, No. 10, Maret 2010, hlm., 29-62

Hasan Ali, "Kata dan Predikat Using", *Lembaran Kebudayaan*, No. 04, September 2009, hlm., 107-111

Taufiq Hidayat, "Suhita", *Lembaran Kebudayaan*, No. 11, Juni 2010, hlm., 57-64

Sastra Banyuwangi

Abdullah Fauzi, "Jejak Sastra Osing", *Lembaran Kebudayaan*, No. 06, Nopember 2009, hlm., 15-27

Armaya, "Pertumbuhan Kesusastraan Berbahasa Daerah di Kabupaten Banyuwangi", *Lembaran Kebudayaan*, No. 03, Agustus 2009, hlm., 21-32

Dasuki Noer, "Sastra Banyuwangi Perlu Dikembangkan dengan Benar", *Lembaran Kebudayaan*, No. 06, Nopember 2009, hlm., 9-13

Dwi Pranoto, "Blambangan dan Syair-Syair Endro Wilis", *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 13-22

M.S. Nugroho, "Membaca Rajegwesi: Puisi-puisi Tak Terduga Fatah Yasin Noor", *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 35-42

Mashuri, "Puisi, Sejarah, Santet: Sebetuk Surat Kreatif kepada Fatah Yasin Noor, Penulis Kumpulan Puisi Rajegwesi, diterbitkan PSBB", *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 25-33

Tentang Using

Armaya, "Aclak, Ladak, dan Bingkak: Pandangan Spekulatif", *Lembaran Kebudayaan*, No. 10, Maret 2010, hlm., 7-12

Istilah "Using" adalah Racun yang Melumpuhkan Jiwa, *Lembaran Kebudayaan*, No. 10, Maret 2010, hlm., 13-22

Ira Rahmawati, "Saat Dendam Asmara, Masyarakat Using Bicara", *Lembaran Kebudayaan*, No. 10, Maret 2010, hlm., 23-28

Sumono, "Wong banyuwangi Bukan Using", *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 23-30

Taufik Wr. Hidayat, "Waktak Rakyat dan Watak Birokrasi", *Lembaran Kebudayaan*, No. 03, Agustus 2009, hlm., 44-49

Budaya dan Adat

"Dari Sawah Turun ke Gandrung dan Kuntulan", *Lembaran Kebudayaan*, No. 8 & 9, Januari-Pebruari 2010, hlm., 89-94

"Kesenian Tradisional Banyuwangi Bertahan di Tengah Berbagai Benturan", *Lembaran Kebudayaan*, No. 8 & 9, Januari-Pebruari 2010, hlm., 105-116

Achmad Aksara, "Angklung", *Lembaran Kebudayaan*, No. 8 & 9, Januari-Pebruari 2010, hlm., 25-35

Achmad Aksoro, "Rumah Adat dann Upacara Adat Bidang Pertanian", *Lembaran Kebudayaan*, No. 06, Nopember 2009, hlm., 47-52



Aekanu Hariyono, *Gesah Seni dan Budaya Banyuwangi*, (Banyuwangi: Dewan Kesenian Blambangan, 2006)

Armaya, “Batokan: Dipandang dari Segi Budaya Banyuwangi”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 8 & 9, Januari-Pebruari 2010, hlm., 21-24

Bambang Priantono, “Kuntulan”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 8 & 9, Januari-Pebruari 2010, hlm., 100-104

Basuki Rosyidi, “Tentang ‘Anang Ayak’ (H.A.K. Armaya)” *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 3-8

Dariharto, *Kesenian Gandrung Banyuwangi*, (Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2009)

Eko Prasetyo dan Siswanto, “Kebo-keboan: Sebuah Tradisi dan Seni Masyarakat Banyuwangi”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 09, Desember 2009, hlm., 36-40

Farida Indirastuti, “Dari Kemiren ke Holiwood” *Lembaran Kebudayaan*, No. 11, Juni 2010, hlm., 17-26

Fatrah Abal, “Gandrung”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 8 & 9, Januari-Pebruari 2010, hlm., 3-19

Fatrah Abal, “Islamisasi Gandrung Banyuwangi”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 13, Januari 2011, hlm., 33-42

Fatrah Abal, “Catatan tentang Gandrung Banyuwangi (Kadung Dadi Gandrung, Wis)”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 16, Mei 2011, hlm., 7-11

Hasan Sentot, “Transeksual dalam Panggung Kesenian Tradisional”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 09, Desember 2009, hlm., 54-56

Hasnan Singodimayan, *Ritual Adat Seblang: Sebuah Seni Perdamaian Rakyat Using Banyuwangi*, (Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2009)

Ikaningtyas, “Kemiren Wajah Banyuwangi Tempo Dulu” *Lembaran Kebudayaan*, No. 09, Desember 2009, hlm., 57-61

Ikaningtyas, “Sejumlah Kesenian yang Menghilang” *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 75-78

Ilham Khoiri, “Barong Osing yang Bersahaja”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 43-46

Indro Wilis, “Seni-Budaya Blambangan Perlu Pembinaan Serius”
Lembaran Kebudayaan, No. 11, Juni 2010, hlm., 51-57

Ira Rachmawati, “Puter Kayun, Sebuah Janji yang Ditepati”,
Lembaran Kebudayaan, No. 14 Pebruari 2011, hlm., 19-21

M.Ridlo’I, “Kuwung Wetan Mengantar Angan”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 13 Januari 2011, hlm., 51-55

Mahfud, “Pelestarian Kesenian Gandrung melalui Pendidikan, Ekonomi, Budaya dan Pariwisata”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 31-46

Mh. Nurul Huda & Paring Waluyo Utomo, “Nasik Kuntulan di Tengah Purifikasi Budaya”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 8 & 9, Januari-Pebruari 2010, hlm., 95-99

Nunung Q., “Budaya Banyuwangi”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 10, Maret 2010, hlm., 65-76

Paul Arthurs Wolbers, “Seblang Bakungan”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 13, Januari 2011, hlm., 27-31

Pomo Martadi, “Musik Banyuwangi, Antara Jawa dan Bali”,
Lembaran Kebudayaan, No. 13, Januari 2010, hlm., 3-7

S.B Setiawan, “Gandrung Siti: Uri-uri Tradisi Banyuwangi”,
Lembaran Kebudayaan, No. 12, Nopember 2010, hlm., 47-50

Siswanto dan Eko Prasetyo, *Tradisi Keboan Aliyan dan Kebo-Keboan Alas Malang*, (Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2009)

Sulistiyani, “Ritual Ider Bumi di Desa Kemiren, Glagah, Banyuwangi”,
Lembaran Kebudayaan, No. 10, Maret 2010, hlm., 63-64

Taufiq Wr. Hidayat, “Para Penjaga yang luhur (Cerita Kecil Jumali Misjumo)” *Lembaran Kebudayaan*, No. 12, Nopember 2010, hlm., 77-79

Taufiq Wr Hidayat, “Dialog: Armaya yang Nyata”, *Lembaran Kebudayaan*, No. 15 April 2011, hlm., 9-12



Menggagas Arah Perkembangan Paradigma Baru Historiografi Indonesia

MUMUH MUHSIN Z.

MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA CABANG JAWA BARAT

Perkembangan historiografi di Indonesia belakangan ini, terutama yang diproduksi oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi (skripsi, tesis, disertasi), semakin menunjukkan gejala ke arah antikuarianisme. Gejala ini nampak menonjol terutama pada batas periode kajian yang semakin jauh dari periode kekinian. Hal ini, bisa jadi, cukup mengasyikkan secara keilmuan. Akan tetapi nilai praktis atau jarak antara kajian dengan kemanfaatan praktisnya akan semakin jauh.

Kenyataan ini mengandung beberapa implikasi yang kurang menguntungkan sejarawan khususnya dan masyarakat umumnya, di antaranya, adalah:

1. Karya akademik (skripsi, tesis, disertasi) yang diproduksi dengan biaya yang cukup mahal itu hanya berakhir di laci atau rak perpustakaan. Kalaupun sampai dicetak dan dipasarkan, tentu saja dengan konsumen yang terbatas.
2. Dalam penelitian yang dikompetisikan yang dibiayai oleh sejumlah lembaga, banyak proposal penelitian sejarah yang terkalahkan oleh penelitian ilmu sosial lain. Salah satu penyebabnya bisa ditudingkan pada pilihan tema yang antikuarianisme itu sehingga tidak memiliki manfaat praktis.
3. Daya serap pasar terhadap lulusan Program Studi Ilmu Sejarah cukup rendah. Kalaupun mereka terserap pasar, bukan karena latar belakang akademiknya yang sejarah, tetapi lebih karena kemampuan (praktis) lainnya.

Realitas seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut. Terutama bagi yang

terlibat langsung dalam dunia akademik sejarah harus segera menyikapinya. Sikap yang paling realistis adalah berupaya menghindarkan anak didik dari memproduksi historiografi yang bersifat antikuarianisme. Sikap ini tentu membawa implikasi terhadap metode dan metodologi penelitian yang diajarkan serta paket-paket perkuliahan lainnya. Pendek kata, harus dilakukan melalui pembenahan kembali kurikulum pendidikan.

BEBERAPA INDIKATOR

Diduga tidak banyak sejarawan yang sesekali menyisihkan waktu untuk berpikir, merenung, berdiskusi, dan mengajukan pertanyaan “bagaimana perkembangan Ilmu Sejarah di Indonesia sekarang ini? Apakah maju, mundur, atau stagnan?” Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak mudah. Akan tetapi setidaknya sejumlah indikator menunjukkan kecenderungannya. Indikator itu antara lain:

- 1) Minat masyarakat untuk menjadi sejarawan.
- 2) Tingkat produktivitas sejarawan dalam menghasilkan historiografi.
- 3) Respons masyarakat terhadapnya.
- 4) Seberapa besar masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya memanfaatkan sejarawan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam menyusun perencanaan dan membuat keputusan.
- 5) Daya serap lapangan kerja terhadap sejarawan.

Meskipun tidak punya data kuantitatif, dugaan ini tidak akan keliru bila dikatakan bahwa minat masyarakat untuk menjadi sejarawan sangat rendah. Tiap tahun, setidaknya di Universitas Padjadjaran, mahasiswa baru yang masuk tidak pernah melebihi satu kelas, artinya sekira 30 sampai 50 orang. Dari jumlah yang sedikit itu pun kebanyakan yang “tersesat” karena jurusan sejarah tidak menjadi pilihan utamanya. Apakah ini berarti “raw



material”-nya pun rendah? Belum diketahui jawabannya.

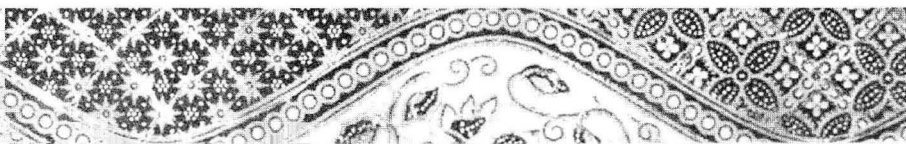
Berkaitan dengan produktivitas historiografi, nampaknya belakangan ini cukup tinggi. Akan tetapi tingginya produktivitas ini memiliki masalah tersendiri karena karya itu lahir “tidak disengaja”. Maksudnya adalah si penulis tidak sengaja untuk menulis buku. Kebanyakan buku sejarah yang terbit adalah berasal dari skripsi, tesis, atau disertasi setelah sedikit mengalami revisi. Akibatnya adalah respons masyarakat terhadap buku-buku sejarah relatif rendah. Alasannya cukup sederhana, buku-buku itu tidak nikmat dibaca.

Sejarawan sering terabaikan untuk dimintai pertimbangannya dalam penyusunan rencana “pembangunan” atau ketika masyarakat atau pemerintah membuat keputusan-keputusan. Terkesan ada keraguan atas kemampuan kontributif sejarawan. Kondisi ini sejajar dengan kenyataan lain, yakni daya serap lapangan kerja terhadap lulusan sejarah. Kita tidak pernah tahu, bahkan untuk estimasi sekalipun, berapa banyak sejarawan dibutuhkan pasar tenaga kerja tiap tahun. Oleh karena itu, walaupun lulusan sejarah pada akhirnya mendapatkan pekerjaan, itu bukan karena kesejarawanannya tapi karena kemampuan-kemampuan lainnya.

Terhadap semuanya kenyataan di atas muncul pertanyaan mengapa demikian? Siapa dan pihak mana yang harus bertanggung jawab? Tulisan singkat ini akan mencoba menjawab pertanyaan itu.

TEMPORALITAS

Garda terdepan yang sangat besar peranannya dalam menentukan bagaimana *image* masyarakat terhadap sejarah dan sejarawan adalah historiografi, buku atau tulisan-tulisan sejarah. Berkaitan dengan hal ini setidaknya penulis punya dua pengalaman yang sempat direnungkan. Pertama, ketika penulis menjadi narasumber dalam sebuah seminar ada peserta yang menyampaikan kekesalannya terhadap buku-buku sejarah



yang ditulis oleh para sejarawan akademis domestik. Pada saat yang sama, peserta itu pun memuji-muji buku-buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan asing yang menulis tentang Indonesia. Si peserta itu menyatakan bahwa buku-buku sejarah tulisan sejarawan akademik dalam negeri itu tidak menarik dibaca, sulit dipahami, dan terkesan kaku. Sebaliknya, buku sejarah Indonesia tulisan orang asing itu menarik dibaca, mudah dipahami, dan tidak kaku. Ia memberi contoh buku sejarawan asing yang dimaksud adalah *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004* tulisan M. C. Ricklefs.

Kedua, dalam dua tahun terakhir ini ada dua buku sejarah tulisan sejarawan dalam negeri yang cukup fenomenal, setidaknya dari sudut pandang *marketing*, yaitu buku Ahmad Mansur Suryanegara berjudul *Api Sejarah* (2009) dan buku Asvi Warman Adam berjudul *Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa* (2009).

Dari dua hal di atas – sekali lagi, meskipun hanya dua hal, akan tetapi cukup representatif untuk menggambarkan dan menganalisis historiografi sejarah Indonesia terakhir ini. Bagi penulis, setidaknya ada dua *issue* yang perlu disoroti. Pertama adalah masalah temporalitas dan kedua masalah eksplisitas teori dan metodologi termasuk di dalamnya model eksplanasi dan eksposisi (*exposition*).

Dalam “kata pengantar” untuk edisi kedua buku *Metodologi Sejarah* (2003), Kuntowijoyo menyampaikan keprihatinan di samping kebanggaan atas perkembangan historiografi belakangan ini. Yang membanggakan adalah sudah banyak kemajuan khususnya dalam variasi tema, deskripsi yang sistematis, penggunaan teori sosial, dan sumber sejarah yang memadai. Adapun yang memprihatinkan adalah munculnya gejala historiografi yang antikuarianisme. Antikuarianisme itu muncul disebabkan oleh adanya gagasan tentang sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu. Seolah-olah “masa lalu” itu harus jauh dari masa kini.

Pikiran bahwa sejarah adalah masa lalu tanpa peduli relevansi dengan

masalah kontemporer akan merugikan sejarawan dan menjadikan sejarah sebagai ilmu yang terpencil di tengah perjuangan bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Karenanya, kita perlu berusaha supaya lulusan sejarah mempunyai sumbangsih kepada bangsa dengan menjadikan ilmunya bagian dari kecerdasan bersama (*collective intelligence*) bangsa ini (Kuntowijoyo, 2003: xi-xii). Oleh karena itu, mengarahkan mahasiswa supaya menulis topik-topik sejarah kontemporer (1945 – 2000) adalah cukup realistis.

Penghidaran diri dari penulisan sejarah kontemporer hanya karena alasan takut bertabrakan dengan ilmu-ilmu sosial lain sama sekali keliru. Sejarah adalah sejarah. Ilmu sosial adalah ilmu sosial. Sejarah dan ilmu sosial lain mempunyai persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama harus memberikan deskripsi dan penjelasan, perbedaannya lebih terletak pada sudut pandang. Dengan demikian, seperti halnya ilmuwan sosial lain, sejarawan pun berhak berbicara masalah-masalah kontemporer. Berangkat dari pemikiran bahwa ilmu sejarah itu juga memiliki sifat *contemporaneous* memungkinkan para sejarawan muda mampu terjun ke dunia jurnalistik, politik, birokrasi, dan bidang-bidang lainnya dengan mantap tanpa kehilangan kesejarawanannya (Kuntowijoyo 2003: xiii).

Keuntungan praktis pengambilan masalah kontemporer adalah selain dekat dengan tingkat kecerdasan masyarakat, sumber-sumber pun tersedia dengan mudah (surat kabar, masyarakat, sejarah lisan), juga tidak memerlukan sumber asing dan sumber arsip berbahasa Belanda yang sering dinilai menakutkan itu.

RIGIDITAS PENGGUNAAN TEORI

Para sejarawan sangat berkepentingan akan kemajuan Ilmu Sejarah. Setidaknya ada empat cara bisa ditempuh untuk memajukan ilmu ini, yaitu dengan mengubah filsafat, teori, metodologi, dan metodenya (Kuntowijoyo

2003). Di sini hanya akan disorot masalah teori. Seminar Sejarah Nasional kedua (1970), dianggap sebagai peletak dasar dari pertumbuhan tradisi penulisan sejarah Indonesia yang baru. Sejak itu, di bawah pengaruh Sartono Kartodirdjo, beberapa perubahan terjadi di kalangan sejarawan akademis. Perubahan itu tampak pada peralihan perhatian dari “sejarah politik” ke “sejarah sosial”, penerapan konsep-konsep ilmu sosial khususnya sosiologi dalam rekonstruksi sejarah dan pemberian keterangan, dan pendekatan secara multidimensional (Abdullah 2001: 227).

Perubahan itu sangat kuat pengaruhnya dalam karya-karya ilmiah sejarah (skripsi, tesis, disertasi). Eksplisitas konsep dan teori itu menjadi model, bahkan jadi subbab tersendiri. Penggunaan teori dan konsep-konsep ilmu-ilmu sosial semestinya menambah daya jelas keterangan sejarah. Dalam perkembangan kemudian, idealisme awal mengenai penggunaan teori dan konsep, untuk menambah daya jelas keterangan sejarah, agak meleset. Kenyataan yang terjadi kemudian adalah teori dan konsep satu hal, uraian sejarah hal lain. Teori dan konsep ilmu-ilmu sosial terasa sekali sebagai “tempelan” yang terpisah dari uraian sejarah. Ketika karya-karya akademis (skripsi, tesis, disertasi) ini dibukukan, kesan kaku dan tidak enak dibaca yang disampaikan oleh masyarakat konsumen harus kita terima dengan lapang dada.

Buku Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, atau buku Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, tidak mengeksplisitkan konsep dan teori yang digunakan. Bahkan untuk sekadar menyebut metode apa yang digunakan untuk menulis buku itu pun sama sekali tidak disebutkan. Padahal, hampir tidak mungkin kedua penulis itu tidak menggunakan konsep, teori, atau metode. Akan tetapi kedua buku tersebut mendapat respons luar biasa dari masyarakat konsumen. Kekuatan kedua buku ini tidak hanya pada pengimplisitan konsep, teori, dan metode – yang sering menjadi penyumbang rigiditas dalam eksplanasi – tapi juga pada *sense of relevance*-nya dengan masa kini. *Sense of relevance* karya sejarah dengan masa kini



tampak melalui tiga cara: kesinambungan dan perubahan, paralelisme, dan perbandingan. Demikian juga pada buku Asvi Warman Adam (2009).

Sesungguhnya bukan hanya buku-buku di atas, buku-buku akademis karya sejarawan “luar” ada kecenderungan tidak mengeksplisitkan konsep, teori, bahkan metode. Sekedar memberikan contoh, saya sampaikan beberapa karya itu: Vreede-de Stuers (1960), Dobbin (1983), Shiraisi (1990), Houben (1994), Moriyama (2003), Elsen (1994 dan 2008). Semua historiografi ini tidak mengeksplisitkan konsep, teori, bahkan metode, apalagi menjadikannya sebagai subbab tersendiri.

Jadi, bila diamati historiografi yang ada ditemukan empat variasi: ada yang menghindari penggunaan konsep dan teori, ada yang menggunakannya secara implisit, ada yang menggunakannya secara eksplisit, dan ada variasi campuran.

KESIMPULAN

Pembahasan ini tidak ingin terjebak pada pemikiran dikotomis perlu atau tidak perlu penggunaan konsep dan teori. Juga mengenai metode, cukup implisit atau harus eksplisit. Yang penting adalah pengeksplisitan konsep dan teori itu bukan ekspresi dari “kegenitan” intelektual yang tidak berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan penjelasan sejarah. Demikian juga dalam pengeksplisitan metode penelitian tidak terjebak pada tampilan dan ungkapan yang klise.

Sense of relevance harus menjadi pertimbangan penting dalam penelitian dan penulisan sejarah. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan supaya terhindar dari antikurisme dan mendekatkan Ilmu Sejarah dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR ACUAN

- Abdullah, Taufik (1997), “Masalah Kontemporer Ilmu Sejarah dan Historiografi,” Makalah Kongres Nasional Sejarah 1996. Jakarta: Deparemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2001), *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- (ed.) (2010), *Sejarah Lokal di Indonesia*, cet. VI. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Adam, Asvi Warman (2009), *Membongkar Manipulasi Sejarah; Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*, cet. V. Jakarta: Kompas.
- Dobbin, Christine (1983), *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy Central Sumatra 1784–1847*. London: Curzon Press.
- Elsen, R. E. (1994), *Village Java under the Cultivation System 1830–1870*. Sydney: Allen and Unwin.
- Houben, Vincent J. H. (1994), *Kraton and Kompeni; Surakarta and Yogyakarta 1830–1870*. Leiden: KITLV Press.
- Kartodirdjo, Sartono (1992), *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kutowijoyo (1995), *Pengantar Ilmu Sejarah*, cet. I. Yogyakarta: Bentang.
- (2003), *Metodologi Sejarah*. Edisi II. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moriyama, Mikihiro (2003), *A New Sprit; Sundanese Publishing and the Changing Configuration of Writing in Nineteenth Century West Java*. Leiden: Universiteit Leiden.
- Ricklefs, M. C. (1992), *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono, cet. II. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- (2008), *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004*, terj. Satrio Wahono, dkk., cet. II. Jakarta: Serambi.
- Shiraisi, Takashi (1990), *An Age in Motion; Popular Radicalism in Java 1912–1926*. New York: Cornell University Press.
- Vreede-de Stuers, Cora (1960), *The Indonesia Women: Struggle and Achievement*. ‘s-Gravenhage.





BAGIAN KETIGA
PENDIDIKAN SEJARAH



Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Sejarah Berbasis Muatan Lokal melalui Pemanfaatan Media Teknologi Informasi

H. ANWAR HAFID
UNIVERSITAS HALUOLEO

Efektivitas pembelajaran dapat dikaji dari beberapa aspek, diantaranya: perangkat pembelajaran, proses, karakteristik guru, dan hasil belajar. Semua aspek tersebut saling terkait dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran (pendidikan) mencakup tiga aspek, yaitu: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan kognitif berkaitan dengan usaha pengembangan intelektual siswa, afektif berhubungan dengan perkembangan sosial dan emosional, sedangkan psikomotorik berkenaan dengan perkembangan aspek ketrampilan siswa. Hal itu berarti pembelajaran dapat dikatakan berkualitas apabila mampu mengembangkan aspek-aspek tersebut pada diri siswa. Pembelajaran yang efektif adalah memungkinkan siswa mendapatkan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap yang telah ditetapkan.

Pembelajaran harus dilandasi dengan penciptaan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar. Pada umumnya guru kurang menyadari peranannya dalam membina pelajaran sejarah. Hal ini tercermin dari seringnya pembelajaran di sekolah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena ternyata pembelajaran sejarah diselenggarakan dengan cara-cara yang kurang memadai (Widja 1989).

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, baik secara eksternal maupun internal. Faktor-faktor eksternal mencakup guru, materi, pola interaksi, media dan teknologi, situasi belajar dan sistem. Masih ada pendidik yang kurang menguasai materi dan dalam mengevaluasi siswa, menuntut jawaban yang persis seperti yang ia jelaskan. Siswa tidak diberi peluang untuk berpikir kreatif. Guru juga mempunyai keterbatasan

dalam mengakses informasi baru yang memungkinkan ia mengetahui perkembangan terakhir di bidangnya dan kemungkinan perkembangan yang lebih jauh dari yang sudah dicapai sekarang. Sementara itu materi pembelajaran dipandang oleh siswa terlalu teoritis, kurang memanfaatkan berbagai media secara optimal.

Beberapa pakar pendidikan sejarah maupun sejarawan memberikan pendapat tentang fenomena pembelajaran sejarah yang terjadi di Indonesia diantaranya masalah model pembelajaran sejarah, kurikulum sejarah, masalah materi dan buku ajar atau buku teks, dan profesionalisme guru sejarah. Kenyataan yang ada sekarang, pembelajaran sejarah jauh dari harapan untuk memungkinkan peserta didik melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Pembelajaran sejarah cenderung hanya memanfaatkan fakta sejarah sebagai materi utama. Tidak aneh bila pendidikan sejarah terasa kering, tidak menarik, dan tidak memberi kesempatan kepada anak didik untuk belajar menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah.

Strategi pedagogis sejarah Indonesia sangat lemah. Pendidikan sejarah di sekolah masih cenderung menuntut anak agar menghafal suatu peristiwa. Siswa tidak dibiasakan untuk mengartikan suatu peristiwa guna memahami dinamika suatu perubahan. Sistem pembelajaran sejarah yang dikembangkan sebenarnya tidak lepas dari pengaruh budaya yang telah mengakar. Model pembelajaran yang bersifat satu arah dimana guru menjadi sumber pengetahuan utama dalam kegiatan pembelajaran menjadi sangat sulit untuk diubah. Pembelajaran sejarah saat ini mengakibatkan peran siswa sebagai pelaku sejarah pada zamannya menjadi terabaikan. Pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya atau lingkungan sosialnya tidak dijadikan bahan belajar di kelas, sehingga menempatkan siswa sebagai peserta pembelajaran sejarah yang pasif. Kekurang cermatan pemilihan strategi pembelajaran akan berakibat fatal bagi pencapaian tujuan (Widja 1989).



Masalah profesionalisme guru sejarah juga masih dipertanyakan, sampai saat ini masih berkembang kesan dari para guru, pemegang kebijakan di sekolah bahwa pelajaran sejarah dalam mengajarkannya tidak begitu penting memperhatikan masalah keprofesian, sehingga tidak jarang tugas mengajar sejarah diberikan kepada guru yang bukan profesinya. Akibatnya, guru mengajarkan sejarah dengan ceramah mengulangi isi yang ada dalam buku. Sementara itu terlalu banyak sekolah yang memposisikan guru sejarah sebagai orang buangan, dan mata pelajaran sejarah sekedar sebagai pelengkap. Selain itu, sebagian besar guru sejarah juga tidak mengikuti perkembangan hasil penelitian dan penerbitan buku sejarah yang mutakhir. Hal yang terakhir itu juga berkaitan dengan adanya kenyataan bahwa institusi resmi yang menjadi tempat pendidikan tambahan bagi guru sejarah itu hanya berfokus pada substansi historis dan metode pembelajaran sejarah yang tertinggal jauh (Purwanto 2006).

Pembelajaran sejarah di sekolah selama ini sering dilakukan kurang optimal. Pelajaran sejarah seolah sangat mudah dan digampangkan. Banyak pendidik yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan/pendidikan sejarah, tetapi mengajar sejarah di sekolah. Sesuai dengan ketentuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 19 tahun 2005, maka pengembangan kurikulum pendidikan sejarah di SD, SMP, SMA menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah tersebut. Melalui pengembangan dan penempatan sejarah lokal sebagai materi kurikulum yang dasar, terlepas apakah materi tersebut dikemas dalam mata pelajaran sejarah ataukah mata pelajaran lain. Posisi materi sejarah lokal dalam kurikulum dianggap penting karena pendidikan harus dimulai dari lingkungan terdekat dan peserta didik harus menjadi dirinya sebagai anggota masyarakat terdekat

Para ahli kurikulum mengajukan kritik terhadap pembelajaran sejarah yang didominasi bahan hafalan, lebih menekankan memorisasi dan mengabaikan usaha pengembangan kemampuan intelektual yang lebih tinggi, tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik (Partington, 1980).

Meskipun kritik tersebut bertolak dari kenyataan yang ada di Inggris, tetapi kenyataannya juga berlaku di Indonesia. Untuk itu, perlu ada usaha untuk mengembangkan alternatif baru dalam proses pembelajaran sejarah di sekolah karena secara pedagogis sangat lemah. Selama ini pembelajaran sejarah di sekolah terlalu indoktrinatif dan tidak menjadikan anak berpikir kreatif

Metode pembelajaran sejarah semacam ini telah menjadikan pelajaran sejarah membosankan, karena tidak memberikan sentuhan emosional, siswa merasa tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang kaku berakibat buruk untuk jangka waktu panjang dan berpotensi memunculkan generasi yang mengalami “amnesia sejarah” yaitu melupakan sejarah bangsa sendiri. Penelitian Govinthasamy (2002) menunjukkan bahwa guru-guru sejarah kurang mementingkan penerapan KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis) dalam pembelajarannya.

Pembelajaran sejarah di sekolah selama ini kurang menarik, bahkan sering dianggap membosankan, dan dirasakan hanya sebagai rangkaian fakta-fakta yang berupa urutan tahun, tokoh dan peristiwa belaka yang jauh dari lingkungan sosial peserta didik, terutama di luar Jawa, karena selama ini materi kurikulum didominasi peristiwa sejarah di Pulau Jawa, sementara peristiwa dan peran tokoh di daerah lain yang tidak sedikit dan tidak kalah pentingnya termasuk di Sulawesi Tenggara tidak pernah termuat dalam buku/bahan ajar. Materi pembelajaran sejarah yang diberikan kepada peserta didik SD hingga SLTA tidak berbeda. “Proklamasi kemerdekaan RI dan Perang Diponegoro, misalnya, dipelajari dari SD hingga SLTA, sehingga membosankan. Akhirnya pelajaran sejarah benar-benar bisa mengajarkan kearifan hidup bagi peserta didiknya. Untuk itu masalah tawuran anak sekolah yang kerap terjadi, bukan semata-mata persoalan budi pekerti, tetapi juga karena ada kesalahan dalam pembelajaran sejarah.

Salah satu usaha pengembangan pembelajaran sejarah adalah dikembangkannya suplemen kurikulum muatan lokal atau Kurikulum



Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Inti muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaianya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan kebutuhan daerah, serta wajib dipelajari oleh siswa di daerah itu.

Hasil Penelitian Sayono (2001) menunjukkan perlunya penyempurnaan kurikulum pembelajaran sejarah dengan menempatkan sejarah lokal sebagai bahan ajar. Hal ini untuk menghindarkan siswa tercabut dari akar sosio-kulturalnya, karena materi sejarah yang paling dekat dengan kondisi psikologis siswa adalah sejarah lokal. Kedudukan sejarah lokal sangat urgen dalam pembelajaran sejarah, dan diharapkan ada kesinambungan dalam pemikiran siswa agar dapat merasa bahwa diri dan lingkungannya merupakan bagian dari kehidupan yang lebih luas yakni negara kesatuan Republik Indonesia

Tujuan penerapan sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah di sekolah adalah (1) bahan belajar akan lebih mudah diserap siswa, (2) sumber belajar di daerah dapat lebih mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, (3) siswa lebih mengenal kondisi lingkungan, (4) siswa dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya, (5) siswa dapat menolong diri dan orang tuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, (6) siswa dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya, (7) siswa menjadi akrab dengan lingkungannya (Widja 1989), dan siswa makin kreatif, inovatif, patriotik, dan cinta tanah air.

Mencermati perkembangan masyarakat yang begitu kompleks, maka perlu kurikulum berwawasan lokal berstandar Internasional, karena perkembangan kurikulum sejarah tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal. Kurikulum nasional yang disusun berdasarkan kompetensi dasar dalam bentuk Standar Internasional, akan memberikan peluang luas kepada daerah untuk mengembangkan muatan lokal dalam pembelajaran sejarah, sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Dalam mengembangkan

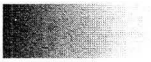
kurikulum bermuatan sejarah lokal dapat dikemas dengan cara menjabarkan dan menambah bahan kajian dari KTSP mata pelajaran sejarah. Untuk dapat mengembangkan muatan sejarah lokal dengan baik perlu kiranya tetap menggunakan pendekatan-pendekatan yang berlaku dalam sejarah nasional yaitu faktual, prosesual, pemecahan masalah, dan tematis. Pendekatan tematis memerlukan pengembangan sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah perkebunan, dan sejarah peradaban, yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Pengembangan pembelajaran sejarah bermuatan lokal perlu pula mencermati arah materi sejarah yang bersifat Indonesia sentris, arah gerak sejarah Bangsa Indonesia yang semula ditentukan oleh kaum elit/penguasa, menuju ke gerak sejarah yang tidak hanya ditentukan oleh kaum penguasa, tetapi oleh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi tantangan pembelajaran sejarah yang demikian ini peran guru sejarah benar-benar menentukan selain sebagai pelaksana kurikulum dan pengembang kurikulum sejarah, juga harus mampu melakukan pengkajian sejarah lokal di sekitar tempat tugasnya.

PENGINTEGRASIAN SEJARAH LOKAL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Pengintegrasian sejarah lokal dalam tulisan ini adalah pemuatan sejarah dalam lingkup yang terbatas meliputi suatu lokasi tertentu. Perlunya pemuatan sejarah lokal karena untuk mengetahui kesatuan yang lebih besar, bagian yang lebih kecil pun harus dimengerti dengan baik. Seringkali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru bisa dimengerti dengan baik, apabila kita mengerti dengan baik pula perkembangan di tingkat lokal. Pengembangan penulisan yang bersifat nasional seperti selama ini, sering kurang memberi makna bagi orang-orang tertentu, terutama yang terkait dengan sejarah wilayahnya sendiri (Lapian 1980).

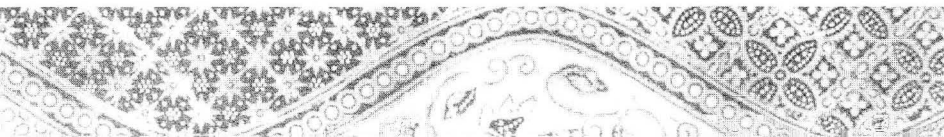




Banyak bagian sejarah bangsa Indonesia, bukan saja tidak pernah dihayati, tetapi juga tidak pernah dibayangkan karena kurangnya informasi tentang peristiwa itu, sehingga ada bagian-bagian sejarah daerah kita sendiri yang luput dari masyarakat pembaca sejarah. Sebagai contoh keterbatasan pengetahuan orang-orang (bahkan yang berasal dari daerah itu sendiri) tentang peranan penting serta perkembangan detail dari kerajaan Wolio, Wuna, Konawe, Mekongga, dan Laiwoi. Ataupun arti penting serta detail dari bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah berkembang di Indonesia seperti Barata di Wuna dan Buton, serta Pitu Dula Batu di Kerajaan Konawe. Masih banyak lagi bisa dipakai contoh tentang kasus-kasus objek studi sejarah lokal yang tidak begitu dikenal di lingkungan masyarakat Indonesia.

Peninggalan gua prasejarah di Muna, Alquran 30 juz tulisan tangan di atas kertas yang berasal dari bahan baku kulit kayu yang ditemukan di Muna, perjuangan rakyat Buton melawan Jepang, perlawanan rakyat Kolaka dan Kendari melawan Sekutu dan Belanda yang mencapai puncaknya pada saat peristiwa 19 November 1945. Rangkaian peristiwa tersebut belum banyak ditulis sehingga tidak dipahami masyarakat di Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, kepentingan mempelajari sejarah lokal, pertama-tama adalah untuk mengenal berbagai peristiwa sejarah di wilayah terdekat dengan lebih baik dan lebih bermakna.

Sejalan dengan itu, Lopian (1980) menunjukkan kepentingan lebih lanjut dari kajian secara lokal, yaitu: “untuk bisa mengadakan koreksi terhadap generalisasi-generalisasi yang sering dibuat dalam penulisan sejarah nasional”. Sebagai ilustrasi masalah generalisasi yang menyangkut periodisasi sejarah Indonesia yang sering diberi istilah Zaman Hindu. Pada kenyataannya ada daerah-daerah yang tidak mengenal periode zaman Hindu (seperti Sangir-Talaud, Sewu, Rote, dan Wilayah Sulawesi Tenggara). Ada pula daerah-daerah yang sampai sekarang masih berpegang pada Hinduisme (seperti Bali, dan sebagian Lombok). Di sini juga nampak



bahwa pengembangan penulisan sejarah lokal akan memberikan bahan pengecekan terhadap anggapan teoritis yang bersifat menggeneralisasikan masalahnya untuk seluruh Indonesia.

Ada beberapa aspek positif dalam pembelajaran sejarah lokal, baik yang bersifat edukatif psikologis maupun yang bersifat kesejarahan sendiri. *Pertama*, mampu membawa peserta didik pada situasi riil di lingkungannya dan mampu menerobos batas antara dunia sekolah dan dunia nyata di sekitar sekolah. Dilihat secara sosio-psikologis bisa membawa peserta didik secara langsung mengenal dan menghayati lingkungan masyarakatnya, dimana mereka merupakan bagian di dalamnya (Douch 1967; Mahoney 1981).

Kedua, pembelajaran sejarah lokal, akan lebih mudah membawa siswa pada usaha untuk mengenang pengalaman masa lampau masyarakatnya dengan melihat situasi masa kini, bahkan dapat memproyeksikan peluang dan tantangan pada yang akan datang. Dalam pembelajaran sejarah lokal peserta didik akan mendapatkan banyak contoh dan pengalaman dari berbagai tingkat perkembangan lingkungan masyarakatnya, termasuk situasi masa kini. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah menangkap konsep perubahan yang menjadi kunci penghubung antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

Kalau dihubungkan dengan teori J. Bruner maupun dalam hubungan dengan konsep-konsep pendekatan proses, maka pembelajaran sejarah lokal sangat mendukung prinsip pengembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif dan struktural konseptual. Hampir semua prinsip dalam rangka pembelajaran siswa aktif sangat relevan dengan kegiatan pembelajaran yang bermuatan sejarah lokal. Sesuai dengan sifat materi serta sumber sejarah lokal, maka peserta didik akan terdorong untuk menjadi lebih peka lingkungan, begitu juga mereka akan lebih terdorong mengembangkan keterampilan-keterampilan khusus seperti: mengobservasi, teknik bertanya atau melakukan wawancara, mengumpulkan dan menyeleksi sumber, mengadakan klasifikasi serta



mengidentifikasi konsep, bahkan membuat generalisasi, kesemuanya itu mendorong bagi perkembangan proses belajar bersifat *discovery inquiry*.

Jika dihubungkan dengan pendekatan kurikulum yang bersifat integratif beberapa mata pelajaran menjadi satu kelompok, dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), maka melalui pembelajaran bermuatan sejarah lokal nampaknya integrasi itu akan lebih mudah diwujudkan. Secara bersama-sama mata pelajaran seperti: ekonomi, geografi dan sejarah bisa juga dikelompokkan sebagai “pembelajaran lingkungan masyarakat setempat” (*local community studies*). Dalam wadah pembelajaran lingkungan masyarakat setempat, aspek-aspek kehidupan ekonomi, sosial, geografis serta aspek perkembangan suatu masyarakat dalam satu lokasi tertentu sulit dipisahkan dengan tegas. Semua unsur kelompok mata pelajaran ini saling terkait dan menjelma dalam wujud kehidupan nyata dari masyarakat secara keseluruhan (Berry dan Schug 1984).

Pembelajaran bermuatan sejarah lokal mengharapkan peserta didik maupun guru harus berhubungan dengan sumber-sumber sejarah, baik yang tertulis maupun informasi lisan, baik berupa dokumen maupun benda-benda seperti: bangunan, alat-alat, peta dan sebagainya yang mula-mula harus dikumpulkan, kemudian dikaji (dikritik) serta diinterpretasikan sebelum bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran sejarah lokal. Untuk itu, guru sejarah perlu suatu persiapan khusus sebelum pembelajaran bermuatan sejarah lokal bisa dilaksanakan secara efektif.

Kesulitan lain adalah memadukan tuntutan pembelajaran sejarah lokal dengan tuntutan penyelesaian target materi yang telah tertulis dalam kurikulum. Pada umumnya dalam kurikulum sudah ditentukan sejumlah materi dan pokok-pokok bahasan yang harus diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dengan ketat. Dengan demikian guru akan mengalami dilema antara memenuhi tuntutan kurikulum dengan usaha pengembangan pembelajaran bermuatan sejarah lokal yang memerlukan waktu yang relatif banyak, baik untuk persiapan maupun untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran sejarah lokal yang dilakukan di luar kelas.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Douch (1967) mengemukakan tiga model pembelajaran sejarah lokal. *Pertama*, guru sejarah hanya mengambil contoh-contoh dari kejadian lokal untuk memberi ilustrasi yang lebih hidup dari uraian sejarah nasional maupun sejarah dunia yang sedang diajarkan. Di sini jelas tidak akan ada masalah bagi usaha yang mengaitkan sejarah lokal dengan kurikulum pembelajaran sejarah yang berlaku, karena tidak ada pengambilan alokasi waktu yang sudah disediakan dan tidak ada kegiatan khusus di luar kelas yang harus dilakukan guru dan peserta didik.

Kedua, dilakukan dalam bentuk kegiatan penjelajahan lingkungan. Di sini sudah ada usaha memberi porsi yang lebih nyata dari kegiatan belajar peserta didik dengan aktivitas kesejarahan di luar kelas. Dalam bentuk ini peserta didik selain belajar sejarah di kelas, juga diajak ke lingkungan sekitar sekolah untuk mengamati langsung sumber-sumber sejarah dan mengumpulkan data sejarah. Aspek-aspek yang diamati tidak semata-mata berupa sejarah dalam urutan-urutan peristiwa, tetapi juga berbagai aspek kehidupan yang terkait seperti geografi, sosial ekonomi, folklor, dan pertanian.

Ketiga, studi khusus tentang berbagai aspek kesejarahan di lingkungan peserta didik. Peserta didik diorganisir untuk mengikuti prosedur seperti yang dilakukan peneliti profesional, mulai dari pemilihan topik, membuat perencanaan, cara membuat analisis data sampai penyusunan laporan hasil studi.

Di antara tiga pilihan tersebut, akan lebih bijak jika dipilih model kedua, karena selain tidak mengganggu materi yang telah ada dalam kurikulum, juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dan mendorong siswa untuk lebih kreatif dan inovatif, serta bangga terhadap lingkungan sosialnya. Persoalannya sekarang, sejauh mana guru sejarah mampu merancang kegiatan pembelajaran yang dapat mengaitkan dengan peristiwa sejarah lokal. Selama ini sumber-sumber sejarah lokal masih terbatas yang



diungkap secara tertulis, jika ada itu umumnya ditulis oleh sejarwan amatir, sementara sejarawan profesional (sarjana sejarah dan magister sejarah) hanya senang berdebat persoalan metodologi yang juga sudah ketinggalan zaman, sehingga cuplikan-cuplikan sejarah yang sempat ditulis juga tidak dapat memuaskan banyak pihak, seperti kasus sejarah Sultra yang dua tahun terakhir dibacakan dalam upacara Harlah Sultra selalu menimbulkan kontroversi. Namun di sisi lain, jika kajian sejarah lokal dapat dilakukan secara profesional dengan mengadaptasi metodologi penelitian sosial modern dapat menghasilkan sesuatu yang berharga seperti hasil kajian sejarah Kota Kendari yang dilakukan Tim dari FKIP Unhalu berhasil mengungkap hari lahir Kota Kendari 9 Mei 1832, demikian pula penelitian Sejarah Kolaka yang dilakukan oleh Tim yang sama berhasil mengungkap beberapa fakta baru diantaranya rangkaian peristiwa 19 November 1945 yang merupakan puncak perjuangan rakyat Sulawesi Tenggara dalam mempertahankan kemerdekaan melawan sekutu dan Belanda sekaligus dapat memperkaya muatan sejarah nasional Indonesia. Dua kajian tersebut dapat menjadi acuan utama guru sejarah dalam pembelajaran di sekolah mulai SD sampai dengan perguruan tinggi.

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH

Agar pembelajaran sejarah berjalan efektif, maka metode yang digunakan harus bisa mengkonstruksi “ingatan historis” yang disertai dengan “ingatan emosional”. Metode pembelajaran satu arah yang ada selama ini hanya akan mengkonstruksi “ingatan historis”. Siswa menjadikan sejarah hanya sebagai fakta-fakta hafalan tanpa adanya ketertarikan dan minat untuk memaknainya, apalagi menggali lebih jauh. Supaya ingatan “historis” bisa bertahan lama, maka perlu disertai “ingatan emosional”, yaitu ingatan yang terbentuk dengan melibatkan emosi hingga bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa untuk menggali lebih jauh dan memaknai berbagai peristiwa sejarah. Proses pembelajaran kemudian tidak hanya

berhenti pada penghafalan saja, tetapi siswa bisa aktif dalam komunikasi dua arah dengan guru untuk menyampaikan pendapatnya mengenai objek sejarah yang tengah dipelajari karena sejak awal ia telah merasa menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sinilah urgensinya sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah.

Penggunaan model pembelajaran *cooperative learning* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam memberdayakan siswa secara aktif dalam menggali muatan sejarah lokal ke dalam pembelajaran sejarah. Model *cooperative learning* ini mampu menempatkan siswa sebagai subjek dalam mengungkap episode-episode sejarah lokal. Karena pada dasarnya *pelaksanaan cooperative learning* adalah menggali potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh masing-masing siswa. Untuk mendukung kondisi tersebut, guru memegang peranan penting dalam menciptakan suasana kelas yang dapat memberikan keleluasaan dalam belajar dan mendorong siswa mengembangkan potensi berpikirnya. Penggunaan model pembelajaran *cooperative learning* ini menempatkan guru sebagai fasilitator, motivator, mediator dan evaluator dalam upaya membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berpikir kritis, agar ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu bekerjasama dengan orang lain, dan mampu untuk berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembelajaran sejarah lokal dapat divariasikan dengan media komputer/ internet dan modul yang secara empiris menunjukkan produktivitas hasil belajar sejarah yang tinggi dan dapat mengaplikasikan pelbagai teori dan strategi pembelajaran terutama pembelajaran kooperatif (Mohamad 2002; Alias 2008).

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu bentuk pembelajaran dalam kelompok kecil untuk bekerja sama sesama siswa (Heinich, 1990), dan dapat meningkatkan motivasi serta prestasi belajar siswa (Anglin 1995). Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran kooperatif, maka ada

lima unsur yang harus diterapkan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: (1) saling ketergantungan positif, (2) tanggung jawab terhadap tugas dan kegiatan belajar, (3) terjadi tatap muka tidak harus di kelas, (4) komunikasi antar anggota, dan (5) evaluasi proses kinerja kelompok (Lie 2002). Hasil uji coba melalui eksperimen menunjukkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar sejarah (Mursidin 2005).

Daud (2008) mengkaji keberkasan strategi pembelajaran diskusi dengan hasil kajian menunjukkan bahawa pembelajaran yang menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar sejarah dan meningkatkan sikap positif siswa terhadap mata pelajaran sejarah dan pembelajaran sejarah.

Kegiatan pembelajaran bermuatan sejarah lokal dapat pula dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL). Melalui pendekatan ini proses pembelajaran menempatkan lingkungan sosial sebagai sumber belajar potensial termasuk di dalamnya aspek-aspek historis dalam lingkungan sehari-hari peserta didik. Penggunaan peta sejarah sebagai bagian dari CTL secara empiris menurut Ismail (2001) dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Implementasi CTL dapat dilakukan dengan menggunakan metode inkuiri seperti dilakukan oleh Ahmad (2008) yang menunjukkan bahawa 83% siswa mampu melakukan inkuiri sejarah secara konsisten. Pemanfaatan metode inkuiri dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar sejarah dan dapat meningkatkan sikap positif siswa terhadap mata pelajaran sejarah dan pembelajaran sejarah (Mahmud 2008).

Dalam kaitannya dengan penggunaan karya sastra pengarang Indonesia sebagai sarana pembelajaran, kita justru tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Di Malaysia sudah sejak lama novel Perburuan karya Pramoedya Ananta Toer menjadi bacaan wajib siswa setingkat SMP, begitu pula dengan Gadis Pantai yang menjadi bacaan wajib siswa setingkat SMP di Australia. Sementara itu, di negeri si pengarang,

semua karya-karyanya sempat dilarang keras beredar. Jadi, sebagai guru sejarah harus senantiasa mendasarkan dirinya pada fakta-fakta, sementara ia tidak boleh menutup diri dari metode pembelajaran yang lebih mudah diterima dan lebih digemari siswa sehingga mereka tidak mengalami “amnesia sejarah” (*Kompas*, 6 September 2006).

Untuk menjadikan guru sejarah yang mampu mengembangkan materi sejarah lokal, maka ia harus mampu melakukan pengkajian sejarah, dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi karena dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memasukkan materi pengenalan penelitian sejarah pada semester satu kelas X. Secara filosofi bahwa inti materi pembelajaran sejarah dalam kompetensi dasar ini adalah sejarah lokal. Usaha ini sangat positif, karena ketika siswa masuk SMA, mereka langsung diajak untuk latihan meneliti sejarah. Pendekatan yang tepat digunakan harus lebih mengedepankan pembelajaran *learning by doing*. Sebab apabila model pembelajaran hanya mengedepankan kognitif, maka tidak ubahnya materi sejarah yang ada pada siswa akan sia-sia.

Berkaitan model pembelajaran sejarah bermuatan sejarah lokal, maka perlu pengembangan modul dan buku-buku untuk merangsang siswa. Seharusnya guru tidak terpaku pada buku ajar, tetapi harus mengembangkan modul yang mengintegrasikan sejarah lokal. Sebab karakteristik setiap sekolah berbeda sesuai dengan arah KTSP berupa keragaman. “Tidak mungkin menggunakan satu buku untuk seluruh sekolah di Indonesia. Guru harus mampu mengembangkan materi sejarah dalam dimensi kekinian dengan mendekatkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kedekatan masalah peserta didik. Pengembangan strategi pembelajaran yang mengedepankan aktivitas siswa merupakan upaya inovatif pembelajaran sejarah.

Menurut Wahap (2000.) yang mampu melakukan itu semua adalah guru yang mempunyai latar pendidikan sejarah dan pengalaman pelatihan. Akhirnya, guru sejarah harus memiliki latar belakang pendidikan sejarah dan



perlu diberi pelatihan materi dan metode pembelajaran sejarah sehingga hasil pembelajarannya efektif dan efisien.

PEMANFAATAN MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI

Upaya mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, maka pembelajaran sejarah harus kaya dengan sumber, agar siswa dapat mengembangkan imajinasinya. Persoalan yang muncul sebagai akibat dari perbedaan persepsi antarpengarang akan memaksa siswa untuk berpikir lebih tajam, sensitif, dan berupaya mengembangkan kemampuan nalar. Sumber atau resource yang paling kaya ada di internet, dan inilah gudangnya resource untuk bahan belajar siswa.

Berkaitan model pembelajaran sejarah bermuatan sejarah lokal, maka perlu pengembangan media berbasis teknologi informasi untuk merangsang siswa. Seharusnya guru tidak terpaku pada buku ajar, tetapi harus mengembangkan media yang mengintegrasikan sejarah lokal. Sebab karakteristik setiap sekolah berbeda sesuai dengan arah KTSP berupa keragaman. Tidak mungkin menggunakan satu buku/media untuk seluruh sekolah di Indonesia. Guru harus mampu mengembangkan materi dalam dimensi kekinian dengan mendekatkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kedekatan masalah peserta didik. Pengembangan strategi pembelajaran yang mengedepankan aktivitas siswa merupakan upaya inovatif pembelajaran sejarah.

Pengadaan media TIK untuk kegiatan pembelajaran bisa saja berasal dari sekolah itu sendiri atau dari pihak lain. Pada dasarnya tidak menjadi masalah dari manapun asalnya media TIK yang sampai di sekolah. Lebih penting lagi adalah bagaimana menyiasati agar media TIK yang telah tersedia di sekolah dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan pembelajaran peserta didik. Beberapa contoh media TIK yang mulai banyak tersedia di pasaran adalah CD/kaset audio, VCD, dan internet.

Timbul pertanyaan, mengapa menggunakan media TIK. Jawabnya: Menghemat waktu proses pembelajaran, melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan (<http://www.docstoc.com/docs/20430018/>).

Sehubungan dengan semakin maraknya ketersediaan media TIK untuk kegiatan pembelajaran, baik di pasaran, yang diadakan sekolah sendiri maupun yang diterima sekolah dari berbagai pihak, maka sebelum memanfaatkannya di dalam kelas, beberapa tips berikut ini perlu kiranya mendapatkan perhatian.

1. Mempelajari Materi Pembelajaran yang Dikemas dalam Media TIK

Akibat kemajuan TIK dewasa ini, para guru dapat mencatat daftar *websites* yang memang memuat materi pelajaran yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan dibahas di dalam kelas. Tidak hanya mencatat website-nya tetapi juga materi pelajaran yang dikandung di dalamnya. Penugasan peserta didik mengakses *websites* tertentu hendaknya dilakukan guru secara terencana. Demikian juga dengan alokasi waktu bagi peserta didik untuk mengerjakan tugas yang diberikan.

Jika di sekolah telah tersedia perangkat komputer dan akses ke internet, maka guru dapat menugaskan para peserta didiknya untuk mengunjungi *websites* yang dimaksudkan. Tidak hanya sekedar mengunjungi *websites* tertentu saja, tetapi para peserta didik juga ditugaskan untuk mendiskusikan materi pelajaran yang dikemas di dalamnya.

Mengakses *websites* tertentu yang ditugaskan guru dapat saja dilakukan peserta didik di luar jam pelajaran sekolah atau selama peserta didik masih berada di sekolah. Apabila selama berada di lingkungan sekolah, peserta didik dapat saja mengakses *websites* yang ditugaskan guru di lab komputer. Peserta didik akan merasa lebih leluasa melaksanakan tugas yang diberikan guru apabila ada jam pelajaran kosong. Atau, setidaknya

tidaknya ada satu jam pelajaran yang diperuntukkan guru kepada peserta didik untuk mengakses *websites* dan mendiskusikan materinya. Tentunya akan lebih baik lagi apabila peserta didik melaksanakan tugas di luar jam pelajaran sekolah.

2. Merencanakan Waktu Pemanfaatan Media TIK

Ada sebagian guru yang membawa media TIK atau media pembelajaran ke dalam kelas dan kemudian memanfaatkannya ketika dirinya merasa memerlukannya. Artinya, pemanfaatan media pembelajaran dilakukan sesuai dengan keinginannya.

Pemanfaatan media dalam kegiatan pembelajaran dilakukan secara terencana dan terintegrasi dalam jadwal pelajaran sekolah. Sebagai contoh guru yang akan memanfaatkan media CD atau VCD dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari materi yang dikandung di dalam CD/VCD, maka guru tahu persis kapan materi tersebut akan dibahas bersama peserta didiknya. Dalam kaitan ini, guru dituntut membuat perencanaan pemanfaatannya. Berbagai topik program media yang terdapat dalam CD/VCD telah terlebih dahulu dipelajari guru sehingga dapat diintegrasikan dengan jadwal pelajaran sekolah, baik hari maupun waktunya. Dengan adanya perencanaan ini, maka peserta didik dapat dikondisikan agar peserta didik mempersiapkan diri dan fasilitas yang mereka perlukan sebelum kegiatan pemanfaatan media dilakukan. Demikian juga kesiapan guru itu sendiri, baik dalam mempelajari materi pelajaran yang dikemas di dalam media CD atau VCD maupun dalam mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan guru.

3. Mengkomunikasikan Rencana Pemanfaatan Media TIK kepada Peserta Didik

Ada dua alasan mengapa dinilai penting mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media TIK kepada peserta didik adalah agar

peserta didik dapat mempersiapkan (a) dirinya untuk mempelajari materi pelajaran yang akan disajikan melalui media TIK dan (b) fasilitas yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui media TIK. Dari sisi guru, ada tuntutan agar guru lebih (a) mempersiapkan dirinya mengenai materi pelajaran yang akan dibahas, (b) mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan (dalam kondisi baik) agar tidak menjadi hambatan sewaktu pemanfaatan media TIK dilaksanakan, dan (c) mempersiapkan ruangan yang akan menjadi tempat pemanfaatan media TIK (Siahaan, 2011).

Menurut Wahap (2000) yang mampu melakukan itu semua adalah guru yang mempunyai latar pendidikan sejarah dan memiliki pengalaman pelatihan dalam aspek media, metode dan materi pembelajaran sejarah. Akhirnya, guru sejarah harus memiliki latar belakang pendidikan sejarah dan perlu diberi pelatihan tentang media dan metode pembelajaran sejarah sehingga hasil pembelajarannya efektif.

PENUTUP

Berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pembelajaran sejarah selama ini, salah satu penyebabnya karena materi yang diajarkan tidak ada kaitannya dengan lingkungan sosial siswa. Materi pembelajaran terkesan cerita tentang tokoh, peristiwa, dan tahun yang jauh dari lingkungan siswa. Untuk itu, integrasi sejarah lokal dalam pembelajaran sejarah merupakan suatu keharusan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memberi makna dan kesadaran kepada peserta didik. Demikian pula penggunaan pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang menarik seperti media teknologi informasi berupa komputer/internet, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Guru sejarah selain harus mampu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, juga dituntut kemampuan untuk melakukan pengkajian sejarah lokal di sekitar peserta didiknya dan mengaksesnya di dunia maya, sehingga peserta didik tidak lagi tergantung sepenuhnya kepada guru di sekolah.



DAFTAR ACUAN

- Abdullah, Taufik, dkk. (1999). *Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Alias, R. (2008), "Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantuan Komputer Bertajuk Sejarah dan Kita, Petempatan Awal di Negara Kita, Parameswara dan Pengasasan Melaka". <http://akademik.ukm.my/eda/projekge6553/sejarah.htm?PHPSESSID=c37f30694e4dc4095e3e7579e8a73e44#118>, 8 Mei 2008.
- Anglin, G. J. (1995), *Instructional Technology, past, present, and future*. Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, Inc.
- Berry, R. dan M. C. Schug (1984). "Young People and Community," dalam *Community Study: Applications and Opportunities*. Washington: National Council for the Social Studies.
- Departemen Pendidikan Nasional (2006). *Bahan Sosialisasi KTSP*. Jakarta: Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan.
- Douch, R. (1967). *Local History and the Teacher*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Govinthasamy, B. A. (2002), "Penilaian Perlaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK) dalam Mata Pelajaran Sejarah KBSM Tingkatan 4. Satu Kajian di Daerah Tampin dan Rembau Negeri Sembilan," <http://akademik.ukm.my/eda/projekge6553/sejarah.htm?PHPSESSID=c37f30694e4dc4095e3e7579e8a73e44#118>, 8 Mei 2008.
- Heinich, R., dkk. (1990), *Instructional and the New Technologies of Instruction*. New York: Macmillan Publishing Company.

<http://www.docstoc.com/docs/20430018/Pembelajaran-Berazas-Media-Teknologi-Informasi>. akses, 2 Maret 2011.

Johnson, E. B. (2006), *Contextual Teaching and Learning*. Bandung: Mizan Media Utama.

Jordan, P. D. (1968), *The Nature and Practice of State and Local History*. Washington: American Historical Association.

Lapian, A. B. (1980), "Memperluas Cakrawala melalui Sejarah Lokal," *Prisma*. No. 8, Tahun IX.

Lie, Anita (2002), *Cooperatif Learning Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas*. Jakarta: Grasindo.

Mahoney, J. (1981), *Local History: A Guide for Research and Writing*. Washington DC: National Education Association.

Mohamad, M. (2002). "Pembinaan dan Perlaksanaan Modul Pembelajaran Mengenai Web yang Disepadukan dengan Subjek Sejarah Dunia Tajuk Tamadun Awal Manusia," <http://akademik.ukm.my/eda/projekge6553/sejarah.htm?PHPSESSID=c37f30694e4dc4095e3e7579e8a73e44#118>, 8 Mei 2008.

Mursidin, T. (2005), "Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Konsep Diri terhadap Hasil Belajar Sejarah," Disertasi tidak diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Nash, G. B. dan C. Crabtree (1996), *National Standard for History*. Los Angeles: National Centre for History in the School University of California.

Partington, G. (1980), *The Idea of an Historical Education*. Avon: NFER Publishing Company.



Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Purwanto, Bambang (2006), *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*. Yogyakarta: Ombak.

Sayono, J. (2001), “Sejarah Lokal Kontemporer: Urgensinya sebagai Muatan Lokal di Sekolah-sekolah Lanjutan,” *Jurnal Sejarah Kajian dan Pengajarannya*, Tahun 6, Nomor 2, September.

Siahaan, Sudirman (2011), “Tips bagi Guru dalam Memanfaatkan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pembelajaran,” <http://cobaberbagi.wordpress.com/2010/01/25/>, 2 Maret 2011.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wahap, W. (2008), “Penggunaan Penyoalan Lisan di Kalangan Guru Sejarah di Sekitar Bandar Sibu, Sarawak,” <http://akademik.ukm.my/eda/projekge6553/sejarah.htm?PHPSESSID=c37f30694e4dc4095e3e7579e8a73e44#118>, 8 Mei 2008.

Widja, I Gede (1989), *Dasar-dasar Pengembangan Strategi dan Metode Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

— (1999), *Sejarah Lokal: Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.



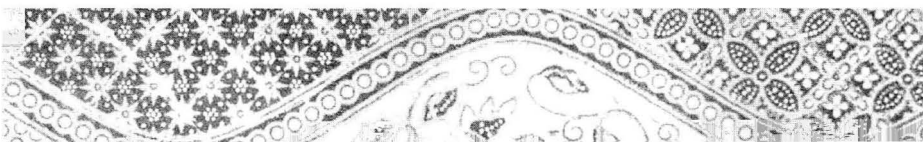
Membangun Karakter Bangsa Lewat Sejarah Refleksi 65 Tahun Pengajaran Sejarah di Indonesia

ABDUL SYUKUR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia menetapkan pembangunan karakter bangsa menjadi program pendidikan nasional untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat krisis multidimensional yang masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan hasil penelitian awal ternyata pembangunan karakter bangsa bukan merupakan program baru karena sudah dicanangkan sejak 1945. Saat itu pemerintah membutuhkan sebuah definisi baru tentang identitas nasional yang mempunyai karakter sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Karakter ini menggantikan karakter lama yang dibangun pemerintah kolonial Hindia Belanda. Proses pergantian karakter ini dilakukan dengan memanfaatkan pengajaran sejarah. Namun kepercayaan yang tinggi terhadap pengajaran sejarah sebagai media pembangun karakter bangsa semakin menurun, terutama setelah runtuhnya pemerintah Orde Baru pada 1998. Semangat reformasi mendorong cara baru dalam memandang masa lalu yang mengkritisi cara pandang lama sehingga menggoyahkan kredibilitas pengajaran sejarah di sekolah.

Tulisan ini bermaksud melakukan refleksi terhadap bentuk karakter bangsa yang dihasilkan pengajaran sejarah dari tahun 1945 hingga 2010. Karakter bangsa apakah yang terbentuk melalui pengajaran sejarah selama 65 tahun? Untuk memahaminya, harus dilakukan studi banding terhadap kebijakan pemerintah menempatkan pengajaran sejarah dalam strategi pembangunannya.

Para pendiri negara Republik Indonesia mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan pengajaran sejarah dalam membangun



karakter bangsa merdeka. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerbitan UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia yang diterbitkan pertama kali pada 2 April 1950 oleh pemerintah negara bagian Republik Indonesia dan diberlakukan kembali pada 12 Maret 1954 sebagai UU No. 12 tahun 1954 oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum ditegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran yang akan dibangun bersifat nasional, yakni berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia.

Pendidikan yang bersifat nasional dan bersandarkan kebudayaan sendiri itu, harus dengan keinsyafan bermaksud menjadi perisai terhadap bahaya *cultural bondage*, yang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial yang tak kita ingini kembali lagi itu. Karena itu dalam pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti, bahwa **pendidikan yang demikian pengajaran sedjarah akan menjadi pengajaran yang penting sekali** (ejaan kutipan sesuai aslinya; penebalan dari penulis).

Perhatian yang besar terhadap pengajaran sejarah tidak hanya diperlihatkan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Atas inisiatif pribadi mereka menerbitkan buku-buku pengajaran sejarah, termasuk di antaranya guru sejarah yang tidak puas dengan buku-buku pelajaran sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Buku-buku mereka berawal dari diktat untuk keperluan pengajaran sejarah di kelas dan hanya membahas secara garis besar sejarah bangsa Indonesia. Kecenderungan ini dapat dilihat dari judul buku seperti *Ichdisar Sedjarah Indonesia*, *Inti-sari Sedjarah Indonesia* atau *Pokok-pokok Sedjarah Indonesia*. Di samping itu terbit pula buku-buku pengajaran sejarah yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah seperti *Zaman Dahulu, Sekarang dan Jang Akan Datang: Buku Peldajarn Ilmu untuk Sekolah Dasar* karya M. Kasim dan Oejeng S. Gana yang terdiri dari tiga jilid atau tulisan Soendoro, *Sedjarah Indonesia untuk Sekolah Lanjutan*.

Banyaknya jumlah dan jenis buku sejarah itu memunculkan kekacauan di bidang pelajaran sejarah di sekolah-sekolah maupun di kalangan masyarakat umum. Kekacauan tersebut terutama timbul karena buku-buku sejarah itu pada umumnya menggunakan smber yang sama, yaitu karya Dr.F.W. Stapel yang diterbitkan pada



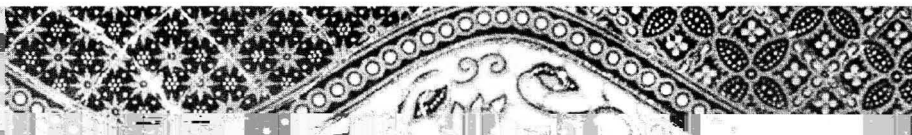
tahun 1939. Karena itu, timbul permasalahan: apakah sejarah Indonesia dan sejarah Hindia Belanda pada dasarnya sama—apakah sejarah Indonesia hanya merupakan antithesis sejarah Hindia Belanda?

Jelaslah bahwa kekacauan itu tidak mendukung pemupukan semangat kebangsaan di bidang pendidikan (Ali dalam Soedjatmoko, dkk., ed. 1995: 2).

Kementerian Pendidikan tidak berdaya melarang penerbitan buku pengajaran sejarah yang rendah mutunya dan tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekolah. Ada dua langkah penting yang dilakukan Kementerian untuk mengatasi kekacauan pengajaran sejarah. Pertama, membenahi materi pengajaran sejarah untuk calon guru sekolah dasar maupun lanjutan. Ini merupakan suatu langkah yang cukup tepat karena para guru akan menyebarkan pemahaman sejarah yang sesuai dengan semangat kebangsaan (juga kepentingan politik pemerintah) kepada para murid. Pada saat itu, calon guru diharuskan mengikuti pendidikan di Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru yang dikelola oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia). Di antara materi pengajaran yang diberikan adalah pengajaran sejarah. Untuk keperluan itulah Kementerian Pendidikan menerbitkan buku *Sedjarah Nasional* secara berseri yang terdiri dari 20 jilid. Buku ini menggunakan sejarah Indonesia sebagai alat bagi pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendidik para calon guru untuk membebaskan diri dari dunia feodal (Ali dalam Soedjatmoko, dkk., ed. 1995: 1–2). Pengarang buku ini menjadikan feodalisme sebagai musuh utama yang harus dihapuskan melalui pengajaran sejarah. Menurutnya ada empat alasan menghapus dunia feodal: alam feodal masih merajalela di Indonesia, feodalisme sebagai sistem dimodernisasikan pemerintah kolonial Hindia Belanda, feodalisme menghambat demokrasi, dan feodalisme mengadakan persekutuan dengan kolonialisme modern.

Manusia demokratis hanya mungkin tercipta apabila feodalisme dalam bentuk-bentuknya sudah lenyap. Maka oleh sebab itu, teranglah bahwa pelajaran sejarah mempunyai fungsi istimewa dalam soal ini . . .

Sekolah Guru (SG) adalah suatu bentuk pendidikan yang semata-mata menuju kearah pembentukan guru-rakyat yang sadar tentang tugasnya sebagai *paedagoog-*



patriot. Semestinya fungsi pelajaran sejarah di SG ialah: memberikan pengertian tentang pasang surut alam feudal di Indonesia (dan di dunia) sehingga pelajar dapat mengatasi kesukaran-kesukaran di dalam pribadinya yang timbul karena adanya alam feudal di samping alam modern, sehingga pelajar dapat menunaikan kewajibannya sebagai guru nasional dengan sempurna (Ali 2005: 353).¹

Secara tegas buku tersebut mengkritik pengajaran sejarah politik dan sejarah perang dan menganjurkan penekanan aspek sosial dalam sejarah nasional. Menurutnya, penghambat utama perjuangan bangsa Indonesia adalah *agrar-feodalismus-kolonialismus*.

Langkah kedua yang dilakukan Kementerian Pendidikan adalah menyusun buku sejarah nasional. Untuk keperluan itu, Kementerian membentuk Panitia Sejarah Nasional pada 1951. Keanggotaan panitia ini terdiri dari para sejarawan Indonesia dan Beanda yang bekerja di Universitas Indonesia dan Dinas Purbakala, namun panitia gagal menyelesaikan tugasnya. Usaha menyusun buku sejarah nasional dilanjutkan kembali setelah terbentuknya pemerintahan hasil Pemilihan Umum 1955, yakni dengan menyelenggarakan seminar sejarah nasional. Penggagasnya adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto. Ia terinspirasi penyelenggaraan Seminar Ilmu dan Kebudayaan pada 25-30 Juni 1956. Gagasannya dibahas oleh Kementerian Pendidikan bersama tiga perguruan tinggi di Pulau Jawa yaitu Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, dan Universitas Airlangga di Surabaya. Dalam sambutannya, Menteri Sarino mengatakan, “Karena itu semua maka saja pinta perhatian dari Universitas agar dengan djalan seminar dapat dibahas sedalam dalamnja peladjaran sedjarah, terutama sedjarah nasional (babad, sedjarah umum, sedjarah kebudajaan, sedjarah ekonomi, sedjarah pergerakan, sedjarah revolusi)” (dalam Surjomihardjo 1976: 9–10; ejaan sesuai aslinya).

1 Lihat Ali 2005. Buku ini terbit pertama kali pada t1961 dan diperbaiki pada cetakan kedua yang terbit setahun kemudian. Ada tiga bagian pembahasan namun Bab IV huruf H (halaman 355–361) sangat penting dalam tulisan ini karena memberikan informasi yang cukup lengkap menyangkut penjelasan tentang pengajaran sejarah Balai Pendidikan Guru.



Sarino tidak sempat melaksanakan gagasannya karena jabatannya sebagai Menteri digantikan oleh Prijono, yang kemudian bertindak sebagai Ketua Panitia Penyusunan Buku Sejarah Nasional tahun 1951. Ia mewujudkan gagasan Sarino mengadakan Seminar Sejarah Nasional. Dalam sambutannya, Prijono mengatakan,

Initiatief itu saja oper, bukan hanja oleh karena saja harus mendjaga continuiteit politik Pemerintah, akan tetapi oleh karena idée jang menimbulkan initiatief itu saja setudjui 100%. Saja memang sependapat dengan Sdr. Sarino Mangunpranoto, bahwa peladjaran Sedjarah Nasional jang dasar2nja dan tjara2nya akan Saudara2 letakkan dalam Seminar ini, adalah salah suatu alat jang terpenting untuk menumbuhkan atau mempertebal nasionalisme dan patriotism, tjinta kepada bangsa dan tjinta kepada tanah-air (dalam Surjomihardjo 1976: 6).

Prijono dan Sarino mengeluhkan kualitas buku-buku sejarah Indonesia, khususnya yang digunakan sebagai materi pengajaran sejarah di sekolah-sekolah. Menurut penilaian Ketua Panitia Sejarah Nasional Sardjito buku sejarah di sekolah-sekolah pada umumnya bersifat kronologis dan bercorak geografis-politis karena hanya berisi peperangan dan bentrokan negara-negara tetangga atau golongan suku bangsa satu sama yang lain (dalam Surjomihardjo 1976: 3). Secara khusus Sarino mengungkapkan pengalaman pribadi yang mendorongnya untuk mengggagas seminar sejarah,

Saja membatja buku2 tentang sedjarah mengenai pertumbuhan bangsa Indonesia, bermatjam matjam tjorak dan ragamnja. Ada jang berbentuk sekumpulan dari pada tahun ke tahun dan nama2 orang. Ada jang berbentuk dokumentasi menurut wadjarnja. Ada jang berbentuk fantasi dan romatiek dari penulisnja (dalam Surjomihardjo 1976: 9–10).

Keluhan serupa dikemukakan pula oleh Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku tuan rumah seminar. Dalam kesempatan itu Sri Sultan menyatakan,

Kita tahu bahwa sedjarah Indonesia jang disusun sampai sekarang pada umumnja masih mempergunakan buku2 dan tulisan-tulisan jang berasal dari penulis-penulis pendjajah Belanda, padahal disamping kita harus mengakui bahwa diantara mereka ada jang berusaha menuliskan setjara objektief, akan tetapi pada umumnja pendjadjah Belanda itu mentjiptakan sedjarah Indonesia tidak lepas dari maksud politiknya, sehingga sedjarah Indonesia dibikin sedemikian rupa agar dapat menguntungkan bagi tudjuan politik mereka (dalam Surjomihardjo 1976: 12).

Tudingan bahwa pengajaran sejarah pada masa kolonial bermuatan kepentingan politik dipertegas oleh Ketua Panitia Seminar Sejarah Nasional Sardjito,

Kita semua mengetahui betapa besarnya peranan dan pengetahuan perihal sedjarah terhadap pertumbuhan djiwa kita...

Didalam djaman kolonial, Belanda menginsjafi benar2 hal ini, dari itu disekolah2 rakjat tidak diperbolehkan adanya peladjaran sedjarah, sedang disekolah menengah mata peladjaran sedjarah jang diberikan itu bertjorak sedjarah negeri Belanda.....

Dengan ini benih2 jang meratjuni djiwa kita, dapat bertumbuh subur, sampai kita dapat perasaan minderwaardigheids-complex, perasaan kurang harga diri, merasa takut, lemah, dan kurang pinter bila kita menghadapi bangsa lain.

Komplex jang djelek ini sebegitu mendalam melekatnja didalam djiwa kita, sampai sering-sering masih terlihat juga di djaman merdeka sekarang ini, meskipun djiwa kita sudah ditjutji oleh revolusi jang hebat, jang mulai 12 tahun jang lampau

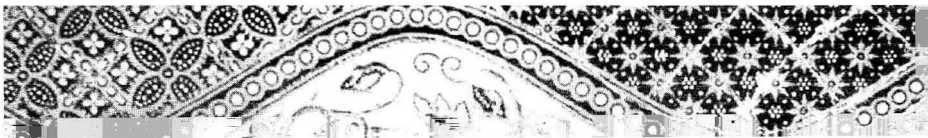
(dalam Surjomihardjo 1976: 3).

Sardjito memberikan contoh pengaruh negatif pengajaran sejarah bercorak sejarah Negeri Belanda tersebut yakni banyaknya generas muda Indonesia yang mendewa-dewakan pahlawan-pahlawan Belanda, dan tidak menghagai pahlawan bangsanya sendiri seperti Imam Bonjol dari Pulau Sumatera dan Pangeran Diponegoro dari Pulau Jawa. Ia memaklumi fenomena ini “karena dibuku sedjarah itu pahlawan2 kita memang ditjap sebagai *opstandeling*, pemberontak.”

Djadi pengalaman jang sangat pahit ini kita pakai sebagai tjermis dan kita akan mentjari djalan untuk dapat menjalurkan perkembangan djiwa pemuda kita kearah kebudajaan nasional Indonesia, dengan berpengangan pada sedjarah Indonesia jang bertjorak nasional.

Oleh karena itu Seminar Sedjarah ini dimaksudkan sebagai langkah pertama untuk mendapatkan bahan2 guna sedjarah Indonesia baru, jang bertjorak nasional dan jang setjara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan (dalam Surjomihardjo 1976: 3).

Berdasarkan penjelasan Sardjito tersebut bahwa tujuan penyelenggaraan seminar adalah memperkuat sejarah yang bercorak nasional dan bersifat ilmiah. Pemanfaatan sejarah sebagai alat indoktrinasi oleh pemerintah pendudukan telah menghilangkan sifat ilmiah sejarah yang bercorak nasional karena sejarah yang bercorak nasional hanyalah sebuah antitesa



sejarah yang bercorak Belanda. Antitesa ini dilakukan akibat tekanan pemerintah pendudukan dan kekurangan tenaga ahli di bidang sejarah. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam kegiatan perumusan sejarah yang bercorak nasional tidak mempunyai latar belakang pendidikan sejarah. Mereka umumnya mendapatkan pengetahuan sejarah di sekolah menengah AMS Jurusan Sastra Timur seperti Muhammad Yamin, Prijono, dan Sanusi Pane. Di antara mereka, Yamin adalah perumus utama landasan filosofis sejarah yang bersifat nasional. Ia menjadi pembicara utama dalam Seminar Sejarah Nasional yang pertama pada tahun 1957.

Dalam makalahnya, Yamin mengartikan filsafah sejarah nasional adalah kebulatan pikiran filosofi terhadap sejarah nasional Indonesia. Keberadaanya sangat diperlukan agar penulisan sejarah Indonesia mempunyai sendi yang berdasarkan alam pikiran bangsa Indonesia untuk menyusun kemabli sejarahnya setelah kemerdekaan nasional tercapai pada 1945. Oleh karena itu filsafah sejarah Indonesia berkaitan dengan filsafat nasional Pancasila (Yamin dalam Surjomihardjo 1976: 204–5).

Pemusatan fikiran kepada segala kedjadian sedjarah Indonesia dalam hubungan umum, sehingga terbentuklah filsafah-sedjarah nasional jang mempunjai empat tiang atau empat sila jang mendukung filsafah-sedjarah nasional itu.

Adapun sila jang empat itu ialah: 1. Kebenaran, 2. Sedjarah Indonesia, 3. Tafsiran synteheese, 4. Nasionalisme Indonesia (Yamin dalam Surjomihardjo 1976: 217).

Melalui filsafah sejarah nasional, bangsa Indonesia akan menemukan kebenaran yang tersembunyi dalam dunia kebatinan di belakang kejadian-kejadian sejarah pada masa lalu sebagai kelahiran masyarakat manusia. Dalam menjelaskan sila kedua filsafa sejarah nasional, Yamin mengingatkan bahwa yang menjadi objek filsafah sejarah ialah sejarah Indonesia. Namun objek filsafah sejarah ini harus ditafsirkan melalui penafsiran sintesis yakni mengkombinasikan lima tafsiran sejarah (teologis, ekonomis, geografis, rasial, dan rohani).

Apabila kelima-lima tafsiran diatas kita laksanakan satu-persatu dengan terpisah satu dari jang lain kepada masyarakat pada jaman jang lampau, maka kita mendapat sedjarah menuut irisan-pandjang.

Sedjarah jang dihasilkan ialah sedjarah terpetjah-petjah dan tidak dapat member lukisan sedjarah dalam keseluruhannya.

Tafsiran jang dilakukan sebenarnya ialah analisa masyarakat.

Oleh sebab itu kita harus mendapat lukisan sedjarah menurut irisan-budjur.....

Tafsiran-syntheticis mendjamin penulisan-sedjarah jang sempurna dan historiografi jang demikian memang djauh lebih sulit dari penulisan sedjarah jang berdasarkan suatu matjam tafsiran sadja (Yamin dalam Surjomihardjo 1976: 220-1).

Menurut Yamin bahwa penafsiran sintesis dalam sejarah Indonesia berfokus pada nasionalisme yang menjadi sila terakhir filsafat sejarah nasional. Konsepsinya dipilih oleh Kementerian Pendidikan untuk menyusun materi pengajaran sejarah yang bersifat doktriner, terutama setelah diberlakukannya Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Seluruh kementerian berusaha menyesuaikan program kerjanya dengan doktrin Demokrasi Terpimpin yang dikembangkan Soekarno dan diberlakukan selama kurun 1960-an.

Kementerian Pendidikan segera mengganti kurikulum pendidikannya dengan yang baru, yang disebut sebagai Kurikulum Pancawardhana. Dalam kurikulum ini, pengajaran sejarah masuk dalam wardhana yang pertama, yakni mengembangkan rasa cinta tanah air. Ciri utama pengajaran sejarah dalam kurikulum Pancawardhana adalah bersifat Proklamasisentris dan berestalogi masyarakat sosialis Indonesia. (Klooster 1985: 175). Untuk memastikan kesamaan pemahaman terhadap sejarah, pemerintah mendoktrin para calon guru sejarah melalui kegiatan Kursus Kader Revolusi (Surjomihardjo dalam Sutjiatiningsih 1995: 93-4). Kegiatan itu dihentikan setelah krisis politik pada 1965 akibat kudeta Gerakan 30 September pimpinan Letnan Kolonel Untung Djamsuri. Krisis mencapai klimaks dengan diberhentikannya Presiden Soekarno oleh Majelis Permusyawaratan Sementara pada 1968.

Soekarno digantikan Jenderal Soeharto yang memimpin operasi penghan-curan Gerakan 30 September. Masa pemerintahannya disebut Orde Baru dan mempunyai kebijakan yang sangat berbeda (baca: bertolak



belakang) dengan pemerintahan sebelumnya. Desoekarnoisasi dilancarkan di seluruh bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintah Orde Baru mengganti kurikulum Pancawardhana maupun kurikulum Gaya Baru 1964 dengan kurikulum gaya baru yang disempurnakan pada 1968. Pengajaran sejarah mendapat perhatian khusus karena pemerintah Orde Baru sangat membutuhkan legitimasi sejarah. Oleh karena itu, Orde Baru berusaha mendominasi penjelasan sejarah terhadap krisis politik antara 1965–68, dan melanjutkan rencana penyusunan buku sejarah nasional. Untuk keperluan itulah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sjarif Thajeb membentuk Panitia Penyusunan Buku Standard Sejarah Nasional Indonesia pada 4 April 1970. Panitia dipimpin oleh Sartono Kartodirdjo, guru besar sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Ia lahir pada 15 Februari 1921 di Wonogiri dan mengawali karirnya sebagai guru di Sekolah Schakel, Muntilan Jawa Tengah. Pendidikan Ilmu Sejarah diperolehnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1956, Universitas Yale, Amerika Serikat, pada tahun 1964, dan Universitas Amsterdam, Belanda pada tahun 1966. Ia juga salah satu pembicara utama Seminar Sejarah Nasional pertama pada 1957.

Selain membentuk panitia, Departemen Pendidikan juga memberikan bantuan dana penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yang kedua pada Agustus 1970 di Yogyakarta. Seminar dibagi dalam enam panel diskusi. Pertama, bidang Prasejarah Indonesia, membahas 9 makalah; kedua, Sejarah Kuna Indonesia (5 makalah); ketiga, Sejarah Indonesia Periode 1500–1800 yang (10 makalah); keempat, Sejarah Indonesia Periode 1800–1900 (15 makalah); kelima, Sejarah Indonesia Periode 1900–1942 (11 makalah); dan keenam, Sejarah Indonesia sesudah 1942 (14 makalah) (Surjomihardjo 1976: iii–iv). Berdasarkan enam panel diskusi inilah *draft* buku *Sejarah Nasional Indonesia* disusun menjadi enam jilid. Setiap jilid membahas satu periode penting dalam sejarah Indonesia, yakni Jaman Prasejarah Indonesia (Jilid I), Jaman Kuna Indonesia (Jilid II), Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (Jilid III), Sejarah Indonesia Abad ke-

19 (Jilid IV), Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (Jilid V), dan Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (Jilid VI). Dengan memperhatikan setiap jilid dapat disimpulkan bahwa SNI—singkatan *Sejarah Nasional Indonesia*—disusun secara kronologi mulai dari sebelum Masehi hingga 1974.

Hasil kerja Panitia 1970 mendapat sambutan positif dari pemerintah seperti disampaikan oleh Menteri P dan K Sjarif Thajeb dalam kata sambutannya untuk edisi pertama SNI.

Buku standard Sejarah Nasional Indonesia pada hakekatnya merupakan “babon” sejarah Indonesia, yang disusun oleh sejarawan Indonesia, berdasarkan penelitian ilmiah dan orientasi nasional. Team sejarawan Indonesia, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo telah bekerja dengan penuh ketekunan dan dedikasi. Hasil pekerjaannya sangat berguna bagi dunia pendidikan pada khususnya dan bagi pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena mempergunakan fakta-fakta ilmiah yang obyektif, dan orientasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Karena itu kita sekarang tidak lagi menggunakan bahan-bahan dan versi asing dalam Sejarah Indonesia.²

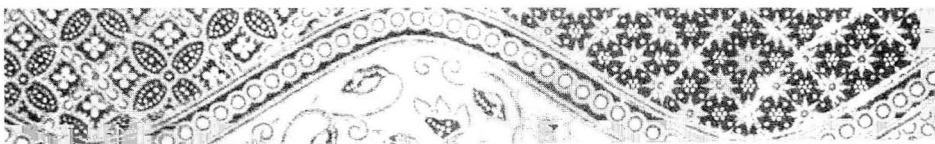
Keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan tujuan panitia seperti diungkapkan oleh Ketua Panitia 1970, Sartono Kartodirdjo, dalam prakata editor umum untuk edisi pertama.

Salah satu sebab yang mendorong panitia untuk menerima tugas penulisan sejarah ialah karena buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah sangat rendah mutunya. Beberapa kali usaha untuk memperbaikinya telah gagal, antara lain karena tidak ada buku babon atau pedoman yang dapat memberi kerangkanya. Diharapkan agar tulisan ini akan dapat dipergunakan sebagai kerangka penulisan buku sekolah itu.³

Edisi pertama SNI terbit pada 1975 dengan Editor Umum Sartono Kartodirdjo. Pada saat bersamaan pemerintah menerbitkan tiga jilid buku pelajaran sejarah Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Pemerintah juga menerbitkan tiga jilid sejarah Indonesia untuk Sekolah

2 Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sjarif Thayeb 5 Maret 1975 ini diterbitkan kembali dalam Edisi IV (1984) yang diedit oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto; lihat Poesponegoro dan Notosusanto (ed.) 1984: vii, Jilid I.

3 Prakata Editor Umum yang ditulis pada 1974 ini diterbitkan kembali dalam SNI Edisi IV (1984); lihat Poesponegoro dan Notosusanto (ed.) 1984: xiii, Jilid I.



Lanjutan Tingkat Atas pada 1976 yang mengacu pada SNI. Posisi SNI sangat penting dalam penyusunan materi pengajaran hingga saat ini karena masih dijadikan sumber utama. Kecenderungan itu dapat terlihat dari periodisasi yang digunakan maupun penjelasan terhadap masa lalu.

Keberhasilan pemerintah Orde Baru menerbitkan SNI telah menyeragamkan pemahaman sejarah bangsa Indonesia terhadap masa lalunya sehingga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dominasinya terus berlanjut hingga sekarang meski pemerintahan Orde Baru telah berakhir pada 1998. Desakan agar pemerintah melakukan reformasi materi pengajaran sejarah sempat bergulir. Departemen Pendidikan di bawah pemerintahan Presiden B. J. Habibie menanggapi desakan ini dengan menerbitkan Suplemen Kurikulum 1999. Materi pengajarannya agak berbeda dengan tiga kurikulum sebelumnya (1975, 1984 dan 1994), terutama menyangkut penjelasan terhadap peristiwa kudeta Gerakan 30 September 1965.

Masa berlaku Suplemen Kurikulum 1999 berakhir setelah Departemen Pendidikan dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menggantinya dengan Kurikulum 2004. Materi pengajaran sejarah dalam Kurikulum 2004 bukan hanya agak berbeda tetapi sangat berbeda dengan tiga kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini ingin menghilangkan karakter antikomunis dalam materi pengajaran sejarah yang dibangun pemerintah Orde Baru. Upaya ini dihentikan oleh Departemen Pendidikan dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan memberlakukan Kurikulum 2006 dan mengembalikan materi pengajaran sejarah pada Kurikulum 1975, 1984 dan 1994. Sayangnya, Kurikulum 2006 tidak dapat mengembalikan kredibilitas pengajaran sejarah yang terbentuk selama Orde Baru dan mengalami kehancuran setelah berakhirnya Orde Baru pada 1998.

KESIMPULAN

Pemerintahan Reformasi, terutama pada masa Presiden Yudhoyono, menempatkan kedudukan pengajaran sejarah pada titik yang terendah bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kecenderungan ini dapat terlihat dari ketiadaan upaya sistematis untuk mengembalikan kredibilitas pengajaran sejarah sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Sebagai contoh yang dilakukan Presiden Soekarno. Melalui kementerian pendidikan pada masa itu, Soekarno melakukan upaya sistematis untuk menemukan kredibilitas pengajaran sejarah yang mengalami kekacauan, seperti membenahi materi pengajaran sejarah untuk calon guru, membentuk panitia penyusunan buku sejarah nasional tahun 1951, memberlakukan kembali UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia yang menempatkan pengajaran sejarah sebagai elemen terpenting dalam pendidikan nasional, dan menyelenggarakan Seminar Sejarah Nasional pertama (1957) yang memberikan landasan filosofis bagi pengajaran sejarah dan membentuk panitia penyusunan buku.

Meski diakui pula bahwa Soekarno pun melakukan upaya sistematis untuk merusak pengajaran sejarah melalui kurikulum Pancawadha yang menempatkan pengajaran sejarah sebagai alat indoktrinasi sehingga materi pengajaran sejarah bercorak ultranasionalis. Mereka yang menentang kebijakan ini mendapatkan momentum untuk menghancurkannya setelah Soekarno diberhentikan oleh MPRS pada 1968. Namun krisis kredibilitas pengajaran sejarah segera diperbaiki oleh Presiden Soeharto. Ia berhasil menuntaskan pekerjaan rumah warisan pemerintahan sebelumnya yakni menyusun buku sejarah nasional dan menyeragamkan materi pengajaran sejarah di seluruh Indonesia. Keberhasilannya memperkuat kredibilitas pengajaran sejarah. Namun keberhasilan ini harus dibayar mahal, yakni terpuruknya kredibilitas pengajaran sejarah setelah pemerintahannya berakhir secara dramatis pada 1998.



Presiden B. J. Habibie berusaha memperbaikinya, tetapi kekurangan waktu karena pemerintahannya berlangsung relative singkat yakni mulai Mei 1998 hingga Oktober 1999. Upaya mengembalikan kredibilitas pengajaran sejarah ini dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, tetapi dihancurkan kembali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah yang sekarang cenderung berpandangan bahwa pengajaran sejarah tidak penting dan hanya menjadi beban kurikulum pendidikan nasional sehingga jumlah jam pelajaran dikurangi. Bahkan pemerintah tidak mempercayai bahwa pengajaran sejarah dapat membantu pengembangan karakter bangsa. Sikapnya sangat berbeda dengan *founding fathers* yang sangat yakin dengan kemampuan pengajaran sejarah untuk membentuk karakter bangsa. Dengan keyakinan itu mereka dapat mengembangkan karakter bangsa yang merdeka dan berdaulat, menumbuhkan kebanggaan terhadap masa lalu sehingga menghilangkan perasaan inferior sebagai bangsa terjajah, membebaskan bangsa Indonesia dari karakter feodalisme, dan membangun fondasi demokrasi.

DAFTAR ACUAN

- Ali, Muhammad (1995), “Beberapa Masalah tentang Historiografi Indonesia,” dalam Soedjatmoko, dkk., (ed.), *Hitoriografi Indonesia: Sebuah Pengantar*, terj. Jakarta: Gramedia.
- (2005), *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, cetak ulang. Yogyakarta: LKis.
- Klooster, H. A. J. (1985, *Indonesiërs schrijven hun geschiedenis: De ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in theorie en praktijk 1900–1980*. Dooerdrecht, Cinnaminson.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid I, Edisi IV. Jakarta: Balai Pustaka.
- Surjomihardjo, Abdurrachman (1976), *Seminar Sejarah Nasional Pertama 14–18 Desember 1957 Yogyakarta: Himpunan Lengkap Kertas Kerja*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (1995), “Pendidikan Sejarah pada Zaman Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia,” dalam Sri Sutjiatiningsih (ed.), *Pengajaran Sejarah: Kumpulan Makalah Seminar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Yamin, Muhammad (1976), “Tjatur Sila Chaiduniah,” dalam Abdurrachman Surjomihardjo, *Seminar Sejarah Nasional Pertama 14–18 Desember 1957 Yogyakarta: Himpunan Lengkap Kertas Kerja*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pendidikan Sejarah

Orientasi dan Strategi Pedagogis

S. HAMID HASAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pada dekade terakhir abad ke 20 terjadi perubahan besar dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan Indonesia. Setelah memasuki masa krisis ekonomi yang cukup dahsyat bangsa Indonesia mengalami pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie. Pada masa pemerintahannya, Presiden Habibie berhasil mengendalikan laju krisis ekonomi tetapi Indonesia harus melepaskan Timor Timur karena kalah dalam plebisit. Kemudian terjadi perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang dikenal dengan masa reformasi dan terjadinya amandemen UUD 1945. Indonesia memasuki kehidupan bernegara yang sangat berbeda dari kehidupan bernegara sebelumnya.

Pada 2004 rakyat Indonesia memilih langsung presiden pertama setelah amandemen UUD 1945 di masa reformasi. Reformasi menghasilkan amandemen UUD 1945 dan hasil amandemen tersebut melahirkan suatu susunan ketatanegaraan baru. Dalam tatanan UUD 1945 yang diamandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah tidak lagi berhak mengangkat presiden, Dewan Pertimbangan Agung sudah tidak lagi dikenal dalam kelembagaan negara, DPR memiliki hak yang lebih kuat baik dalam kedudukan sebagai lembaga legislatif mau pun kontrol terhadap kekuasaan Presiden, terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga parlemen Indonesia berubah dari sistem satu kamar (*unicameral*) ke sistem dua kamar (*bicameral*).

Reformasi juga memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten/kota melebihi otonomi provinsi. Sebagaimana

presiden, gubernur/bupati/wali kota dipilih langsung oleh masyarakat provinsi/kabupaten/kota tersebut. Sejalan dengan itu masyarakat mendapatkan kebebasan yang lebih luas dalam berpendapat dan bertindak bahkan melakukan sesuatu yang melewati batas-batas norma sebelumnya. Gejolak kehidupan politik yang sedemikian rupa diikuti dengan perilaku politik yang tidak juga dikenal sebelumnya. Elite politik dan pimpinan lembaga negara saling menyerang setiap ada celah politik. Setiap ada isu politik yang dianggap “menguntungkan” untuk dijual maka media massa terlebih media elektronik menjadikan isu politik tersebut sebagai lahan yang memberi keuntungan ekonomi. Tanpa risih media menyodorkan kepada rakyat berita yang sama selama berminggu-minggu ketika dirasakan isu itu masih bisa dijual. Isu politik yang menyerang pemerintah adalah yang paling membawa keuntungan ekonomi dan menyebabkan berita tersebut disiarkan terus menerus tanpa sedikitpun mempertimbangkan dampaknya terhadap keutuhan bangsa dan kehidupan kebangsaan yang sehat. Keburukan demi keburukan politik terus dipertontonkan tanpa mempertimbangkan dan masyarakat makin terpecah. Kebebasan pers adalah jargon baru dan doktrin rakyat berhak tahu menggantikan jargon pembangunan pada masa Orde Baru, jargon manipol-usdek dan doktrin revolusi yang terus berkelanjutan pada masa pemerintahan Orde Lama.

Pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan akar rumput keadaan tidak lebih baik. Masyarakat saling serang ketika dalam pemilihan pimpinan daerah calon yang dijagokannya kalah. Intimidasi, kekerasan, dan segala cara dihalalkan asalkan tujuan tercapai. Emosi masyarakat semakin tinggi dan perbedaan dijadikan alasan untuk melakukan berbagai perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan dirinya atau pun kelompoknya. Di berbagai jenjang sosial-ekonomi, dari kelompok yang tidak tamat Sekolah Dasar sampai kepada mahasiswa dan bahkan pimpinan lembaga terhormat seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan emosi yang tinggi telah menyebabkan perilaku yang tak terpuji. Sementara itu ketimpangan



dalam kehidupan ekonomi, sosial dan pendidikan bergerak ke arah yang semakin melebar. Hak konstitusional sebagian besar warganegara untuk hidup layak dan mendapat pendidikan yang berkualitas berjalan di jalan menanjak yang sangat terjal, tertatih-tatih, dan lamban. Kebijakan pendidikan masih belum memperbaiki hak pendidikan bagi kalangan tidak mampu dan terkendala.

Gejala tersebut dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Bahaya disintegrasi disadari oleh individu tertentu dan mereka memberikan peringatan untuk menyadarkan bangsa. Berbagai kalangan masyarakat yang menyadari hal tersebut melakukan berbagai tindakan dan upaya meski pun jalan yang harus ditempuh sangat panjang. Pemerintah bukannya tidak tahu dan tidak peduli tetapi aturan main baru terkadang menjadi hambatan untuk berbuat sementara aturan lama memang tidak juga memberikan jaminan untuk digunakan karena sudah tidak sesuai dengan norma baru dan kehidupan masyarakat.

Sementara gejala tersebut terus berlangsung dunia pendidikan pun belum bergerak cepat menanggapi permasalahan yang ada. Memang harus diakui bahwa para pemimpin bangsa di berbagai lembaga baik di jenjang nasional maupun daerah, tokoh masyarakat dan anggota produktif masyarakat adalah mereka yang dihasilkan dari kebijakan pendidikan masa lalu, bukan kebijakan pendidikan masa kini. Hasil pendidikan masa reformasi yang paling tinggi adalah mereka yang baru bekerja setelah menyelesaikan kesarjanaannya atau mereka yang bekerja pada jenjang lebih bawah. Mereka belum menjadi figur yang dikenal, dilihat, didengar, diperhatikan apalagi diteladani. Juga harus diakui bahwa kebijakan isi pendidikan yang ada sekarang ini pun belum menjawab kebutuhan masyarakat yang timbul akibat reformasi.

Masih banyak pekerjaan pendidikan yang harus dilakukan terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan sejarah. Sebagai suatu program pendidikan baik yang dikemas dalam mata pelajaran IPS mau

pun mata pelajaran Sejarah, pendidikan sejarah perlu bekerja lebih keras lagi untuk mengurangi dampak negatif reformasi yang mengarah kepada disintegrasi bangsa dan mempertajam hal-hal positif dari reformasi sehingga mendapat landasan edukatif yang kuat.

POSISI PENDIDIKAN SEJARAH DALAM KURIKULUM

Pendidikan Sejarah merupakan materi pendidikan yang teramat penting untuk mencapai empat tujuan. Pertama pendidikan sejarah memberikan materi pendidikan yang mendasar, mendalam dan berdasarkan pengalaman nyata bangsa di masa lalu untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang diri dan bangsanya. Kedua, materi pendidikan sejarah merupakan materi pendidikan yang khas dalam membangun kemampuan berpikir logis, kritis, analitis, dan kreatif karena berkenaan dengan sesuatu yang sudah pasti dalam kehidupan bangsa di masa lampau dan selalu berkenaan dengan perilaku manusia yang dikendalikan oleh cara berpikir logis, kritis, analitis dan kreatif yang sesuai dengan tantangan kehidupan yang dihadapi pada masanya. Ketiga, pendidikan sejarah menyajikan materi dan contoh keteladanan, kepemimpinan, kepeloporan, sikap dan tindakan manusia dalam kelompoknya yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia tersebut. Keempat, kehidupan manusia selalu terkait dengan masa lampau karena walau pun hasil tindakan dalam menjawab tantangan bersifat final tetapi hasil dari tindakan tersebut selalu memiliki pengaruh yang tidak berhenti hanya untuk masanya tetapi berpengaruh terhadap masyarakat tadi dalam menjalankan kehidupan barunya, dan oleh karenanya peristiwa sejarah menjadi “bank of examples” untuk digunakan dan disesuaikan sebagai tindakan dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini.

Keempat makna tersebut memberikan “pengetahuan masa lampau yang mengandung nilai-nilai kearifan untuk dapat digunakan untuk melatih



kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik.” (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2005). Atas dasar manfaat yang dapat diperoleh dari peristiwa sejarah untuk pendidikan maka “mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2005). Arti strategis peristiwa sejarah dikembangkan menjadi materi pendidikan sejarah yang:

1. mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik;
2. memuat khasanah mengenai peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia. Materi tersebut merupakan bahan pendidikan yang mendasar bagi proses pembentukan dan penciptaan peradaban bangsa Indonesia di masa depan;
3. menanamkan kesadaran persatuan dan persaudaraan serta solidaritas untuk menjadi perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa;
4. sarat dengan ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari;
5. berguna untuk menanamkan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Posisi penting mata pelajaran sejarah dikenal dari keberadaannya sejak zaman Hindia Belanda. Dalam Leerplan Mulo dikenal ada mata pelajaran *geschiedenis* (sejarah) terbagi atas *Volksgeschiedenis* ‘sejarah rakyat’ dan *Vaderlansegeschiedenis* ‘sejarah tanah air’ (Hasan 2010b). Pada masa pendudukan militer Jepang dikenal ada mata pelajaran sejarah. Setelah merdeka dalam Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat (1947) ada

mata pelajaran Sejarah dimulai dari Kelas IV sampai VI, demikian pula pada Rencana Pelajaran Sekolah Menengah Pertama ada mata pelajaran Sejarah yang dikelompokkan dalam Pengetahuan Sosial bersama mata pelajaran Ilmu Bumi (Hasan 2010b: 46) dan di Sekolah Menengah Atas ada mata pelajaran Sejarah (Djojonegoro 1996: 101). Pada 1954, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Republik Indonesia Serikat diberlakukan menjadi UU Nomor 12 Tahun 1954 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia mata pelajaran Sejarah di SR dan SMP yang dikemas dalam kelompok Pengetahuan Sosial (Hasan 2010: 63). Di SMA terutama SMA Bagian A dikenal ada mata pelajaran Sejarah, Sejarah Kesenian, dan Sejarah Kebudayaan, di SMA Bagian C dikenal ada mata pelajaran Sejarah dan Sejarah Perekonomian sedangkan di SMA Bagian B ada mata pelajaran Sejarah (Djojonegoro 1996: 135–7).

Pada 1962 dunia pendidikan Indonesia mendapat pengaruh politik yang sangat kuat dibandingkan masa sebelumnya. Pada waktu itu diperkenalkan Pancawardhana melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan pada 17 Agustus 1961. Tujuan pendidikan yang utama adalah membentuk manusia patriotik dan dalam Rencana Pelajaran SR menjadi tugas mata pelajaran Sejarah Kebangsaan. Dalam Rencana Pelajaran SMP dikenal ada mata pelajaran Sejarah Kebangsaan dalam kelompok mata pelajaran Dasar dan mata pelajaran Sejarah Dunia dalam kelompok mata pelajaran Cipta dalam melaksanakan tugas membangun manusia patriotik. Pada masa Orde Baru kurikulum tahun 1962 segera diganti oleh Rencana Pelajaran 1964 dan kedudukan mata pelajaran Sejarah masih sama dengan Rencana Pelajaran tahun 1962 (Gaya Baru).

Pada 1968 Rencana Pelajaran baru diberlakukan. Di SD mata pelajaran Sejarah Indonesia masuk dalam kelompok Pendidikan Kewargaan Negara bersama mata pelajaran Ilmu Bumi dan Civics. Di SMP ada mata pelajaran Sejarah sedangkan di SMA ada mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia. Dengan demikian, hingga 1975 mata pelajaran berada dalam



kelompok Pendidikan Sosial dan kemudian Pendidikan Kewargaan Negara. Meski demikian, posisi kurikulum pendidikan Sejarah tetap merupakan satu mata pelajaran yang berdiri sendiri walau pun sebagaimana mata pelajaran lain, mata pelajaran sejarah mendapat tugas untuk mengembangkan nilai-nilai budi pekerti, dan mata pelajaran sejarah mendapatkan dukungan dari mata pelajaran ilmu bumi dalam ketrampilan menggambar peta dan dari mata pelajaran menggambar dalam ketrampilan menggambar tokoh sejarah.

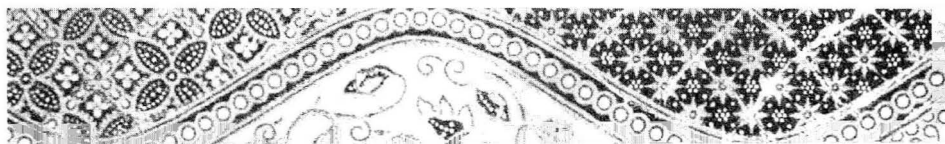
Pada 1975 pemikiran baru tentang kurikulum mulai diperkenalkan di Indonesia dan nama atau istilah kurikulum mulai digunakan. Mata pelajaran sejarah bersama geografi/ ilmu bumi tetap dipertahankan tetapi tata negara tidak lagi menjadi bagian dari kelompok ini. Anggota baru dari kelompok ini adalah ekonomi, sosiologi, dan antropologi dan nama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) digunakan menggantikan nama Pengetahuan Sosial dan Kewargaan Negara. IPS dikembangkan berdasarkan pendekatan yang berbeda dari Pengetahuan Sosial atau pun Pendidikan Kewargaan Negara. Jika dalam kedua istilah terakhir ini keanggotaan pendidikan sejarah berdiri sendiri dan tidak bersinergi atau pun berinteraksi dengan mata pelajaran lain, dalam Kurikulum 1975 digunakan pendekatan yang terpadu. Meski pun secara fisik dikenal ada 8 Tujuan Instruksional Umum (TIU), suatu istilah baru yang dikembangkan dari pendekatan desain instruksional, dan ada 2 TIU masing-masing TIU Pendidikan Sejarah (Indonesia dan Dunia) kurikulum merancang terjadinya sinkronisasi dan interaksi antara mata pelajaran Sejarah dengan mata pelajaran lain.

Pada 1984 Pemerintah memperkenalkan kurikulum baru yang dikenal dengan nama Kurikulum 1984 dan digunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu kurikulum SD dan SMP menggunakan pendekatan “correlated” sedangkan kurikulum SMA menggunakan pendekatan “discrete discipline”. Perbedaan tujuan institusional antara SD dan SMP yang merupakan dua lembaga pendidikan dasar dengan SMA yang mempersiapkan peserta

didik untuk pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi menyebabkan perbedaan dalam pendekatan kurikulum antara keduanya. Pendekatan kurikulum 1984 digunakan kembali oleh Kurikulum 1994. Untuk SD dan SMP digunakan pendekatan “correlated” bagi IPS dimana sejarah menjadi bagiannya bersama geografi dan ekonomi. Sedangkan di SMA digunakan pendekatan “discrete discipline” dan sebagaimana pada kurikulum yang digantikannya, nama IPS di SMA digunakan sebagai nama program akademik.

Pada 2000 Pemerintah mulai merancang kurikulum baru untuk menggantikan Kurikulum 1994. Perubahan sistem ketatanegaraan yang disentralistis dengan otonomi utama pada pemerintahan daerah Kota dan Kabupaten, perubahan UUD 1945, perubahan sosial yang disebabkan oleh reformasi menjadi dasar untuk perubahan kurikulum. Kurikulum ini baru dikembangkan mulai tahun 2000 dan dinyatakan selesai pada tahun 2004 tetapi pada 2005 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 7 Tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 uji coba untuk mata pelajaran.

Sejarah dihentikan karena pengembang kurikulum tidak menggunakan tafsir resmi Pemerintah (*official history*) berkenaan dengan Gerakan 30 September/PKI. Secara keseluruhan sebenarnya Kurikulum (2004) sudah tidak berlaku ketika Permendiknas Nomor 7 Tahun 2005 dikeluarkan karena pada 2003 diberlakukan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989. Dalam UU Nomor 20 tentang Sisdiknas wewenang untuk mengembangkan kurikulum ada di tangan pemerintah daerah dan sekolah dan oleh karena itu ide kurikulum yang dikembangkan dalam Kurikulum 2004 secara hukum batal tetapi dalam menanggapi gejolak masyarakat maka diperlukan keputusan dari Mendiknas tersebut. Lagi pula, Pemerintah pada 2005 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang pada dasarnya melanjutkan kurikulum berbasis kompetensi yang digunakan Kurikulum

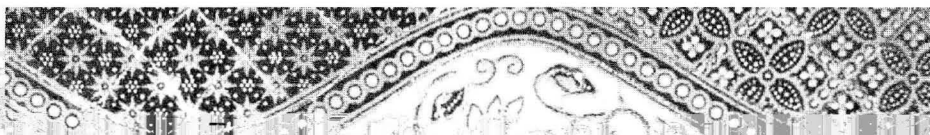


2004 dan rumusan kompetensi Kurikulum 2004 dijadikan materi utama Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Artinya, secara yuridis ide Kurikulum 2004 dihidupkan kembali dalam ketentuan hukum yang baru berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 23 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan walaupun terjadi persoalan mendasar karena standar dirumuskan sebagai tujuan. Standar bukan kurikulum dan bukan pula tujuan tetapi kualitas minimal yang harus dimiliki peserta didik atau satuan pendidikan. Dalam konteks ini maka kualitas minimal yang harus dimiliki peserta didik adalah pengetahuan, kemampuan (kognitif dan psikomotorik), dan sikap untuk etiap mereka yang telah menyelesaikan satu program pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA).

Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2005 tentang Standar Isi maka pelajaran Sejarah menjadi bagian dari IPS untuk kurikulum SD dan SMP dan menjadi nama mata pelajaran Sejarah digunakan untuk kurikulum SMA. Dalam kurikulum SMA, mata pelajaran sejarah dicantumkan di tahun pertama, dilanjutkan di program studi IPS, IPA, dan Bahasa pada tahun-tahun berikutnya. Dilihat dari keberadaannya sebagai mata pelajaran maka posisi kurikulum pendidikan sejarah pada masa kini hampir sama dengan posisi kurikulum pada 1958 dan 1968.

PERAN POKOK MATERI PENDIDIKAN SEJARAH

Ada tiga peran pokok materi pendidikan sejarah yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pendidikan sejarah baik untuk jenjang pendidikan dasar mau pun untuk jenjang pendidikan menengah. Ketiga peran pokok materi pendidikan sejarah tersebut adalah sebagai “bank of explanation” bagi berbagai aspek kehidupan masa kini, menjadi “bank of examples” (Wineburg 2001) sebagai rujukan bagi penyelesaian berbagai permasalahan kehidupan bangsa masa kini, dan dasar untuk membangun

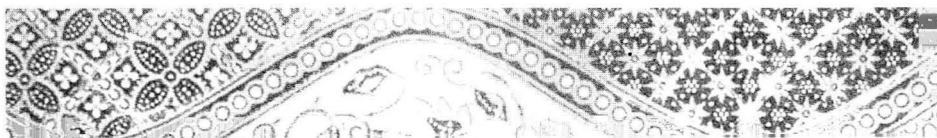


kehidupan masa kini dan masa depan (Wineburg 2001) ke arah yang lebih baik berdasarkan kriteria apa pun yang digunakan pengambil kebijakan. Peristiwa sejarah yang menjadi materi pelajaran sejarah memiliki kemampuan untuk mengemban ketiga peran tersebut mengingat sifat materi sejarah yang sangat khas berkenaan dengan kehidupan manusia di masa lampau dan sudah terjadi tetapi selalu berkaitan dengan kehidupan masa kini.

Materi pendidikan sejarah berupa berbagai peristiwa yang dialami umat manusia pada masa lampau pada lingkungan atau situasi tertentu. Lingkungan tersebut ada yang sangat kecil, terbatas pada lingkungan geografis-sosial-budaya-ekonomi-politik-pendidikan-ilmu-teknologi- dan lainnya-yang sangat dekat dengan pelaku yang terlibat pada peristiwa tetapi lingkungan tersebut dapat pula menjadi sangat luas meliputi berbagai lingkungan geografis-sosial-budaya-ekonomi-politik-pendidikan-ilmu-teknologi dan lainnya yang sangat luas dan jauh. Dunia adalah lingkungan terbesar dan terjauh sebagai tempat umat manusia melakukan aktivitasnya dan membuat berbagai peristiwa sejarah.

Apa yang terjadi di masa lampau dari masa waktu yang mungkin sangat jauh sampai ke masa waktu yang paling dekat, membentuk suatu rangkaian rantai kehidupan umat manusia yang sangat panjang. Sebagian dari rantai tersebut berada di atas suatu garis lurus imajiner, sebagian lagi berada pada garis lurus imajiner tersebut, dan sebagian yang lain berada di bawah garis imajiner yang dibentuk. Garis imajiner itu lurus horisontal dan peristiwa yang berada pada garis lurus menggambarkan peristiwa yang tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan. Peristiwa yang berada di bawah garis imajiner merupakan peristiwa yang mengubah keadaan ke arah yang bertentangan dari apa yang dirancang suatu kegiatan/gerakan. Peristiwa yang berada di atas garis imajiner menggambarkan peristiwa yang berhasil mencapai tujuan gerakan yaitu kehidupan yang lebih baik.

Kehidupan masa kini adalah bagian akhir (bukan terakhir) dari



rangkaian kegiatan tersebut dan merupakan hasil langsung dari peristiwa sejarah yang paling akhir (bukan terakhir) dan peristiwa sejarah yang paling akhir itu selalu terkait dengan peristiwa sejarah sebelumnya. Kontinuitas ini terjadi karena manusia selalu hidup berkelanjutan dari satu generasi ke generasi lain. Oleh karena itu berbagai keadaan dalam berbagai dimensi kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan ummat manusia pada masa sekarang merupakan hasil dari perjalanan kehidupan masa lalu. Dengan perkataan lain apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masa kini selalu ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Artinya, berbagai keadaan kehidupan masa sekarang dapat dicari penjelasannya pada kejadian di masa lalu yang terekam dalam peristiwa sejarah.

Berbagai bagian peristiwa sejarah bersifat khusus, unik dan tidak berulang tetapi banyak pula aspek atau sisi lain peristiwa sejarah yang terulang. Pada dasarnya peristiwa sejarah selalu digerakkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan. Keinginan untuk mengenyam kehidupan yang lebih baik bersifat sangat manusiawi dan selalu berulang, mungkin dalam dimensi waktu yang sama di tempat yang berbeda atau pun di dimensi waktu yang berbeda di tempat yang sama atau bahkan di dimensi waktu dan tempat yang berbeda. Bagian ini adalah bagian yang berulang dari peristiwa sejarah, dapat menjadi contoh dan pelajaran atau *historia magistra vitae* dalam Latin.

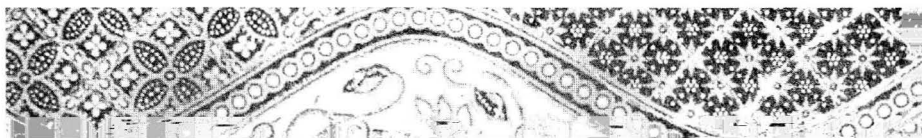
Unsur peristiwa sejarah lainnya adalah reaksi atau tindakan manusia untuk mewujudkan keinginan meraih kehidupan yang lebih baik. Reaksi dan tindakan ini mungkin saja sangat spesifik sehingga unik dan tidak mungkin diduplikasi atau berulang. Berbagai reaksi yang bersifat sangat spesifik ini disebabkan oleh keadaan yang ingin diperbaiki dan keadaan masyarakat yang akan memperbaiki kehidupan sangat spesifik dan berbeda dari keadaan di waktu atau tempat lain. Keadaan yang menyebabkan rakyat koloni di berbagai wilayah yang sekarang bernama Amerika Serikat menyatakan bersatu dan memperjuangkan kemerdekaannya berbeda dari

keadaan yang menyebabkan rakyat Perancis menyerang penjara Bastille dan mendirikan negara republik. Keadaan yang berbeda pula dihadapi oleh para pemimpin perjuangan dan pendiri bangsa ini ketika mereka melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Semua kejadian tersebut, dan di berbagai tempat lain, sama dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Namanya mungkin merdeka, mendirikan negara baru, mendirikan pemerintahan baru, dan cara yang digunakan untuk membuat gerakan baik yang berhasil atau pun gagal, berbeda pula. Keadaan yang ingin diperbaiki dan masyarakat atau kelompok yang ingin memperbaiki menyebabkan keunikan itu terjadi. Oleh karena itu cara khusus ini tidak mungkin terulangi dan direplika dalam keadaan yang berbeda. Meski pun demikian, ketiga hal tersebut yaitu keadaan yang ingin diperbaiki, keadaan manusia atau masyarakat yang akan memperbaiki serta cara untuk memperbaiki dalam berbagai bentuk atau tindakan yang kesemuanya menghasilkan peristiwa sejarah dapat dipelajari dan dikaji sebagai contoh atau *bank of examples* (Wineburg 2001).

Contoh selalu memiliki dua sisi yaitu positif dan negatif. Suatu peristiwa sejarah menjadi contoh positif apabila tindakan yang dilakukan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yaitu mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Suatu peristiwa sejarah menjadi contoh yang negatif apabila tindakan yang dilakukan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan sehingga tidak terjadi perubahan kehidupan yang lebih baik atau bahkan terjadi perubahan kehidupan ke arah yang lebih buruk. Dalam kedua arah itu suatu peristiwa sejarah tetap dapat digunakan sebagai contoh dan keduanya dapat dikaji untuk ditemukan hal-hal yang dapat disesuaikan dan digunakan untuk menjawab keinginan memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik. Artinya, upaya untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan tidak terlepas dari keadaan masyarakat masa kini.

Dimensi yang akan diperbaiki selalu berupa dimensi kehidupan yang pada waktu tersebut dianggap tidak cukup baik untuk kehidupan



masa itu atau pun kehidupan masa depan. Masa sekarang adalah hasil perkembangan dari berbagai peristiwa sejarah di masa lampau, masih berkelanjutan dalam kehidupan masa kini, dan akan pula berkelanjutan di masa mendatang. Oleh karena itu pendidikan sejarah perlu mengkaji materi pendidikan sejarah yaitu materi berbagai peristiwa sejarah yang menjadi dasar membangun kehidupan masa kini. Berdasarkan kenyataan kehidupan masa kini dikembangkan kehidupan masa depan dan yang dapat dilakukan langsung oleh peserta didik adalah kehidupan mereka besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun ke depan. Kesemuanya merupakan masa depan bagi dirinya.¹

Ketiga peran pokok pendidikan sejarah di atas digunakan dalam membahas pendidikan sejarah untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

¹ Masa depan bangsa dibangun dari masa depan seseorang dan kemudian menjadi bagian dari masa depan komunitas, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Perencanaan masa depan komunitas, masyarakat dan bangsa dilakukan oleh pemimpin, terbentuk dari dan membentuk rencana masa depan individu. Peserta didik memiliki posisi membentuk masa depan dirinya dan berpartisipasi dalam membangun masa depan keluarga, komunitas, masyarakat dan bangsanya.

TUJUAN PENDIDIKAN SEJARAH

Sesuai dengan tujuan setiap jenjang pendidikan maka tujuan pendidikan sejarah untuk pendidikan dasar dibedakan dari tujuan pendidikan sejarah di SMA. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum untuk seluruh anak bangsa yang berumur 7–15 tahun sedangkan SMA adalah lembaga pendidikan yang tidak untuk semua anak bangsa yang berumur 16–18 karena sebagian dari mereka melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan sedangkan sebagian lain tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan menengah ini.

Tujuan pendidikan sejarah di SD dan SMP adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang masa lampau bangsa, memiliki dan wawasan serta kesadaran sebagai bangsa, mampu menerapkan pengetahuan masa lampau dan wawasan kebangsaan dalam mengembangkan kehidupan pribadi yang sehat, produktif, cinta damai, menunjukkan keteladanan, berpikir kritis, toleran, cinta tanah air dan bangsa. Berdasarkan kualitas pribadi tersebut yang bersangkutan menjadi anggota masyarakat dan warganegara yang mampu berkontribusi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang sehat, produktif, cinta damai, toleran, disiplin, dan menghargai prestasi.

Sedangkan tujuan pendidikan Sejarah di SMA terutama ditujukan untuk mengembangkan rasa senang belajar peristiwa sejarah dan belajar dari peristiwa sejarah (Hasan 2011b), mengenal lebih lanjut jati diri bangsa, berpikir historis (Cooper 1992), memiliki kemampuan dasar metodologi sejarah atau *historical skills* (Stearn, Seixas, Wineburg 2000; Hasan 2011b), rasa kebangsaan, cinta damai, dan mengenal dan mampu menggunakan konsep-konsep utama sejarah.

MATERI PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Pendidikan Sejarah untuk jenjang pendidikan dasar diperuntukkan bagi pengembangan kualitas dasar yang harus dimiliki semua warganegara.



Berdasarkan program pendidikan Pemerintah maka Wajib Belajar 9 Tahun adalah program pendidikan minimal (*basic education*) untuk seluruh warga negara di mana pun mereka berada dan apa pun latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan budaya keluarganya. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 maka pendidikan dasar 9 tahun adalah kebijakan Pemerintah dalam menjamin hak setiap warga negara akan pendidikan. Hak ini seharusnya segera dilaksanakan Pemerintah sebagai kewajiban konstitusional tetapi sayangnya berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010–14 pada 2014 Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB pada 2014 adalah 96 persen sedangkan SMP/MTs/SMPLB adalah 76.8 persen. Artinya, pada 2014 belum seluruh anak usia 7–15 tahun memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan 9 tahun yang menjadi haknya. Dengan perkataan lain, pada 2014 belum seluruh anak Indonesia yang berusia 7–15 tahun memiliki kesempatan untuk belajar sejarah.

Selanjutnya berdasarkan pendekatan kompetensi yang tampaknya masih akan digunakan paling tidak dalam waktu lima tahun mendatang maka materi pendidikan sejarah untuk pendidikan dasar (SD dan SMP) terdiri atas (Borries 2000; Hasan 2011b):

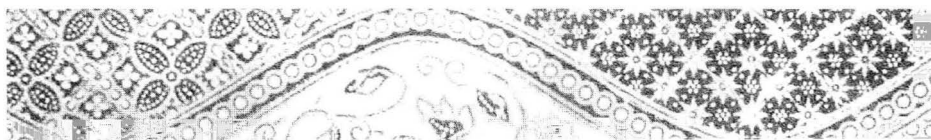
- pengetahuan tentang peristiwa sejarah yang akan membangun pengenalan diri, dan memori kolektif bangsa
- kemampuan kognitif dari mengingat sampai menciptakan (Anderson, dkk. 2001) yang dikembangkan untuk membangun kemampuan berpikir kronologis, kritis, analitis, dan kreatif.
- nilai dan sikap yang dikembangkan untuk membangun kebiasaan senang membaca, senang belajar, menghargai prestasi (perjuangan/kepemimpinan), mengikuti keteladanan pelaku sejarah, aspiratif, inovatif, cinta bangsa dan Tanah Air.

Materi peristiwa sejarah yang dikaji adalah materi yang diarahkan

untuk mengenal dirinya sebagai anggota masyarakat bangsa dan warga negara. Pengenalan diri ini penting untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, mengapa, bagaimana bangsa ini lahir (Kartodirdjo). Pengenalan diri ini dilakukan melalui peristiwa sejarah di wilayah tempat tinggalnya (kota/kabupaten/provinsi) dan daerah lain dari kepulauan Indonesia sebagai bagian dari tanah air dan bangsanya, dan yang membentuk bangsa ini. Oleh karena itu pengenalan diri menjadi bagian yang tak terelakkan dalam proses pembentukan memori kolektif sebagai bangsa (Hasan 2002).

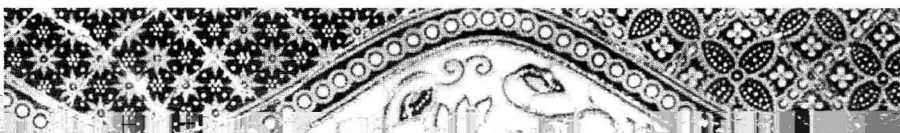
Peristiwa sejarah tentang pengaruh Hindu-Buddha, Islam, penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan pembangunan kehidupan kebangsaan harus memberi tempat untuk terjadinya proses identifikasi diri dan pengembangan memori kolektif bangsa. Semakin dekat suatu peristiwa sejarah dengan dirinya dalam arti budaya, sosial, dan etnis semakin mudah proses identifikasi tersebut. Untuk itu maka setiap peserta didik perlu memiliki rasa keterdekatan pribadi dengan suatu peristiwa sejarah. Untuk kurikulum SD dan SMP, peristiwa sejarah yang dipilih haruslah peristiwa sejarah yang terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Peserta didik belajar tentang peristiwa sejarah yang terjadi di wilayahnya dan bagaimana peristiwa tersebut menjadi bagian serta memberikan sumbangan terhadap pembentukan dan perkembangan kehidupan kebangsaan. Dominasi peristiwa sejarah yang terjadi di suatu wilayah nusantara tidak boleh lagi dipertahankan dan tidak lagi memberikan dampak positif dalam kehidupan kebangsaan masa kini. Fokus pada peristiwa-peristiwa nasional (daerah lain) setelah Indonesia berdiri sebagai satu negara dan bangsa tentu merupakan suatu keharusan dan bagian penting dalam membangun kesadaran diri dan memori kolektif bangsa (Hasan 2008).

Faktor keterdekatan emosional peserta didik dengan suatu peristiwa sejarah menghendaki suatu kebijakan baru dalam pengembangan materi pendidikan sejarah di SD dan SMP (Hasan 2011a). Pendekatan baru itu



mengharus para pengembang kurikulum di tingkat nasional dan daerah untuk mengkaji dan memilih berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di suatu daerah dalam setiap periode. Apabila suatu peristiwa sejarah yang terjadi di suatu daerah sudah dinilai sebagai suatu peristiwa nasional tentu tidak menghilangkan hak peserta didik untuk mempelajari suatu peristiwa sejarah yang berstatus lokal. Setiap peristiwa sejarah atau tokoh sejarah penting yang ada di suatu wilayah harus dikenal oleh peserta didik SD dan SMP. Pendidikan sejarah tidak boleh lagi membiarkan fenomena dimana peserta didik tidak mengenal peristiwa dan tokoh sejarah dari daerahnya yang telah berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, pembentukan dan pengembangan kehidupan kebangsaan bangsanya. Peserta didik tidak boleh dibiarkan dalam keadaan sebagai penonton yaitu mempelajari peristiwa sejarah penting yang terjadi di wilayah tertentu di luar wilayah saja dan seolah-olah daerahnya tidak menjadi pelaku sejarah penting dalam arus sejarah bangsanya.

Oleh karena itu periode materi pendidikan sejarah yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 tetap dapat digunakan sebagai bingkai materi tetapi diperlukan penjelasan yang rinci dan operasional bagi guru yang terlibat dalam pengembangan KTSP mengenai pemilihan peristiwa sejarah yang ada di daerah. Misalkan, ketika pembahasan mengenai perjuangan para tokoh dalam persiapan kemerdekaan maka peserta didik di suatu provinsi atau daerah kabupaten/kota perlu mengetahui dan mempelajari tokoh dari daerah tersebut. Tugas tim pengembang Standar Isi di level nasional adalah menentukan berbagai peristiwa sejarah nasional yang perlu diketahui dan dipelajari oleh setiap peserta didik di seluruh wilayah Indonesia. Para pengembang Standar Isi haruslah mendasarkan pilihannya kepada peristiwa sejarah nasional yang dianggap penting bukan dari kaedah ilmu sejarah tetapi dari peran suatu peristiwa sejarah dalam membangun pengenalan diri



dan memori kolektif bangsa.

Peristiwa sejarah untuk jenjang pendidikan dasar dan dimulai dari Kelas IV adalah kehadiran berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu arus sejarah mengenai kedatangan nenek moyang yang ada di kurikulum SMA perlu dipindahkan ke kurikulum IPS SD Kelas IV. Setelah itu barulah dimulai dengan kehidupan pada masa batu besar yang ada di wilayah masing-masing dilanjutkan dengan kedatangan pengaruh Hindu-Budha, dan seterusnya. Pendekatan daerah pemerintahan (kota/kabupaten/provinsi) dimulai di SMP Kelas VII dilanjutkan sampai kepada peristiwa sejarah yang ditetapkan sebagai peristiwa sejarah nasional yang harus dikenal peserta didik.

MATERI PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Kedudukan mata pelajaran Sejarah di SMA berbeda dari pendidikan sejarah di SD dan SMP. Sebagaimana telah dikemukakan, mata pelajaran Sejarah SMA tidak lagi diikuti oleh seluruh warga negara yang berumur 16–18 tahun karena sebagian dari mereka sudah tidak lagi menjadi peserta didik di jenjang pendidikan menengah atau bahkan SMA karena mereka menjadi peserta didik SMK dan belajar materi sejarah sebagai bagian dari IPS.

Pengembangan materi mata pelajaran Sejarah harus diarahkan untuk mampu mengembangkan tujuan pendidikan Sejarah di SMA yang telah dikemukakan. Dalam pengembangan itu maka prinsip berikut ini digunakan (Hasan 2011a).

1. Materi ketrampilan dilatihkan di semester awal (pertama dan kedua) sehingga peserta didik memahami konsep-konsep utama sejarah, menguasai ketrampilan dasar sejarah, dan memantapkan penggunaan konsep utama dan ketrampilan dasar ketika mereka mempelajari



berbagai peristiwa sejarah pada semester berikutnya (semester 3–6).

2. Setiap peristiwa sejarah dirancang sebagai kegiatan pembelajaran satu semester dan bukan kegiatan satu pokok bahasan. Untuk itu maka peserta didik secara kelompok atau individual dapat mempelajari satu atau lebih peristiwa sejarah secara mendalam, dan memahami peristiwa sejarah lainnya secara garis besar, berdasarkan laporan kelas peserta didik.
3. Peserta didik diberi kebebasan dalam memiliki peristiwa sejarah nasional untuk setiap periode yang tercantum dalam SK/KD dan peristiwa sejarah daerah yang terkait dengan periode yang dibahas. Guru sejarah sudah harus menentukan berapa banyak peristiwa sejarah tingkat nasional dan tingkat daerah yang harus dipelajari peserta didik, dalam satu rancangan bersama guru sejarah di satu satuan pendidikan.
4. Proses pembelajaran sejarah memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan berbagai sumber baik buku teks, buku referensi, dokumen, narasumber, atau pun artefak serta memberi kesempatan yang luas untuk menghasilkan “her or his own histories” (Borries 2000).

Berdasarkan keempat prinsip tersebut maka perlu ada revisi materi pendidikan sejarah dari apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005. Revisi yang dianjurkan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Tahun Pertama atau X (diikuti oleh seluruh peserta didik SMA) mengembangkan materi:
 - (a) Pengetahuan tentang disiplin sejarah terutama pengertian sejarah, dan konsep perubahan dan kontinuitas.
 - (b) Kemampuan berpikir dan ketrampilan sejarah (*historical thinking and skills*). Kemampuan berpikir sejarah yang dikembangkan terutama adalah kemampuan berpikir kronologis dan kausalita.

Ketrampilan sejarah yang dikembangkan adalah merumuskan pertanyaan, menentukan sumber dan cara mengumpulkan sumber, kritik terhadap sumber, analisis, rekonstruksi peristiwa, dan penulisan cerita.

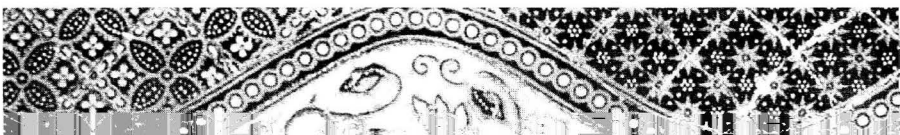
- (c) Nilai dan sikap yang dikembangkan untuk membangun kebiasaan senang membaca, senang belajar, menghargai prestasi (perjuangan/kepemimpinan) dan mengikuti keteladanan pelaku sejarah, inovatif, cinta bangsa dan Tanah Air.

2. Tahun Kedua dan Ketiga atau Tahun XI dan XII (semester 3–6) dapat menggunakan periode dan peristiwa sejarah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2005 dengan catatan bahwa peristiwa sejarah yang digunakan dapat berupa cerita sejarah yang ditetapkan secara nasional dan oleh komite sekolah atau komite pendidikan. Dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan ketrampilan sejarah maka guru boleh menggunakan peristiwa sejarah yang ditetapkan di tingkat nasional dan daerah dan telah atau belum dipelajari peserta didik di jenjang pendidikan dasar terutama SMP, atau materi yang ada di semester lainnya. Nilai dan sikap yang telah ditetapkan sebagai materi pendidikan sejarah di semester 1 dan 2 tahun X tetap dikembangkan pada semester 3–6 Tahun XI dan XII.

PEMBELAJARAN SEJARAH

Proses pembelajaran sejarah perlu mengalami perubahan yang mendasar. Fokus pada pembelajaran ketrampilan intelektual, belajar, dan nilai menuntut proses pembelajaran yang berbeda dari proses pembelajaran yang hanya mengembangkan pengetahuan tentang sejarah. Berikut adalah beberapa prinsip pembelajaran Sejarah untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (Hasan 2011a).

1. Proses pembelajaran untuk semester awal tahun pertama dapat



dilakukan berdasarkan pendekatan kelas (*classroom basis*) tetapi yang penting adalah setiap materi kemampuan dan keterampilan sejarah dikuasai dengan baik oleh peserta didik ketika mereka sudah menyelesaikan tahun pertama bersama SMA tersebut. Pengembangan kemampuan dan ketrampilan sejarah selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) atau pembelajaran proyek (*project-based learning*).

2. Proses pembelajaran pada semester 3–6 (Tahun XI dan XII SMA) dilakukan berdasarkan pendekatan pembelajaran semester. Berbeda dari pendekatan yang dilaksanakan pada saat ini, pendekatan pembelajaran semester menekankan penyelesaian proses pembelajaran adalah setiap semester. Pada setiap semester Tahun XI dan XII SMA tersebut peserta didik boleh memilih satu atau lebih peristiwa sejarah yang ingin dipelajari secara mendalam. Peristiwa itu yang dikaji dalam semester tersebut dan dapat dilakukan secara kelompok atau individual. Hasil studi ditulis dalam bentuk makalah dan disajikan dalam kelas kepada peserta didik lainnya. Dengan cara ini peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, cara berpikir dan ketrampilan sejarah yang sudah dipelajari di semester awal, mendalami suatu peristiwa sejarah yang menarik perhatian dirinya (peserta didik dapat mengembangkan interest pribadinya), setiap peserta didik memiliki pengetahuan tentang semua peristiwa sejarah yang tercantum dalam semester tersebut.
3. Pengembangan nilai dan sikap dilakukan melalui pendekatan “indirect-teaching” yaitu tidak diajarkan sebagai materi pelajaran tetapi ditumbuhkan bersamaan dan secara terpadu ketika peserta didik belajar tentang satu peristiwa sejarah dan mengembangkan kemampuan berpikir dan ketrampilan sejarah.

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar Sejarah perlu mengubah dari kebiasaan terpaku hanya pada “pencil and paper test” ke berbagai alat lain yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengetahui ketrampilan dan sikap sebagai hasil pendidikan Sejarah. Pendekatan berikut diusulkan untuk digunakan.

1. Tujuan penilaian ialah agar pada akhir semester peserta didik memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir, dan ketrampilan sejarah yang dinyatakan dalam indikator semester tersebut. Indikator setiap semester selalu menunjukkan tingkat penguasaan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan ketrampilan sejarah yang semakin meningkat (*progressive*).
2. Penilaian dilakukan untuk membantu peserta didik mengatasi kelemahan atau kesulitan belajar. Skor atau nilai yang diperoleh dari setiap kegiatan penilaian digunakan untuk menemukan kesulitan belajar peserta didik dan untuk membantu peserta didik mengatasinya.
3. Alat penilaian yang digunakan adalah makalah, presentasi makalah, tanya jawab, dan observasi guru ketika peserta didik melaksanakan tugasnya.
4. Dengan menggunakan standar 1–10 yang berlaku saat ini maka KKM adalah 70 untuk kemampuan berpikir dan 80 untuk keterampilan sejarah. Guru membantu setiap peserta didik untuk mencapai KKM pada akhir setiap semester dan nilai itulah yang digunakan tanpa mengkaitkan dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya digunakan guru hanya untuk membantu peserta didik mengatasi kelemahan yang ada pada waktu itu dan tidak digunakan untuk menghukum ketidakmampuan mereka.
5. Nilai dan sikap peserta didik dinilai dengan prinsip yang sama dengan prinsip nomor 4 kecuali tidak ada skor atau nilai untuk peserta didik pada akhir semester. Berdasarkan pengamatan guru terhadap perilaku



sehari-hari peserta didik dan indikator yang ada maka nilai dan sikap peserta didik diberi apresiasi yaitu BT, MT, MB, MK yaitu (Puskur 2010):

- Belum Terlihat (BT), apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator;
- Mulai Terlihat (MT), apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten;
- Mulai Berkembang (MB), apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten; dan
- Membudaya (MK), apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya penyempurnaan pendidikan sejarah perlu dilakukan. Penyempurnaan tersebut berkenaan dengan pemisahan tujuan yang jelas antara pendidikan sejarah untuk SD dan SMP yang diorganisasikan dalam kemasan IPS dan diperuntukkan bagi seluruh warga negara usia 7–15 tahun dari pendidikan Sejarah di SMA untuk sekelompok penduduk usia 16–18 dan dengan tujuan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Perubahan yang perlu dilakukan terutama dalam kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dimana kemampuan intelektual, berbagai kebiasaan, nilai dan sikap harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan keadaan sekarang. Pemilihan peristiwa sejarah yang menjadi materi pelajaran di SD dan SMP, posisi materi pelajaran sejarah di SMA, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

DAFTAR BACAAN

- Anderson, L. W., dkk. (ed.) (2001), *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Borries, Bodo von (2000), "Methods and Aims of Teaching History in Europe: A Report on Youth and History," dalam P. N. Stearns, P. Seixas, S. Wineburg (ed.), *Knowing Teaching and Learning History: National and International Perspectives*. New York: New York University Press.
- Cooper, H. (1992), *The Teaching of History: Implementing the National Curriculum*. London: David Fulton Publishers.
- Djojonegoro, W. (1996), *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Hasan, S. H. (2002). "Pendidikan Sejarah dalam Rangka Pengembangan Memori Kolektif Bangsa," Makalah Seminar Sejarah Nasional. Pontianak.
- (2010), "Pendidikan Sejarah: Lika-Liku Pengembangannya," *Basis*, No. 07–08, Tahun ke-59.
- (2010), *Perkembangan Kurikulum SMP: Dari Zaman Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, dan Zaman Kemerdekaan*. Jakarta (dalam proses cetak).
- (2011), "The Development of Historical Thinking and Intellectual Skills in the Teaching of History in the Senior Secondary School Curriculum in Indonesia," *Historia: International Journal of History Education*, Vol. XI, No.2



— (2011b), “Pendidikan Sejarah untuk Membangun Inspirasi dan Mengembangkan Aspirasi,” *Majalah Jurnal Pendidikan Sejarah*, Edisi ke-2/Januari–Maret 2011.

Stearns, P. N., P. Seixas, S. Wineburg (ed.) (2000), *Knowing Teaching and Learning History: National and International Perspectives*. New York: New York University Press.

Wineburg, S. (2001), *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*. Philadelphia: Temple University Press.

Dokumen

Dokumen Kurikulum 1964

Dokumen Kurikulum 1968

Dokumen Kurikulum 1975

Dokumen Kurikulum 1984

Dokumen Kurikulum 1994

Dokumen Kurikulum 2004

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2005

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010–2014

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Penyusupan Komunisme dalam Pelaksanaan Pendidikan Pancawardhana

UMASIH
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Setelah Dekrit Presiden diumumkan pada 5 Juli 1959, disusul pidato Presiden Soekarno pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita,” maka seluruh arah kebijakan negara dan pelaksanaannya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, haruslah berlandaskan pada Manifesto Politik—lazim diakronimkan Manipol. Selanjutnya, melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960, Manipol ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan tambahan Usdek.¹ Tujuannya mengembalikan “revolusi” Indonesia pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, kebijakannya juga harus berlandaskan pada Manipol/ Usdek.

Dalam hubungan dengan pendidikan itu, Ketetapan MPRS tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem pendidikan nasional harus bertujuan ke arah pembentukan tenaga ahli dalam pembangunan untuk melahirkan warga negara yang berjiwa Pancasila dan patriot komplet supaya melahirkan tenaga-tenaga kejuruan yang ahli dan berjiwa revolusi Agustus 1945.² Senada dengan itu, dalam Kongres I Lembaga Pendidikan (1962) dibahas bahwa pendidikan yang dilaksanakan adalah “pendidikan manipolis” yang bertujuan melahirkan tenaga ahli yang patriotik,

1 Usdek merupakan singkatan/akronim yang terdiri atas unsur-unsur: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Sosialisme Indonesia, (3) Demokrasi Terpimpin, (4) Ekonomi Terpimpin, dan (5) Kepribadian Indonesia.

2 Ketetapan Nomor II/MPRS/1960, Lampiran A, Bab I, Pasal 21.

demokratis, dan manipolis serta bercita-cita sejalan dengan sosialisme.³

Berdasarkan tujuan, isi moral dan politik pendidikan nasional tersebut, jelas tergambar bahwa suasana kependidikan saat itu mengharuskan pemerintah Indonesia dengan segala daya yang dimiliki dikerahkan untuk mensukseskan dalam istilah yang dijelaskan Presiden Soekarno "revolusi yang belum selesai." Konsep revolusi adalah doktrin yang selalu dikumandangkan dalam ajaran komunisme. Artinya, ideologi komunis telah betul-betul menyusupi segi kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu, tak terkecuali dalam dunia pendidikan.

SISTEM PENDIDIKAN PANCAWARDHANA⁴

Untuk memberikan dasar dalam pendidikan nasional yang sesuai dengan Manipol/ Usdek Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Prijono, merumuskan langkah-langkah jangka pendek dengan mengeluarkan instruksi kepada Menteri Muda Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, Nomor 1/1959 tanggal 17 Agustus 1959 tentang Sapta Usaha Tama, yang terdiri dari:

1. Penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
2. Menggiatkan kesenian dan olah raga
3. Mengharuskan usaha halaman
4. Mengharuskan penabungan
5. Mewajibkan usaha-usaha koperasi
6. Mengadakan kelas masyarakat
7. Membentuk regu kerja di kalangan SLA dan universitas.⁵

3 Lihat Prasaran, "Pendidikan Mengabdikan Manipol," dalam Kongres I Lembaga Pendidikan, Juli 1962.

4 Dalam ejaan asli, istilah ini tertulis *Pantjawardhana*. Dalam tulisan ini, ejaan tersebut diubah menjadi *pancawardhana* sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan yang berlaku sejak 1972. Penyesuaian juga diberlakukan untuk istilah lain yang terkait.

5 Lihat *Pendidikan Nasional*, No. 9–10, 1964. Dalam Sapta Usaha Tama diperkenalkan Hari Krida, yaitu satu hari dalam satu minggu (hari Sabtu) disediakan untuk kegiatan olah raga, olah seni, rekreasi dan kegiatan kemasyarakatan lainnya di sekolah.



Selanjutnya bertepatan dengan pidato Presiden Soekarno pada peringatan 17 Agustus 1961 yang berjudul Resopim (Revolusi Sosialis Pimpinan), Menteri Prijono mengeluarkan Instruksi Nomor 2 yang berisi tentang penegasan Pancasila dan Manipol sebagai pelengkapannya sebagai dasar pendidikan dan menetapkan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan.⁶ Sistem Pendidikan Pancawardhana pada hakikatnya adalah pendidikan dengan pemusatan pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi serta bercorak nasionalistik yang dipandang memenuhi tuntutan Revolusi Indonesia yang sedang berjalan. Ada tiga kerangka revolusi Indonesia yang diterangkan dalam Manipol:⁷

1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.
2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia
3. Pembentukan persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama negara-negara Asia Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar kerja sama membentuk Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.

Terhadap Sistem Pendidikan Pancawardhana, pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa (pelaksanaan) pendidikan itu akan mengarahkan siswa ke arah sistem pendidikan komunis. Alasannya, karena Lembaga Pendidikan Nasional (LPN), yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), sangat gigih dalam upaya menafsirkan pelaksanaan pendidikan Pancawardhana hingga melahirkan konsep Pancacinta.⁸ Di mata masyarakat nonkomunis, isi moral Pancacinta sangat

6 Meliputi (1) Perkembangan cinta bangsa dan Tanah Air, moral nasional, internasional, keagamaan, (2) perkembangan kecerdasan, (3) perkembangan emosional-artistik atau rasa keharmonisan dan keindahan lahir dan batin, (4) perkembangan keprigelan dan kerajinan tangan, dan (5) perkembangan jasmani.

7 Lihat *Pendidikan Nasional*, No. 9-10, 1964.

8 Meliputi (1) cinta nusa dan bangsa, (2) cinta ilmu pengetahuan, (3) cinta kerja dan rakyat yang bekerja, (4) cinta perdamaian dan persahabatan antarbangsa, dan (5) cinta orang tua.

bertentangan dengan dasar Negara Pancasila karena pada instansi pertama isi moral itu tidak mengakui cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mereka menuntut agar LPN dilikuidasi. Sebaliknya, menurut LPN, masyarakat yang menolak Sistem Pendidikan Pancawardhana berarti bertentangan dengan ajaran Bapak Marhaenis, Bung Karno, tentang Pancasila. Mereka yang menolak itu dengan sendirinya tidak menerima sistem pendidikan nasional. Memperkuat argumennya, pendukung Sistem Pendidikan Pancawardhana menunjuk pernyataan Menteri Pendidikan Priyono di depan Seminar Pendidikan Mengabdikan Manipol bahwa antara Pancasila dan Pancawardhana tidak bertentangan tetapi saling melengkapi.

Menurut Menteri Priyono kedua konsep pendidikan, Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana, sebenarnya merupakan penolakan terhadap Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950, yang dipandang hanya cocok untuk pelaksanaan pendidikan pada masa Demokrasi Liberal. Golongan komunis sangat mendukung Sistem Pendidikan Pancawardhana dengan alasan bahwa praksis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sampai saat itu lebih menekankan pada aspek intelektual. Padahal siswa dididik agar pengetahuan tentang ilmu dan kecakapannya harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, pemikiran itu juga menjadi bagian tujuan pendidikan nasional yang diterapkan pada saat ini. Suatu hal yang positif jika pelaksanaan Sistem Pendidikan Pancawardhana ketika itu, tidak dilakukan dengan cara indoktrinatif.

Melalui Lembaga Pendidikan Nasional, PKI merumuskan sistem pendidikan yang agak berbeda dengan Pancawardhana, namun menurut golongan komunis tidak bertentangan dengan syarat Pancatinggi, yaitu:

1. Tinggi kesadaran politik bercita-cita sosialisme
2. Tinggi moral yang bercirikan Pancacinta
3. Tinggi ilmu dan kecakapan teknik
4. Tinggi rasa estetika (tata sulistya)
5. Tinggi kondisi jasmaniah



Pendidikan nasional harus mengabdikan kepada haluan negara, yaitu Manipol/ Usdek yang sudah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Terlebih sejak ”tahun vivere pericoloso”—sesuai judul pidato Presiden Soekarno dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan 1964—jelaslah bahwa dasar atau isi moral pendidikan nasional adalah Pancasila/Manipol/Usdek dan Sistem Pendidikan Pancawardhana. Sesuai dengan alam Manipol maka watak Revolusi Indonesia adalah menentang imperialisme/kolonialisme dan sifat demokratis Revolusi Indonesia adalah menentang keterbelakangan, feodalisme, dan otokrasi atau kediktatoran baik militer maupun perorangan (Caroeboka 1965: 13).⁹

Dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 itu yang kemudian menjadi isi pendidikan nasional, dirumuskan mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai bagian dari sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta berencana yaitu menuju tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu pendidikan berfungsi sebagai lima pancabhakti yang berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, yaitu:

1. Pembina manusia Indonesia baru yang berakhlak tinggi
2. Produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan
3. Lembaga pengembangan kebudayaan nasional
4. Lembaga pengembangan ilmu pengetahuan teknik dan fisik/mental
5. Lembaga penggerak seluruh kegiatan rakyat

Untuk mengimplementasikan Ketetapan MPRS tersebut, Presiden merumuskan nama dan induk sistem pendidikan nasional sebagai berikut:¹⁰

1. Manusia Indonesia baru yang berjiwa Pancasila Manipol/Usdek dan sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita tersebut
2. *Manpower* yang cukup untuk melaksanakan pembangunan

⁹ Chairun Caroeboka ialah Ketua Umum Lembaga Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan PKI.

¹⁰ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional.

3. Kepribadian kebudayaan nasional yang luhur
4. Ilmu dan teknologi yang tinggi
5. Pergerakan massa aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangunan dan revolusi.

Untuk efektivitas praksis penyelenggaraan pendidikan maka kurikulum sekolah harus memiliki jiwa:

1. Semangat mengemban amanat penderitaan rakyat secara gotong royong demi tercapainya masyarakat adil makmur dan diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa
2. Semangat demokrasi terpimpin yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat
3. Semangat cinta bangsa dan tanah air dan semangat kesatuan bangsa yang ber-bhinneka tunggal ika, berkepribadian dan berkebudayaan nasional
4. Rasa perikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia atas semangat Nefo (*new emerging forces*, negara-negara Asia dan Afrika yang merdeka dari penjajahan) untuk membangun duania baru yang bebas dari imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme
5. Kepercayaan dan rasa taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara berkeadaban sebagai karakteristik bangsa Indonesia.¹¹

Berikut adalah struktur mata pelajaran Sekolah Dasar pada Sistem Pendidikan Pancawardhana.

1. Untuk mencapai wardhana kesatu:
 - a. Kewarganegaraan (*civics*)
 - b. Pelajaran Agama
 - c. Ilmu Bumi
 - d. Sejarah
2. Untuk mencapai wardhana kedua:
 - a. Bahasa
 - b. Berhitung

¹¹ *Ibid.*, pasal 18



- c. Pengetahuan Alam (ilmu hayat, ilmu alam)
 - d. Menulis
3. Untuk mencapai wardhana ketiga:
- a. Menggambar
 - b. Melukis
 - c. Menyanyi
 - d. Menari
 - e. Bersandiwara, bermusik, berdeklamasi
 - f. Karawitan (memukul gamelan)
 - g. Membatik dan lain-lain
4. Untuk mencapai wardhana keempat yaitu pelajaran Prakarya, artinya yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat seperti:
- a. Bercocok tanam, perikanan, beternak dan lain-lain
 - b. Kerajinan tangan; menganyam, bertenun, membuat tembikar, berbengkel, berpandai besi dan lain-lain
 - c. Perindustrian kecil; membuat sabun, kecap, balsem, dan lain-lain
5. Untuk mencapai wardhana kelima:
- a. Pendidikan Jasmani
 - b. Pendidikan Kesehatan

PENYUSUPAN KOMUNISME DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCAWARDHANA

Dalam dokumen Manipol disebutkan bahwa untuk pertama kalinya Republik Indonesia, melalui kepala negaranya, mengumumkan sebuah dokumen yang menjelaskan persoalan pokok rakyat Indonesia yang bersifat menyeluruh. Watak Revolusi Indonesia—seperti telah disebutkan—adalah revolusi nasional menentang imperialisme/kolonialisme. Di samping sifat nasionalnya, Revolusi Indonesia adalah revolusi demokratis, yang menentang keterbelakangan, feodalisme dan otokrasi atau kediktatoran baik militer maupun perseorangan. Dengan demikian pembaruan pendidikan

yang akan dirancang bertujuan menyiapkan anak-anak Indonesia menjadi manusia pembangun dan pembina masyarakat baru yang kuat bersemangat antiimperialisme dan antifeodalisme serta bercita-cita menghapuskan penghisapan manusia oleh manusia. Singkatnya, manusia Indonesia adalah manusia baru kader pembangunan yang ahli, patriot dan demokrat serta bercita-cita sosialisme.

Melalui LPN dijelaskan bahwa yang dimaksud “patriot paripurna” adalah manusia baru yang memiliki segenap syarat dan unsur yang dibutuhkan bagi perkembangan perspektif masyarakatnya yang 1) tinggi kesadaran politik bercita-cita sosialisme, 2) tinggi moral yang berisikan Pancacinta, 3) tinggi ilmu dan kecakapan teknik, 4) tinggi rasa estetika atau tata sulistya, dan 5) tinggi kondisi jasmaniah. LPN mendukung Sistem Pendidikan Pancawardhana dengan memberinya isi berupa Pendidikan Pancacinta. Sebagai lembaga pendidikan pendukung Manipol, LPN berpendapat bahwa politik pendidikan harus mempunyai tiga prinsip yaitu Nasional, Kerakyatan dan Ilmiah (*Pendidikan Nasional*, No. 7–8, Maret 1963).

Kedua konsep pendidikan, Pancawardhana dan Pancacinta, menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, bahkan di kalangan pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) sendiri. Golongan komunis mempertahankan Sistem Pendidikan Pancawardhana, sedangkan golongan agama dan nasionalis menentang sistem itu dan menuduh bahwa konsep pendidikan Pancacinta—seperti sudah dijelaskan—telah menghilangkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertentangan antara kubu Pancawardhana/ Pancacinta di satu pihak dengan kubu pendidikan berdasarkan Pancasila berpengaruh terhadap kehidupan guru. Guru-guru dalam Sistem Pendidikan Pancawardhana tidak sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi “guru Manipolis dan Pancawardhanais.”



Guru Pancawardhanais adalah guru yang memiliki kekuatan sebagai pendorong Revolusi Indonesia, artinya harus revolusioner, manipolis dan patriot paripurna. Guru-guru paripurna dan ahli bersama-sama anak didik diharuskan mempunyai kebencian yang tajam dan semangat perlawanan yang gigih terhadap musuh revolusi, yakni imperialisme dan neokolonialisme. Guru harus memiliki kesadaran kehidupan demokratis untuk menyatukan kekuatan nasional. Guru bertugas melakukan indoktrinasi kepada anak didik melalui Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran wajib (Walujo 1964: 8). Kewajiban mengajarkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran wajib di sekolah hingga perguruan tinggi juga sesuai dengan Ketetapan MPRS II Tahun 1960, Bab II, Pasal 2, Ayat (2). Kemudian dalam Panca Program Front Nasional ditekankan perlunya mengamalkan Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) yang dilengkapi dengan pidato Resopim dan Takem (Tahun Kemenangan) yang memuat sembilan nasihat Presiden Soekarno.

Seruan Presiden untuk mengajarkan Manipol dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi dan "memanipol-usdekkan" siswa/mahasiswa adalah untuk mengajarkan guru-guru agar mau berpolitik. Dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pendidikan Guru dan Tenaga Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di Bandung, Presiden menyatakan bahwa "... hanya guru-guru yang benar-benar rasul revolusi dapat membawa anak-anak ke dalam revolusi."¹² Di situlah Soekarno menekankan bahwa guru Indonesia pada saat itu harus mengenal politik dan mengamalkan garis politik yang berdasarkan Pancasila, Manipol/Usdek secara konsekuen dan berani membentuk anak-anak didik Indonesia berjiwa patriot paripurna yang manipolis dan ahli.

Kesulitan ekonomi yang dialami para pegawai negeri khususnya para guru pada masa itu telah dimanfaatkan oleh Partai Kominis Indonesia (PKI) melalui organisasi guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

¹² Isi sambutan tertulis Presiden Soekarno dimuat dalam *Suara Pendidikan* (1965).

Organisasi itu dalam kongresnya yang ke-9, Oktober 1959, PGRI telah "mendwifungsikan" diri sebagai serikat sekerja dan profesi guru. Dengan demikian, organisasi itu telah memudahkan jalan bagi PKI masuk ke dalam tubuh organisasi (serikat sekerja) dan mempengaruhinya untuk mensukseskan "Plan Empat Tahun" atau Peta yang dilancarkan PKI. Peta meliputi tiga bidang garapan yaitu kebudayaan, ideologi, dan organisasi. Pelaksanaan Peta berhubungan dengan tuntutan taktis dan strategis gerak Kabinet Gotong Rotong yang berporoskan Nasakom—Nasionalis, Agama, Komunis, tiga kekuatan sosial yang disatukan oleh Soekarno.

Memasuki kurun 1960-an itu, PKI semakin intensif melakukan infiltrasi untuk menguasai PGRI. Meskipun Ketua Umum PGRI, Subiadinata, menolak terhadap usaha-usaha yang dilakukan PKI, ia justru ditentang oleh sebagian pengurus PGRI seperti Soebandri. Selanjutnya dalam kongres PGRI ke-10 di Gelanggang Olah Raga Bung Karno pada 1962, Soebandri dan kawan-kawan kembali melakukan politik adu domba. Bahkan saat itu mereka memfitnah Ketua Umum PGRI, Subiadinata, yang disebut sebagai anti-Manipol, antirevolusi, dan sebagainya. Namun, PKI yang telah menunjuk Soebandri sebagai ketua umum melalui pemilihan Pengurus Besar PGRI, tidak berhasil menggeser kedudukan Subiadinata sebagai ketua umum. Dalam kongres yang ke-10 itu Subiadinata kembali terpilih sebagai Ketua Umum PGRI. Namun, terpengaruh oleh suasana kongres itu, akhirnya kongres menyepakati untuk memasukkan Pancasila/ Manipol Usdek sebagai dasar PGRI.

Konflik internal dalam tubuh organisasi PGRI benar-benar nyata setelah pengurus PGRI mengikuti Musyawarah Penegasan Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Nasional di Jakarta, 17 Juli 1963. Musyawarah yang diadakan oleh partai-partai politik dan ormasnya merupakan reaksi terhadap Seminar Pendidikan Mengabdikan Manipol yang diadakan pada Februari 1963 oleh Lembaga Pendidikan Nasional yang berafiliasi dengan PKI.



Penyusupan dilakukan oleh PKI terhadap anggota-anggota PGRI terutama guru-guru di daerah Jawa Barat meski dalam jumlah sedikit, yaitu 573 orang dari 80.000 anggota, dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 2.000 orang guru. Sementara itu, Muljono dan Ichwani yang kecewa karena gagal dalam upaya mempengaruhi suasana Kongres PGRI 1962 dan menyaksikan Pengurus Besar PGRI tetap mempertahankan Dasar Pendidikan Nasional Pancasila, mengajukan nota pengundurkan diri. Selanjutnya mereka melakukan propaganda "non-vaksentral" kepada anggota PGRI yang berhasil dipengaruhi PKI. Akan tetapi mereka belum berani secara terang-terangan membela Pancacinta sebagai isi moral Pendidikan Pancawardhana. Bersama-sama anggota PGRI yang telah berafiliasi dengan PKI, pada Juni 1964 mereka memisahkan diri dan membentuk PGRI Non-Vaksentral (PGRI 1973: 19).¹³

Kepada anggotanya, PGRI Non-Vaksentral menyerukan melakukan pemogokan, berdemonstrasi dan berkonfrontasi sebagaimana yang dilakukan para buruh kepada majikannya. Anti-pemogokan berarti antiburuh, antiburuh berarti antikomunis, dan antikomunis berarti anti-Nasakom, anti-Nasakom berarti anti-revolusi atau kontra-revolusi). Demikian propaganda yang dikumandangkan guru-guru prokomunis untuk mengintimidasi guru-guru lain yang tetap setia kepada Pendidikan Pancasila dan PGRI Vaksentral—sebutan lain yang ditujukan kepada PGRI hasil Kongres (PGRI, t.t.). Para guru dipaksa untuk menarik garis tegas tentang siapa kawan dan siapa lawan. Prinsip siapa kawan dan siapa lawan berlaku juga dalam tubuh PGRI. Menurut versi PKI, "lawan" dalam dunia pendidikan adalah guru-guru Pancasila yang berusaha mengamankan Pancasila, sedangkan "kawan" adalah guru-guru yang membela Pancacinta dan Pancatinggi. Persaingan antarindividu dan antarkelompok dalam

13Sumber lain menyebutkan bahwa pembentukan PGRI tandingan yang kemudian disebut PGRI Non-Vaksentral terpaksa dilakukan oleh PKI setelah gagal menguasai PGRI dari dalam. PGRI Non-Vaksentral di bawah pimpinan Subandri dan Muljono yang mendapat dukungan dari Menteri P dan K, Prijono, dan Sekretaris Jenderal P dan K, Supardo (lihat Poesponegoro dan Notosusanto, ed. 2008: 370).

masyarakat pun terjadi dengan cara yang berlebihan. Orang-orang yang berbeda pendapat dengan pandangan pemerintah, dengan mudah dituduh kontrarevolusi, anti-Manipol, agen subversi asing dan lain-lain julukan lagi yang mematikan.

Hingga saat dibubarkan, PGRI Non-Vaksentra tidak banyak memperoleh dukungan dan hanya populer di kalangan guru di Pulau Jawa khususnya guru sekolah dasar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur sehingga dari mereka banyak yang terlibat sebagai anggota PKI. Di lingkungan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, konflik internal makin meningkat setelah Menteri Prijono dalam rapat dinas 23 Juli 1964 memperdebatkan lagi isi Dasar Pendidikan Nasional yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun. Tidak senang dengan situasi seperti itu, seorang pembantu Menteri, Tartib Prawirodiharjo, meninggalkan rapat karena dituduh mengkhianati menternya.

Ketegangan makin memuncak ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan reorganisasi Departemen kepada Presiden khususnya mengenai jumlah pembantu Menteri yang semula tiga orang menjadi dua orang. Presiden menyetujui reorganisasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 187/1964 dan Nomor 188/1964. Keputusan itu menimbulkan kegelisahan banyak pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan karena dirasa tidak ada kepastian dan jaminan hukum bagi pegawai dan karier mereka (Yunus, dkk. 2003: 931). Ketika 27 pegawai tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan untuk menjernihkan suasana, surat itu ditanggapi Menteri justru dengan memberhentikan 27 orang pejabat tersebut dengan alasan atas permintaan sendiri.

Akibat pemecatan terhadap ke-27 pejabat tersebut, kehebohan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Berbagai organisasi massa dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memprotes keras tindakan Menteri.

Akan tetapi Serikat Sekerja Pendidikan dan PGRI Non-Vaksentral yang pro-PKI, sebaliknya, mendukung tindakan Menteri. Bahkan kedudukan Menteri Prijono semakin kuat saat terjadi *reshuffle* kabinet pada Agustus 1964, Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi Menteri Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan kedudukan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan diberikan kepada Artati Marzuki Soedirdjo. Meskipun ke-27 orang pejabat Departemen P dan K yang telah dipecat Prijono menyatakan kesediaannya membantu Artati Marzuki Soedirdjo, tetapi maksud itu tidak dapat dipenuhi karena masalah mereka sudah ditangani Presiden. Akhirnya, 24 dari 27 orang itu ditampung di Markas Besar TNI Angkatan Darat di bawah langsung Letnan Kolonel Amir Murtono; dua orang menjadi Pembantu Khusus Menteri Dalam Negeri dan satu orang lagi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Pusat.

Untuk menata ulang kebijakan pendidikan dan menyatukan kembali PGRI menyusul heboh di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kemudian Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan), Presiden Soekarno meminta melalui Komisi Nasakom yang diketuai oleh Profesor Soejono Hadinoto, S.H., Wakil Ketua DPA. Duduk dalam komisi itu Soedijarto, Kepala Biro Urusan IKIP, dan Surahman yang mewakili golongan Nasionalis, Wiswojo utusan dari PKI, Ridwan Fadil (sekretaris Idham Cholid) wakil dari NU serta Ridwan Saidi, Saleh Mahmud dan Ismaun dari IKIP.¹⁴ Meski upaya menyatukan kembali PGRI belum berhasil hingga terjadi peristiwa G-30-S/PKI (1965), Panitia Negara Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana berhasil menyampaikan pertimbangan atas pemecatan masal para pejabat Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tersebut. Oleh Panitia Negara, ke-27 pejabat yang dipecat itu dinyatakan tidak bersalah. Akan tetapi untuk menyelamatkan nama Menteri Prijono, dari 27 orang itu hanya 13 orang yang diizinkan kembali bekerja di Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, sedangkan 14 orang lainnya

¹⁴Wawancara dengan Prof. Dr. Soedijarto, M.A., Jakarta, 15 Juli 2008.

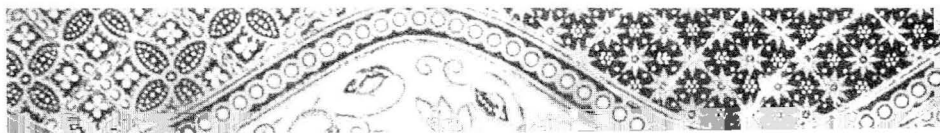
tetap di Markas Besar TNI Angkatan Darat dan Departemen Dalam Negeri. Panitia Negara juga menyarankan kepada Presiden untuk menyempurnakan konsep Pendidikan Pancawardhana (Ricklefs 2004: 967–8).

Pada 1965, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang dasar-dasar pendidikan, tujuan, isi moral, dan politik pendidikan nasional yang ditafsirkan menurut Manipol/Usdek. Dalam Penetapan Presiden itu dinyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiel dan berjiwa Pancasila.¹⁵ Oleh karena politik pendidikan nasional adalah Manifesto Politik Republik Indonesia, maka garis dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan Nasional Demokratis harus melahirkan patriot-patriot komplit, yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/Usdek, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa.¹⁶ Penetapan Presiden No. 19 itu belum sempat dilaksanakan karena keadaan politik yang semakin kacau dan friksi antargolongan semakin tajam hingga timbul Gerakan 30 September.

Satu kelemahan yang disadari atau tidak oleh pemerintah ialah bahwa sistem pendidikan nasional yang resmi yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai pelaksana Pendidikan Pancasila dalam sistem Pancawardhana, ternyata mengundang peluang untuk disusupi unsur politik yang membahayakan Pancasila, seperti yang telah dimanfaatkan oleh PKI dengan Pancacinta dan Pancatinggi. Ketika usaha besar-besaran PKI mencoba menggagalkan Kongres PGRI di Surabaya (1959) dan Jakarta (1962), mereka lupa bahwa dalam tubuh PGRI masih terdapat banyak guru yang setia kepada prinsip, dasar, tujuan murni PGRI sebagai organisasi yang menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

15 Lihat Pasal 2 Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pendidikan Nasional Pancasila.

16 Pasal 2 Penetapan Presiden. ...



DAFTAR ACUAN

- Caropeboka, Chairun (1965), "Sesuaiakah Pengajaran Sekolah Dasar Dewasa Ini dengan Kebutuhan Kaum Tani," *Pendidikan Nasional*, 1965, h. 13.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2003), *Guru di Indonesia: Pendidik-an, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Direktorat PMPTK.
- Pendidikan Nasional* (1963), "Pantjatjita sebagai Sumbangan bagi Pelaksanaan Pantjawardhana Setjara Konsekwen," No. 7–8, Maret.
- (1964), "Pendidik Indonesia, Laksanakan Pantjawardhana," No. 9–10.
- PGRI (1973), *Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Era Pembangunan 25 Tahun Indonesia*. Hasil Kongres PGRI Ke-13, 21–25 November.
- (t.t.), *Sejarah PGRI*. Surabaya: YPLP PGRI Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.) (2008), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Edisi Revisi. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasaran (1962), "Pendidikan Mengabdikan Manipol," Kongres I Lembaga Pendidikan. Juli.
- Ricklefs, M. C. (2008), *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004*, terj. Satrio Wahono, dkk., cet. II. Jakarta: Serambi.
- Suara Pendidikan* (1965), No. 3 Tahun IV.
- Walujo, Sophian (1964), "Guru yang Manipolis," *Pendidikan Nasional*

(nomor terbitan tidak tercatat).

Yunus, M. Rusli, dkk. (2003), “Sejarah Persatuan Guru Republik Indonesia Merdeka,” dalam Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Direktorat PMPTK.

Dokumen

Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pendidikan Nasional Pancasila.





BAGIAN KETIGA
SEJARAH GENRE BARU



Labu Rope Labu Wana Konsep **‘Pulau Sejarah’** **dalam Historiografi Indonesia**

SUSANTO ZUHDI
UNIVERSITAS INDONESIA

Beberapa waktu yang lalu, seorang pembawa acara sebuah stasiun televisi swasta, dengan latar panorama perairan Teluk Jakarta melaporkan, “Kita baru saja meninggalkan ‘daerah belakang’ menuju ‘daerah depan’ ibukota Jakarta”. Penonton televisi yang sempat menyaksikan acara tersebut patilah tahu kemudian apa yang dimaksud penyiar bahwa ‘daerah belakang’ adalah wilayah di Kepulauan Seribu. Dengan pola pikir seperti itu maka yang dimaksud ‘daerah depan’ adalah wilayah daratan kota Jakarta. Seperti diketahui, Kepulauan Seribu merupakan salah satu kecamatan yang masuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Boleh saja pernyataan penyiar televisi tersebut tidak dianggap sebagai kekeliruan. Mengapa demikian karena sebuah pernyataan tergantung dari sudut pandang dalam melihat kenyataan. Dengan mudah dapat diterka bahwa pembawa acara itu menggunakan titik tolak atau sudut pandang daratan. Atau dengan kata lain daratanlah yang menjadi pijakannya untuk melihat kenyataan. Dengan cara pandang ini maka daratan pulalah yang dianggap lebih penting atau utama daripada laut.

Berangkat dari itu, agaknya semacam itu pula orientasi umum suatu bangsa dalam memandang wilayahnya. Contoh kecil tersebut dapat diproyeksikan ke prisma yang lebih luas ketika orientasi bangsa mengabaikan lingkungan geografis dengan lautan yang jauh lebih luas daripada daratan. Dapat juga dikatakan bahwa *world view* suatu bangsa dapat dilihat ketika apa yang menjadi orientasi menjadi visi dalam mengarahkan seluruh tindakan kepada perwujudan cita-citanya.

Orientasi membentuk *mindset*. Kemudian, apa yang mengherankan jika *mindset* bangsa Indonesia dalam kenyataannya mengabaikan laut? Memang pernyataan pembawa acara televisi tersebut hanya salah satu indikasi. Akan tetapi gejala pengabaian terhadap laut kerap kita dengar dengan banyaknya laporan tentang seperti kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal, sumber daya alam di lepas pantai apalagi laut belum dieksploitas, dan tidak kalah penting masih rendahnya konsumsi ikan oleh orang Indonesia. Jika dilihat dari aspek keamanan dalam konteks kedaulatan sebuah negara kepulauan keprihatinan akan bertambah lagi karena dari 92 pulau “terdepan” baru 12 pulau yang terjaga secara fisik, dalam arti ditempatkan personel angkatan laut.

Namun apakah mengherankan kalau undang-undang kelautan hingga kini, sejak 2005, masih berupa rancangan yang belum juga disahkan. Memang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sudah diterbitkan, tetapi salah satu amanatnya belum juga dilaksanakan yakni bahwa dalam tiga tahun kemudian (artinya Mei 2011) harus sudah terbentuk penjaga laut dan pantai untuk sebuah negeri dengan pantai terpanjang kedua di dunia. Sejauh ini yang baru berdiri adalah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2005.

Rupanya pembicaraan anak bangsa tentang bahari lebih sering mengacu pada kejayaan masa lampau, betapa hebatnya (nenek moyang) bangsa ketika zaman Sriwijaya dan Majapahit. Tentang kata “bahari” pun tampaknya kurang dipahami bahwa sesungguhnya kata itu memiliki beberapa makna (Lapian 1992). Sejarahwan maritime A. B. Lapian mengimbau kita untuk menelaah kata “bahari” yang memiliki tiga arti: zaman dahulu kala; elok sekali; dan yang berkaitan dengan laut (mengacu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995). Bayangkan kalau ketiga arti tersebut dirangkai menjadi “suatu kehidupan di laut yang elok sekali pada zaman dahulu.” Arti “elok sekali” dalam konteks ini dapat pula berarti “hebat atau jaya sekali.”

Hanya saja, persoalannya, mengapa “yang elok sekali di laut” hanya berlangsung dahulu kala? Lalu, bagaimana dengan kehidupan di laut bangsa ini sekarang dan masa depan? Suatu kajian yang lebih intensif tentang kemaritiman dari berbagai aspek akan menjadi sumbangan untuk historiografi Indonesia yang semakin komprehensif.

PEMIKIRAN ADRIAN BERNARD LAPIAN TENTANG SEJARAH MARITIM

Berbicara tentang sejarawan yang tekun mempelajari laut boleh dikata belum terlalu lama. Dilacak ke belakang, perhatian sejarawan Indonesia tentang laut memang sudah diawali sejak 1967, ketika Adrian Bernard Lapien untuk pertama kali menulis “Pelajaran ke Maluku” (dalam ejaan lama). Kemudian sejarawan yang oleh Shaharil Talib dari Universiti Malaya (1997) digelar sebagai “nakoda pertama sejarawan maritim Asia Tenggara” itu lebih mendalami sekaligus memperluas cakrawala sejarah bahari, yang ia perlihatkan dalam sebuah disertasi yang dipertahanankannya di Universitas Gadjah Mada berjudul “Orang Laut, Raja Laut, Bajak Laut: Suatu Kajian Laut Sulawesi Abad XIX” (1987). Motivasi Lapien mengambil tema laut berasal dari salah satu dalil disertasi Sartono Kartodirdjo (1966) bahwa sejarah Indonesia tidak akan lengkap tanpa dimensi lautnya. Jadi, pergumulan Lapien dengan kajian laut telah mencapai duapuluh tahun sampai ia menghasilkan suatu studi yang lebih fokus pada aspek kelautan yang merupakan tonggak historiografi sejarah maritim Indonesia.

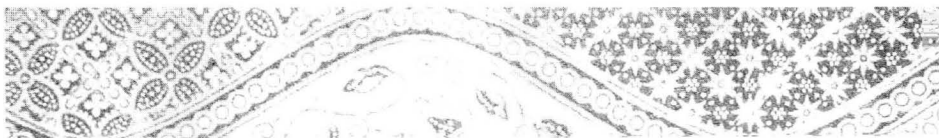
Pengaruh sejarawan Perancis, Fernand Braudel, terhadap Lapien tampak dalam disertasinya tersebut. Lapien seakan-akan “memindahkan” Laut Tengah (*Mediterranean Sea*)—yang menjadi kajian pokok Braudel—ke Laut Sulawesi. Dari disertasi ini, Lapien mengemukakan beberapa konsep yang memudahkan kita untuk menangkap gejala bahwa kehidupan di laut terdapat tiga unsur kelompok masyarakat, yaitu orang laut, raja Laut, dan

bajak Laut. Lopian adalah sedikit dari sejarawan Indonesia yang konsisten dalam menekuni kajiannya untuk kemudian menghasilkan rumusan mengenai konsep yang ditawarkan bagi pengembangan studi sejarah maritim.

Ketiga konsep tersebut merupakan upaya Lopian untuk mengkategorisasi agensi sejarah di laut. Ia mengawali risetnya setidaknya sejak 1970-an, kemudian tertuang dalam tulisan “The Sealords of Berau and Mindanao” (Lopian 2010: 101–15). Lopian layaknya seorang antropologiawan yang melakukan kegiatan turun ke lapangan untuk memperoleh wawasan geografi dan lingkungan sejarah. Kajian Lopian itu melampaui batas-batas wilayah yang kemudian menjadi negara-negara nasional merdeka (Malaysia, Brunei, Filipina, dan Indonesia). Wawasan seperti ini penting untuk memahami dan menjelaskan masalah perbatasan wilayah antarnegara dalam perspektif kekinian. Dari kajian Laut Sulawesi abad ke-19 itu pula dapat dipahami dinamika kemaritiman etnik atau bangsa-bangsa yang meskipun kini hidup dalam negara-negara nasional yang berbeda tetapi sering masih melakukan pelayaran tradisional.

Dengan bekal perspektif ini bermanfaat untuk memahami upaya masing-masing negara ASEAN dalam membentuk satu komunitas bersama pada 2015. Dalam kaitan itu pelabuhan di negara-negara ASEAN akan berfungsi sebagai penghubung dan membentuk jejaring di kawasan bersama yang terintegrasi.

Pemikiran Lopian tentang laut lebih lanjut dikemukakan dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tidak tetap di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1992. Tentu bukan sekadar menjelaskan padanan kata antara *nusantara* dan *bahari*, namun dengan eksplanasi dan argumentasi yang kuat Lopian dapat menunjukkan kesamaan pengertian antara *nusa* yang berarti “pulau” dan *antara* yang berarti “yang lain” (yang dimaksud adalah “pulau-pulau” selain Jawa). Jadi yang dimaksud dalam konteks ini bahwa “memper-antara-i pulau-pulau” itu adalah “laut” yang juga



berarti “bahari.” Konsep untuk memahami negeri seperti Indonesia adalah bahwa daerah inti bukanlah *heart land* atau suatu pulau melainkan wilayah maritim yang memiliki letak sentral. Wilayah maritim itu terdiri atas sejumlah sistem satuan laut (*sea systems*) yang memperlihatkan proses integrasi yang terus berkembang menjadi satuan yang lebih besar seperti Laut Jawa, Laut Banda, Laut Sawu.

Dalam Konferensi International Association for Historian of Asia di Tokyo, Jepang (1994), dalam panel khusus, Lopian mengemukakan konsep tentang *hintersea*. Konsep ini diajukan untuk menggantikan istilah *hinterland* yang dianggapnya keliru atau kurang cocok sebagai konsep jika digunakan untuk menanggapi kenyataan geografis kepulauan Indonesia. Alasan pertama, adalah bahwa istilah *hinterland* hanya ada di wilayah berupa kontinental seperti Eropa, dari mana istilah itu muncul. Kedua, secara geografis tidak ada pedalaman (*hinterland*) di seantero kepulauan Nusantara, yang benar-benar tertutup dari pengaruh jaringan laut.

Alasan mengapa *hintersea* lebih tepat karena pulau-pulau Indonesia sesungguhnya adalah yang menaburi lautan. Jadi bukan pulau-pulau yang dikelilingi laut. Dengan kata lain ke mana pun kita pergi atau mengarahkan pandangan, laut merupakan fakta yang jauh lebih luas daripada wilayah darat. Pada pulau-pulau besar seperti Sumatra, Kalimantan dan Papua, konsep *hintersea* dapat dijelaskan dengan analisis interaksi ulu dan ilir melalui aliran sungai. Artinya dengan konsep tersebut wilayah ‘pedalaman’ juga terintegrasi dengan jaringan laut. Semakin ke timur dengan bentuk pulau-pulau yang kecil dan ramping, maka ‘daerah belakang’ adalah laut juga. Oleh karena itulah, menurut Lopian, kita perlu mengganti istilah *hinterland* dengan *hintersea*.

Kepada sejarawan Taufik Abdullah, rekan sejawatnya, Lopian pernah mengemukakan pikirannya, “Kalau kita terus berlayar sejauh-jauhnya maka kita pun akan sampai juga ke daratan,” Jadi, bagaimanapun “pandangan dunia” anak negeri ini tidak bisa tidak semestinya selalu mengintegrasikan

tanah dan air. Oleh karena itulah memang “Tanah-Air” merupakan istilah sekaligus konsep yang paling tepat untuk menyebut sebuah negeri dengan karakteristik seperti itu. Laut sebagai kenyataan geografis yang lebih luas mengambil ruang daripada daratan, menjadi metafora yang tidak pernah habis digali, diungkap dan dimaknai.

Pandangan Lopian tentang laut secara lebih komprehensif tertuang dalam hasil wawancara Hendrik Niemejer dari Belanda yang berjudul “A Sea of Histories, a History of the Seas” (*Itinerario* 2004). “Laut Sejarah, Sejarah Laut” merupakan ungkapan mengenai kenyataan kehidupan tetapi juga metafora yang bermakna tentang hakikat kehidupan itu sendiri. Laut sejarah adalah laut kehidupan manusia, yang menggambarkan betapa “luas” aspek dan sangat “dalam” makna yang terkandung di dalam kehidupan. Suatu bukti bahwa kuatnya budaya bahari suku bangsa di Nusantara sampai dikenal dalam peribahasa “dalamnya laut dapat diduga dalamnya hati siapa yang tahu.”

Sedangkan “Sejarah Laut” adalah penggambaran mengenai berbagai aspek kehidupan manusia yang dapat diungkap dan direkonstruksi melalui kajian dan penulisan sejarah. Betapa dalamnya makna laut bagi anak negeri barangkali dapat dikatakan begini: “laut adalah kehidupan, kehidupan adalah sejarah, dan sejarah adalah laut.” Tentu saja ungkapan itu tidak usah dihiperbolakan, sebab bukankah tetap saja ada ungkapan “jangan lupa daratan.”

“PULAU SEJARAH” DAN “SEJARAH PULAU”

Ketika orang Eropa berlayar ke kepulauan di Pasifik seperti Hawaii, Tahiti, Vanuatu, dan sebagainya, pandangan mereka tentang pulau-pulau adalah mengenai surga atau sesuatu yang utopis, atau yang eksotik. Lebih daripada itu pemikiran mereka tentang pulau-pulau sesuatu yang ideal dapat didiami atau sebuah pulau yang kosong sehingga dapat dihuni kembali (“European voyager until recently often thought of island in terms



of paradise or utopian, either an ideal inhabited island or else an empty island on which to start again (Howe dalam Edmond dan Smith 2003: 1).

Marshall Sahlins seorang antropologiawan sosial dari Universitas Chicago mengkaji sejarah kepulauan Hawaii sebagai *neglected island of history* atau “pulau sejarah yang terabaikan.” Banyak hal yang tak terbayangkan oleh pelaut Eropa mengenai kehidupan di pulau-pulau yang sejatinya menyimpan sejarah.

Gambaran tentang pulau-pulau di Pasifik diungkapkan Edmond dan Smith sebagai *island in history* atau “pulau di dalam sejarah”; artinya pengetahuan yang terdapat di dalam sejarah. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa “sejarah adalah pengetahuan itu sendiri.” Epeli Hau’ofa penulis dari Tonga menegaskan bahwa masyarakat Pasifik mendiami “laut pulau” (*a sea of islands*). Atau dapat dikatakan Pasifik adalah “lautan pulau” atau “laut yang ditaburi pulau.” Tampaknya seperti permainan kata-kata tetapi kemudian dengan logika tersebut Walcott menam-bahkan kalau begitu “laut adalah sejarah,” *the sea is history* (Howe dalam Edmond dan Smith: 2003: 2).

Sayangnya karena titik tolak memandang kebanyakan orang Indonesia dari daratan maka mereka berpikir terhadap pulau-pulau itu sebagai wilayah tak dikenal (*terra incognita*) atau wilayah yang kosong (*terra nullius*). Terhadap kenyataan geosejarah seperti ini, di sini perlu ditegaskan perlu mengkonseptualisasikan “pulau sejarah” sebagai pendekatan dalam sejarah maritim Indonesia.

Dengan fakta seperti itu haruskah untuk mengkaji “pulau-pulau sejarah” Indonesia mengikuti jejak orang Belanda—apa yang pernah dikatakan Lapien sebagai “follow the Dutch trail.” Begitulah saya sendiri pada awalnya untuk meneliti sejarah Buton melalui laporan Speelman, panglima armada timur VOC, melalui *Memorie van Overgave Blok*, dan sketsa *gescheidenis van Buton* oleh Ligetvoet, seorang Sekretaris Gubernur

Sulawesi (1878). Juga dari kumpulan kontrak Buton-VOC yang dilakukan oleh Tielle dalam *Bouwstoffen*.

Untuk tidak “hanya” mengikuti jejak orang Belanda teresbut, saya menggali sumber lokal, yang agaknya dilihat sebelah mata sebagai “historiografi tradisional” karena dihadapkan dengan sumber sejarah modern yang dianggap lebih absah. Memang sejarah dalam arti konvensional adalah sejarah yang bersumber dokumen arsip. Dalam kenyataannya tidak semua yang kita cari terdapat dalam sumber arsip. Fakta mental atau pandangan dunia suatu komunitas, dan apresiasi mereka terhadap sejarahnya mungkin hanya diperoleh melalui sumber lokal, yang umumnya berupa tradisi lisan atau naskah.

Sumber lokal yang berharga untuk mengimbangi sumber Belanda, yang saya dapatkan adalah *kabanti* atau syair berjudul *Ajonga Inda Malusa* (harafiah: “Pakaian yang Tak Luntur”). Karya ini ditulis oleh cendekiawan Buton abad ke-19, Abdul Ganiyu, *kenepulu* Bula (kepala Hakim di wilayah bernama Bula). Karya itu sendiri ditujukan untuk anak perempuannya, yang menjadi permaisuri Sultan Buton, sebagai bekal kehidupan. Di dalam sumber seperti itulah kami mendapatkan struktur ingatan kolektif dan *the body of knowledge* masa lampau Buton. Mutiara terpendam berupa konsep yang saya peroleh adalah ungkapan “labu rope labu wana.”

“LABU ROPE LABU WANA”: PERJUMPAAN SEJARAH DALAM POLA SEKUTU-SETERU

Labu rope labu wana merupakan metafora yang kami anggap tepat merepresentasikan “perjumpaan sejarah” dalam konteks ini antara Buton dan VOC/Belanda. Seperti telah disebutkan, metafora itu terdapat dalam *kabanti*, suatu syair panjang karya Abdul Ganiyu (pertengahan abad ke-19) yang menjadi bacaan populer pada zamannya di Kesultanan Buton.

Secara harafiah *labu rope* berarti “berlabuh haluan” dan *labu wana*





berarti “berlabuh buritan.” Ungkapan tersebut menggambarkan suatu kondisi sebuah perahu yang telah dengan “selamat dan aman” dapat berlabuh. Sebelum itu, ia terombang-ambing oleh hantaman ombak dan badai yang diwujudkan dalam bentuk ekspansi Gowa dari arah *rope* (haluan) dan Ternate dari arah *wana* (buritan). Ambisi kedua kerajaan tersebut untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Buton dihentikan oleh bantuan VOC pada akhir abad ke-17. Sebaliknya, VOC memperoleh kemudahan dalam berlayar dan berdagang di wilayah Buton. Inilah bentuk persekutuan keduanya.

Ancaman terus-menerus secara fisik terhadap Buton terutama datang dari Gowa. Setelah beberapa kali serangan armada Sultan Hasanuddin yang berpuncak pada 1655, telah dipatahkan armada Speelman. Bantuan VOC untuk Buton dalam menghadapi musuhnya telah diatur di dalam kontrak yang ditandatangani pada 1613. Kesultanan Buton menyebutnya sebagai *kontarati awwalina* (kontrak yang awal) dan selalu dijadikan acuan dalam melakukan persekutuannya dengan VOC. Pada prinsipnya VOC akan membantu Buton menghadapi musuhnya, sebaliknya VOC diberikan hak untuk berdagang rempah-rempah dan budak.

Sudah menjadi ketentuan bahwa setiap sultan Buton yang baru diangkat harus memegang teguh *kontarati awwalina*. Dalam perkembangannya bahkan terjadi penambahan pasal dalam kontrak yang diperbarui. Kontrak berikut yang dianggap lebih menunjukkan keuntungan VOC adalah kontrak pada 1667. Dominasi VOC dan Ternate tampak dalam hal pengangkatan sultan Buton yang harus mendapatkan persetujuan atau setidaknya memberitahukan kepada keduanya.

Dalam perjalanan, persekutuan Buton dan VOC tidak selalu berjalan mulus. Meskipun perjumpaan sejarah dan budaya telah mengikat tali persekutuan yang erat namun tidak berarti tanpa masalah dan konflik dalam bentuk perseteruan. Dinamika pun terjadi dalam arti pasang-surut hubungan itu. Ternyata tidak semua sultan mau meneguhkan kontrak-



kontrak sebelumnya. Peristiwa dalam sejarah berpotensi mengubah struktur yang telah mapan. Suatu perompakan kapal VOC *Rust en Werk* di perairan Baubau pada 1752 yang dilakukan oleh seorang petualang berasal dari Eropa bernama Frans Fransz menjadi pemicu konflik dan perang antara Buton dan VOC.

Dalam peristiwa perompakan kapal itu, Sultan Himayatuddin (memerintah 1750–52) seharusnya membantu VOC. Sikapnya bukan saja telah membiarkan peristiwa terjadi tetapi malahan mendukung perompakan. VOC menganggap tindakan sultan merupakan pembangkangan. VOC segera mengajukan tuntutan ganti rugi berupa penyerahan seribu budak dari Buton. Pemakzulan Himayatuddin yang diganti dengan Sakiyatuddin sebagai cara agar hukuman tak dijatuhkan ternyata tidak berhasil. VOC mengetahui bahwa peran Himayatuddin masih besar dalam turut mengendalikan kekuasaan. Sampai pada saat pembayaran ganti rugi tidak dipenuhi, maka VOC melancarkan ekspedisi militer ke Buton pada 13 Februari 1755.

Adalah menarik bahwa VOC menyebut ekspedisi militernya dengan istilah perang “... *waar de jongst oorlog expeditie naar Bouton onder het gezag van den te Macassar militerende Captain Reijswieber*” (ANRI Arsip Makasar No. 73, 1755–56).

Ekspedisi militer dapat dilihat sebagai “perjumpaan sejarah” dalam arti kekerasan. Ada tiga versi pandangan yang dapat diajukan berkaitan dengan ekspedisi militer tersebut. Pertama, dari sudut pandang VOC, ekspedisi itu sudah merupakan hal yang wajar terjadi yakni sebagai bentuk “penghukuman” terhadap Buton karena tidak menepati janji sebagai sekutu. Kedua, dari pihak Kesultanan Buton sendiri memiliki rasa bersalah. Ketiga, terdapat makna heroisme atau setidaknya patriotisme, sebagai bentuk pembelaan atas negeri berdaulat yang diserang musuh. Kelompok ini adalah yang menginginkan agar Himayatuddin diangkat kembali sebagai sultan. Alasan mereka adalah karena Buton memerlukan tokoh yang kuat dan tegas menghadapi VOC.



Hingga pengujung abad ke-18 Buton tidak menghadapi musuh dari luar secara berarti. Jadi benar-benar sebagai perahu sudah dalam posisi “labu rope labu wana.” Secara konseptual “labu rope labu wana” merupakan ide yang otentik dari masyarakat maritim di Nusantara dalam hal ini Buton. Bahkan merupakan konsep yang bermakna karena merupakan pembentukan kesadaran tentang ruang atau lingkungan strategis. Istilah “haluan” dan “buritan” menjadi penanda masyarakat bahari yang menjadikan perahu sebagai simbol negara dan bagi kehidupannya.

Akibat perang, Buton mengalami kekacauan. Buton sebelum dan Buton sesudah mengalami kekacauan ditandai oleh “batas” atau “tonggak” sebagai disebut *zamani kaheruna walanda* artinya “zaman huru-hara Belanda” yakni sebuah peristiwa yang terjadi pada 1755. Sesudah tonggak itulah tercapai masa atau kondisi *labu rope labu wana*. Atau dapat dikatakan bahwa sesudah zaman huru-hara itu maka telah amanlah kondisi kesultanan Buton yang disimbolkan dengan perahu: maka telah berlabuh haluan dan berlabuh buritan. *Labu rope labu wana* mengungkap ‘semangat zaman’ dan penanda batas periode yang dibentuk oleh peristiwa. Dalam kaitan ini dua dunia pandangan yang bersekutu sekaligus bernuansa seteru telah menghasilkan “perjumpaan budaya.”

Hal yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa ternyata banyak ‘pulau sejarah’ dalam arti pengetahuan atau ingatan sejarah di kepulauan yang belum terungkap. Anggapan keliru bahwa setiap persekutuan kerajaan Nusantara dengan VOC Belanda merupakan ikatan abadi dan berjalan mulus hanya akan menunjukkan ketidakpahaman kita terhadap ‘pulau-pulau sejarah’.

Secara metodologis dalam arti perumusan konsep untuk menangkap kenyataan historis di negeri ini sulit dibayangkan untuk melepaskan kondisi geografis sebagai acuan atau titik tolak melihat kenyataan historis itu. Pulau sejarah atau pulau di dalam sejarah (Sahlins 1985 dan Edmond 2003) memang benar-benar suatu kehidupan masyarakat yang merupakan bahan kajian yang menarik bagi sejarah maritim.

SALING MENDEKATNYA SEJARAH DAN ANTROPOLOGI

Apa yang disebut baru kalau kita berbicara tentang historiografi? Apakah teori, metodologi, pendekatan dengan peralatan konsep, tema, aspek atau ranah kajian, sumber (data) dan atau pertanyaan baru?

Pada dasarnya sejarah memiliki dua hakikat yakni sebagai anggota ilmu sosial dan termasuk humaniora. Kecenderungan ke arah ilmu sosial dengan eksplanasi dan atau ke ranah humaniora dengan interpretasi. Bagaimanapun sejarah adalah tentang fakta yang bermakna yang perlu diperhatikan bukan hanya sejarawan, yang merasa berhak memberikan makna, tetapi sejarawan berempati terhadap masyarakat yang memberikan makna terhadap sejarahnya. Di sinilah diperlukan pendekatan antropologi, ilmu yang menginterpretasi simbol melalui interpretasi yang diberikan masyarakat terhadap kebudayaannya.

Hubungan sejarah dan antropologi dapat digambarkan begini. Sejarawan bertolak dari masa lampau untuk memahami kekinian, sebaliknya antropolog bertolak dari kekinian yang memerlukan perspektif masa lampau. Antropolog lebih spesifik lagi dalam hal memerlukan sejarah untuk memahami tindakan sosial yang dimaknai oleh karena adanya transformasi nilai-nilai yang diperoleh dari masa lampau (Rudyansyah 2009). Bagi antropolog, sejarah bukan dalam arti sebagai *history* tetapi sebagai arti *historicity* atau kesejarahan. Jika sejarawan berpegang pada peristiwa dengan kronologi yang ketat, antropolog tidak berkepentingan terhadap aspek temporal dalam arti kronologis, tetapi lebih pada makna dari peristiwa yang entah kapan terjadi.

Apabila sejarawan menganggap antropologi sebagai ilmu yang mengkaji mengenai mitos, sebaliknya sejarawan dianggap menciptakan mitos masa kini. Apakah melalui rekonstruksi dari fakta yang dilakukan sejarawan dapat memenuhi tuntutan Ranke yang mengatakan “*wie es eigentlich gewesen is*” (menunjukkan apa yang sesungguhnya terjadi)? Perdebatan kemudian adalah apakah sejarah sebagai pengetahuan yang



objektif dapat dipertahankan merupakan agenda yang menarik dalam diskusi.

Sejarawan memerlukan antropologi terutama apabila hendak menulis sejarah masyarakat yang didukung oleh sumber historiografi tradisional atau yang sama sekali tak didukung oleh sumber tertulis. Dalam pengertian sejarah yang paling umum dimengerti mengenai sejarah adalah sejarah yang dikomunikasikan secara lisan (*orally communicated history*). Dengan kata lain sejarah dari masyarakat dengan sumber kelisanan. Menurut Jan Vansina, dalam kaitan ini tradisi lisan (adalah) sebagai sejarah.

Dalam kaitan mendekatkan sejarah dan antropologi maka pendekatan atau metode dan penulisan etnografi menjadi penting. Kini malahan antropologiawan mulai merintis (kembali) untuk menggunakan sejarah atau kesejarahan sebagai pendekatan kajian mereka. Suatu gejala yang tampak dalam kurun 1970-an dan 80-an ketika sejarawan menoleh ke antropologi untuk mendapatkan inspirasi teoretik dan metodologi, beberapa antropologiawan khususnya Sahlins mendekati sejarah. Konsekuensi keterlibatan antropologi dengan sejarah adalah munculnya minat antropologiawan pada persoalan *historical change* atau perubahan sejarah. Orientasi seperti ini jarang dijumpai di kalangan antropologi sendiri mengingat pengaruh kuat strukturalisme, apakah Levi Strauss, seperti pada tulisan awal Pierre Bourdieu, atau model linguistik dari aplikasi semiotik ke kebudayaan seperti Clifford Geertz (lihat Sahlins dalam Spiegel 2005:111).

Di Tanah Air, antropolog seperti Tony Rudyansyah, seorang murid Sahlins di Universitas Chicago, menulis disertasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang “Lanskap Budaya Kekuasaan pada Masyarakat Buton: Satu Kajian Mengenai Historitas dan Tindakan” (2007), kemudian diterbitkan dengan judul *Kekuasaan, Sejarah dan Tindakan* (2009). Selain itu, saat tulisan ini dibuat, sebuah disertasi antropologi—juga di fakultas yang sama— mengenai peristiwa konflik

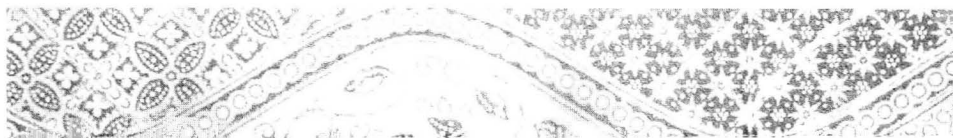
sosial di Sampit, Kalimantan, dengan topik “Mengenang Sampit: Kajian dengan Pendekatan Sejarah” sedang dipersiapkan.

Lalu bagaimana sejarawan seharusnya menoleh ke antropologi untuk memanfaatkan pendekatan atau cara kerja etnografi dalam mengembangkan kajiannya?



DAFTAR PUSTAKA

- Edmond, Rod dan Vanessa Smith (ed.) (2003), *Islands in History and Representation*. London: Routledge.
- Lapian, A. B. (1987), "Orang Laut, Raja Laut, Bajak Laut: Studi Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX," Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- (1992), "Sejarah Nusantara Sejarah Bahari," Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- (2010), *For Better or Worst: Collected Essays on Indonesia-Dutch Encounters*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Niemeijer, Hendrik E. (2004), "Seas of History: The History of the Seas," *Itinerario*, Vol. XXXVIII, No. 1 (7–15).
- Rudyansjah, Tony (2009), "Lanskap Budaya Kekuasaan pada Masyarakat Buton: Satu Kajian mengenai Historitas dan Tindakan," Disertasi Universitas Indonesia.
- Sahlins, Marshall (1985), *Islands of History*. Chicago: Chicago University Press.
- (2005), "Individual Experience and Cultural Order," dalam Gabrielle M. Spiegel (ed.), *Practicing History: New Directions in Historical Writing After the Linguistic Turn*. New York: Routledge.
- Windschuttle, Keith (ed.) (2006), *The Killing of History: How Literacy Critics and Social Theorists are Murdering Our Past*. San Francisco: Encounters Book.
- Zuhdi, Susanto (2006), "Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia," Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- (2010), *Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton yang Terabaikan*. Jakarta: Rajagrafindo.



Pendekatan Hukum dalam Penulisan Sejarah

HARTO JUWONO

Pada akhir 2010 Kota Yogyakarta dilanda aksi massa. Aksi itu dipicu oleh rencana menerbitkan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya terkait dengan pemilihan atau penetapan gubernur dan wakil gubernur sebagai kepala daerah. Opini dukungan dan penolakan terhadap persoalan tersebut, yang mengaburkan aspek lain dalam UU ini, muncul. Sebagian besar opini, termasuk tanggapan dan pandangan para ahli dan ilmuwan tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat, sebaliknya justru mempertajam perdebatan (*Suara Karya*, 13 Januari 2011).

Yang menarik, perdebatan tersebut terjadi dengan perbedaan sudut pandang dan, lebih parah lagi, kepentingan. Hampir semua pandangan yang dilontarkan melihat dari sudut pandang politik, sejarah, dan pemerintahan yang didasari oleh analisis masing-masing disiplin ilmu. Kajian dari disiplin ilmu tersebut akhirnya tidak membawa solusi. Salah satu alasan dari stagnasi ini adalah penempatan persoalan pada konteks yang tepat, yaitu disiplin ilmu hukum khususnya hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Disiplin ilmu hukum tidak banyak digunakan dalam menganalisis perkembangan dan permasalahan yang terjadi seputar UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KAJIAN “LEGAL HISTORY”

Persoalan tersebut hanya merupakan salah satu dari banyak masalah hukum yang terkait dengan perkembangan masa lalu. Di antara persoalan lainnya adalah kasus agraria, perbatasan wilayah, keputusan peradilan, dasar legalitas dalam proses atau fondasi suatu institusi, dan

sebagainya yang melibatkan dua disiplin ilmu yaitu sejarah dan hukum. Dalam hal ini muncul pertanyaan mengapa kedua bidang ilmu ini belum banyak melakukan sinergi untuk menjawab persoalan yang bisa ditemukan solusinya dari pendekatan multidisiplin ini.

Kajian yang mempertemukan keduanya adalah sejarah hukum atau *legal history*. Sementara ini kajian *legal history* justru lebih banyak ditekuni di kalangan para ahli dan akademisi disiplin ilmu hukum, setidaknya dibandingkan dengan para sejarawan. Dari hasil penelusuran asal-usul cabang ilmu ini, *legal history* lebih banyak ditemukan di kawasan negara-negara Anglo-Saxon dibandingkan di kawasan Kontinental atau daratan Eropa. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari kenyataan pada awal perkembangan bidang kajian tersebut, yang bersumber pada *common law* (Seipp dalam Gordon 1992: 62).¹

Di negara-negara Anglo-Saxon, khususnya Inggris, *common law* merupakan suatu bidang ilmu yang menjadikan adat dan tradisi budaya suatu bangsa sebagai objeknya. Akan tetapi fokus kajian tersebut bukan hanya terbatas pada adat sebagai suatu perangkat atau kumpulan nilai-nilai budaya suatu etnis, melainkan meluas dengan mencakup penerapan nilai-nilai tersebut dalam suatu sistem sosial yang akhirnya tumbuh sebagai aturan mengikat dengan disertai sanksi. Bertolak dari perkembangan tersebut, para ahli hukum Inggris menjadikan *common law* sebagai suatu fondasi bagi pengembangan sistem hukum. Mengingat perkembangan ini berlangsung dalam suatu kurun waktu, proses itu tidak bisa terlepas dari konteks kronologis yang menjadi bidang kajian historis. Dengan demikian, *common law* menjadi titik tolak bagi kajian ilmu hukum dan ilmu sejarah-antropologis di negara-negara Anglo-Saxon, yang akhirnya menjadi fondasi bagi bidang kajian *legal history* (Simson 1987: 359).²

Sementara itu di negara-negara Kontinental, perkembangan seperti

1 Di Inggris sendiri, pembakuan *common law* baru dilakukan pada tahun 1600.

2 Keterkaitan antara *common law* dan *legal history* tidak bisa dilepaskan dari *legal tradition* di negara-negara Anglo Saxon.



disebutkan tidak terjadi. Salah satu contoh adalah Negeri Belanda. Ketika orang-orang Belanda menegakkan kekuasaan di Indonesia, saat itu bernama Hindia Timur Belanda sebagai suatu koloni, para ahli hukum Belanda mencoba meneliti sistem nilai budaya dan adat tradisi di tanah jajahannya. Hasil penelitian mereka kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan penentuan kebijakan politik pemerintah kolonial, di samping juga dirangkum sebagai suatu kajian ilmiah. Selanjutnya, materi kajian tersebut diterbitkan dengan nama *Adatrecht* (Burns 2004: 13).³

Penggunaan istilah *adatrecht* yang dikenal di kalangan para praktisi dan ilmuwan hukum Belanda membuktikan bahwa dalam khazanah kosakata bahasa Belanda, istilah *adat* tidak memiliki padan kata. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman para ahli hukum Belanda tentang nilai-nilai tradisi yang dianggap oleh mereka sebagai adat penduduk koloni merupakan sesuatu yang tidak pernah dikenal di Eropa, khususnya di Negeri Belanda. Kondisi tersebut jelas sangat berbeda dibandingkan rezim kolonial Inggris di tanah koloni mereka yang mencoba menerapkan *common law* Anglo-Saxon, atau setidaknya menggunakannya sebagai *frame of reference* ketika menghadapi sistem nilai dan adat tradisi masyarakat jajahannya.

Kekosongan dalam kajian ilmu hukum adat kolonial Belanda tersebut menjadi penyebab sulitnya bidang kajian *legal history* tumbuh dan berkembang di tanah jajahannya. Sejumlah karya yang diterbitkan oleh para ahli hukum seperti Van Vollenhoven, Resink, Logemann, Ter Haar dan lain-lain lebih banyak menempatkan fokus dan metodologi mereka sebagai kajian hukum daripada sejarah murni. Paradigma yang digunakan oleh para ahli ini lebih dibatasi oleh kaidah-kaidah yang berkembang dalam ilmu hukum dan hasil penelitian mereka menjadi khasanah kepustakaan disiplin ilmu hukum. Tentu saja hal itu tidak bisa disalahkan sebagai suatu ketimpangan, mengingat penelitian mereka tidak terlepas dari kepentingan

3 Van Vollenhoven sebenarnya telah mencoba merintis untuk mengaitkan kajian *adatrecht* dengan *legal history*, tetapi tampaknya upaya ini menjadi kabur dengan lebih banyaknya kajian tentang peraturan hukum kolonial (*colonial legislation*).

penguasa kolonial masa itu terhadap tanah jajahannya dan penduduknya.

Dalam penulisan sejarah Indonesia, bidang kajian *legal history* belum banyak ditemukan. Sejumlah karya yang dijumpai sebagai hasil penelitian atau kajian ilmiah, baik di kalangan akademisi maupun ilmuwan profesional, khususnya yang menghasilkan karya-karya sejarah hukum berasal dari para ilmuwan hukum. Dengan menggunakan metodologi ilmu hukum untuk menganalisis data masa lalu, proses rekonstruksi yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diharapkan sebagai suatu karya kajian oleh sejarawan, yang selayaknya disebut *legal history*. Karya-karya dari para ilmuwan hukum ini lebih tepat disebut sebagai *history of law*.

Perbedaan yang besar terletak pada fokus yang diberikan oleh masing-masing. Dalam *history of law*, tekanan analisis diberikan pada produk suatu bentuk perundangan yang dihasilkan oleh suatu lembaga yang memiliki keabsahan. Sejumlah produk hukum tersebut diletakkan dalam konteks rentang waktu (periodisasi) tertentu dan ditelusuri keterkaitan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Prioritas utama diberikan pada sebab-sebab terjadinya perubahan pada produk hukum itu dari waktu ke waktu.

The history of law involves far more than a mere accounts of the laws that have actually passed. Its most important province is to disclose that causes that lead to the changes in the law; and at a period when the great changes in the law of this important subject are evidently impending, and their nature can to a great extent be almost anticipated, any history of the law on the subject would be incomplete which did not notice the causes of movement which made such change inevitable (Filanson 1870: 151).

[Sejarah hukum mencakup jauh lebih banyak daripada hanya penjelasan produk hukum yang telah disahkan. Bidanganya yang terpenting adalah mengungkapkan sebab-sebab yang mengarah pada perubahan dalam hukum; dan pada suatu periode ketika perubahan besar dalam hukum dari subjek yang penting ini jelas terjadi, dan sifat mereka sejauh ini hampir bisa diduga, suatu sejarah hukum tentang subjek itu tidak akan lengkap apabila tidak memperhatikan sebab-sebab pergerakan yang menciptakan perubahan ini].

Dengan demikian *history of law* memiliki dua objek yaitu produk hukum dan penyebab perubahannya. Sementara itu prosedur pembuatan



produk hukum, yang tentu saja mencakup asas legalitas baik pelaku, lembaga yang mewadahi maupun cara kerja yang menciptakan perubahan pada produk dan kemudian juga penerapannya, termasuk juga dampaknya pada masyarakat penerimanya, tidak termasuk dalam *history of law*.

Legal history mencakup bidang kajian yang lebih luas daripada *history of law*. Sesuai dengan perkembangannya yang dimulai dari aktivitas para ilmuwan hukum untuk mempelajari kembali proses kemunculan hukum Romawi dan dampak-dampaknya dalam penerapannya pada masyarakat Eropa pada Abad Pertengahan, ada tuntutan bagi kajian khusus yang lebih luas bukan hanya atas produk hukum dan perubahannya. Dalam mencari solusi bagi persoalan ini, para ilmuwan hukum melibatkan sejarawan untuk merekonstruksi proses pembuatan peraturan hukum yang mengikat dan merekonstruksi penerapan dari peraturan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Sebagai akibatnya hasil rekonstruksi yang kemudian digunakan sebagai dasar kajian *legal history* merupakan perpaduan pertama kali antara ilmu hukum dan ilmu sejarah. Sejak itu, bidang kajian *legal history* bukan hanya terbatas pada produk peraturan melainkan juga meliputi proses pembuatan perundangan, konteks yang melingkupinya sampai pada penerapan peraturan itu yang berdampak pada perubahan di kalangan masyarakat sebagai subjek hukum (Schrage dan Heutger 2006: 402–3).

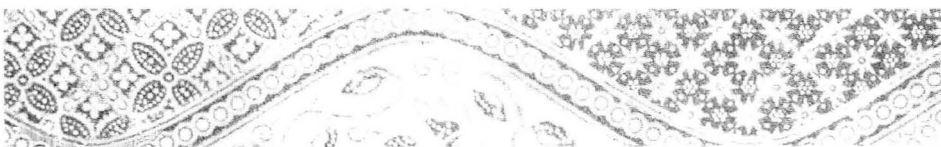
PENDEKATAN HUKUM DALAM REKONSTRUKSI SEJARAH

Dengan adanya keterlibatan sejarawan merumuskan konsep *legal history*, bidang kajian ini tidak lagi didominasi oleh ilmuwan dari disiplin ilmu hukum. Sejarawan bisa ikut berperan untuk menerapkan metodologinya dan penguasaan datanya dalam rangka melakukan rekonstruksi bagi suatu objek peristiwa masa lalu, yang terletak dalam konteks kajian ilmu hukum. Keterlibatan ilmu sejarah dalam pengembangan *legal history* lebih lanjut bukan hanya memberikan dimensi historis pada bidang kajian ini,

melainkan juga memperluas aspek yang dicakup di dalamnya. Jika *history of law* lebih terbatas fokusnya pada sejarah terjadinya produk hukum dan perubahannya, *legal history* mencakup jauh lebih luas dengan melibatkan objek kajian ilmu lain khususnya ilmu sosial yang menggunakan perubahan sosial masyarakat sebagai objeknya. Sejarah bisa menjadikan penghubung antara kajian hukum dan ilmu sosial melalui pendekatannya dari masa lampau.

Akan tetapi perkembangan kajian *legal history* sendiri juga membawa pengaruh pada bidang kajian sejarah, terutama bagi sejarawan yang mencoba merekonstruksi suatu peristiwa yang terletak dalam konteks disiplin ilmu hukum. Pengaruh ini terutama muncul dengan peluang penggunaan pendekatan yang diambil dari ilmu hukum untuk membantu sejarawan menganalisis perubahan yang terjadi dalam lingkup *legal history*. Dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum, sejarawan akan tertolong dalam mengarahkan fokusnya pada objek yang dihadapinya. Berbeda dengan ahli sejarah hukum yang berlatar belakang disiplin ilmu hukum dengan objeknya produk hukum, sejarawan lebih melihat dimensi yang luas dengan mencakup objek hukum, proses perubahan hukum dan juga konteks terjadinya perubahan tersebut.

Dalam disiplin ilmu hukum terdapat sejumlah metodologi yang biasanya digunakan untuk menyusun suatu karya penelitian hukum. Di antara metodologi tersebut, metodologi normatif merupakan pendekatan yang bisa digunakan oleh sejarawan untuk membantu merekonstruksi peristiwa sejarah masa lalu, khususnya dalam konteks *legal history*. Sesuai dengan istilah itu, metodologi normative menekankan pada kajian terhadap sejumlah peraturan yang dibuat dalam rentang waktu tertentu. Hal ini bertolak dari pandangan bahwa peraturan yang dibuat mengandung norma hukum dalam pengertian *doctrinal*. Dengan mempelajari dan menganalisis norma-norma yang terkandung dari serangkaian peraturan yang dikeluarkan ini, tujuan metodologi normatif adalah untuk menemukan adanya suatu



benang merah dari makna peraturan dan sifatnya, yang akan membentuk pola baru. Dari pola yang digali itu, metodologi ini bisa merancang bersama dengan asumsi-asumsi hukum suatu teori baru (Ginting 2010: 20).

Dalam penerapannya metodologi normatif mengamati proses pembuatan peraturan, perubahan yang perlu dilakukan terhadap peraturan itu dan penggantiannya dengan peraturan lain. Latar belakang kebutuhan mengubah suatu peraturan, proses dan langkah-langkah yang diambil untuk mengubahnya sampai dihasilkannya suatu peraturan baru menjadi fokus utama dari metodologi normative. Di samping itu juga faktor penyebab utama terjadinya perubahan akan digunakan sebagai titik tolak bagi penelusuran kembali legalitas yang berlaku, baik pada prosedur maupun pada produk hukum yang dihasilkannya.⁴

Dengan melihat kinerja dan fokus metodologi normatif tersebut, kajian *legal history* bisa menelusuri kembali terjadinya proses perubahan struktural yang terjadi dalam seperangkat peraturan secara kronologis dalam periodisasi masa lalu. Hal ini membuka peluang bagi metodologi atau pendekatan yang digunakan oleh sejarawan dalam melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah. Sejumlah pendekatan dalam penulisan sejarah bisa dipadukan dengan metodologi normatif disiplin ilmu hukum untuk menghasilkan suatu karya sejarah, baik dalam lingkup *legal history* maupun di luar lingkup tersebut.

Setidaknya ada dua pendekatan oleh sejarah yang bisa digunakan untuk merekonstruksi karya sejarah melalui perpaduan dengan metodologi normatif, yaitu struktural dan naratif. Dalam pendekatan struktural, fokus utama adalah perubahan struktur sosial yang terjadi selama kurun waktu tertentu. Mengingat perubahan tersebut hanya bisa diketahui dalam jangka waktu lama, pendekatan struktural selalu menekankan adanya keterlibatan

4 Dengan demikian metodologi hukum normatif sering disebut sebagai penelitian inventarisasi hukum positif, karena menggunakan data dokumen sebagai sumbernya. Ada tiga tujuan yang dicapai oleh metodologi ini yaitu seleksi norma hukum, koleksi norma hukum, dan pembakuan norma tersebut menjadi produk hukum. Lihat Adi 2004: 92.

atau pengaruh dari kondisi yang berlangsung di sekitar objek sejarahnya. Terutama dalam hal ini kondisi alam tempat terjadinya peristiwa tersebut dianggap ikut berperan di samping interaksi yang terjadi antara komponen di dalam struktur dengan unsur-unsur di luar struktur (Hoed 2003: 3–4).⁵

Pendekatan ini kemudian berkembang dalam sejarah yang dipelopori oleh Fernand Braudel. Dalam pandangan Braudel, yang mengembangkan analisis diakronis bagi rekonstruksi sejarah, menegaskan bahwa perubahan struktural dalam sejarah berlangsung dalam rentang waktu yang berbeda-beda tetapi terangkum dalam satuan waktu tertentu (sinkronis dalam analisis diakronis). Dengan menggunakan analisis diakronis ini, perubahan atau perkembangan sejarah bisa dijelaskan lebih mendalam dengan menggali faktor yang paling berpengaruh pada peristiwa itu. Dengan demikian sejarawan akan mampu menemukan penyebab utama terjadinya perubahan struktural.⁶

Jika metodologi struktural menekankan pada perubahan struktur sosial, pendekatan naratif menekankan pada terjadinya suatu proses perkembangan. Perkembangan ini berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan sering dibagi dalam periodisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah bukan hanya untuk mengungkapkan bagaimana proses peristiwa itu berlangsung, melainkan juga untuk menggali makna yang terkandung di balik perkembangannya (*meaning that which result from their connecting together via narrative logic*) (Lemon 2003: 316).

Pendekatan naratif atau yang sering disebut narativisme memiliki tiga ciri. Pertama, pendekatan ini memandang peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya.

5 Pendekatan struktural ini muncul dalam konteks dominasi strukturalisme di kalangan ilmuwan. Setidaknya ada tujuh ciri dalam analisis struktural yang menjadi dasar analisisnya. Interaksi antara komponen dalam struktur dan di luar struktur merupakan salah satu ciri yang disebut sebagai komutasi.

6 Braudel membaginya dalam tiga lapis periode: jangka panjang (*longue durée*) yang disebut zaman geosejarah dengan interaksi manusia dan alam, jangka menengah yang sering disebut masa konjunktur (*histoire conjuncturelle*), dan jangka pendek yang ditandai dengan peristiwa dan individu. Lihat Burke 2003: 228.



Kedua, keterkaitan antarperistiwa ini memiliki hubungan kausalitas. Yang dimaksudkan di sini adalah peristiwa yang satu merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya, dan akan menjadi penyebab peristiwa selanjutnya. Dengan mengamati rangkaian tersebut, akan ditemukan suatu perulangan yang dapat dikembangkan menjadi pola perubahan. Ketiga, semua interaksi peristiwa ini berlangsung dalam konteks waktu yang berangkai (kronologis). Batasan temporal sangat penting dalam pendekatan naratif, karena pada akhirnya pendekatan ini ingin mengungkap pola apa yang muncul dalam periode tertentu perkembangan peristiwa tersebut (Lemon 2003: 299–300).

Dengan melihat kedua pendekatan tersebut, metodologi normatif dari bidang kajian hukum bisa dipadukan. Meskipun berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, ketiganya mempunyai persamaan dalam dua hal. Pertama, batasan temporal menjadi faktor yang dominan. Pendekatan struktural dengan analisis diakronis dan pendekatan naratif dengan aspek kronologisnya bisa dipadukan dengan tekanan rentang waktu dalam metodologi normative ilmu hukum. Dengan demikian, rekonstruksi yang dilakukan oleh sejarawan akan mampu menghubungkan peristiwa dari masa lalu, masa kini dan bisa digunakan untuk memberikan makna bagi peristiwa di masa mendatang (Suryo 2009: 13).⁷

Kedua, dari ketiga metodologi tersebut bisa ditemukan hukum baru dari analisis terhadap pola yang berulang terjadi berdasarkan rangkaian peristiwa. Pengelompokan peristiwa yang sama bisa menghasilkan pola umum dalam rekonstruksi sejarah dan hal ini bisa dianggap sebagai suatu makna dari peristiwa sejarah. Demikian juga dalam ilmu hukum, metodologi normatif mengangkat makna yang terkandung di balik perkembangan dan perubahan produk hukum dalam suatu rangkaian saling terkait.

⁷Djoko Suryo melontarkan pendekatan baru dalam penulisan sejarah Indonesia yang disebut pendekatan visioner. Pendekatan ini disampaikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan dalam eksplanasi sejarah dan kebutuhan adanya metode baru dalam penulisan sejarah.

PERAN SEJARAH HUKUM DALAM HISTORIOGRAFI INDONESIA

Dalam konteks penulisan sejarah di Indonesia, peran sejarah hukum atau ilmu hukum masih sangat terbatas. Setidaknya ada dua bidang yang menunjukkan kekosongan ini. Pertama secara metodologi, dan kedua secara materi.

Di bidang metodologi, belum banyak sejarawan Indonesia yang menggunakan pendekatan dari ilmu hukum, atau setidaknya menggunakan teori hukum untuk menganalisis peristiwa. Seperti yang telah disampaikan di awal tulisan ini, bahkan belum banyak sejarawan yang mampu membedakan antara tema hukum dan disiplin ilmu lainnya. Salah satu penyebab dari kondisi ini adalah keterkaitan erat antara penulisan sejarah dengan pendekatan ilmu sosial, sementara ilmu hukum sendiri sering menganggap dirinya berada di luar lingkup ilmu sosial.⁸

Jarak yang terbentang antara disiplin ilmu sejarah dan disiplin ilmu hukum menimbulkan keterasingan bagi sejarawan, dan mendorong para ilmuwan hukum untuk merekonstruksi sejarahnya menurut metodologi mereka sendiri, yang kemudian menghasilkan *legal history*. Karya-karya yang dihasilkan di kalangan ilmuwan hukum dalam konteks *legal history* lebih banyak didominasi oleh bentuk kajian hukum karena metodologi yang digunakan berasal dari metodologi sepihak, yaitu ilmu hukum. Dengan demikian karya *legal history* khususnya yang diterbitkan di Indonesia terbatas pada penggunaan oleh kalangan ilmuwan hukum, sementara itu karya tersebut akan berbeda ketika ditulis oleh sejarawan.⁹

8 Para praktisi dan ilmuwan hukum sering menganggap bahwa kajian mereka berbeda dengan ilmu sosial mengingat objek yang mereka teliti bukan manusia atau masyarakat, melainkan produk hukum dan sistem yang melingkupinya. Bahkan kalangan ahli hukum melangkah lebih jauh dengan menegaskan perbedaan bahasa dan interpretasi yang mereka gunakan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain.

9 Terdapat sejumlah karya sejarah yang ditulis sebagai hasil penelitian oleh ilmuwan hukum seperti Sugiastuti (2003), dan Devi (2004).



Karya-karya tersebut lebih menekankan pada penulisan peristiwa sejarah oleh ahli hukum dan disusun dari sudut pandang hukum. Dengan demikian makna yang diambil dari berlangsungnya peristiwa akan lebih banyak dikaitkan dengan perubahan hukum dan perkembangan yang terjadi di bidang kajian hukum meskipun mengambil batasan temporal historis. Bidang ini bisa dilakukan oleh sejarawan dengan melakukan rekonstruksi, mengingat data yang digunakan menunjukkan kesamaan.

Kedua, dari aspek materi, ketimpangan juga tampak khususnya dalam historiografi Indonesia. Peristiwa hukum belum mendapatkan tempat yang selayaknya pada banyak kajian sejarah yang ditulis oleh sejarawan. Sebaliknya dominasi aspek politik tampak jelas dan menyisihkan aspek-aspek lain, termasuk aspek hukum. Sementara itu ada suatu peristiwa penting dalam bidang hukum yang menimbulkan perubahan besar dan bahkan mempengaruhi perkembangan sejarah masyarakat Indonesia hingga sekarang dan mungkin di masa mendatang. Peristiwa itu adalah penggunaan dan penerapan hukum positif Barat dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia sejak pertengahan abad ke-19.

Sebagai akibat dari pergolakan politik di Paris pada Februari 1848 yang dipicu oleh tuntutan mahasiswa bagi kehidupan politik yang lebih liberal, ide-ide liberalisme segera menyebar ke sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda. Sebagai akibat dari tuntutan politik tersebut, sistem pemerintahan Belanda mengalami perubahan dalam arti menguatnya peran rakyat yang disalurkan lewat Parlemen (*Staten General*). Sejak bulan Desember 1948, Raja Belanda menyetujui pelimpahan kewenangan lebih luas kepada Parlemen sementara sebagai eksekutif, ia diwakili oleh Menteri Koloni. Pelimpahan kewenangan itu disahkan melalui Konstitusi Liberal yang diundangkan pada akhir 1848 (Secker 2004: 271).

Sebagai konsekuensi dari terbentuknya Kementrian Koloni, peran koloni dalam sistem pemerintahan negara induk menjadi penting. Jika sebelumnya koloni hanya dianggap sebagai sarana eksploitasi tanpa

memiliki suara hukum di pusat pemerintahan, kini koloni dianggap sebagai suatu kesatuan politik yang diberi kewenangan untuk mengatur sendiri pelaksanaan instruksi dari pusat karena status koloni bukan merupakan wilayah asing melainkan bagian tak terpisahkan dari negara induk (*nu het moederland niet gezegd kan worden tegenover Indië een vreemd land te zijn*). Pandangan itu dilontarkan oleh Dewan Negara (*Raad van de Staat*) dalam sidang tahunan 1845 (Resink 1959: 2). Akan tetapi sebagai akibatnya, kesamaan sistem nilai antara negara induk dan koloni harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya kesulitan dalam penerapannya. Bertolak dari situ peluang bagi penerapan sistem hukum positif Barat yang dianut di negara induk atas tanah koloni menjadi terbuka. Hal ini kemudian terwujud ketika Parlemen Belanda menundangkan *Regeerings Reglement* pada tanggal 2 September 1854 sebagai Undang-Undang pertama bagi Hindia Belanda (Cordes 2008: 5).¹⁰

Dengan diberlakukannya UU tersebut, semua peraturan pemerintah yang dibuat sejak saat itu mengacu pada *Regeerings Reglement* sebagai produk hukum tertinggi di Hindia Belanda. Ketentuan-ketentuan yang dimuat di dalamnya digunakan sebagai pedoman yang mendasari kebijakan pemerintah kolonial Belanda, sehingga rezim kolonial tidak lagi harus merujuk pada peraturan yang berlaku di negara induk atau menunggu instruksi dari Den Haag dalam menentukan langkah-langkah politiknya.

Namun demikian perubahan yang lebih luas terjadi di samping lingkup hukum dan perundangan. Ketentuan yang dimuat di dalamnya, seperti status kekawulaan Hindia Belanda dan keyakinannya (de Bosch Kemper 2008: 289),¹¹ membawa dampak yang luas. Perbedaan status antara orang Eropa, Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) dan pribumi (*Inlander*) mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam sistem nilai baik di

¹⁰ Undang-Undang ini dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indië* tahun 1855 Nomor 2.

¹¹ Khususnya dalam hal ini faktor agama Kristen masih dipertimbangkan karena memberikan banyak dukungan suara bagi perolehan kursi di parlemen Belanda. Hal itu juga mempengaruhi kebijakan para pejabat kolonial di tanah koloni.



bidang sosial, politik maupun ekonomi. Ketentuan ini kemudian menyebar pada aspek-aspek lain seperti pemukiman, penyebaran penduduk, hak kepemilikan, hubungan sosial, dan kebijakan negara terhadap masing-masing kelompok penduduk tersebut yang didasarkan pada kekawulaan (*onderdanschap*) (Nieuwenhuys 1995: 27).

Bersumber dari hal tersebut, bisa diketahui bahwa peran hukum sangat besar dalam historiografi Indonesia. Perubahan yang dipicu oleh perkembangan sistem hukum di atas menimbulkan dinamika yang tinggi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di samping itu pemahaman perkembangan hukum dalam arti sempit masih berlaku di kalangan para ilmuwan, yaitu identifikasi hukum dengan institusinya. Hal ini terbukti bahwa istilah hukum selalu berkonotasi pada lembaga peradilan atau institusi hukum lainnya. Semenara itu di dalam ilmu hukum sendiri telah terjadi perluasan dan pemisahan bidang kajian, seperti hukum agraria, hukum ekonomi, hukum dagang dan sebagainya. Dengan demikian lingkup kajian sejarah hukum (*legal history*) bisa meluas sehingga meliputi sektor keuangan, perbankan, perusahaan, agraria, dan bahkan aktivitas sosial, di luar lembaga peradilan sendiri (Simangunsong dan Kartika 2005: 4).

PENUTUP

Kajian hukum atau pendekatan dari disiplin ilmu hukum dalam penulisan karya sejarah merupakan sesuatu yang perlu dirintis dan dilakukan. Kajian ini memberikan wacana baru dan menawarkan solusi baru bagi sejumlah persoalan yang tidak bisa dijawab oleh disiplin ilmu lain terutama dari kalangan ilmu sosial. Bagi ilmu sejarah sendiri, pendekatan hukum akan memperkaya khazanah analisis ilmiah yang diperlukan dalam rangka merekonstruksi peristiwa masa lalu dan menarik kesimpulan yang benar.

Perpaduan pendekatan interdisipliner antara ilmu sejarah dan ilmu hukum sejauh ini telah dihasilkan lewat bidang kajian *legal history*. Akan tetapi mengingat posisi cabang ilmu ini berada di antara keduanya, *legal history* tampaknya tidak bisa hanya diartikan sebagai perpaduan keduanya. Sebaliknya *legal history* memerlukan metodologi atau pendekatan tersendiri untuk menjadikannya sebagai disiplin ilmu yang mampu memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi baik oleh ilmu hukum maupun ilmu sejarah.

Di Indonesia, kajian *legal history* masih sangat sedikit khususnya di kalangan sejarawan. Bidang yang dirintis oleh para ahli hukum ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para sejarawan untuk diletakkan dalam konteks rekonstruksi sejarah sesuai dengan metode ilmu sejarah. Namun demikian, hal itu hanya bisa tercapai ketika pemahaman sejarawan Indonesia tentang pendekatan dan kajian ilmu hukum diperluas, bukan hanya terbatas pada materi perkembangan hukum melainkan juga pada metodologi yang berlaku dalam ilmu hukum. Dengan pemahaman tentang metodologi, tentu saja mencakup juga teori, dari ilmu hukum, diharapkan sejarawan lebih mampu memahami konteks peristiwa masa lalu yang menjadi objek kajiannya dan membuktikan sumbangannya bagi permasalahan masa kini dan masa mendatang.

Sementara itu, perkembangan yang semakin kompleks dan luas pada disiplin ilmu hukum memaksanya menghadapi kenyataan bahwa kajian sejarah menjadi penting. Hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masa lalu baik masyarakat yang menjadi wabah maupun produk dan proses hukumnya. Dalam hal ini hukum memerlukan ilmu sejarah yang mempunyai kemampuan dalam bentuk metode untuk menganalisis dan mengungkapkannya kembali sebagai suatu karya rekonstruksi yang kritis. Dengan perpaduan keduanya, diharapkan karya *legal history* yang dihasilkan bukan hanya memiliki bobot ilmiah melainkan juga nilai legalitas yang mendasarinya.



DAFTAR ACUAN

- Adi, Rianto (2004), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- de Bosch Kemper, Jeronimo (2008), *Geschiedenis van Nederland na 1830*. London: Bibliolife.
- Burke, Peter (2003), *Sejarah dan Teori Sosial*, terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burns, Peter (2004), *The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Cordes, Jan Willem Cornelis (2008), *De privaatrechtelijke toestand der Vreemde Oosterlingen op Java en Madoera*. London: Bibliolife.
- Devi, Keizernia (2004), *Poenale Sanctie: Studi tentang Globalisasi Ekonomi dan Perubahan Hukum di Sumatra Timur 1870–1950*. Medan: USU Press.
- Filanson, William Francis (1870), *The History of Law of Tenures Land in England and Ireland with Partic-ular Reference to Inheritable Tenancy*. London: Steven & Haynes.
- Ginting, Elvira Dewi (2010), *Analisis Hukum mengenai Peraturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kait-annya dengan Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press.
- Hoed, Benny Hoedoro (2003), "Strukturalisme di Prancis dan Pengaruhnya di Indonesia," dalam Irzanti Sutanto dan Ari Anggari Harapan (ed.), *Prancis dan Kita: Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Lemon, M. C. (2003), *Philosophy of History*. London: Routledge.
- Nieuwenhuys, Eva Constant (1995), *Regulering van buitendlandse investering in Indonesië en China: Een rechtvergelijkheid onderzoek naar de toelating en oprichting van buitenlandsche ondernemingen*. Appeldoorn: Makklu.

- Resink, G. J. (1959), "Conflicttenrecht van de Nederland Indische staat in internationaalrechtelijke setting," *BKI*, Jilid 115.
- Schrage, Eltjo dan Viola Heutger (2006), "Legal History and Comparative Law," dalam J. M. Smith (ed.), *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Secker, Inneke (2004), "Representatives in Dutch People: The Smooth Transformation of Parliamentary Elite in Consociational Democracy 1849–1988," dalam Heinrich Best dan Maurizio Cotta (ed.), *Parliamentary Representative in Europe 1848–2000: Legislative Recruitment*. New York: Oxford University Press.
- Seipp, David J. (1992), "The Structure of English Common Law in the Seventeenth Century," dalam William M. Gordon (ed.), *Legal History in the Making: Proceedings of the Ninth British Legal History Conference*. Ohio: The Hambledon Press.
- Simangunsong, Advendi dan Elsa Kartika (2005), *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi II. Jakarta: Grasindo.
- Simson, Alfred William (1987), *Legal Theory and Legal History: Essays on Common Law*. London: The Hambledon Press.
- Sujiastuti, Natasya Yunita (2003), *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, Studi mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial 1870–1942*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suryo, Djoko (2009), *Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Historiografi Indonesia Modern*. Yogya-karta: STPN Press.



Eksplorasi Sejarah Lingkungan sebagai Teritori dan Perspektif Baru Kajian Sejarah Indonesia

NAWIYANTO
UNIVERSITAS JEMBER

Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Selain menyediakan dataran untuk berpijak, lingkungan juga menyediakan manusia dengan berbagai sumber daya alam untuk menopang kehidupannya. Akan tetapi hubungan antara manusia dengan lingkungan pada masa lampau sering tidak tergambarkan dalam kisah dan analisis sejarah. Historiografi yang dominan lebih terkonsentrasi pada isu-isu politik, dan belakangan juga menyangkut aspek sosial-ekonomi. Historiografi politik memfokus pada isu-isu seperti perkembangan dinasti kekuasaan, konflik internal dan eksternal pusat-pusat politik, peperangan antara kekuatan kolonial dan kelompok perlawanan, gerakan kebangsaan, dekolonisasi dan separatisme. Historiografi ekonomi banyak menyoroti aspek-aspek seperti perkembangan eksploitasi kolonial, dinamika historis ekonomi lokal, peranan komunitas-komunitas bisnis, dan perdagangan maritim.

Kontras dengan perkembangan tersebut, sejarah lingkungan belum muncul sebagai *trend* penting di Indonesia. Kajian sejarah lingkungan masih terdengar asing bagi banyak orang, termasuk di kalangan pemerhati sejarah. Memang kajian sejarah lingkungan sebagai disiplin yang otonom belum baru berkembang sekitar 1970-an ketika dilema global sedang berlangsung dan gerakan environmentalis populer mendapatkan momentumnya (Worster 1988). Kajian ini termasuk sebagai bagian dari gerakan pembaruan dalam mengkaji masa lampau. Mereka yang tergabung dalam gerakan pembaruan historiografis ini hendak membangun kesadaran

baru bahwa pengalaman manusia tidak terpisah dari realitas lingkungan alam. Manusia bukan spesies super-natural (di atas lingkungan alam) dan dampak lingkungan perbuatan mereka pada masa lampau dapat diabaikan. Manusia telah lama hidup di atas planet bumi, namun sebagaimana tampak dalam kajian sejarah konvensional, manusia belum sepenuhnya menyadari menjadi bagian dari planet. Sejarah lingkungan bermaksud mengakhiri sikap naif semacam itu (Worster 1988). Oleh karena itu, untuk memberi gambaran umum dirasa perlu di sini dikemukakan apakah yang dimaksud dengan sejarah lingkungan.

DEFINISI

Ada beberapa definisi mengenai sejarah lingkungan. Menurut Boomgaard (1997: 2), sejarah lingkungan adalah "a study of mutual relations and influences between humans and their environment in the past" (kajian mengenai hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia dengan lingkungan mereka pada masa lampau). Dimensi "masa lampau" perlu mendapat penekanan karena di sinilah ditemukan perbedaan pokok antara sejarah lingkungan dengan disiplin lain khususnya ekologi yang tidak secara eksplisit menempatkan kajian yang dilakukan dalam perspektif waktu. Sejarah selalu melihat persoalan yang dikaji dalam perspektif waktu atau temporal.

Definisi lain sejarah lingkungan dikemukakan oleh Richard Grove. Menurut Grove (1988), sejarah lingkungan adalah "the historically documented part of the story of the life and death . . . of societies and of specie . . . in terms of their relationship with the world around them" atau Bagian kisah yang terdokumentasi secara historis mengenai kehidupan dan kematian . . . masyarakat dan spesies . . . dalam hubungan mereka dengan dunia sekitar mereka]. Lagi-lagi definisi ini menekankan hubungan antara manusia (masyarakat) dengan lingkungan mereka. Namun definisi ini agak lebih



luas dibanding apa yang disampaikan Boomgaard karena melingkup juga spesies, artinya nonmanusia atau hewan termasuk di dalamnya.

Menarik pula melihat definisi sejarah lingkungan yang diberikan sejarawan lingkungan dari Amerika Serikat, Roderick Nash. Ia menyatakan sejarah lingkungan sebagai "the total contact of man with his habitat and includes everything from urban design to wilderness preservation" atau kontak total manusia dengan habitatnya dan meliputi segala sesuatu dari desain perkotaan hingga alam liar (Nash 1970).

Dalam difinisi tersebut juga digarisbawahi hubungan manusia dengan lingkungannya. Perkotaan adalah salah satu contoh ekstrem mengenai bagaimana manusia menjadi agen yang sangat kuat dalam mengubah wajah lingkungan alam. Bahkan dalam konteks Amerika dan berbagai tempat lain, alam liar pun termasuk terbentuk atau tepatnya dapat dilestarikan karena "campur tangan manusia" juga. Maksudnya, alam liar memang sengaja dipertahankan dalam bentuknya yang asli karena manusia menginginkannya tetap dalam kondisi demikian atas dasar beberapa pertimbangan dan kepentingan baik estetis maupun ilmiah. Perlu diingat di sini tentang adanya peraturan-peraturan yang diformulasi pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan alam sebagaimana aslinya melalui pencagar-alaman dan pembentukan berbagai taman nasional.

WILAYAH GARAPAN DAN PERMASALAHAN

Permasalahan yang termasuk dalam bidang garapan sejarah lingkungan meliputi aspek yang cukup luas. Menurut Worster (1988), ada tiga wilayah utama penyelidikan sejarah lingkungan. Ketiga wilayah ini meliputi (1) lingkungan alam pada masa lampau, (2) moda produksi, dan (3) persepsi, ideologi dan nilai-nilai kultural.

Dalam wilayah penyelidikan pertama sejarah lingkungan berurusan



dengan lingkungan fisik pada masa lampau. Dalam hal ini berbagai konsep kimia tanah dengan siklus karbon dan nitrogen, kadar keasaman kaitannya dengan garam-garaman dan kegiatan pertanian dapat menambah perangkat kuat untuk mempelajari munculnya berbagai peradaban. Bidang garap lainnya termasuk perubahan atau kerusakan ekosistem dalam hubungannya dengan berbiak atau punahnya populasi spesies termasuk manusia sebagai bagian dari ekosistem. Dalam wilayah penyelidikan kedua, menyangkut moda produksi, sejarah lingkungan membahas kegiatan sosio-ekonomis dalam persentuhannya dengan lingkungan dengan melihat hubungan-hubungan dan kelembagaan sosial yang muncul, berbagai cara orang menghasilkan barang-barang dari sumberdaya alam.

Wilayah penelitian ketiga lebih abstrak dibanding dua wilayah terdahulu. Secara umum sering dibedakan antara nilai-nilai Barat dan nilai-nilai Timur. Nilai-nilai Barat atas lingkungan tumbuh dengan akar tradisi Yunani dan Kristen. Dalam tradisi Kristen manusia mempunyai kedudukan lebih tinggi atau berada di atas lingkungan/alam. Manusia ditahankan untuk menguasai alam dan mempunyai kebebasan melakukan apapun terhadap alam karena diyakini alam semesta diciptakan untuk melayani kepentingan manusia. Manusia adalah satu-satunya makhluk terpenting dunia ini. Lingkungan alam sendiri dipandang tidak mempunyai nilai intrinsik. Pengaruh Yunani terhadap pandangan Barat secara khusus direpresentasikan oleh Aristoteles, yang memandang alam secara hirarkhis. Makhluk dengan kemampuan penalaran rendah ada dan diciptakan untuk melayani ciptaan yang berkemampuan penalaran lebih tinggi. Pandangan demikian sangat dominan setidaknya selama 18 abad pertama (Singer 1991). Namun belakangan muncul tafsir baru mengenai kedudukan manusia terhadap alam. Penguasaan manusia atas lingkungan alam dalam tradisi Kristen tidak semata-mata dalam kerangka eksploitasi (*dominion*), melainkan juga dalam kerangka melindungi dan merawat (*stewardship*) atas nama Tuhan. Sementara itu, nilai-nilai timur sering dikaitkan dengan hubungan yang





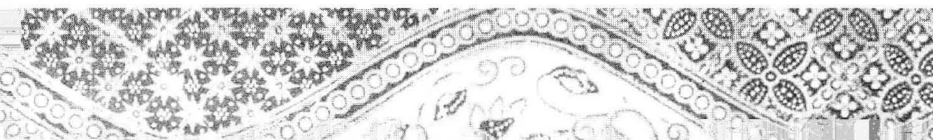
harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Pendirian demikian tidak tanpa masalah. Ada pertanyaan, misalnya, apakah keharmonisan dengan alam tercipta karena memang penduduk Asia mempunyai mentalitas yang menjunjung nilai-nilai ini ataukah karena absennya perkembangan ekonomi.

BEBERAPA PERSPEKTIF SEJARAH LINGKUNGAN

Secara umum historiografi lingkungan yang telah berkembang mengelompok dalam empat perspektif utama. Keempat perspektif ini adalah (1) permasalahan lingkungan, (2) perubahan lingkungan, (3) pandangan tentang lingkungan, dan (4) politik lingkungan. Berikut ini dipaparkan masing-masing kelompok perspektif meski harus tetap diakui bahwa pengelompokan ini tidak bersifat ketat dan kaku.

Permasalahan Lingkungan

Kehadiran manusia dengan berbagai aktivitasnya tidak dapat disangkal memunculkan permasalahan terhadap lingkungan. Kajian Clapp (1994) merupakan ilustrasi penting penulisan sejarah lingkungan dengan perspektif permasalahan lingkungan di negara maju. Dengan menjadikan revolusi industri di Inggris sebagai titik tolak, Clapp melakukan analisis secara mendalam persoalan pencemaran yang diakibatkan berbagai kegiatan industri dan pengurasan kekayaan sumberdaya alam yang diakibatkan revolusi industri. Clapp lebih jauh juga mendiskusikan berbagai bentuk tanggapan yang muncul dalam rangka memecahkan problema yang dihadapi dan mengawetkan lingkungan dari kerusakan akibat berkembangnya kegiatan industri. Clapp menunjukan dengan jelas bahwa dikeluarkannya regulasi politik merupakan bagian integral dalam rangka pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh revolusi industri, selain berbagai bentuk inovasi teknologi, serta pencarian alternatif sumberdaya



alam yang baru.

Di Indonesia sejarah lingkungan dengan orientasi problem diilustrasikan misalnya Nagtegaal (1995). Tulisan ini membahas polusi perkotaan di Jawa pada periode kolonial awal. Melalui tulisan ini Nagtegaal memperlihatkan bahwa beragam polusi baik mikrobial maupun artisanal telah menjadi masalah di berbagai perkotaan Jawa sebelum pertengahan abad ke-19. Ditegaskan pula bahwa dampak polusi bagi kehidupan masyarakat kota di Jawa cukup signifikan dan tidak jauh berbeda dibanding dengan perkotaan di negara-negara Barat.

Sebuah karya sejarah lingkungan yang mendalam mengenai problem banjir dan pengendaliannya dipublikasikan oleh Restu Gunawan (2010). Gunawan memperlihatkan bahwa perkembangan spasial kota Jakarta secara pesat dibarengi dengan hilangnya lokasi penampungan air sehingga memperbesar aliran permukaan dan ancaman banjir. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan mengalami kegagalan karena terlalu terlambatnya pembangunan infrastruktur yang diperlukan karena kurangnya dana. Ketika berhasil direalisasikan, program pengendalian sudah tidak memadai lagi karena ancaman banjir sudah jauh lebih besar skala dan intensitasnya. Realisasi program pengendalian yang tidak tepat waktu membuat target pemecahan tidak tercapai atau dengan kata lain program tersebut *too little* dan *too late* dibanding banjir yang semakin parah.

Perubahan Lingkungan

Dengan berbagai aktivitas kehidupan yang dilakukan, manusia menjadi agen yang mengubah lingkungan. Salah satu contoh penulisan sejarah lingkungan dengan tema pokok perubahan lingkungan misalnya diberikan oleh Young (2000). Studi ini mengupas perubahan jangka panjang yang membentuk wajah lingkungan Australia kontemporer. Young



berargumentasi bahwa pendirian pemukiman Eropa telah mengubah secara drastis lanskap Austrasia dan berdampak pada lingkungan. Menguji berbagai bentuk keterlibatan manusia dengan lingkungan dari pemanfaatan sumberdaya hingga konservasi, Young menyimpulkan bahwa pertanian merupakan elemen paling menonjol yang membentuk lanskap Australia dan mendorong perdebatan luas mengenai penggunaan tanah dan isu-isu strategi kesinambungan (*sustainable strategy issues*) khususnya melawan kepentingan konservasi dan kehutanan.

Juga menjadi bagian perspektif perubahan lingkungan adalah studi mengenai dampak manusia terhadap lingkungan. Studi klasik yang menyoroti peranan manusia sebagai pengubah lingkungan dihasilkan ahli geografi Marsh (1864). Sekitar seratus tahun kemudian oleh David Lowenthal diterbitkan ulang dengan judul *Man and Nature* (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1965). Juga dalam kategori ini adalah karya bunga rampai yang disunting oleh Thomas (1955).

Sejumlah artikel dapat dimasukkan dalam kategori ini. Mengenai Asia Tenggara masa prakolonial, Reid (1995: 93–109) mengemukakan bahwa perkembangan penanaman padi sawah, pertanian komersial, dan eksploitasi hutan menyebabkan hilangnya penutup hutan dan habitat mamalia besar. Artikel yang sama muncul dalam kumpulan tulisan yang disunting Richard H. Groves, Vinita Damodaran, dan Satpal Sangwan, *Nature and the Orient* (Delhi: Oxford University Press, 1998: 106–26). Tulisan Jeya Kathirithamby-Wells (1997: 215–60) mengkaji dampak kegiatan manusia pada populasi mamalia di Malaysia yang dinilainya begitu radikal.

Kajian yang lebih komprehensif baru-baru ini juga muncul dengan fokus wilayah Indonesia terutama luar Jawa. Karya Knapen (2001) mengenai sejarah lingkungan Kalimantan Tenggara. Karya ini menggarisbawahi dampak manusia terhadap lingkungan dan proses adaptasi mereka terhadap tekanan lingkungan yang meningkat saat daya

dukung lingkungan terlampaui. Karya penting lainnya dihasilkan oleh Henley (2005). Karya tentang Sulawesi Utara dan Tengah ini membahas secara mendalam kompleks kaitan yang melibatkan proses demografis dan ekonomis dengan realitas lingkungan yang berubah. Karya Nawiyanto (2009) merupakan contoh kajian tentang perubahan lingkungan. Dengan memanfaatkan teori *frontier*, kajian ini menunjukkan dalam waktu satu abad wilayah Besuki mengalami perubahan lingkungan secara radikal seiring dengan proses demografis dan sosio-ekonomis sehingga menjadi mirip Jawa.

Singkatnya, perspektif perubahan dalam historiografi lingkungan menekankan manusia sebagai agen atau penggerak perubahan lingkungan pada masa lampau. Peranan manusia diterjemahkan dalam realitas fisik alamiah melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dari kegiatan pertanian, eksploitasi sumberdaya alam (hutan, tambang, perairan), hutan produksi monokultur, dan pembangunan pemukiman, industri, hingga terbentuknya lanskap perkotaan yang secara radikal mengubah lingkungan fisik alamiah. Di dalam perspektif ini dapat dikaji pula berbagai respons dalam bentuk adaptasi terhadap realitas lingkungan yang telah berubah.

Pandangan dan Nilai-nilai Kultural terhadap Lingkungan

Sejarah lingkungan juga telah ditelaah dari perspektif pandangan dan nilai-nilai kultural. Pandangan manusia terhadap lingkungan secara sederhana sering dibedakan atas dua golongan, yakni pandangan imanen (holistik) dan transeden. Menurut pandangan holistik, manusia mempunyai kemampuan memisahkan diri dari lingkungan biofisik di sekitarnya, seperti hewan, tumbuhan, sungai dan gunung dan unsur-unsur lainnya. Namun demikian manusia masih menganggap dan menempatkan diri sebagai bagian integral dalam konteks hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik. Sebaliknya, menurut pandangan transenden, manusia terpisah dari lingkungannya meskipun secara ekologis merupakan bagian dari lingkungannya. Dalam pandangan ini, lingkungan hanya dianggap sebagai



sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besarnya dengan kemampuan yang ada demi kepentingan manusia. Pandangan transenden pada umumnya berkembang luas di masyarakat Barat, sedangkan pandangan imanen hidup dan berkembang di masyarakat Timur yang masih “tradisional” (Iskandar 2001:11).

Salah satu contoh klasik tentang pandangan masyarakat Timur terhadap lingkungan adalah kumpulan tulisan oleh Stott (1978). Karya ini merupakan eksplorasi nilai-nilai dan persepsi kultural pribumi tentang lingkungan dan permasalahannya dalam konteks negara-negara Asia Selatan dan Tenggara. Dalam imajinasi populer, sering kali dibedakan adanya dua nilai dan sikap kultural terhadap alam: destruktif dan harmonis. Dikotomi ini biasanya diterapkan dalam konteks perbandingan Masyarakat Timur dan Masyarakat Barat, sebagaimana dikemukakan dalam tulisan To Thi Anh (1985:72–5), serta dalam Glacken (1970:127–42).

Validitas dikotomi perbedaan pandangan dan sikap terhadap alam antara masyarakat Barat dan Timur belum lama ini dipertanyakan oleh Ole Bruun dan Arne Kalland, yang memandang bahwa model semacam ini lebih merupakan mitos ketimbang relitas. Menunjuk pada kemunculan permasalahan lingkungan di antara masyarakat Asia yang konon berorientasi pada alam, Bruun dan Kalland (1995) menegaskan sifat partikularistik dan pragmatis manusia terhadap alam ketimbang diatur nilai-nilai normatif.

Sejumlah studi merepresentasikan pendekatan dengan orientasi sikap dan nilai kultural tetapi dengan penekanan berbeda, yakni pada proses pembentukan kesadaran lingkungan. Dua contoh penting pendekatan semacam ini diberikan oleh Richard Groves (1995) dan (1998). Groves berargumen bahwa pemikiran lingkungan di antara negara-negara kolonial tumbuh sejajar dengan ekspansi kolonial. Ekspansi ini membawa mereka pada kesadaran baru tentang lingkungan yang berbeda di antara negara-negara jajahan dan memperkuat kepekaan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan kolonialisme seperti degradasi hutan, erosi tanah, dan kepunahan spesies adalah krusial.

Politik Lingkungan

Politik lingkungan merupakan bidang kajian ilmu politik yang diarahkan pada masalah lingkungan. Kajian politik lingkungan berurusan dengan dampak isu-isu lingkungan terhadap berbagai proses politik di tingkat formal, serta peran negara dalam manajemen lingkungan. Menurut Bryant dan Bailey (2001), politik lingkungan hanya mempertimbangkan lingkungan sejauh aspek-aspek lingkungan masuk dan mempengaruhi proses politik formal. Politik lingkungan mengupas proses dinamis dengan mana kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan tertentu membawa isu-isu lingkungan ke dalam agenda politik, proses perumusan kebijakan dan langkah-langkah konservasi.

Ilustrasi perspektif ini diberikan oleh Robert Cribb dalam karyanya yang mengkaji politik perlindungan lingkungan alam dan satwa di Indonesia. Cribb (1997: 379–408) mengemukakan bahwa bukti-bukti ilmiah, kepentingan nonekonomi dan generasi mendatang, mempengaruhi perumusan kebijakan konservasi, dan dalam prosesnya tekanan luar memainkan peranan penting.

Juga termasuk dalam model ini adalah tulisan Cribb yang lain (1990: 1123–35) dan Anton Lucas (1998: 189–209). Tulisan Cribb mengupas kaitan dinamis antara perkembangan ekonomi, kelompok penekan, dan kontrol birokrasi terhadap polusi, sedangkan tulisan Lucas tentang polusi sungai selama periode Orde Baru, yang memperlihatkan peran aktif kelompok lingkungan dalam menekan pemerintah untuk memberikan berbagai pemecahan atas masalah polusi. Tulisan MacAndrews (1994: 369–80) menunjukkan pemanfaatan isu-isu lingkungan oleh pemerintah Orde Baru dan berbagai kelompok sosial untuk tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Gambaran tentang politik lingkungan masa kontemporer juga dapat disimak dalam karya Aditjondro (2003) yang memaparkan tumbuhnya gerakan lingkungan dan isu lingkungan dalam kaitan dengan dinamika politik Orde Baru, demokratisasi, ekspansi modal asing dan marginalisasi rakyat kecil.



SIGNIFIKANSI, TANTANGAN DAN PROSPEK DI INDONESIA

Memang pembahasan mengenai aspek-aspek lingkungan dalam analisis sejarah sudah dijumpai dalam beberapa karya (Geertz 1963; Van Schaik 1986, 1988; Van der Eng 1996; Hefner, 1999). Meskipun demikian, perlu digarisbawahi di sini bahwa mayoritas studi menempatkan isu-isu lingkungan sebagai unsur pendukung ketimbang fokus utama. Baru dalam dua dasa warsa terakhir ranah kajian sejarah lingkungan Indonesia mulai dijelajahi secara lebih serius. Upaya kearah ini terwujud dalam proyek penelitian sejarah dari Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde (Royal Institute of Linguistics and Anthropology, KITLV), Amsterdam yang dinamai Proyek EDEN (Ecology, Demography, and Economy in Nusantara) mulai 1992.

Sejumlah publikasi mengenai sejarah lingkungan Indonesia dari Proyek EDEN membuka wawasan akan isu-isu menyangkut hubungan manusia-lingkungan di Indonesia. Karya yang disunting Peter Boomgaard, David Henley and Freek Colombijn *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental History of Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 1997) memberi sumbangan berharga ke arah ini. Dari proyek Eden juga telah terbit beberapa monografi penting mengenai sejarah lingkungan. Di antaranya adalah karya Han Knapen, *Forest of Fortune?: The Environmental History of Southeast Borneo, 1600-1880* (Leiden: KITLV Press, 2001) dan karya David Henley, *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930* (Leiden: KITLV Press, 2005). Karya-karya ini membuka wawasan mengenai bagaimana proses demografis dan sosio-ekonomis dikembangkan dan akhirnya mengubah realitas lingkungan di berbagai tempat di luar Jawa selama periode kolonial. Karya Boomgaard *Frontiers of Fear: Tigers and People in the Malay World, 1600-1950* (New Haven: Yale University Press, 2001) menyingkap pandangan mengenai harimau dan hubungan manusia-harimau di Indonesia kolonial dan dunia Melayu.

Pengembangan sejarah lingkungan Indonesia perlu terus didorong khususnya di kalangan ilmuwan domestik. Dalam konteks Indonesia sejarah lingkungan setidaknya mempunyai dua makna strategis. Secara praktis Indonesia merupakan contoh negara dengan permasalahan lingkungan yang kompleks dan kronis. Kajian sejarah lingkungan dapat menawarkan penjelasan atas pertanyaan mengapa persoalan lingkungan hadir atau tidak dijumpai pada masa lampau. Hasil semacam itu dapat dicapai melalui analisis jangka panjang atau dengan membandingkan kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi lingkungan pada masa lampau dan kini. Kesenambungan dan perubahan dalam kekuatan-kekuatan yang bekerja akan dapat menjelaskan muncul atau absennya permasalahan lingkungan. Penggalakan kajian sejarah lingkungan memberikan wawasan yang lebih mendalam atas persoalan lingkungan yang dihadapi pada masa kini dalam rangka mencari pemecahan yang komprehensif. Dari sudut pandang teoretis, penelitian sejarah lingkungan akan memperluas teritori penelitian sejarah melampaui isu-isu sosio-politis baik di tingkat nasional maupun lokal.

Memang ada kendala dalam pengembangan kajian sejarah lingkungan di Indonesia. Pertama, kurangnya pengetahuan ilmiah tentang ekologi membuat kebanyakan sejarawan kurang percaya diri dan tidak mempunyai perlengkapan konseptual yang memadai saat mengeksplorasi ranah kajian sejarah ini. Kedua, sejarawan terbiasa menangani isu-isu yang secara langsung berkaitan dengan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi dan kultural realitas masa lampau. Banyak sejarawan merasa kurang nyaman ketika memfokus pada isu-isu non-manusia. Kesulitan ketiga terkait kurangnya informasi sejarah. Bagian terbesar bahan-bahan sejarah sering berisi informasi yang tidak secara langsung relevan dengan sejarah lingkungan. Dalam keadaan semacam ini, sejarah lingkungan harus bersandar pada informasi yang relevan dalam sumber-sumber sejarah yang belum banyak digali, dan kemampuan mereka melihat secara berbeda



sumber-sumber sejarah yang umumnya digunakan. Sama pentingnya dalam kaitan ini adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber sejarah yang tidak biasa, termasuk lingkungan sebagai dokumen historis sebagaimana dikemukakan Roderick Nash. Termasuk dalam kategori ini misalnya lanskap persawahan, jenis tumbuhan yang ditanam dalam hutan kota atau di pinggiran jalan, kebun pekarangan, bangunan irigasi, jalur kereta api, garis pantai, pelumpuran muara sungai.

Dalam konteks Indonesia, terdapat sumber-sumber berharga bagi penelitian sejarah lingkungan, meliputi baik terbitan resmi maupun organisasi swasta. Diantara bahan-bahan tersebut adalah empat belas volume laporan Komisi Penyelidikan Kemakmuran (*Onderzoek naar de Mindere Welvaart*) khususnya mengenai pertanian, ekonomi desa, irigasi, dan perikanan. Bahan-bahan ini dapat ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Jakarta), Perpustakaan Nasional Australia (Canberra). Bahan berharga lainnya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, adalah laporan Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda (*Verslag over de Burgelijke Openbare Werken*), Pemberitahuan Djawatan Kesehatan Penduduk (*Mededeelingen van den Dienst der Volksgezondheid*), Laporan Tahunan Djawatan Kehutanan (*Verslagen van den Dienst van het Boschwezen*). Sebagian laporan Djawatan Kehutanan berasal dari Perpustakaan Departemen Pertanian (dulu Bibliotheca Bogoriensis) di Bogor dan Institut Tropika Kerajaan (KIT) di Amsterdam.

Sejumlah terbitan organisasi memberikan informasi mengenai soal-soal khusus yang dapat menjadi sumber berharga untuk mengkaji sejarah lingkungan. Laporan organisasi yang dihasilkan oleh Masyarakat Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam (*Verslag van de Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*), menyediakan informasi berharga mengenai isu-isu konservasi. Bahan-bahan ini sebagian besar dikumpulkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Informasi sekitar pertanian sebagian besar dimuat di *Landbouw, De*

Bergcultures (kemudian, *Menara Perkebunan*), *Mededelingen van het Besoekisch Proefstation*, *Pertanian*, and *Teknik Pertanian*. Bahan-bahan ini dapat diakses di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Jakarta), Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Malioboro dan Perpustakaan Pusat Penelitian Tanaman Perkebunan (sebelumnya, *Besoekisch Proefstation*) di Kaliwining, Jember (Jawa Timur).

Terbitan berharga untuk persoalan hutan dan proteksi alam adalah *Tectona* (kemudian *Rimba Indonesia*), *Tropische Natuur* (kemudian, *Penggemar Alam*), *De Indische Jager*, *De Nederlandsch Indische Jager*, dan *Gema Perhutani*. Sebagian dari bahan-bahan rujukan ini dapat ditemukan di Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta). Perpustakaan Pusat Penelitian Tanaman Perkebunan (Jember) dan Perpustakaan Departemen Pertanian (Bogor). *De Indische Jager* dan *De Nederlandsch Indische Jager* dapat diakses di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan KITLV di Leiden, dan Perpustakaan KIT. Sementara itu, sumber berharga untuk soal perikanan adalah *Visserijnieuws* (kemudian *Berita Perikanan*), *Pewarta Oseana*, dan *Terubuk*. Di samping dapat diakses di Perpustakaan Nasional, *Berita Perikanan* dalam bentuk microfiche dapat ditemukan pada Koleksi mikrofilm Perpustakaan Nasional Australia. Edisi *Pewarta Oseana* dan *Terubuk* juga dapat diakses di Perpustakaan Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada.



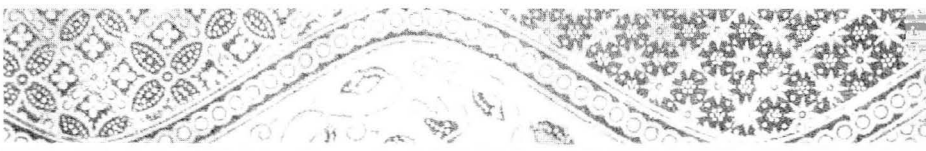
DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George (2003), *Pola-pola Gerakan Lingkungan*. Yogyakarta: Galangpress.
- Boomgaard, Peter, Freek Columbijn, dan David Henley (ed.) (1997), *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental Histories of Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Bruun, Ole dan Arne Kalland (1995), "Images of Nature: An Introduction to the Study of Man-Environment Relations in Asia," dalam Ole Bruun dan Arne Kalland (ed.), *Asian Perceptions of Nature: A Critical Approach*. Surrey: Curzon Press.
- Bryant, L. Raymond dan Sinead Bailey (2001),.. *Third World Political Ecology*. London: Routledge.
- Clapp, B. W. (1994), *An Environmental History of Britain since the Industrial Revolution*. London: Longman.
- Cribb, Robert (1988, "The Politics of Environmental Protection in Indonesia," *Working Paper* No. 48. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- (1990), "The Politics of Pollution Control in Indonesia," *Asian Survey*, 30.
- Cribb, Robert (1997), "Birds of Paradise and Environmental Politics in Colonial Indonesia, 1890-1931," dalam Peter Boomgaard, Freek Columbijn, dan David Henley (ed.), *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental Histories of Indonesia*, Leiden: KITLV Press.
- Geertz, Clifford (1963), *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*, Berkeley: University of California Press.
- Glacken, Clarence J. (1970),.. "Man against Nature: An Outmoded Concept," dalam Harold W. Helfrich (ed.), *The Environmental Crisis: Man's Struggle to Live with Himself*. New Haven: Yale University Press.

- Grove, Richard H. (1995), *Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600-1860*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Grove, Richard H. (1998), *Ecology, Climate and Empire: The Indian Legacy in Global Environmental History, 1400-1940*. Delhi: Oxford University Press.
- Hefner, Robert W. *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, terj. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Henley, David (2005), *Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*. Leiden: KITLV Press.
- Iskandar, Johan (2001), *Budaya Manusia dan Lingkungan: Ekologi Manusia*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kathirithamby-Wells, Jeya (1997), "Human Impact on Large Mammal Populations in Peninsular Malaysia from the Nineteenth to the mid-Twentieth Century," dalam Peter Boomgaard, Freek Colombijn, dan David Henley (ed.), *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental Histories of Indonesia*, Leiden: KITLV Press.
- Knapen, Hans (2001), *Forest of Fortune?: The Environmental History of Southeast Borneo, 1600-1880*. Leiden: KITLV Press.
- Lucas, Anton (1998), "River Pollution and Political Action in Indonesia," dalam Philip Hirsch and Carol Warren (ed.), *The Politics of Environment in Southeast Asia*. London: Routledge, hlm. 189-209.
- MacAndrews, Colin (1994), "Politics of the Environment in Indonesia", *Asian Survey*, 34.
- Marsh, George Perkins (1864), *Man and Nature or Physical Geography as Modified by Human Action*. New York: Charles Scribner, diterbitkan ulang dengan judul, *Man and Nature*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1865.

- Nagtegaal, Luc (1995), "Urban Pollution in Java," dalam P. J. M. Nash, *Issues in Urban Development*. Leiden: CWNS.
- Nash, Roderick (1970), "The State of Environmental History," dalam Herbert J. Bass (ed.), *The State of American History*. Chicago: Quadrangle Book.
- Nawiyanto (2009), *Transforming the Frontier: Environmental Change in a Region of Java: Besuki 1870-1970*. Bantul: Lembah Manah Press.
- Reid, Anthony (1995), "Humans and Forests in Pre-colonial Southeast Asia," *Environment and History*, 1, juga terbit dalam Richard H. Groves, Vinita Damodaran, dan Satpal Sangwan (ed.), *Nature and the Orient*. Delhi: Oxford University Press, 1988.
- Restu Gunawan (2010), *Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa*. Penerbit Buku Kompas.
- Richard, Grove, dkk. (ed.), *Nature and the Orient: The Environmental History of South and Southeast Asia*. Delhi: Oxford University Press, 1998.
- Singer, Peter (1991), "Environmental Values," dalam Ian Marsh (ed.), *The Environmental challenge*. Melbourne: Longman Chesire.
- Stott, P. A. (1978), *Nature and Man in Southeast Asia*. London: School of Oriental and African Studies.
- Thomas, William L. (1955), *Man's Role in Changing the Face of the Earth*. Illinois: University of Chicago Press.
- To Thi Anh (1985), *Nilai Budaya Timur dan Barat*. Jakarta: Gramedia.
- Van der Eng, Pierre (1996), *Agricultural Growth in Indonesia: Productivity Change and Policy Impact since 1880*. Basingstoke: Macmillan.
- Van Schaik, Arthur (1986), *Colonial Control and Peasant Resources in Java: Agricultural Involution Reconsidered*. Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

- Worster, D. (ed.) (1988), "Appendix: Doing Environmental History," dalam D. Worster (ed.), *The End of the Earth: Perspectives on Modern Environment History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Young, Ann R. M. (2000), *Environmental Change in Australia since 1788*. Melbourne: Oxford University Press.



Dinamika Kehidupan Masyarakat Gundagai, Australia, 1840–60 Upaya Mewujudkan Pendekatan Sejarah Total

WARDININGSIH SOERJOHARDJO
UNIVERSITAS INDONESIA

Kota kecil Gundagai yang berpenduduk 4.250 jiwa pada tahun 1981 terletak di distrik Murrumbidgee, New South Wales,¹ Australia. Pada tahun 1830-an distrik tersebut diduduki secara *illegal* oleh kaum pastoralis (peternak). Kota tersebut didirikan di dataran yang rendah, di tepi sungai Murrumbidgee, sehingga sering mengalami bencana banjir.

Adapun nama sungai Murrumbidgee dikatakan merupakan suatu peringatan orang Aborijin, “Mor-unbeed-ja”, yang berarti “suatu banjir besar”,² sedangkan “Gundagai” berasal dari suatu kata dalam bahasa Aborijin “Gundabandobingee”, yang berarti “memotong dengan tomahawk di balik pohon”, yang tampaknya tidak memiliki arti yang jelas, namun beberapa penulis cenderung berpendapat bahwa hal tersebut berhubungan dengan bentuk sungai yang melengkung,³ sementara beberapa arti lain dari “Gundagai” adalah “ke hulu” dan “kokok ayam jago yang memilukan”.⁴ Kenyataannya, karena lokasinya yang terletak di dataran rendah, Gundagai yang terletak di tepi sungai Murrumbidgee, memang seringkali mengalami bencana banjir.

A.Gaunt dalam karyanya *History of Gundagai* berusaha melakukan survey tentang perkembangan Gundagai.⁵ Gaunt membagi sejarah Gundagai dalam dua tahapan, yaitu Kota Tua Gundagai (1829-1852), dan

1 *Australian Bureau of Statistics*, New South Wales Office, Catalogue No. 3209.1 (New Issue)

2 “The Murrumbidgee”, *The Gundagai Independent*, June 26, 1952, Hal. 9

3 A.C. Butcher, *Gundagai: Its History, Verse and Song*, Gundagai Independent Print, 1956, Hal. 5.

4 Ibid.

5 A. Gaunt, *A History of Gundagai*, October 1979, merupakan tesis yang ditulis pada tahun 1944, yang kemudian dipublikasikan oleh Graeme dan Nancy Dixon.

Kota Baru Gundagai (1852-1944). Tahun 1852 dianggap sebagai titik balik dari sejarah Gundagai karena pada tahun tersebut terjadi kehancuran kota yang disebabkan oleh banjir bandang. Tahapan pertama sejarah Gundagai dimulai dengan serangkaian eksplorasi ke pedalaman, termasuk distrik Gundagai, beberapa pemukim awal, kehidupan ekonomi, penjualan lahan pertama, dan beberapa bangunan pertama, sementara tahapan kedua sejarah Gundagai, terbagi dalam tiga babak, yaitu (1) era Gundagai yang dimulai pada tahun 1852 (tragedi banjir terparah di sepanjang abad ke 19, terjadi pada tahun 1852) sampai dengan 1875, yang terdiri dari masa penemuan emas; perampokan; dan banjir tahun 1870; (2) masa perkembangan pertanian dan peternakan; dan (3) pasca tahun 1895, yaitu masa penemuan emas kedua.

Makalah ini membahas dinamika kehidupan keseharian masyarakat Gundagai, Australia, pada pertengahan abad ke 19, dengan menggunakan peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 1852 sebagai pusat lingkaran penelitian. Ini merupakan *a total and coherent snapshot of economic, social, political, and cultural life of a mid-nineteenth century frontier town in Australia* (gambaran total dan terpadu dari kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya sebuah kota pedesaan di Australia pada pertengahan abad 19).

Bagaimanakah proses penelitian yang dialami penulis dalam upaya menemukan tema dan pendekatan yang dipakai di dalam penelitian tersebut? Bagaimanakah proses pengumpulan dan pengaturan sumber-sumber sejarah yang digunakan di dalam penelitian tersebut? Bagaimanakah penulis membahas isu-isu yang muncul di dalam berbagai dokumen serta menghubungkannya dengan tema-tema yang akan dikembangkan? Akhirnya, bagaimanakah penulis menginterpretasikan motif, perasaan, dan ekspresi kesedihan, kemarahan, penghinaan, dan keangkuhan, serta berbagai konsep pemikiran lainnya seperti sekularisme, rasisme, dan lain-lain, di balik kata-kata yang muncul dalam dokumen? Sebuah kesimpulan menutup makalah ini.

PENEMUAN TEMA PENELITIAN DAN PENDEKATAN

The main stimulus in choosing a subject is not a full appreciation of the relevant sources. We can not possibly know all evidence before we start, though we hope to know some of it. The unavoidable starting point must be a deep and genuine interest in some aspect of human life which we believe is significant.

David Dymond⁶

‘Motivasi’ khususnya, sangat penting dalam penulisan sejarah. Sebaiknya kita teliti terlebih dahulu motif kita sebelum kita memulai penjelasan tentang sumber-sumber. Mengapa kita merasa tertarik pada suatu bentuk tertentu dari karya sejarah? Apakah kita tertarik pada peristiwa atau proses sejarah yang bersifat unik, yang terjadi pada suatu masa dan tempat tertentu? Ataupun karena suatu *locality* memiliki dinamika sejarah yang romantik dan tragis, atau revolusioner? Ataupun penemuan seperangkat dokumen yang menarik kemudian memicu kita untuk merajut suatu bentuk sejarah tertentu?⁷

Sebagai seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, dan berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, saya terdorong untuk meneliti nilai-nilai dan sikap budaya masyarakat Australia. Karya A.C. Milner⁸ yang meneliti sikap budaya Malaya pada abad ke 19, membantu penulis untuk memulai penelitian budaya dari suatu kelompok kecil masyarakat Eropa di Australia. Dalam karyanya, Milner dipengaruhi oleh penerapan ‘thick description’⁹ yang diajukan oleh Antropolog Amerika, Clifford Geertz, yaitu suatu deskripsi yang menekankan pentingnya

6 David Dymond, *Writing Local History: A Practical Guide*, Bedford Square Press, London 1982.

7 Wardiningsih Soerjohardjo, “An Outsider’s Approach” dalam The Local History Co-ordination Project, *Locating Australia’s Past: A practical guide to writing local history*, New South Wales University Press, Sydney, 1988, Hal. 29-72.

8 A.C. Milner, *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*, The University of Arizona Press, Tuscon, 1982.

9 Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, Hutchinson and Co.Ltd., London, 1975, Hal. 7.

pemikiran konteks budaya dalam meneliti tindakan manusia. Dalam penelitian tentang dinamika masyarakat Gundagai pada pertengahan abad ke 19 ini, bidang Antropologi yang menelusuri nilai-nilai dan sikap budaya suatu masyarakat juga diterapkan oleh penulis, namun bukan terhadap suatu masyarakat yang masih hidup, melainkan terhadap seperangkat dokumen-dokumen sejarah. Selanjutnya, jiwa kesejarahan penulis tersentuh oleh Mountaillou,¹⁰ sebuah karya cemerlang sejarawan Perancis, Emmanuel Le Roy Ladurie, yang menggunakan deskripsi antropologis dalam penulisan tentang sejarah sebuah desa di bagian barat-daya Perancis pada abad ke 14.

Mountaillou adalah suatu daerah, di mana terdapat pandangan sekelompok penduduk yang bertentangan dengan pandangan ortodok Gereja Katolik Roma (*cathar heresy*) yang terdengar kuat gaungnya pada abad ke 14. Kelompok penentang tersebut ditindas dengan serangkaian interogasi komprehensif dan dijatuhi hukuman oleh Bishop (Uskup) setempat, Jacques Fournier. Catatan tentang interogasi tersebut masih *survive* dan dipublikasikan pada tahun 1965. Hal ini memicu sejarawan Ladurie yang menaruh minat pada antropologi sosial untuk menelaah lebih dalam lagi nilai strategis dan berharga dari sebuah *record of inquisition* tersebut (catatan penyelidikan Gereja atas penindasan terhadap penentang pandangan Gereja Kristen). Ternyata catatan tersebut telah menyentuh Ladurie, tidak hanya untuk meneliti *the cathar heresy*, melainkan juga untuk meneliti sejarah pedesaan Perancis. Ladurie mencatat sekitar 25 orang, yaitu sekitar seperempat dari kelompok tersangka penentang, sekaligus 10 % dari penduduk Mountaillou), diintegrasikan. Catatan interogasi oleh penyidik terhadap para tersangka tersebut diatur kembali oleh Ladurie, dalam bentuk suatu studi tentang masyarakat, sebagaimana yang sering ditulis oleh ahli antropologi. Ia membagi tulisannya dalam dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan budaya material dari Mountaillou, seperti

10 Le Roy Ladurie, E., *Mountaillou: Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324*. Penguin Books, New York, 1970.

bangunan batu tanpa baja, memberi peluang antar tetangga di desa untuk menyelidiki dan mendengar satu sama lain melalui celah lubang dinding bangunan, sementara bagian kedua berkaitan dengan mentalitas orang desa, pandangan mereka tentang waktu dan ruang, masa kanak-kanak dan kematian, seksualitas, Tuhan, dan alam. Ladurie merupakan sejarawan pertama yang menggunakan *inquisition register* untuk merekonstruksi sikap dan kehidupan keseharian.¹¹ Dalam pandangan penulis, *Mountaillou* adalah *a microhistory*, dengan pendekatan *total history*. ‘Sejarah total’ berusaha melingkup hampir seluruh aspek dari interaksi antar manusia dalam suatu masyarakat. Interaksi yang kompleks antara lingkungan hidup, ekonomi, masyarakat, politik, budaya, dan berbagai peristiwa merupakan cirri-ciri dari ‘sejarah total’. Burke menekankan sejarawan ‘sejarah total’ “...always wanted to see things whole, to integrate the economics, the social, the political, and cultural into a ‘total’ history..., the totality of the social”.¹²

Sentuhan kesejarahan *Mountaillou* memicu penulis untuk menerapkan model pendekatan Ladurie tersebut, kemudian diterapkan dalam episode sejarah pedesaan di Australia. Penulis kemudian berpikir, peristiwa unik apakah yang pernah terjadi dalam perkembangan sejarah pedesaan di Australia? Interaksi akademik penulis dengan sejarawan terkemuka Australia sekaligus Kepala Departemen Sejarah, Faculty of Arts – Australian National University (ANU), Professor John N. Molony, mengarahkan penulis untuk mulai melihat Gundagai, khususnya peristiwa banjir bandang yang terjadi pada tahun 1852.

Bencana banjir terbesar di Australia di sepanjang abad ke 19 terjadi pada tahun 1852 di Gundagai, yang menelan hampir 100 korban jiwa. Yang menarik dari peristiwa banjir tersebut, adalah munculnya nama Yarrie, seorang pemuda Aborijin, bersama tiga teman Aborijinnya, yang menjadi

¹¹Peter Burke, *The French Historical Revolution: The Annales Schools, 1929-89*, Polity Press, 1990, Hal. 81-82.

¹²Burke, *Ibid.*, hal. 42.

pahlawan dalam bencana tersebut, dengan menyelamatkan 49 orang kulit putih dari atap-atap rumah dan puncak-puncak pepohonan. Kepahlawanan Yarrrie bersama teman-temannya terekam dalam *Parliamentary Papers* tahun tersebut. Sementara data rinci tentang korban-korban banjir tersebut terekam oleh Gereja, dan tersimpan pada bagian Koleksi Langka – Mitchell Library, Sydney, Australia. Dengan demikian, dokumen-dokumen tersebut merupakan sumber dokumen inti penelitian, di samping berbagai sumber primer lainnya. Sumber dokumen inti tersebut di atas tidak hanya melaporkan tentang nama-nama korban banjir saja, melainkan juga melaporkan tentang properti dan nilai properti yang dimiliki oleh setiap korban dan telah rusak akibat banjir, serta jenis kelamin, usia dan agama (Katolik atau Anglikan) yang dianut para korban. Kini, *ocean of historical sources* (lautan sumber sejarah) berada di hadapan penulis. Bagaimanakah proses penulis mengumpulkan dan mengatur sumber-sumber sejarah hingga tersistematis dan efektif.

PENGUMPULAN DAN PENGATURAN SUMBER

Setiap lokalitas memiliki fenomena sosial dan ekonomi sendiri. Latar belakang pengetahuan karenanya amat penting dalam penulisan sebuah karya sejarah. Hal ini dapat diperoleh dengan membaca sejarah dari periode terkait secara umum dan referensi apa pun yang berkaitan dengan lokalitas terkait. Pengetahuan ini menjadikan kita mampu untuk menentukan apakah peristiwa-peristiwa tertentu merupakan bagian dari tren nasional atautkah secara murni merupakan fenomena lokal. Pendirian sebuah National School di Gundagai pada tahun 1949 misalnya, merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan koloni New South Wales. Namun bencana alam, tragedi banjir tahun 1852, merupakan peristiwa lokal murni yang menarik perhatian seluruh koloni di Australia.

Pada tahap awal dari penelitian, penulis banyak terlibat dalam menggeluti sumber-sumber sekunder, khususnya buku dari A.C. Butcher

yang berjudul *Gundagai: Its History, Verse and Song*.¹³ Hal ini memicu penulis untuk berinteraksi dengan penulisnya, Butcher, seorang akuntan warga Gundagai, pada bulan November 1983. Ia memberi kesempatan pada penulis untuk meneliti sumber-sumber terkait di perpustakaan pribadinya di kota Gundagai. Pada sebuah acara sosial yang diselenggarakan oleh The Gundagai Rotary Club di mana Butcher menjadi presidennya, ia memperkenalkan penulis kepada beberapa warga Gundagai, khususnya yang mempunyai leluhur yang mengalami banjir tahun 1852. Penulis akhirnya mendapatkan seorang nara sumber, W.W. Horsley, yang mempunyai leluhur Frederick Horsley yang diselamatkan oleh seorang Aborijin, Yarrie, selama banjir¹⁴.

Banyak dokumen penting tentang Gundagai dari abad ke-19 ditemukan dalam penelitian lapangan yang pertama. Warga lokal tidak hanya memberi penulis dengan dokumen, tetapi juga informasi tentang sumber-sumber lainnya. Bantuan yang sangat berharga diberikan kepada penulis dari berbagai warga yang secara radikal berbeda status sosialnya seperti para petani kaya, pendeta Anglikan, pastor Katolik, pensiunan, jurnalis, kalangan bisnis, pegawai negeri, guru-guru sekolah, pemilik-pemilik toko, dan seorang sopir bus. Pada penelitian lapangan selanjutnya yang dilakukan pada tahun 1984, Gundagai High School meminta penulis untuk memberi ceramah tentang masyarakat dan budaya Indonesia bagi pelajar yang mengambil pengkhususan Kajian Asia. Hal ini memberi kesempatan bagi penulis untuk menyumbangkan pengetahuan tentang Indonesia kepada masyarakat Australia. Dengan demikian terbangunlah hubungan yang baik (*good rapor*) antara penulis dengan warga Gundagai. Upaya membangun hubungan yang baik tersebut sangatlah penting, khususnya bagi orang asing seperti penulis, yang akan melakukan penelitian tentang suatu masyarakat yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda.

13 A.C. Butcher, *Gundagai: Its History, Verse and Song*, Gundagai Independent Print, Gundagai, 1956

14Foto Frederick Horsley diberikan oleh Ny. Emily Horsley, menantu dari W.W. Horsley pada tahun 1984 di Sydney.

Sumber-sumber apa sajakah yang ditemukan dan diteliti? Penelitian budaya tentang Gundagai di abad 19 mengharuskan adanya semua jenis sumber, misalnya dokumen resmi, statistik, *Government Gazettes*, dokumen Parlemen, *Colonial Secretary Despatches*, dokumen hukum/pengadilan (*Bench Books of Magistrated and Police Records*), manuskrip, surat kabar/majalah sejamin, berbagai peta dari Departemen Pertanahan, berbagai *Parish Registers* (catatan pembaptisan, perkawinan, dan pemakaman), dan sajak-sajak sejamin, untuk merekonstruksi nilai-nilai dan sikap budaya dalam keseharian masyarakat Gundagai yang kemudian diinterupsi oleh bencana banjir di tahun 1852. Bagaimanakah respon masyarakat Gundagai di satu pihak, dan di lain pihak, respon Pemerintah Kolonial yang berpusat di kota Sydney terhadap bencana banjir tersebut? Respon-respon tersebut akan menyumbangkan dinamika suatu karya sejarah, tergantung gaya penulisan seorang penulis.

Colonial Secretary despatches yang tersimpan di Kantor Arsip New South Wales, memiliki berbagai macam koresponden antara *Colonial Secretary* dan penduduk Gundagai. Koresponden tersebut membahas banjir besar tahun 1852, pertukaran lahan dari lahan rendah ke lahan yang lebih tinggi, pendirian Gedung Pengadilan, dan lain-lain. Dokumen hukum yang tersimpan di Kantor Arsip New South Wales, sangatlah penting dalam merekonstruksi sejarah sosial suatu kota. Dokumen hukum tersebut menyimpan catatan berbagai tindakan kriminal, seperti kasus-kasus kemabukan, penggunaan bahasa asusila, pencurian kuda, pelanggaran kontrak kerja antara majikan dan buruh, bahkan berbagai kasus pembunuhan. Adapun manuskrip, surat kabar, dan jurnal tersimpan di *Mitchell Library* dan *Dixon Library*, Sydney dan *National Library of Australia*, Canberra, juga memberi informasi yang berharga.

Gundagai memiliki lembaga-lembaga Kristen yang terorganisir, namun pembangunan gereja-gereja sangatlah lambat. Sebelum adanya



gereja, kegiatan agama di Gundagai tergantung pada kunjungan pendeta/pastor ke kota tersebut.¹⁵ Penelitian tentang Parish Registers dari berbagai denominasi baik di Gundagai maupun daerah sekitarnya sangatlah penting karena menggambarkan mobilitas sosial dari penduduk Gundagai dan sekitarnya.

Dokumen tertulis yang terdapat dalam berbagai sumber primer bukanlah satu-satunya bukti yang ada. Bukti fisik seperti berbagai peta, dan foto-foto tua turut melengkapi keterpaduan suatu karya sejarah. Sebuah peta yang memperlihatkan jalan raya dari Melbourne ke Sydney melalui Ferry Street (South Gundagai) dan melintasi 'Old Crossing' dan 'Punt', memasuki sebuah jalan di North Gundagai pada tahun 1845¹⁶ dan sebuah peta lainnya yang memperlihatkan beberapa properti di Gundagai pada tahun 1849¹⁷ misalnya, menggambarkan lingkungan fisik Gundagai, sumber daya ekonomi dan karakter teknis. Bagaimanapun juga, sejarawan harus memiliki sensitivitas terhadap lanskap dan tata ruang dari lokalitas yang dipilihnya.

Tugas selanjutnya adalah mengatur informasi yang didapat dari berbagai sumber sejarah. Sistem kartu tampaknya paling praktis. Seperangkat dokumen seringkali berisi berbagai jenis informasi. Informasi tersebut harus disimpan dan dipindahkan ke kartu-kartu sesuai dengan kategori informasi terkait. Maka kartu-kartu yang berukuran sama diperlukan dalam tahap kategorisasi dari suatu perangkat informasi. Judul-judul tema biasanya berkembang mengikuti bukti-bukti yang ditemukan (banjir, ekonomi, agama, kriminalitas, isu-isu sosial-politik, dan lain-lain). Tiap judul tema sebaiknya ditulis pada bagian kanan atas dari kartu, sedangkan referensi dicatat pada bagian kiri atas dari kartu.

15 Soeryohardjo, *Op. Cit.*, Chapter 7

16 Soeryohardjo, *Ibid.*, Hal. 34

17 *Ibid.*, Hal. 6

MENELITI DOKUMEN DAN MENGEMBANGKAN TEMA

Tahapan untuk meneliti dokumen, kemudian mengembangkan tema-tema kini dimulai. Hasil dari penelitian dokumen pengadilan misalnya, sangatlah mengejutkan penulis, khususnya dengan dampak dari meluasnya konsumsi minuman alcohol (mabuk-mabukan) dan semakin meningkatnya kasus-kasus penggunaan bahasa asusila di hadapan pengadilan Gundagai. Hal ini mengarahkan penulis untuk membuat tema ‘Drink and Language’.

Kasus lainnya adalah hubungan antara majikan dan buruh, khususnya menyangkut pelanggaran terhadap ‘agreement’ (kesepakatan kerja yang mengikat buruh di satu pihak dan kesepakatan majikan di lain pihak untuk membayar upah kerja buruh). Kasus-kasus pelanggaran yang terekam dalam dokumen pengadilan adalah kasus ‘refusing to pay wages’ (menolak untuk membayar upah buruh) dan kasus ‘absenting from hired services’ (kabur dari pekerjaan yang telah disepakati). Ini menggelitik penulis untuk menelusuri kelompok manakah yang memiliki pengaruh lebih kuat dari yang lainnya dalam sidang pengadilan Australia pada pertengahan abad ke 19. Sebuah tema berjudul ‘Agreement’ akhirnya tampil dalam palam pemikiran penulis. Banyak informasi penting lainnya yang penulis dapatkan dalam penelitian, yang setelah dialokasikan ke dalam kategorisasi, kemudian dikembangkan ke dalam tema-tema utama. Dengan demikian, sejarawan ‘sejarah total’ haruslah memiliki sensitivitas terhadap kata-kata yang muncul dalam dokumen sebagai upaya merekonstruksi nilai dan sikap budaya suatu masyarakat. Hal ini sungguh penting dalam tahapan interpretasi terhadap seperangkat dokumen.

INTERPRETASI DAN GAYA PENULISAN

Interpretasi merupakan tahapan yang paling penting dalam penulisan sejarah.. Sejarawan seyogyanyalah bersikap kritis terhadap *evidence* (bukti/



dokumen) yang mereka temukan. Sebagaimana masyarakat lain, Gundagai memiliki berbagai macam kelompok sosial. Kelompok sosial tersebut pada tingkatan tertentu, terorganisir sebagai hirarki sosial. Dalam suatu surat yang ditujukan kepada Colonial Secretary tertanggal 3 Februari 1845 misalnya, John Spencer, ahli bedah sekaligus pemilik hotel, menyatakan bahwa ‘The Gundagaites, or the inhabitants of Gundagai, as yet consists of two innkeepers, one storekeeper (likewise calling himself surgeon and druggist), two shoemakers, one saddler that is likewise a tanner, one sailor and one blacksmith, these were all the inhabitants, except the servants of the innkeepers and storekeepers’.¹⁸ Dokumen ini memberi informasi kepada kita bagaimana pelapisan sosial warga Gundagai sesuai pandangan Spencer, yang tidak memasukkan kelompok pelayan dari pemilik hotel dan pemilik toko ke dalam tangga sosial. Beberapa dokumen lainnya juga mengungkap pelapisan sosial warga Gundagai dengan sikap yang berbeda dengan Spencer. Dalam hal ini, sejarawan perlu menjaga jarak dengan dokumen dan berupaya untuk tidak mencampurinya terlalu jauh. *Let the documents speak about their own world* (biarkanlah dokumen itu berbicara tentang dunia mereka sendiri). Tugas sejarawan hanyalah merekonstruksi sejarah sesuai dokumen terkait dan menginterpretasikannya sesuai konteks.

Pada tingkatan manakah pelapisan sosial tersebut dihormati oleh mereka yang ditempatkan kedalam lapisan sosial yang lebih rendah? Apakah lapisan sosial yang lebih rendah tersebut selalu menghormati mereka yang memduduki lapisan sosial yang lebih baik? John Doyle, seorang buruh, diseret ke muka pengadilan karena menggunakan bahasa asusila terhadap seorang tuan tanah dari lapisan kelas sosial atas, John Bray, pada tahun 1857. John Bray menyatakan:

Last Monday, the tenth day of August, instant, while I was on the Punt, this young man, defendant, came up and said, ‘Why didn’t you kick

¹⁸ Letters from John Spencer, surgeon and innkeeper to the Colonial Secretary, respecting the laying out of the township of Gundagai as proposed by Mr Bingham. NSW Votes and Proceedings of the Legislative Council (VP-LC) 1852, Vol. 2, NSW Parliamentary Papers, Hal. 255.

the buggers' arse when you had him on this side' – he said this to his brother in my hearing. Defendant was on the bank of the river – that is a public place in this colony – he said further. 'Bray you damn scoundrel don't let me catch you this side of the river today'. He said a great deal more abusive language, but I cannot remember the words exactly – I remember perfectly well his calling me a 'bugger' just as I was going off the punt.¹⁹

Dokumen di atas cenderung menggambarkan adanya ketegangan sosial yang diwakili oleh John Doyle (lapisan bawah) dan John Bray (lapisan atas), meskipun diperlukan bukti lain sebelum kesimpulan kuat dibuat.

Selanjutnya, sebuah sajak sarkastik, 'Songs of the Squatters', yang dipublikasikan oleh *The Atlas* tertanggal 22 Februari 1845, mencerminkan sikap sarkastik seorang *squatters* (pemilik tanah peternakan/pertanian) terhadap Commissioner of Crown Lands (komisioner yang membawahi Tanah Mahkota), salah satu jajaran Pejabat tingkat tinggi pada administrasi Pemerintahan Kolonial Inggris di Australia. Beberapa bait dari sajak tersebut sebagai berikut:²⁰

The Commissioner bet me a pony – I won,
So he cut off exactly two thirds of my run,
For he said I was making a fortune too fast;
And profit gained slower, the longer would last,

...

The Commissioner pounded my cattle, because
They had mumbled the scrub with their famishing jaws
On the part of the run he had taken away,
And he sold them by auction the cost to defray.

...

The Commissioner's bosom with anger was filled,
Against me, because my poor shepherd was killed;
So he straight took away the last third of my run,
And got it transferred to the name of his son.

19 The Bench Book of Magistrate of Gundagai, 1856-1858, Archive Office of New South Wales, Sydney, Reel 2741, Hal. 186.

20 *The Atlas*, 22 February 1845.



Sikap sarkastik tersebut di atas tidak berhenti pada seorang Komisioner Tanah Mahkota. Gubernur Gipps, yang memegang posisi tertinggi dalam hirarkhi tertinggi di koloni, muncul dalam sebuah sajak 'To the Man of Gundagai', yang juga dipublikasikan oleh *The Sydney Atlas* tertanggal 22 Februari 1845. Sajak tersebut mencerminkan rasa kekecewaan yang mendalam terhadap kebijakan Gubernur Gipps yang telah menolak permohonan warga Gundagai untuk menukar lahan yang seringkali terkena banjir dengan lahan yang lebih tinggi, menyusul setelah terjadinya banjir besar pertama di Gundagai pada tahun 1844. Gipps berpendapat 'what a man bought, he bought for better or worse' (apa yang telah dibeli oleh seseorang, ia telah membeli yang lebih baik atau lebih buruk). Beberapa bait dari sajak tersebut sebagai berikut:

The watery town of Gundagai,
No native fire shall burn,
Till stout Sir Robert's ministry,
Shall order Gipps' return;
Then perhaps the men of Gundagai
Upon dry land shall go,
Leave their bogs to the frogs,
And the settlements below.

Then Gundagai, then Gundagai
Be liberal with your purse,
Again your town allotments buy
'For better or for worse',

And if, as further still you wind
To lands still worse you go,
Gipps will stand still your friend
In the settlements below.

Di Gundagai, banyak terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa kekakuan struktur sosial telah dilenturkan oleh tradisi egaliter²¹ dan kecenderungan untuk memungkas jatuh 'tall poppies'.

Sementara itu, suatu bukti sajak yang mengungkapkan sikap

21 Russel B. Ward, *The Australia Legend*, OUP, London, 1958, Hal. 83-84.

kepahlawanan Yarrie, seorang Aborijin, dalam tragedi banjir bandang tahun 1852, namun disisipi irama rasis muncul dalam salah satu baitnya:

But on he went on again,
A black man, but his heart was white;
Not once to cross that stream in vain,
Till barred by darkness of the night.²²

Parish Registers tidak hanya member informasi tentang kegiatan religius dan mobilitas sosial penduduknya, namun juga status sosial perempuan. Catatan perkawinan dari St Augustine's Catholic Church of Yass misalnya, membuktikan bahwa kebanyakan perempuan Gundagai terlibat dalam pekerjaan yang kurang prestisius, seperti menjadi pembantu rumah tangga. Gejala ini didukung oleh Sensus New South Wales tahun 1851 dan iklan reguler dari harian lokal *the Goulburn Herald*, yang giat mencari perempuan disalurkan ke pekerjaan pembantu rumah tangga.

Analisis isi dan interpretasi terhadap dokumen sebagaimana telah dibahas, sangat tergantung pada sensitivitas sejarawan terhadap dokumen yang ditemukannya. Tahapan akhir adalah penulisan sejarah. Pada tahapan ini penggunaan kartu-kartu yang telah menyimpan berbagai macam informasi, dimulai. Kartu-kartu terkait yang terdiri dari berbagai judul sesuai dengan topic yang dipilih yang akan ditulis, dapat dikeluarkan, dibaca kembali, dan diatur kembali ke dalam tata urutan logis.²³

Persaingan dan perseteruan pribadi antar warga Gundagai seringkali muncul dalam dokumen. Hal ini mencerminkan inti kehidupan sebuah lokalitas dan karenanya, sebaiknya dibahas dalam sejarah lokal. Kutipan-kutipan sebaiknya digunakan untuk lebih memberi 'sentuhan manusiawi'.

²² *The Gundagai Independent*, 26 Juni 1952.

²³ Dymond, *Op. Cit.*, Hal. 83.



KESIMPULAN

Pendekatan dalam penulisan sebuah karya sejarah lokal dari suatu masyarakat kecil Eropa, di Gundagai, pada pertengahan abad ke-19, telah dibahas. Dalam penelitian ini nilai-nilai dan sikap budaya tertentu dari warga Gundagai telah dibahas. Hampir seluruh aspek kehidupan dan interaksi antar warga Gundagai, tertuang dalam hasil penelitian. ‘The totality of the social’ seperti yang dikatakan Burke²⁴ tercermin dalam isu-isu yang diangkat oleh penulis dalam menelaah dinamika masyarakat Gundagai di pertengahan abad 19. Isu-isu tersebut meliputi:

- Sejarah singkat Gundagai
- Gundagai pada pertengahan abad ke-19, yang meliputi tema-tema kependudukan; iklim dan cuaca; komunikasi; kehidupan politik; isu-isu sosial dan politik; kehidupan sosial, kegiatan di waktu senggang, dan pendidikan; hukum dan peraturan; serta banjir.
- Kepemimpinan dan hirarki
- *Agreement* (kesepakatan antara majikan dan buruh)
- *Drink and Language* (mabuk-mabukan dan penggunaan bahasa asusila)
- Kedudukan perempuan
- Sikap terhadap agama, dan
- Rasisme

Gundagai di pertengahan abad ke-19, menurut pandangan penulis, merupakan ‘a democratic petitioning society’, sejauh menyangkut masyarakat kulit putih. Tampaknya tradisi menulis petisi menyangkut berbagai permasalahan, termasuk bencana banjir, telah mengakar pada masyarakat Gundagai. Pelaku rasis terhadap 27 orang Cina yang dilakukan oleh *puntkeeper* (pemilik *punt*) kulit putih yang melipatgandakan biaya penyebrangan sungai untuk minoritas Cina, dijatuhi hukuman yang setimpal oleh pengadilan Gundagai.²⁵ Namun demikian, kecenderungan

²⁴ Burke, *Op.Cit.*, Hal. 42.

²⁵ Soerjohardjo, *Op.Cit.*, Chapter VIII, Hal. 172.

sikap rasial kulit putih terhadap masyarakat Aborijin pada waktu itu masih terjadi.

Sebagai seorang Indonesia, penulis merasa terhenyak oleh keterbukaan Australia di pertengahan abad ke 19, khususnya dalam pembahasan masalah sosial dan politik. John Punch misalnya, membakar masyarakat Gundagai, yang dianggap bersikap pasif dan pasrah menerima nasib setelah banjir melanda mereka pada tahun 1844:

Are you senseless, mad, men of Gundagai; Have the floods which roar above your heartstones left their stagnant waters on your brains,...you have bought, and you have paid for – you have bargained, and have been deceived – you have possessed, and have been ruined!...Up and be stirring, then, Men of Gundagai! Erect your brazen ensign! Think no more of prayer and petition!²⁶

‘Two ways communication’ (komunikasi dua arah) antara Pemerintah Kolonial di Sydney dan penduduk Gundagai tampaknya telah berakar kuat. Ketika pada tahun 1845 Gubernur Gipps menolak permohonan warga Gundagai untuk menukar lahan yang sudah terlanjur dibeli dari dataran rendah ke dataran yang lebih tinggi, berbagai protes dalam bentuk surat, petisi, dan sajak, bermunculan.²⁷ Dengan berbagai cara, warga Gundagai seringkali mengekspresikan perasaan kecewa dan marah secara sarkastik, dengan kata-kata tajam.

²⁶ Soerjohardjo, *Ibid.*, Chapter III, Hal. 79.

²⁷ *Ibid.*, Chapter III.



DAFTAR ACUAN

Sumber Primer

Australian Bureau of Statistics, New South Wales Office, Catalogue No. 3209.1 (New

Issue)

The Bench Book of Magistrate of Gundagai, 1856-1858, Archive Office of New South

Wales, Sydney, Reel 2741, Hal. 186.

Letters from John Spencer, surgeon and innkeeper to the Colonial Secretary, respecting the

laying out of the township of Gundagai as proposed by Mr Bingham. NSW Votes

and Proceedings of the Legeslative Council (VP-LC) 1852, Vol. 2, NSW

Parliamentary Papers.

Surat Kabar

The Atlas, 22 February 1845.

The Gundagai Independent, 26 Juni 1952.

Buku

Burke, Peter, *The French Historical Revolution: The Annales Schools, 1929-89*, Polity

Press, 1990.

Butcher, A.C., *Gundagai: Its History, Verse and Song*, Gundagai Independent Print,

Gundagai, 1956

Dymond, David, *Writing Local History: A Practical Guide*, Bedford Square Press, London,

1982.

Gaunt, A., *A History of Gundagai*, October 1979, merupakan tesis yang ditulis pada tahun

1944, yang kemudian dipublikasikan oleh Graeme dan Nancy Dixon.

Geertz, Clifford, *The Interpretation of Culture*, Hutchinson and Co.Ltd., London, 1975.

Le Roy Ladurie, E., *Mountaillou: Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324*.

Penguin Books, New York, 1970.

Milner, A.C., *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*, The

University of Arizona Press, Tuscon, 1982.

Ward, Russel B., *The Australia Legend*, OUP, London, 1958.

Artikel

Soerjohardjo, Wardiningsih, "An Outsider's Approach" dalam The Local History Co-ordination Project, *Locating Australia's Past: A practical guide to writing local history*, New South Wales University Press, Sydney, 1988.

Tesis

Soerjohardjo, Wardiningsih, "Aspects of Life in Gundagai", Australian National University (ANU), Canberra, 1986.

Le Roy Ladurie, E., *Mountaillou: Cathars and Catholics in a French Village 1294-1324*. Penguin Books, New York, 1970.





**Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta 2013**

ISBN : 978-602-1289-03-7

Perpu
Jen